



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Tahun Anggaran 2020**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI...	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
A. LRA.....	
B. LPSAL.....	
C. NERACA	
D. LO	
E. LAK.....	
F. LPE	
G. Catatan atas Laporan Keuangan	
Bab I Pendahuluan	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
Bab II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	
2.1 Ekonomi Makro	6
2.2 Kebijakan Keuangan	8
Bab III Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan	
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	28
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	38
Bab IV Kebijakan Akuntansi	
4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah	46
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	47
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	48
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan	52
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan	
5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	67
5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	115
5.3 Penjelasan pos-pos Neraca	127
5.4 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)	216
5.5 Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)	251
5.6 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	256
Bab VI Penjelasan atas informasi non keuangan	264
Bab VII Penutup	270
Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2020
Lampiran 2	Rekap PFK Januari s/d Desember Tahun 2020
Lampiran 3	Berita Acara Rekonsiliasi Bank antara BUD dengan Bank Nagari Cabang Payakumbuh dan Berita acara Penyelesaian Transaksi Kas Umum Daerah
Lampiran 4	Rekap Penyetoran UYHD Tahun 2020
Lampiran 5	Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Pajak OPD TA 2020
Lampiran 6	Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran serta Sisa Dana BOS tahun 2020
Lampiran 7	-Laporan Keuangan BLUD RSUD dr. Achmad Darwis -Laporan Keuangan BLUD Puskesmas
Lampiran 8	Perhitungan Penyisihan Piutang Tahun 2020
Lampiran 9	Rekapitulasi Persediaan Tahun 2020
Lampiran 10	Rincian Persediaan Obat-obatan Tahun 2020
Lampiran 11	Rincian Persediaan Lain-lain Tahun 2020
Lampiran 12	Dana Bergulir Tahun 2020
Lampiran 13	Laporan Keuangan PDAM
Lampiran 14	Rekapitulasi Aset Tetap 2020
Lampiran 15	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2020
Lampiran 16	Rincian Utang PFK Tahun 2020
Lampiran 17	Rincian Utang Jangka Pendek Tahun Anggaran 2020
Lampiran 18	Rincian Beban Persediaan Per SKPD Tahun 2020
Lampiran 19	Rincian Beban Jasa per SKPD Tahun 2020
Lampiran 20	Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2020
Lampiran 21	Rincian Beban Perjalanan Dinas 2020
Lampiran 22	Rincian Beban Hibah 2020
Lampiran 23	PD Gonjong Limo Sakato
Lampiran 24	Rekapitulasi Penyaluran DD dan ADD APB Nagari Tahun Anggaran 2020
Lampiran 25	Laporan Realisasi Penyaluran Hibah Tahun 2020
Lampiran 26	Rekap Pendapatan diterima dimuka (Pajak Reklame) Tahun 2020
Lampiran 27	Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

Lampiran



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ungkapan rasa syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang dipimpinnya. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan disusun dan disampaikan kepada kelompok utama pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan juga pemerintah. Diharapkan melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sarilamak, Mei 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Laporan Arus Kas; (d) Neraca; (e) Laporan Operasional (LO); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Interen yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, perubahan saldo anggaran, arus kas, posisi keuangan, kegiatan operasional dan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak, Mei 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN Dt. BANDARO RAJO

LAPORAN KEUANGAN POKOK

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1	30.241.808.019,00	23.556.949.207,00	77,90	24.181.111.740,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.2	4.793.237.109,00	3.691.643.431,00	77,02	4.534.569.182,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.3	3.353.697.260,00	3.226.731.006,00	96,21	2.675.284.188,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.4	48.277.292.985,00	46.954.160.059,61	97,26	53.777.188.222,25
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		86.666.035.373,00	77.429.483.703,61	89,34	85.168.153.332,25
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA					
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan -LRA					
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak -LRA	5.1.5	15.797.052.016,00	13.360.698.775,00	84,58	10.773.957.374,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) -LRA	5.1.6	2.934.040.276,00	1.800.038.422,00	61,35	1.897.802.801,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum -LRA	5.1.7	702.365.062.000,00	696.866.984.000,00	99,22	768.836.012.000,00
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus -LRA	5.1.8	94.124.101.000,00	82.069.351.610,00	87,19	82.797.025.030,00
4.2.1.05	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.1.9	161.279.651.100,00	154.869.866.102,00	96,03	151.719.334.611,00
	Sub Jumlah		976.499.906.392,00	948.966.938.909,00	97,18	1.016.024.131.816,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya					
4.2.2.03	Dana Penyesuaian -LRA	5.1.10	127.396.498.000,00	127.623.525.500,00	100,18	174.095.960.290,00
	Sub Jumlah		127.396.498.000,00	127.623.525.500,00	100,18	174.095.960.290,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA					
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LRA	5.1.11	46.693.355.972,00	45.117.450.495,00	96,62	51.554.994.575,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA					
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya -LRA	5.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah		46.693.355.972,00	45.117.450.495,00	96,62	51.554.994.575,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.150.589.760.364,00	1.121.707.914.904,00	97,49	1.241.675.086.681,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
4.3.1	Pendapatan Hibah					
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah -LRA	5.4.13	22.913.862.041,00	10.333.998.383,00	45,10	9.642.270.290,00
	Sub Jumlah		22.913.862.041,00	10.333.998.383,00	45,10	9.642.270.290,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.260.169.657.778,00	1.209.471.396.990,61	95,98	1.336.485.510.303,25
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.14	615.893.161.325,00	591.691.011.079,00	96,07	630.882.952.899,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.15	245.316.768.308,00	220.429.184.424,37	89,85	270.235.514.066,00
5.1.3	Belanja Bunga				-	
5.1.4	Belanja Subsidi				-	
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.16	54.006.772.025,00	53.106.806.784,00	98,33	33.749.616.407,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.17	10.206.709.000,00	9.772.819.405,00	95,75	15.480.975.829,00
	Jumlah Belanja Operasi		925.423.410.658,00	874.999.821.692,37	94,55	950.349.059.201,00
5.2	BELANJA MODAL					
5.2.1	Belanja Tanah	5.1.18	1.014.725.000,00	913.869.539,00	90,06	261.246.598,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.19	38.008.077.819,00	37.329.485.325,00	98,21	34.310.434.344,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.20	42.986.567.249,00	38.200.979.558,00	88,87	32.110.044.597,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.21	66.635.367.996,00	61.514.075.572,00	92,31	171.401.890.737,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.22	29.005.216.494,00	14.753.679.651,00	50,87	14.826.905.476,00
	Jumlah Belanja Modal		177.649.954.558,00	152.712.089.645,00	85,96	252.910.521.752,00

	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
5.3	BELANJA TAK TERDUGA					
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.23	40.017.877.625,00	36.111.744.605,00	90,24	659.859.470,00
	Jumlah		40.017.877.625,00	36.111.744.605,00	90,24	659.859.470,00
	JUMLAH BELANJA		1.143.091.242.841,00	1.063.823.655.942,37	93,07	1.203.919.440.423,00
6	TRANSFER					
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan					
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.24	3.530.620.013,00	2.715.537.370,00	76,91	2.560.879.926,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.25	0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah		3.530.620.013,00	2.715.537.370,00	76,91	2.560.879.926,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan					
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.26	0,00	0,00	-	0,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.27	150.183.855.700,00	149.803.583.386,00	99,75	154.771.387.194,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.28	898.831.321,00	774.813.087,00	86,20	864.642.889,00
	Jumlah		151.082.687.021,00	150.578.396.473,00	99,67	155.636.030.083,00
	JUMLAH TRANSFER		154.613.307.034,00	153.293.933.843,00	99,15	158.196.910.009,00
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER		1.297.704.549.875,00	1.217.117.589.785,37	93,79	1.362.116.350.432,00
	SURPLUS/(DEFISIT)		(37.534.892.097,00)	(7.646.192.794,76)		-25.630.840.128,75
7	PEMBIAYAAN					
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	5.1.29	39.884.892.097,00	38.843.992.097,42	97,39	80.874.732.226,17
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	-	0,00
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	-	0,00
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	-	0,00
7.1.5	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00	-	0,00
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah Penerimaan		39.884.892.097,00	38.843.992.097,42	97,39	80.874.732.226,17
7.2	PENGELUARAN DAERAH					
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	-	0,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.30	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	100,00	15.359.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	-	0,00
7.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	-	0,00
7.2.5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah Pengeluaran		2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	100,00	15.359.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		37.534.892.097,00	36.493.992.097,42	97,23	65.515.732.226,17
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.31	0,00	28.847.799.302,66		39.884.892.097,42

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

NO	URAIAN	Ref.	2020	2019
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	39.884.892.097,42	80.874.732.226,17
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	38.843.992.097,42	80.874.732.226,17
3.	Sub Total (1 - 2)		1.040.900.000,00	-
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	28.847.799.302,66	39.884.892.097,42
5.	Sub Total (3 + 4)		29.888.699.302,66	39.884.892.097,42
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(1.040.900.000,00)	-
7.	Lain-lain			-
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	28.847.799.302,66	39.884.892.097,42

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Sarilamak, Mei 2021
BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN D. BANDARO RAJO

C. NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NERACA

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

NO AKUN	URAIAN	Ref	2020	2019
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.01	Kas Daerah	5.4.1	15.145.768.088,53	24.484.049.093,92
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	5.4.2	13.260.000,00	0,00
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.4.3	100.093.586,00	156.556.542,00
1.1.1.04	Kas di BLUD RSUD	5.4.4	4.065.373.463,50	2.718.567.255,50
1.1.1.05	Kas di BLUD Puskesmas	5.4.5	5.033.046.604,63	3.244.253.704,00
1.1.1.06	Kas Dana BOS	5.4.6	4.522.566.649,00	9.312.171.705,00
1.1.1.07	Kas Lainnya	5.4.7	171.604,00	171.604,00
1.1.3	Piutang Pendapatan			
1.1.3.01	Piutang Pajak	5.4.8	7.765.182.316,00	8.210.452.851,00
1.1.3.02	Piutang Retribusi	5.4.9	12.636.000,00	188.286.000,00
1.1.3.03	Piutang Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	5.4.10	2.070.000,00	3.227.588.506,00
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.11	2.926.747.273,76	7.741.246.900,76
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.4.12	2.202.891.322,00	3.748.918.450,00
1.1.3.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	5.4.13		
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			
1.1.3.08	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.14	9.643.804.567,00	
1.1.5	Penyisihan Piutang			
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	5.4.15	(3.100.289.526,59)	(4.430.078.043,30)
1.1.7	Persediaan	5.4.16	18.394.043.520,45	11.387.077.422,23
	JUMLAH ASET LANCAR		66.727.365.468,28	69.989.261.991,11
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG			
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
1.2.1.06	Investasi Non Permanen Lainnya	5.4.15	760.196.328,00	760.196.328,00
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		(442.407.091,00)	(311.803.390,00)
	Jumlah Investasi Jk. Panjang Non Permanen Bersih		317.789.237,00	448.392.938,00
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen			
1.2.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.4.16	49.936.237.701,49	47.602.215.114,01
	Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen		49.936.237.701,49	47.602.215.114,01
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		50.254.026.938,49	48.050.608.052,01
1.3	ASET TETAP			
1.3.1	Tanah	5.4.17	115.939.065.391,00	116.865.485.811,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	5.4.18	437.276.755.985,61	384.956.130.842,98
1.3.3	Gedung dan Bangunan	5.4.19	808.776.804.375,18	771.612.773.814,18
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.4.20	1.603.703.199.908,82	1.547.785.073.839,82
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	5.4.21	102.937.798.194,41	100.230.824.023,00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.4.22	14.724.865.154,00	19.535.339.346,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.4.23	(1.466.097.181.619,66)	(1.345.719.874.731,29)
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(336.507.520.209,85)	(290.093.201.130,03)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(323.000.842.207,35)	(310.433.641.316,49)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan JII		(805.443.542.842,73)	(744.605.859.222,16)
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(1.145.276.359,73)	(587.173.062,61)
	JUMLAH ASET TETAP		1.617.261.307.389,36	1.595.265.752.945,69

NO AKUNT	URAIAN	Ref	2020	2019
1.4	DANA CADANGAN			
1.4.1	Dana Cadangan		-	-
	Jumlah Dana Cadangan		-	-
1.5	ASET LAINNYA			
1.5.3	Aset Tak Berwujud	5.4.24	2.344.291.820,00	2.180.991.820,00
1.5.4	Aset Lain-lain	5.4.25	11.239.282.772,97	9.426.559.956,97
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(3.588.537.728,00)	
	JUMLAH ASET LAINNYA		9.995.036.864,97	11.607.551.776,97
	JUMLAH ASET		1.744.237.736.661,10	1.724.913.174.765,78
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.2.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.4.26	30.073.511,00	34.004.364,00
2.2.2	Utang Bunga		-	-
2.2.4	Pendapatan Diterima Dimuka	5.4.27	80.510.378,00	56.070.433,00
2.2.5	Utang Belanja	5.4.28	4.523.307,71	
2.2.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.4.29	1.971.688.498,90	5.526.320.902,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.086.795.695,61	5.616.395.699,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
	Hutang dalam negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		2.086.795.695,61	5.616.395.699,00
3	EKUITAS			
3.1	Ekuitas			
3.1.1	Ekuitas	5.4.29	1.742.150.940.965,49	1.719.296.779.066,78
	JUMLAH EKUITAS		1.742.150.940.965,49	1.719.296.779.066,78
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.744.237.736.661,10	1.724.913.174.765,78

Sarijamak, Mei 2021



D. LAPORAN OPERASIONAL (LO)



Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

No.Akun	URAIAN	Ref	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL					
8.	PENDAPATAN	5.5.1				
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.5.1.1				
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.5.1.1.1	23.087.238.727,00	25.940.427.255,00	(2.853.188.528,00)	(11,00)
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.5.1.1.2	3.529.253.431,00	4.543.974.182,00	(1.014.720.751,00)	(22,33)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.5.1.1.3	1.212.500,00	5.900.802.694,00	(5.899.590.194,00)	(99,98)
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.5.1.1.4	42.139.660.432,61	54.998.971.507,25	(12.859.311.074,64)	(23,38)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		68.757.365.090,61	91.384.175.638,25	(22.626.810.547,64)	(24,76)
8.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.5.1.2				
8.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.5.1.2.1				
8.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak		12.344.388.942,00	14.263.928.739,00	(1.919.539.797,00)	(13,46)
8.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.270.321.127,00	2.156.749.886,00	(886.428.759,00)	(41,10)
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum		696.866.984.000,00	768.836.012.000,00	(71.969.028.000,00)	(9,36)
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus - Fisik		82.069.351.610,00	82.797.025.030,00	(727.673.420,00)	(0,88)
8.2.1.05	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		154.869.866.102,00	151.719.334.611,00	3.150.531.491,00	2,08
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		947.420.911.781,00	1.019.773.050.266,00	(72.352.138.485,00)	(7,09)
8.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.5.1.2.2				
8.2.2.01	Dana otonomi Khusus					-
8.2.2.02	Dana Penyesuaian		50.047.827.500,00	174.095.960.290,00	(124.048.132.790,00)	(71,25)
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya		50.047.827.500,00	174.095.960.290,00	(124.048.132.790,00)	(71,25)
8.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.5.1.2.3				
8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi					
8.2.3.01.01	BH Pajak Kendaraan Bermotor		14.257.453.008,00	12.662.403.915,00	1.595.049.093,00	12,60
8.2.3.01.02	BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		5.680.519.261,00	7.145.382.716,00	(1.464.863.455,00)	(20,50)
8.2.3.01.03	BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		17.478.634.433,00	16.494.992.173,00	983.642.260,00	5,96
8.2.3.01.04	BH Pajak Air Permukaan		290.165.057,00	486.509.080,00	(196.344.023,00)	(40,36)
8.2.3.01.05	BH Pajak Rokok		17.054.483.303,00	14.765.706.691,00	2.288.776.612,00	15,50
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi		54.761.255.062,00	51.554.994.575,00	3.206.260.487,00	6,22

No.Akun	URAIAN	Ref	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
8.2.4	Bantuan Keuangan	5.5.1.2.4				-
8.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Propinsi Lainnya		-	-	-	
	Jumlah Bantuan Keuangan					
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.052.229.994.343,00	1.245.424.005.131,00	(193.194.010.788,00)	(15,51)
8.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	5.5.1.3				
8.3.1	Pendapatan Hibah		27.438.594.242,00	15.537.523.262,80	11.901.070.979,20	76,60
8.3.2	Pendapatan Dada Darurat					
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		27.438.594.242,00	15.537.523.262,80	11.901.070.979,20	76,60
	JUMLAH PENDAPATAN		1.148.425.953.675,61	1.352.345.704.032,05	(203.919.750.356,44)	(15,08)
9	BEBAN	5.5.2				
9.1	Beban Operasi	5.5.2.1	1.042.059.963.105,03	1.084.447.132.465,43	(42.387.169.360,40)	(3,91)
9.1.1	Beban Pegawai		598.559.781.161,71	634.391.378.003,00	(35.831.596.841,29)	(5,65)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa		225.059.281.986,05	269.436.105.865,10	(44.376.823.879,05)	(16,47)
	Beban Persediaan		39.284.909.529,78	34.560.367.684,10	4.724.541.845,68	13,67
	Beban Jasa		146.236.896.309,27	167.665.400.349,00	(21.428.504.039,73)	(12,78)
	Beban Pemeliharaan		5.821.362.138,00	4.161.570.926,00	1.659.791.212,00	39,88
	Beban Perjalanan Dinas		33.716.114.009,00	63.048.766.906,00	(29.332.652.897,00)	(46,52)
9.1.3	Beban Bunga					
9.1.4	Beban Subsidi					
9.1.5	Beban Hibah		56.451.617.524,00	36.963.869.527,00	19.487.747.997,00	52,72
9.1.6	Beban Bantuan Sosial		27.398.419.405,00	15.480.975.829,00	11.917.443.576,00	76,98
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi		125.359.640.102,87	118.342.195.533,41	7.017.444.569,46	5,93
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang		1.054.706.480,29	727.379.333,59	327.327.146,70	45,00
9.1.9	Beban Lain-lain		8.176.516.445,11	9.105.228.374,33	(928.711.929,22)	(10,20)
9.2	Beban Transfer	5.5.2.2	75.718.235.843,00	158.196.910.009,00	(82.478.674.166,00)	(52,14)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		2.363.287.249,00	2.560.879.926,00	(197.592.677,00)	(7,72)
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	-	#DIV/0!
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya					
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		72.580.135.507,00	154.771.387.194,00	(82.191.251.687,00)	(53,10)
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		774.813.087,00	864.642.889,00	(89.829.802,00)	(10,39)
9.4	Beban Tidak Terduga	5.5.2.3				
9.4.1	Beban Tidak Terduga					
9.4.1.01	Beban Tidak Terduga					
	JUMLAH BEBAN		1.117.778.198.948,03	1.242.644.042.474,43	(124.865.843.526,40)	(10,05)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.5.3	30.647.754.727,58	109.701.661.557,62	(79.053.906.830,04)	(72,06)

No.Akun	URAIAN	Ref	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan	%
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		-	-		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		-	-		
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		-	-		
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		-	-		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		-	-		
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		-	-		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-		
	SURPLUS DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.5.4	30.647.754.727,58	109.701.661.557,62	(79.053.906.830,04)	(72,06)
	POS LUAR BIASA	5.5.5				
	Pendapatan Luar Biasa		-	-		
	Beban Luar Biasa	5.5.5.1	2.267.022,00	659.859.470,00	(657.592.448,00)	(99,66)
	POS LUAR BIASA		2.267.022,00	659.859.470,00	(657.592.448,00)	
	SURPLUS DEFISIT - LO	5.5.6	30.645.487.705,58	109.041.802.087,62	(78.396.314.382,04)	(71,90)



E. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir Tahun 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.3.1		
Arus Kas Masuk	5.3.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		23.556.949.207,00	24.181.111.740,00
Penerimaan Retribusi Daerah		3.691.643.431,00	4.534.569.182,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.841.949.598,00	2.675.284.188,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		46.954.160.059,61	53.726.135.222,25
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		13.360.698.775,00	10.773.957.374,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.800.038.422,00	1.897.802.801,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		696.866.984.000,00	768.836.012.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		82.069.351.610,00	82.797.025.030,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		154.869.866.102,00	151.719.334.611,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		127.623.525.500,00	174.095.960.290,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		45.117.450.495,00	51.554.994.575,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			
Penerimaan Hibah		10.333.998.383,00	9.642.270.290,00
Penerimaan Dana Darurat			
Penerimaan Lainnya (Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi)			-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa			
Jumlah Arus Kas Masuk		1.209.086.615.582,61	1.336.434.457.303,25
Arus Kas Keluar	5.3.1.2		
Pembayaran Pegawai		591.691.011.079,00	630.882.952.899,00
Pembayaran Barang		220.429.184.424,37	270.235.514.066,00
Pembayaran Hibah		53.106.806.784,00	33.749.616.407,00
Pembayaran Bantuan Sosial		9.772.819.405,00	15.480.975.829,00
Pembayaran Tidak Terduga		36.111.744.605,00	659.859.470,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak			
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi			
Pembayaran Bagi Hasil Lainnya			
Pembayaran Kejadian Luar Biasa			
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Pemerintah Desa		2.715.537.370,00	2.560.879.926,00
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya			
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa		149.803.583.386,00	154.771.387.194,00
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya		774.813.087,00	864.642.889,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.064.405.500.140,37	1.109.205.828.680,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.3.1.3	144.681.115.442,24	227.228.628.623,25
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.3.2		
Arus Kas Masuk	5.3.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin			
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		384.781.408,00	51.053.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		384.781.408,00	51.053.000,00
Arus Kas Keluar	5.3.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		913.869.539,00	261.246.598,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		37.329.485.325,00	34.310.434.344,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		38.200.979.558,00	32.110.044.597,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		61.514.075.572,00	171.401.890.737,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		14.753.679.651,00	14.826.905.476,00
Perolehan Aset Lainnya			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.350.000.000,00	15.359.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		155.062.089.645,00	268.269.521.752,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.3.2.3	(154.677.308.237,00)	(268.218.468.752,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.3.3		
Arus Kas Masuk	5.3.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-

URAIAN	Ref	2020	2019
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.3.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri - Pemerintah Daerah		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.3.3.3	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.3.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.3.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		73.511.372.412,00	90.491.333.924,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		73.511.372.412,00	90.491.333.924,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.3.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		73.509.824.563,00	90.468.574.820,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		73.509.824.563,00	90.468.574.820,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.3.4.3	1.547.849,00	22.759.104,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(9.994.644.945,76)	22.759.104,00
Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran		38.874.869.904,42	80.882.679.325,17
Koreksi Kas di BLUD		(13.204.963,00)	
Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran		28.866.848.391,66	39.915.598.300,42
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		13.260.000,00	-
Saldo Akhir Kas Lainnya		171.604,00	171.604,00
SALDO AKHIR KAS		28.880.279.995,66	39.915.769.904,42

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Sarijama, Mei 2021
 BUPATI LIMA PULUH KOTA

 SAFARUDDIN DI BANDARO RAJO

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2020 dan 2019**

NOMOR	Uraian	Ref	2020	2019
1	Ekuitas Awal	5.6.1	1.719.296.779.066,78	1.611.031.731.763,59
2	Surplus/defisit - LO	5.6.2	30.645.487.705,58	109.041.802.087,62
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	5.6.3	(7.791.325.806,87)	(776.754.784,43)
	a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	5.6.3.1	2.832.104.007,00	(616.217.411,00)
	Koreksi Kas Lainnya Tahun Lalu		-	-
	Koreksi hutang		444.817.010,00	(443.011.911,00)
	Koreksi Aset Ekstrakomtabel		2.792.000,00	88.494.500,00
	Mutasi Tambah/ (Kurang) Aset Tetap		-	-
	Mutasi Tambah/ (Kurang) Aset Lainnya		-	-
	Koreksi Piutang		215.650,00	(261.700.000,00)
	Koreksi Penghapusan Piutang		2.384.279.347,00	-
	b. Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	5.6.3.2	(10.623.429.813,87)	(160.537.373,43)
	Mutasi Tambah Aset Tetap		18.346.049.564,00	24.490.260.766,00
	Mutasi Kurang Aset Tetap		(20.072.825.639,00)	(24.271.419.196,56)
	Mutasi Tambah Aset Lainnya		-	174.100.000,00
	Mutasi Kurang Aset Lainnya		(452.357.500,00)	-
	Koreksi Nilai Persediaan		139.555.000,00	3.700.000,00
	Penghapusan		(2.107.295.750,00)	(732.249.300,00)
	Koreksi Kesalahan Perhitungan Akm.Penyusutan		812.679.286,50	175.070.357,13
	Koreksi Saldo Dana BOS		(42.740.000,00)	-
	Koreksi Kas BLUD Puskesmas		(12.829.521,00)	-
	Koreksi Nilai Investasi		1.678.545,63	-
	Penghapusan Jalan, irigasi dan Jaringan		(7.235.343.800,00)	-
4	Ekuitas Akhir	5.6.4	1.742.150.940.965,49	1.719.296.779.066,78

Sarilamak, Mei 2021
BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN D. BANDARO RAJO

BAB I PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan dan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah, untuk menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Hal itu tidak terbatas pada pemuktahiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan dan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Pada tahun 2015, Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2015, Kabupaten Lima Puluh Kota mengawali penerapannya pada tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan-undangan-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disamping itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 juga berlandaskan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat adanya perbedaan dalam pengklasifikasian Pendapatan maupun Belanja dari kedua ketentuan tersebut diatas maka dilakukan konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut.

- a. Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- p. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- q. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
- r. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- s. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- t. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

- | | | |
|-----|-----|---|
| BAB | I | Pendahuluan |
| | | 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan |
| | | 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan |
| | | 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan |
| BAB | II | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD |
| | | 2.1. Ekonomi Makro |
| | | 2.2. Kebijakan Keuangan |
| | | 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD |
| BAB | III | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan |
| | | 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan |
| | | 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| BAB | IV | Kebijakan Akuntansi |
| | | 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan |
| | | 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan |
| | | 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan |
| | | 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah |
| BAB | V | Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan |
| | | 5.1 LRA |
| | | 5.1.1 Pendapatan –LRA |
| | | 5.1.2 Belanja |

- 5.1.3 Transfer
- 5.1.4 Surplus/deficit
- 5.1.5 Penerimaan Pembiayaan
- 5.1.6 Pengeluaran Pembiayaan
- 5.1.7 Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran
- 5.2 LPSAL
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Awal Lebih
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Neraca
 - 5.3.1 Aset Lancar
 - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.3 Aset Tetap
 - 5.3.4 Aset Lainnya
 - 5.3.5 Kewajiban
 - 5.3.6 Ekuitas Dana
- 5.4 Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus/defisit-LO
 - 5.4.4 Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa
 - 5.4.5 Pos Luar Biasa
 - 5.4.6 Surplus/defisit-LO
- 5.5 Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktifitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktifitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktifitas Transitoris
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas awal
 - 5.6.2 Surplus/Defisit-LO
 - 5.6.3 Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir

VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kebijakan umum APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan menganalisis pencapaian kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang sedang dan akan terjadi, proyeksi ketersediaan dana pembangunan serta kondisi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kinerja APBD. Kondisi makro ekonomi tersebut antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Informasi dan data mengenai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Lima Puluh Kota yang disajikan dan dijelaskan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2020 ini merupakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diamati melalui beberapa indikator makro salah satunya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan jumlah dari seluruh nilai tambah dari produk barang dan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Besaran nilai PDRB ini merupakan indikator yang dapat dijadikan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota.

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan indikator-indikator lain yang terkait sebagai mana yang tergambar pada Tabel II.1.

Tabel II.1

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 – 2019

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PDRB:					
	a. Atas dasar harga berlaku (juta Rupiah)	11.582.971,5	12.677.544,4	13.531.194,7	14.522.497,4	15.615.532,99
	b. Atas dasar harga konstan 2010 (juta Rupiah)	9.125.377,06	9.611.264,5	10.123.647,6	10.655.891,5	11.198.937,20
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,61	5,32	5,34	5,26	5,10

Keterangan: ¹⁾ Data/Target disusun pada saat BPS masih memakai tahun 2010 sebagai tahun dasar

²⁾ Data diolah

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel II.2
Distribusi dan Persentase PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019
(Dalam juta rupiah)

NO	Lapangan Usaha	Harga Konstan		Harga berlaku	
		Rp	%	Rp	%
A	Pertanian,Kehutanan dan Perikanan	3.630.010,72	2,24	5.224.036,89	33,45
B	Pertambangan dan Penggalian	855.610,00	3,16	1.277.022,22	8,18
C	Industri Pengolahan	811.980,71	0,10	966.273,43	6,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.853,11	3,65	2.730,00	0,02
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3.450,06	4,10	4.381,58	0,03
F	Konstruksi	576.928,67	7,89	828.991,16	5,31
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1.756.212,36	7,48	2.339.155,45	14,98
H	Transportasi dan pergudangan	1.208.424,09	9,35	1.673.111,82	10,71
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	70.685,02	6,41	121.650,02	0,78
J	Informasi dan komunikasi	693.862,70	9,47	841.348,13	5,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	174.527,09	2,73	257.628,00	1,65
L	Real Estate	128.414,00	5,19	178.677,00	1,14
M,N	Jasa Perusahaan	3.415,68	6,57	4.948,39	0,03
O	Administrasi Pemerintahan,Pertanahan dan Jaminan Sosial	637.474,00	6,78	911.290,91	5,84
P	Jasa Pendidikan	328.613,00	8,38	516.705,00	3,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169.852,00	8,82	236.056,00	1,51
R,S, T,U	Jasa Lainnya	147.624,00	9,94	231.527,00	1,48
		11.198.937,20	5,10	15.615.533,00	100,00

Tahun 2020 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terlihat sebesar 15.615 milyar rupiah, sedangkan untuk PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terlihat sebesar 11.198 Milyar rupiah. Nilai PDRB ADHB atas dasar harga berlaku selalu menunjukkan kenaikan yang cukup besar seiring dengan kenaikan harga secara umum.

Dilihat dari segi sektoral, sektor yang paling tinggi sumbangannya dalam hal pembentukan PDRB sampai dengan tahun 2019 masih didominasi oleh sektor pertanian, dimana tahun 2020 peranan sektor pertanian tercatat sebesar 33,45 persen dari total PDRB. Kemudian sektor yang paling kecil peranannya dalam hal pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh kota adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,02 persen atas dasar harga berlaku.

2.1.2 PDRB Per Kapita

Teori ekonomi menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan rakyat dapat dinilai dengan melihat nilai produk domestik bruto perkapita. Untuk lingkup daerah, ini disebut PDRB per kapita. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional

netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.1, menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 7,52 persen, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 5,09 persen.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dengan berpedoman kepada RPJMD tahun 2016-2021 serta sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 antara lain:

1. Pembangunan dan rehabilitasi serta pengembangan sarana prasarana pertanian dan perikanan
2. Peningkatan kapasitas SDM pertanian dan perikanan
3. Pengembangan komoditi baru dalam mendukung ketahanan pangan, produksi, ketersediaan dan cadangan pangan yang memiliki daya saing
4. Peningkatan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
5. Peningkatan penerapan teknologi dan nilai tambah, pengelolaan dan pemasaran hasil produksi pertanian dan perikanan
6. Peningkatan daya tarik dan pengembangan kawasan berbasis produk unggulan
7. Pembangunan destinasi pariwisata daerah
8. Penciptaan iklim usaha kerakyatan melalui pengembangan kewirausahaan, daya saing UMK dan industri kecil, peningkatan IPTEK sistem produksi, perwilayahan, digital ekonomi dan reformasi kelembagaan
9. Pembangunan dan pemberdayaan koperasi melalui permodalan, kelembagaan, SDM, teknologi, kerjasama, dan kesempatan usaha

Berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 130/26/BLK/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, maka kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola APBD tahun 2020 meliputi hal berikut.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Kemudian menurut Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, dimana tahun 2020 merupakan tahun ke 5 dari pelaksanaan RPJMD.

Pada tahun 2020, pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diperkirakan mengalami penurunan menjadi Rp1.260.169.657.778,- yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp86.666.035.373,00 meliputi Pajak Daerah sebesar Rp30.241.808.019,00, Retribusi Daerah sebesar Rp4.793.237.109,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.353.697.260,00, Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp48.277.292.985,00.
- b. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp976.499.906.392,00 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp18.731.092.292,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp702.365.062.000,00, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp255.403.752.100,00.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp22.913.862.041,00.

Untuk mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2020, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kebijakan pendapatan daerah yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan yang dimiliki dengan mempedomani potensi yang tersedia dan memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan umum.
2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, OPD Pemungut serta Pemerintahan Nagari, organisasi/asosiasi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
5. Menyempurnakan sistem administrasi melalui aplikasi berbasis elektronik dengan memperhatikan aspek legalitas, kecepatan pelayanan dan akuntabilitas.
6. Meningkatkan kapasitas Sumber daya aparatur Pengelola Pajak dan Retribusi melalui Diklat Teknis, Bimtek dan Sosialisasi.
7. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada aparatur nagari, wajib pajak dan wajib retribusi.
8. Melakukan pembinaan dan penertiban terhadap Wajib Pajak dan Objek Pajak.

9. Meningkatkan anggaran untuk sarana dan prasarana pemungutan.
10. Meningkatkan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi melalui pendataan dan penerbitan NPWPD dan NPWRD baru.
11. Melakukan pengelolaan manajemen kas yang menganggur (idle cash).
12. Meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
13. Mengendalikan dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2.2.2. Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah terutama yang menjadi program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai indikator dan target yang jelas untuk peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2020, Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan sebesar Rp1.297.704.549.875,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp860.797.067.856,00 meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp614.558.637.197,00 dan sisanya untuk Belanja Hibah Rp47.575.616,00, Belanja Bantuan Sosial Rp4.031.630.000,00, Belanja bagi hasil kepada Provinsi / Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa Rp3.530.620.013,00, bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota pemerintahan desa dan partai politik Rp151.082.687.021,00 serta Belanja Tidak Terduga Rp40.017.877.625,00.
- b. Belanja Langsung sebesar Rp436.907.482.019,00 meliputi belanja pegawai sebesar Rp27.931.667.128,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp231.325.860.333,00 dan sisanya untuk belanja modal sebesar Rp177.649.954.558,00.

Untuk pencapaian target indikator kinerja daerah maka disusunlah arah kebijakan belanja untuk tahun 2020 sebagai berikut :

1. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja Daerah diprioritaskan untuk pencapaian agenda prioritas daerah tahun 2020 yaitu Revolusi mental, Revitalisasi pertanian menuju agroindustri, Pariwisata dan ekonomi kreatif, Investasi dan kemudahan berusaha, Penguatan ekonomi kerakyatan, Akselerasi pembangunan sumber daya manusia, Reformasi birokrasi, Penguatan Nagari, Penataan Ruang dan Kawasan Strategis, Fasilitas umum dan fasilitas sosial berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dan Pengembangan daerah basis perjuangan.

3. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan penganggaran yang tepat melalui analisis standar belanja (ASB) dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan kebijakan pengeluaran melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.
7. Penganggaran pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20% dari Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
8. Pemenuhan kebutuhan anggaran kesehatan minimal 10% dari Total Belanja Daerah diluar Gaji, sesuai dengan pasal 171 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
9. Penganggaran untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional.
10. Penganggaran barang /jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
11. Penganggaran belanja Barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani pasal 59 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Dalam rangka pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dianggarkan belanja Hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten serta dana pengamanan

- pelaksanaan pemilihan dianggarkan dalam bentuk hibah atau program kegiatan OPD berkenaan, termasuk pendanaan untuk pemilihan suara ulang.
13. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah sebesar 0,16% dari total belanja daerah.
 14. Penganggaran Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi Pimpinan dan anggota DPRD diformulasikan kedalam program kegiatan di Sekretariat DPRD.
 15. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar 0,75% dari total Belanja Daerah.
 16. Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemilihan walinagari untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan sesuai amanat pasal 34 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 17. Penganggaran Belanja Modal memperhatikan RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang dan selaras dengan biaya pemeliharaan.
 18. Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
 19. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang (RKPBMMD).
 20. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik mengacu kepada alokasi Tahun anggaran sebelumnya. Pemanfaatan belanja sesuai dengan Rencana Kegiatan yang sudah disepakati dengan Kementerian/Lembaga dan berpedoman pada petunjuk teknis dalam pelaksanaannya. Dalam hal alokasi definitif sudah ditetapkan, maka Kepala Daerah melakukan penyesuaian dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 21. Menganggarkan sebesar 5 % dari DAK Fisik untuk kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan perundang-undangan.
 22. Penganggaran Bantuan Keuangan dari Provinsi dilakukan setelah keluarnya Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan dari Gubernur Sumatera Barat.
 23. Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan prosesnya sebelum Permendagri mulai berlaku tetap menggunakan

struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan karena pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah .

2.2.3. Penentuan Sumber/Penggunaan Pembiayaan

APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 direncanakan defisit sebesar Rp(37.534.892.097,00). Perkiraan defisit sejumlah tersebut direncanakan akan ditutup melalui Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp39.884.892.097,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp40.542.906.467,42 Selanjutnya direncanakan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.350.000.000,00 berupa Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.

2.2.4. Kebijakan Umum Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD Kabupaten Lima Puluh kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Seiring terjadinya Pandemi covid 19, maka Pemerintah menerbitkan :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan postur dan rincian anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun anggaran 2020.
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terakhir diubah dengan Keputusan Peresiden Nomor 9 Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bahwa Pandemi Covid 19 telah mengancam stabilitas Keuangan Negara maupun Daerah. Hal ini berdasarkan aturan serta regulasi yang telah diperintahkan oleh Pemerintah, ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan penyesuaian terhadap APBD dengan melakukan perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk memenuhi kebutuhan Penanganan Dampak Kesehatan, Penanganan Jaring Pengaman Sosial dan Penanganan Dampak Ekonomi sebagai berikut :

A.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan perubahan alokasi anggaran dengan dasar :

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
2. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
3. Pendanaan yang disediakan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.
4. Langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dengan melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
5. Pengeluaran pada point(4) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
6. Dalam hal belanja tidak terduga pada point(5) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan :
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

**Tabel II.3
Perbup No.18 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD**

No. Urut	Uraian	Perbup No. 18 Th 2020		Bertambah/ berkurang
		Perbup 91 thn 2020	Setelah Pergeseran	
1	2	4	5	6
5.	BELANJA	323.632.112.173,00	323.633.412.172,70	1.299.999,70
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.039.821.853,00	24.088.739.578,00	13.048.917.725,00
5.1.1	Belanja Pegawai	464.021.853,00	465.321.853,00	1.300.000,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	464.021.853,00	465.321.853,00	1.300.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	464.021.853,00	465.321.853,00	1.300.000,00
5.1.4.	Belanja Hibah	9.290.800.000,00	8.770.800.000,00	(520.000.000,00)
5.1.4.04.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	9.290.800.000,00	8.770.800.000,00	(520.000.000,00)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.285.000.000,00	14.852.617.725,00	13.567.617.725,00
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	1.285.000.000,00	14.852.617.725,00	13.567.617.725,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	312.592.290.320,00	299.544.672.594,70	(13.047.617.725,30)
5.2.1.	Belanja Pegawai	15.398.851.982,30	15.178.869.502,00	(219.982.480,30)
5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.784.295.000,30	13.567.030.520,00	(217.264.480,30)

No. Urut	Uraian	Perbup No. 18 Th 2020		Bertambah/ berkurang
		Perbup 91 thn 2020	Setelah Pergeseran	
1	2	4	5	6
5.2.1.03.	Uang Lembur	1.614.556.982,00	1.611.838.982,00	(2.718.000,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.457.715.752,00	198.559.040.507,00	(11.898.675.245,00)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.655.437.777,00	14.653.110.842,00	997.673.065,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.766.713.400,00	6.125.505.700,00	(641.207.700,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.893.021.749,00	65.542.085.239,00	(2.350.936.510,00)
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.593.598.326,00	6.566.711.926,00	(26.886.400,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.210.091.909,00	5.894.942.279,00	(1.315.149.630,00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	929.315.600,00	1.044.883.600,00	115.568.000,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	444.600.000,00	433.800.000,00	(10.800.000,00)
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	909.353.500,00	799.640.000,00	(109.713.500,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.178.804.136,00	13.485.538.661,00	(693.265.475,00)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.007.356.000,00	1.948.051.000,00	(59.305.000,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.137.389.092,00	47.057.043.557,00	(2.080.345.535,00)
5.2.2.18.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	12.818.376.162,00	10.849.972.102,00	(1.968.404.060,00)
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.006.899.001,00	3.911.999.001,00	(94.900.000,00)
5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang	13.287.370.500,00	13.126.368.000,00	(161.002.500,00)
5.2.2.27.	Belanja Bantuan Sosial Barang	10.619.388.600,00	7.119.388.600,00	(3.500.000.000,00)
5.2.3.	BELANJA MODAL	86.735.722.585,70	85.806.762.585,70	(928.960.000,00)
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	25.250.000,00	30.150.000,00	4.900.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.800.629.000,00	1.840.629.000,00	40.000.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.079.219.600,00	3.074.319.600,00	(4.900.000,00)
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	5.152.291.999,70	4.870.791.999,70	(281.500.000,00)
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	1.227.515.000,00	1.203.515.000,00	(24.000.000,00)
5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	778.600.000,00	738.600.000,00	(40.000.000,00)
5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	2.269.104.295,00	2.392.704.295,00	123.600.000,00
5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	6.096.570.000,00	5.296.570.000,00	(800.000.000,00)
5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.715.350.000,00	1.626.865.000,00	(88.485.000,00)
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	64.591.192.691,00	64.732.617.691,00	141.425.000,00

B. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dilakukan perubahan alokasi anggaran dengan dasar :

1. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2020, dilakukan penyesuaian dan/atau penetapan atas pagu alokasi TKDD Tahun Anggaran 2020.
2. Penyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan atas :
 - a. DBH;
 - b. DAU;
 - c. DAK Fisik;
 - d. DAK Nonfisik;
 - e. DID;
 - f. Dana Otonomi Khusus dan DTI;
 - g. Dana Keistimewaan; dan
 - h. Dana Desa.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813.SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dilakukan perubahan alokasi anggaran dengan dasar :

1. Penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui :
 - a. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro.
2. Penyesuaian belanja daerah melalui :
 - a. Rasionalisasi belanja pegawai
 - b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja
 - c. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi belanja
3. Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah, digunakan untuk mendanai :
 - a. Belanja bidang kesehatan
 - b. Penyediaan jaring pengaman sosial
 - c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup

4. Pengutamakan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran melalui :
- a. Realokasi penggunaan anggaran untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu.
 - b. Penerapan pola padat karya tunai dalam pelaksanaan belanja modal

Tabel II.4

Perbup No. 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD

No. Urut	Uraian	Perbup No. 21 Th 2020		Bertambah/berkurang
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	
1	2	3	4	5
4	<u>PENDAPATAN</u>	1.144.880.035.920	989.984.205.092	(154.895.830.828)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.376.678.675	33.008.357.092	(11.368.321.583)
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	22.613.985.466	16.258.088.175	(6.355.897.291)
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	4.554.939.109	3.105.022.932	(1.449.916.177)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.957.700.000,00	2.957.700.000,00	0
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.250.054.100	10.687.545.985	(3.562.508.115)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.022.073.906.245	879.400.150.000	(142.673.756.245)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak//Bagi Hasil Bukan Pajak	14.763.998.245	14.116.515.000	(647.483.245)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	780.710.271.000	702.365.062.000	(78.345.209.000)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	226.599.637.000	162.918.573.000	(63.681.064.000)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.429.451.000	77.575.698.000	(853.753.000)
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78.429.451.000	77.575.698.000	(853.753.000)
5.	<u>BELANJA</u>	1.375.540.550.678	1.186.303.075.995	(189.237.474.683)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	810.009.897.549	831.791.189.049	21.781.291.500
5.1.1.	Belanja Pegawai	602.159.103.624	594.239.099.624	(7.920.004.000)
5.1.4.	Belanja Hibah	48.588.916.000	48.775.616.000	186.700.000
5.1.7.	Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik	157.976.877.925	150.423.855.700	(7.553.022.225)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.285.000.000	38.352.617.725	37.067.617.725
5.2.	BELANJA LANGSUNG	565.530.653.129	354.511.886.946	(211.018.766.183)
5.2.1.	Belanja Pegawai	22.542.414.982	19.851.515.059	(2.690.899.923)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.267.119.916	217.531.875.052	(62.735.244.864)
5.2.3.	BELANJA MODAL	262.721.118.231	117.128.496.835	(145.592.621.396)

C. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri, dilakukan perubahan alokasi anggaran dengan dasar :

1. Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan / atau perubahan alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.
2. Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur terkait penetapan PSBB di Propinsi Sumatera Barat

Tabel II.5

Perbup No. 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD

No. Urut	Uraian	Perbup No. 33 Th 2020		Bertambah/ berkurang
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	
1	2	3	4	5
4	<u>PENDAPATAN</u>	1.141.922.335.920	987.026.505.092	(154.895.830.828)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.418.978.675	30.050.657.092	(11.368.321.583)
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	22.613.985.466	16.258.088.175	(6.355.897.291)
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	4.554.939.109	3.105.022.932	(1.449.916.177)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.250.054.100	10.687.545.985	(3.562.508.115)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.022.073.906.245	879.400.150.000	(142.673.756.245)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak//Bagi Hasil Bukan Pajak	14.763.998.245	14.116.515.000	(647.483.245)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	780.710.271.000	702.365.062.000	(78.345.209.000)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	226.599.637.000	162.918.573.000	(63.681.064.000)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.429.451.000	77.575.698.000	(853.753.000)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	78.429.451.000	77.575.698.000	(853.753.000)
5.	<u>BELANJA</u>	1.340.987.734.678	1.148.154.259.995	(192.833.474.683)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	775.176.956.549	793.458.248.049	18.281.291.500
5.1.1.	Belanja Pegawai	611.449.903.624	602.516.599.624	(8.933.304.000)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.465.175.000	531.630.000	(3.933.545.000)
5.1.7.	Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik	157.976.877.925	150.423.855.700	(7.553.022.225)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.285.000.000	39.986.162.725	38.701.162.725
5.2.	BELANJA LANGSUNG	565.810.778.129	354.696.011.946	(211.114.766.183)
5.2.1	Belanja Pegawai	22.542.414.982	19.851.515.059	(2.690.899.923)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.315.119.916	217.531.875.052	(62.783.244.864)
5.2.3.	BELANJA MODAL	262.953.243.231	117.312.621.835	(145.640.621.396)

D.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, dilakukan perubahan alokasi anggaran dengan dasar :

1. Cadangan DAK Fisik dialokasikan pada bidang tertentu berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus.
2. Kriteria umum meliputi mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah, memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan perekonomian Daerah, mendukung ketahanan pangan dan pengembangan kawasan startegis pariwisata nasional.
3. Kriteria khusus meliputi kegiatan yang didanai dari Cadangan DAK Fisik bukan merupakan usulan kegiatan baru, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara padat karya, dan dapat diselesaikan pada sisa Tahun Anggaran 2020.
4. Bidang yang akan didanai meliputi perumahan dan pemukiman, industri kecil dan menengah, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan transportasi pedesaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomot 15/KM.7/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, dilakukan perubahan alokasi anggaran dengan dasar :

1. Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 merupakan alokasi bulan Maret sampai dengan Mei sebagai Insentif Tenaga Kesehatan Daerah.
2. Penyaluran Dana Cadangan BOK Tambahan dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu Tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40% dari alokasi.
3. Selisih antara Total Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan dengan Pagu Dana Cadangan BOK Tambahan setelah memperhitungkan Dana Cadangan BOK Tambahan, dialokasikan sebagai Sisa Dana Cadangan BOK Tambahan.

Tabel II.6

Perbup No. 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD

No. Urut	Uraian	Perbup No. 59 Th 2020		Bertambah/ berkurang
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	
1	2	3	4	5
4	<u>PENDAPATAN</u>	1.296.201.256.450	1.183.184.462.622	(113.016.793.828)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	97.618.204.205	86.249.882.622	(11.368.321.583)
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	32.010.499.996	25.654.602.705	(6.355.897.291)

No. Urut	Uraian	Perbup No. 59 Th 2020		Bertambah/ berkurang
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	
1	2	3	4	5
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	5.792.843.109	4.342.926.932	(1.449.916.177)
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.814.861.100	56.252.352.985	(3.562.508.115)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.070.332.801.245	969.538.082.000	(100.794.719.245)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak//Bagi Hasil Bukan Pajak	14.763.998.245	14.116.515.000	(647.483.245)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	780.710.271.000	702.365.062.000	(78.345.209.000)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	274.858.532.000	253.056.505.000	(21.802.027.000)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	128.250.251.000	127.396.498.000	(853.753.000)
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	128.250.251.000	127.396.498.000	(853.753.000)
5.	BELANJA	1.451.575.228.604	1.300.640.965.921	(150.934.262.683)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	861.371.256.180	883.152.547.680	21.781.291.500
5.1.1.	Belanja Pegawai	648.156.455.934	640.236.451.934	(7.920.004.000)
5.1.4.	Belanja Hibah	48.588.916.000	47.575.616.000	(1.013.300.000)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.465.175.000	4.031.630.000	(433.545.000)
5.1.7.	Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik	158.875.709.246	151.322.687.021	(7.553.022.225)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.285.000.000	39.986.162.725	38.701.162.725
5.2.	BELANJA LANGSUNG	590.203.972.424	417.488.418.241	(172.715.554.183)
5.2.1.	Belanja Pegawai	31.050.734.982	28.359.835.059	(2.690.899.923)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.342.459.916	223.160.238.502	(58.182.221.414)
5.2.3.	Belanja Modal	277.810.777.526	165.968.344.680	(111.842.432.846)

E. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Tabel II.7

Perbup No. 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD

No. Urut	Uraian	Perbup No. 78 Th 2020		Bertambah/ berkurang
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN	1.331.248.220.287	1.209.167.429.002	(122.080.791.285)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	78.695.818.570	64.785.949.738	(13.909.868.832)
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	11.964.313.361	10.195.621.384	(1.768.691.977)
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	4.763.944.109	3.764.338.109	(999.606.000)

No. Urut	Uraian	Perbup No. 78 Th 2020		Bertambah/
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	berkurang
1	2	3	4	5
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.807.700.000	3.203.697.260	395.997.260
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.159.861.100	47.622.292.985	(11.537.568.115)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.066.471.767.245	970.291.625.292	(96.180.141.953)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak//Bagi Hasil Bukan Pajak	14.763.998.245	18.731.092.292	3.967.094.047
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	780.710.271.000	702.365.062.000	(78.345.209.000)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	270.997.498.000	249.195.471.000	(21.802.027.000)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	186.080.634.472	174.089.853.972	(11.990.780.500)
4.3.4.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57.830.383.472	46.693.355.972	(11.137.027.500)
4.3.5.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	128.250.251.000	127.396.498.000	(853.753.000)
5.	BELANJA	1.376.027.280.594	1.216.882.773.453	(159.144.507.141)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	785.823.308.170	782.201.538.534	(3.621.769.636)
5.1.1.	Belanja Pegawai	648.156.455.934	614.437.637.197	(33.718.818.737)
5.1.4.	Belanja Hibah	48.588.916.000	47.575.616.000	(1.013.300.000)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.465.175.000	4.031.630.000	(433.545.000)
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	3.780.334.311	3.530.620.012	(249.714.299)
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	79.547.426.925	72.608.157.700	(6.939.269.225)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.285.000.000	40.017.877.625	38.732.877.625
5.2.	BELANJA LANGSUNG	590.203.972.424	434.681.234.919	(155.522.737.505)
5.2.1.	Belanja Pegawai	31.050.734.982	27.931.667.128	(3.119.067.854)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.342.459.916	229.099.613.233	(52.242.846.683)
5.2.3.	BELANJA MODAL	277.810.777.526	177.649.954.558	(100.160.822.968)

F.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KMK.07/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020, dilakukan perubahan alokasi anggaran sehingga struktur anggaran menjadi :

Tabel II.8
Perbup No. 101 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD

No. Urut	Uraian	Perbup No. 101 Th 2020		Bertambah/ berkurang
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	
1	2	3	4	5
4.	<u>PENDAPATAN</u>	1.379.903.201.963,00	1.257.822.410.678,00	(122.080.791.285,00)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.575.904.205,00	86.666.035.373,00	(13.909.868.832,00)
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	32.010.499.996,00	30.241.808.019,00	(1.768.691.977,00)
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	5.792.843.109,00	4.793.237.109,00	(999.606.000,00)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.957.700.000,00	3.353.697.260,00	395.997.260,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.814.861.100,00	48.277.292.985,00	(11.537.568.115,00)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.070.332.801.245,00	974.152.659.292,00	(96.180.141.953,00)
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak//Bagi Hasil Bukan Pajak	14.763.998.245,00	18.731.092.292,00	3.967.094.047,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	780.710.271.000,00	702.365.062.000,00	(78.345.209.000,00)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	274.858.532.000,00	253.056.505.000,00	(21.802.027.000,00)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	208.994.496.513,00	197.003.716.013,00	(11.990.780.500,00)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	22.913.862.041,00	22.913.862.041,00	0,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57.830.383.472,00	46.693.355.972,00	(11.137.027.500,00)
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	128.250.251.000,00	127.396.498.000,00	(853.753.000,00)
5.	<u>BELANJA</u>	1.455.355.562.915,00	1.295.357.302.774,00	(159.998.260.141,00)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	865.151.590.491,00	860.676.067.855,00	(4.475.522.636,00)
5.1.1.	Belanja Pegawai	648.156.455.934,00	614.437.637.197,00	(33.718.818.737,00)
5.1.4.	Belanja Hibah	48.588.916.000,00	47.575.616.000,00	(1.013.300.000,00)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.465.175.000,00	4.031.630.000,00	(433.545.000,00)
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	3.780.334.311,00	3.530.620.012,00	(249.714.299,00)
5.1.7.	Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik	158.875.709.246,00	151.082.687.021,00	(7.793.022.225,00)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.285.000.000,00	40.017.877.625,00	38.732.877.625,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	590.203.972.424,00	434.681.234.919,00	(155.522.737.505,00)
5.2.1.	Belanja Pegawai	31.050.734.982,00	27.931.667.128,00	(3.119.067.854,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.342.459.916,00	229.099.613.233,00	(52.242.846.683,00)
5.2.3.	BELANJA MODAL	277.810.777.526,00	177.649.954.558,00	(100.160.822.968,00)

Penjelasan Kebijakan Pengelolaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanggulangan dan Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan COVID-19, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengambil tindakan antara lain:

1. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Dalam Keadaan darurat Penanganan Virus Corona di Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 18 Maret 2020.
2. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Virus Corona di Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 26 Maret 2020.
3. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase-19 (COVID-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020.
4. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 177 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disesase-19 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 3 Juni 2020
5. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 211 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Masa Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 30 Juni 2020.

a. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan, Perekonomian, Dan Kebijakan Keuangan

Mewabahnya Covid-19 sangat mempengaruhi tatanan hidup di kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada mereka yang terinfeksi saja, tetapi pada semua masyarakat di sekitarnya. Baik dari sisi ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan raga, dan interaksi dengan masyarakat luas. Tidak terkecuali di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik saja, namun juga secara mental. Kesehatan mental menjadi salah satu dampak yang mengancam masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi disebabkan karena masyarakat dikelilingi oleh kematian, kemiskinan, kecemasan, isolasi, dan kegelisahan akibat pandemi Covid-19. Begitu banyak berita buruk yang diterima, membuat masyarakat cemas akan hidup diri mereka sendiri, keluarga, teman terdekat, dan bahkan lingkungan sekitarnya

Dampak positifnya telah menjadikan kedisiplinan masyarakat terhadap gerakan hidup sehat seperti rajin cuci tangan. Dampak negatifnya, rasa takut dan kegelisahan yang terjadi ditengah masyarakat mengakibatkan turunnya imun tubuh yang menyebabkan masyarakat semakin gampang diserang oleh virus covid-19 dan penyakit lainnya.

Langkah antisipasi pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 mengakibatkan mobilisasi masyarakat dibatasi sehingga pergerakan perekonomian jadi terganggu, pasar-pasar jadi sepi, dunia usaha banyak yang mengalami kerugian. Perekonomian jadi lesu, perputaran uang melambat sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru.

- b. Langkah yang dilakukan dan realokasi anggaran yang dilakukan dalam rangka untuk kesehatan, jaringan pengamanan social dan penguatan ekonomi

Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan tindakan-tindakan untuk penanganan covid-19 di kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu:

- Menetapkan status tanggap darurat bencana non alam sebagai langkah awal untuk mengambil tindakan dalam penanganan covid-19
- Membentuk gugus tugas dan satuan tugas penanganan covid-19 yang melibat semua unsur terkait
- Memperkuat fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di RSUD dengan pengadaan peralatan dan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Lima Puluh Kota
- Memberikan Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat terdampak Covid-19 sebagai perwujudan dari program jaringan pengaman social
- Melakukan tracking terhadap masyarakat, khususnya yang melakukan kontak dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan masyarakat yang memiliki gejala terpapar Covid-19, Melakukan sterilisasi terhadap arus keluar masuk masyarakat ke Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mendirikan posko perbatasan
- Membentuk satgas penangan Covid-19 tingkat kecamatan
- Melakukan sosialisasi dan penindakan kebiasaan hidup baru untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota
- Untuk mengatasi Keterbatasan anggaran dalam penanganan Covid-19, telah dilakukan refofusing anggaran

- c. Refocusing anggaran dan realokasi anggaran yang dilakukan dalam rangka untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan penguatan ekonomi.

Refocusing anggaran dan alokasi anggaran yang dilakukan dalam rangka untuk kesehatan, jaring pengaman social dan penguatan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:

DATA REFOCUSING DAN REALOKASI APBD DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA POSISI 31 DESEMBER 2020			
	Total Belanja	Total Pendapatan	Posisi Per
APBD 2020 Murni	1.455.355.562.915,00	1.379.903.201.963,00	31/12/20
APBD 2020 Setelah Refocusing dan Realokasi Berdasarkan Perubahan Terkini Nomor 101 tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020	1.295.357.302.775,00	1.257.822.410.678,00	31/12/20
APBD Yang Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19 Berdasarkan Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Posisi Per
A. Belanja Tidak Terduga (BTT)	39.264.129.900,00	36.109.477.583,00	31/12/20

1. Bidang Kesehatan	16.205.687.000,00	9.518.529.179,00	
2. Bidang Sosial	17.858.439.000,00	17.647.846.000,00	
3. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	309.538.000,00	18.419.650,00	
3. Bidang Lainnya	4.890.465.900,00	8.924.682.754,00	
B. Belanja Kegiatan pada OPD	20.934.077.400,00	18.697.414.429,00	31/12/20
1. Bidang Kesehatan	16.456.327.400,00	14.278.175.626,00	
a. Belanja Pegawai	0,00	0,00	
b. Belanja Barang dan Jasa	8.584.858.400,00	7.150.814.449,00	
c. Belanja Modal	7.871.469.000,00	7.127.361.177,00	
d. Belanja Bantuan Sosial	0,00		
e. Belanja Lainnya			
2. Bidang Sosial	4.177.750.000,00	4.119.438.055,00	
a. Belanja Pegawai	0,00	0,00	
b. Belanja Barang dan Jasa	1.827.750.000,00	1.769.438.055,00	
c. Belanja Modal	0,00	0,00	
d. Belanja Bantuan Sosial	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	
e. Belanja Lainnya	0,00	0,00	
3. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	300.000.000,00	299.800.748,00	
a. Belanja Pegawai	0,00	0,00	
b. Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	299.800.748,00	
c. Belanja Modal	0,00	0,00	
d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
e. Belanja Lainnya	0,00	0,00	
C. Total BTT dan Kegiatan OPD	60.198.207.300,00	54.806.892.012,00	
APBD Yang Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19 Berdasarkan Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Posisi Per
A. Belanja Tidak Terduga (BTT)	39.264.129.900,00	36.109.477.583,00	31/12/20
1. Bidang Kesehatan	16.205.687.000,00	13.996.916.501,00	
a. Alkes	4.326.149.909,00	3.906.353.218,00	
b. Obat-obatan	70.383.000,00	70.383.000,00	
c. Habis Pakai/Material Kesehatan	1.250.065.000,00	1.129.051.299,00	
d. Insentif Tenaga Kesehatan	1.854.160.000,00	1.352.184.711,00	
e. Lainnya	8.704.929.091,00	7.538.944.273,00	
2. Bidang Sosial	17.976.546.300,00	17.734.753.300,00	
a. Bantuan Tunai	17.858.439.000,00	17.647.846.000,00	
b. Dapur Umum	0,00		
c. Lainnya	118.107.300,00	86.907.300,00	
3. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	309.538.000,00	18.419.650,00	
a. Bantuan UMKM	0,00		
b. Insentif Usaha	0,00		
c. Lainnya	309.538.000,00	18.419.650,00	
3. Bidang lainnya	4.772.358.600,00	4.359.388.132,00	

a. Belanja Pegawai	751.485.000,00	751.485.000,00	
b. Belanja Barang Jasa	3.910.873.600,00	3.573.280.632,00	
c. Belanja Modal	110.000.000,00	34.622.500,00	
d. Lainnya			
B. Belanja Kegiatan pada OPD	20.934.077.400,00	18.697.414.429,00	31/12/20
1. Bidang Kesehatan	16.456.327.400,00	14.278.175.626,00	
a. Alkes	3.467.520.800,00	2.592.401.889,00	
b. Obat-obatan	0,00	0,00	
c. Habis Pakai/Material Kesehatan	60.326.000,00	11.642.000,00	
d. Insentif Tenaga Kesehatan	5.676.247.100,00	5.261.247.100,00	
e. Lainnya	7.252.233.500,00	6.412.884.637,00	
2. Bidang Sosial	4.177.750.000,00	4.119.438.055,00	
a. Bantuan Tunai	0,00	0,00	
b. Dapur Umum	0,00	0,00	
c. Lainnya	4.177.750.000,00	4.119.438.055,00	
3. Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	300.000.000,00	299.800.748,00	
a. Bantuan UMKM	0,00	0,00	
b. Insentif Usaha	0,00	0,00	
c. Lainnya	300.000.000,00	299.800.748,00	
C. Total BTT dan Kegiatan OPD	60.198.207.300,00	54.806.892.012,00	

2.2.5. Capaian Target Kinerja Pendapatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran pendapatan pada tahun 2020 ini dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut:

- Pendapatan Daerah-LRA.
Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 mencapai Rp1.209.471.396.990,61 atau 95,98% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian realisasi pendapatan daerah sedikit dibawah target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2019, maka terdapat penurunan pendapatan daerah di tahun 2020 sebesar Rp127.014.113.312,64 atau turun sebesar 9,50 persen.
- Realisasi Pendapatan Daerah-LRA tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya mencapai Rp77.429.483.703,61 atau 89,34% Dari realisasi tersebut terdapat kekurangan realisasi dari target PAD sebesar Rp9.236.551.669,39 atau kurang 10,66 % dari anggaran yang ditetapkan.
- Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-LRA yang bersumber dari Dana Perimbangan realisasinya adalah sebesar Rp948.966.938.909,00 atau 97,18%. Pada Dana Perimbangan ini untuk Bagi Hasil Pajak realisasinya 84,58%, Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) realisasinya mencapai 61,35% dari target yang ditetapkan, Dana Alokasi Umum (DAU) realisasinya mencapai 99,22% sementara DAK Fisik realisasinya adalah sebesar 87,19%. DAK Non Fisik realisasinya adalah sebesar 96,03%.

- Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya-LRA berupa Dana Penyesuaian, realisasinya adalah sebesar Rp127.623.525.500,00,00 atau 100,18% dari anggaran yang ditetapkan.
- Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya-LRA berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi realisasinya adalah sebesar Rp45.117.450.495,00 atau mencapai 96,62 % dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan realisasi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA berupa pendapatan hibah dari Pemerintah mencapai Rp10.333.998.383,00 atau 45,10% dari anggaran yang ditetapkan.

2.2.6. Capaian Target Kinerja Belanja Daerah dan Transfer

Capaian target kinerja Belanja Daerah untuk Tahun 2020 Direalisasikan sebesar Rp1.063.823.655.943,37 atau 93,07% dari target sebesar Rp1.143.091.242.841,00.

Pada Belanja operasi, realisasinya sebesar Rp874.999.821.693,37,00 atau 94,55% dari target sebesar Rp925.423.410.658,00 Belanja Modal realisasinya sebesar Rp152.712.089.645,00 atau 85,96% dari target sebesar Rp177.649.954.558,00 Belanja Tak Terduga realisasinya sebesar Rp36.111.744.605,00 atau 90,24% dari target sebesar Rp40.017.877.625,00, dan terdapat defisit Anggaran sebesar Rp(7.646.192.795,76).

Capaian target Transfer untuk Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp153.293.933.843,00 atau 99,15% dari target sebesar Rp154.613.307.304,00, yang terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp2.715.537.370,00 atau 76,91% dan Transfer Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp150.578.396.473,00 atau 99,67% dari target yang ditetapkan.

2.2.7. Capaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

- a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp38.843.992.097,42 yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp39.884.892.097,42.
- b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp2.350.000.000,00 atau 100,00% yaitu berupa Pembiayaan Penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp2.350.000.000,00.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari sisi pembiayaan, APBD tahun 2020 juga telah berpedoman pada Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 52 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.260.169.657.778,00 dan terealisasi sebesar Rp1.209.471.396.990,61 atau sebesar 95,98%, sedangkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.336.485.510.303,25 sehingga pendapatan tahun 2020 turun sebesar 9,50% dibanding dengan tahun 2019.

Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menganggarkan sebesar Rp1.143.091.242.841,00 dan terealisasi sebesar Rp1.063.823.655.943,37 atau sebesar 93,07%. sedangkan realisasi belanja pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.362.116.350.432,00 atau lebih besar 10,65 % dibanding realisasi belanja tahun 2020.

Berikut ini disajikan anggaran pendapatan, belanja tahun 2020 dan tahun 2019 beserta realisasinya.

Tabel III.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja (Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2016)
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	PENDAPATAN	1,260,169,657,778	1,209,471,396,990.61	95.98	1,336,485,510,303
2.	BELANJA	1,297,704,549,875	1,217,117,589,785	93.79	1,362,116,350,432
	a. BELANJA TIDAK LANGSUNG	860,797,067,856	830,554,547,133	96.49	798,401,840,627

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	b. BELANJA LANGSUNG	436,907,482,019	386,563,042,652	88.48	563,714,509,805

Target dan realisasi pendapatan setiap OPD untuk tahun anggaran 2020 dijelaskan pada tabel III.2 di bawah ini:

Tabel III.2
Target dan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA UNIT ORGANISASI (OPD)	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	LEBIH /KURANG
		Rp	Rp		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dinas Kesehatan	17,998,285,000.00	18,989,652,695	105.51	991,367,695
3	RSUD dr.Achmad Darwis	21,384,747,000.00	22,311,076,995	104.33	926,329,995
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	536,164,932.00	239,185,000	44.61	(296,979,932)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15,000,000.00	5,100,000	34.00	(9,900,000)
6	Dinas Pemadam Kebakaran	50,000,000.00	17,000,000	34.00	(33,000,000)
7	Dinas Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8,052,000.00	0.00	0.00	(8,052,000)
9	Dinas Pangan	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	70,000,000.00	78,680,000	112.40	8,680,000
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Dinas Perhubungan	896,811,000.00	870,639,300	97.08	(26,171,700)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	28,420,000.00	792,650	2.79	(27,627,350)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	306,228,000.00	319,319,799	104.28	13,091,799
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2,005,390,000.00	1,647,550,000	82.16	(357,840,000)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Dinas Perikanan	165,601,000.00	99,837,500	60.29	(65,763,500)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	175,740,000.00	82,237,900	46.80	(93,502,100)
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0.00	0.00	0.00	0.00

NO	NAMA UNIT ORGANISASI (OPD)	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	LEBIH /KURANG
		Rp	Rp		
23	Inspektorat	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Badan Keuangan	42,813,826,441.00	32,592,895,583	76.13	(10,220,930,858)
26	PPKD	1,173,503,622,405.00	1,132,041,913,287	96.47	(41,461,709,118)
27	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Sekretariat Daerah	63,670,000.00	168,776,000	265.08	105,106,000
29	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Sekretariat DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
31	DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Kecamatan Gunung Omeh	9,500,000.00	364,500	3.84	(9,135,500)
33	Kecamatan Bukit Barisan	10,500,000.00	576,000	5.49	(9,924,000)
34	Kecamatan Suliki	15,000,000.00	0.00	0.00	(15,000,000)
35	Kecamatan Guguk	15,000,000.00	1,735,500	11.57	(13,264,500)
36	Kecamatan Mungka	5,000,000.00	0.00	0.00	(5,000,000)
37	Kecamatan Akabiluru	6,000,000.00	0.00	0.00	(6,000,000)
38	Kecamatan Payakumbuh	7,500,000.00	0.00	0.00	(7,500,000)
39	Kecamatan Luak	10,000,000.00	0.00	0.00	(10,000,000)
40	Kecamatan Lareh Sago Halaban	12,200,000.00	2,508,482	20.56	(9,691,518)
41	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	10,500,000.00	0.00	0.00	(10,500,000)
42	Kecamatan Harau	28,000,000.00	0.00	0.00	(28,000,000)
43	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6,000,000.00	1,555,800	25.93	(4,444,200)
44	Kecamatan Kapur IX	12,900,000.00	0.00	0.00	(12,900,000)
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		1,260,169,657,778.00	1,209,471,396,991	95.50	(50,698,260,787)

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap OPD untuk tahun anggaran 2020 dijelaskan pada tabel III.3 di bawah ini:

Tabel III.3
Anggaran dan Realisasi Belanja OPD
Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA UNIT ORGANISASI (OPD)	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	LEBIH /KURANG
		Rp	Rp		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	493,630,845,305.00	471,738,313,603.00	95.56	(21,892,531,702.00)
2	Dinas Kesehatan	151,934,671,206.00	125,449,140,647.37	82.57	(26,485,530,558.63)
3	RSUD dr.Achmad Darwis	47,404,809,344.00	42,991,125,104.00	90.69	(4,413,684,240.00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	80,676,824,859.00	74,534,564,518.00	92.39	(6,142,260,341.00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7,713,929,728.00	7,008,056,608.00	90.85	(705,873,120.00)
6	Dinas Pemadam Kebakaran	8,917,599,083.00	8,807,318,764.00	98.76	(110,280,319.00)
7	Dinas Sosial	7,054,060,187.00	6,652,773,301.00	94.31	(401,286,886.00)
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3,685,097,767.00	3,604,880,528.00	97.82	(80,217,239.00)
9	Dinas Pangan	2,986,211,475.00	2,864,460,078.00	95.92	(121,751,397.00)
10	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	10,961,963,554.00	10,849,058,125.00	98.97	(112,905,429.00)
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5,428,361,076.00	5,341,178,024.00	98.39	(87,183,052.00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3,686,184,376.00	3,496,424,235.00	94.85	(189,760,141.00)
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A	9,525,911,648.00	8,823,916,032.00	92.63	(701,995,616.00)
14	Dinas Perhubungan	15,857,509,782.00	15,127,366,798.00	95.40	(730,142,984.00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	7,809,425,027.00	7,559,865,826.00	96.80	(249,559,201.00)
16	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	5,797,245,999.00	4,914,264,500.00	84.77	(882,981,499.00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	3,818,931,361.00	3,738,661,722.00	97.90	(80,269,639.00)
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8,865,549,353.00	7,298,494,108.00	82.32	(1,567,055,245.00)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,271,407,108.00	3,236,609,513.00	98.94	(34,797,595.00)
20	Dinas Perikanan	5,355,295,774.00	5,042,938,759.00	94.17	(312,357,015.00)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	18,668,911,740.00	17,374,826,811.00	93.07	(1,294,084,929.00)
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7,279,566,150.00	7,013,947,464.00	96.35	(265,618,686.00)
23	Inspektorat	6,592,024,963.00	6,404,608,428.00	97.16	(187,416,535.00)
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	4,460,269,677.00	4,135,975,616.00	92.73	(324,294,061.00)
25	Badan Keuangan	27,826,442,507.00	26,497,905,122.00	95.23	(1,328,537,385.00)
26	PPKD	246,238,430,659.00	240,152,487,854.00	97.53	(6,085,942,805.00)
27	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,596,901,825.00	5,375,131,831.00	96.04	(221,769,994.00)

NO	NAMA UNIT ORGANISASI (OPD)	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	LEBIH /KURANG
		Rp	Rp		
28	Sekretariat Daerah	27,064,945,473.00	26,020,617,505.00	96.14	(1,044,327,968.00)
29	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	540,559,497.00	513,016,456.00	94.90	(27,543,041.00)
30	Sekretariat DPRD	25,331,969,958.00	22,802,401,271.00	90.01	(2,529,568,687.00)
31	DPRD	11,634,047,557.00	11,229,520,380.00	96.52	(404,527,177.00)
32	Kecamatan Gunung Omeh	1,292,657,798.00	1,268,115,681.00	98.10	(24,542,117.00)
33	Kecamatan Bukit Barisan	1,502,470,228.00	1,451,793,176.00	96.63	(50,677,052.00)
34	Kecamatan Suliki	1,641,732,536.00	1,614,604,424.00	98.35	(27,128,112.00)
35	Kecamatan Guguk	1,633,807,811.00	1,609,529,394.00	98.51	(24,278,417.00)
36	Kecamatan Mungka	1,575,099,645.00	1,503,232,653.00	95.44	(71,866,992.00)
37	Kecamatan Akabiluru	1,575,177,316.00	1,496,503,842.00	95.01	(78,673,474.00)
38	Kecamatan Payakumbuh	1,891,541,911.00	1,734,378,866.00	91.69	(157,163,045.00)
39	Kecamatan Luak	1,557,133,419.00	1,487,100,922.00	95.50	(70,032,497.00)
40	Kecamatan Lareh Sago Halaban	2,028,767,672.00	1,856,780,241.00	91.52	(171,987,431.00)
41	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	1,715,369,037.00	1,705,054,986.00	99.40	(10,314,051.00)
42	Kecamatan Harau	1,989,920,335.00	1,966,968,912.00	98.85	(22,951,423.00)
43	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1,431,621,464.00	1,410,261,459.00	98.51	(21,360,005.00)
44	Kecamatan Kapur IX	2,243,818,672.00	2,131,486,028.00	94.99	(112,332,644.00)
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5,699,724,158.00	5,112,244,223.00	89.69	(587,479,935.00)
46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,309,803,855.00	4,169,685,447.00	96.75	(140,118,408.00)
JUMLAH		1,297,704,549,875.00	1,217,117,589,785.37	95.50	(80,586,960,089.63)

a. Pendapatan-LRA

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020, diperoleh realisasi Pendapatan Daerah-LRA sebesar Rp1.209.471.396.990,61 atau 95,98 persen dari pendapatan-LRA yang ditargetkan sebesar Rp1.260.169.657.775,00.

Capaian Realisasi Pendapatan Tahun 2020 dibandingkan dengan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan-LRA Tahun 2020

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%	Diatas/(Dibawah)
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	86,666,035,373.00	77,429,483,703.61	89.34	(9,236,551,669.39)
Pend.Transfer Pemerintah	1,150,589,760,361.00	1,121,707,914,904.00	97.49	(28,881,845,457.00)
Pusat- Dana	976,499,906,389.00	948,966,938,909.00	97.18	(27,532,967,480.00)

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Diatas/(Dibawah)
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Perimbangan				
Bagi Hasil Pajak	15,797,052,016.00	13,360,698,775.00	84.58	(2,436,353,241.00)
Bagi Hasil SDA	2,934,040,273.00	1,800,038,422.00	61.35	(1,134,001,851.00)
Dana Alokasi Umum	702,365,062,000.00	696,866,984,000.00	99.22	(5,498,078,000.00)
DAK Fisik	94,124,101,000.00	82,069,351,610.00	87.20	(12,054,749,390.00)
DAK Non Fisik	161,279,651,100.00	154,869,866,102.00	96.03	(6,409,784,998.00)
Pend. Transfer- Pusat – Lainnya	127,396,498,000.00	127,623,525,500.00	100.18	227,027,500.00
Dana Penyesuaian	127,396,498,000.00	127,623,525,500.00	100.18	227,027,500.00
Pend.Transfer Pemerintah Daerah lainnya (Propinsi)	46,693,355,972.00	45,117,450,495.00	96.62	(1,575,905,477.00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46,693,355,972.00	45,117,450,495.00	96.62	(1,575,905,477.00)
-Lain-lain Pend. Daerah yang Sah	22,913,862,041.00	10,333,998,383.00	45.10	(12,579,863,658.00)
Pendapatan Hibah	22,913,862,041.00	10,333,998,383.00	45.10	(12,579,863,658.00)
Jumlah	1,260,169,657,775.00	1,209,471,396,990.61	95.98	(50,698,260,784.39)

Pada Tabel III.4 diatas dapat diketahui bahwa secara total, realisasi Pendapatan daerah yang dapat dicapai masih dibawah anggaran yang ditetapkan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.260.169.657.778,00 dengan realisasi sebesar Rp1.209.471.396.990,61 atau mencapai 95,98%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah sebesar Rp77.429.483.703,61 atau 89,34% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA dibawah dari target yang ditetapkan, ini antara lain karena realisasi semua kode rekening jenis penerimaan PAD tidak ada yang mencapai seratus persen dari target yang ditetapkan, dimana penerimaan pajak daerah-LRA hanya sebesar 77,90%, Retribusi Daerah-LRA hanya tercapai sebesar 77,02% dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA mencapai 96,21%, sedangkan realisasi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA mencapai 97,26% dari anggaran yang ditetapkan.

Pada tahun 2020 realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dapat terealisasi sebesar Rp82.069.351.611,00 atau 87,19%. DAK Non Fisik dapat terealisasi sebesar Rp154.869.866.102,00 atau 96,03%. Anggaran dan Realisasi DAK Fisik dan Non Fisik dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel III.5
Perbandingan Realisasi dengan Anggaran DAK Fisik dan Non Fisik-LRA Tahun 2020

DAK Fisik:	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Diatas/ (Dibawah)
	(Rp)	(Rp)		
Dana Alokasi Khusus (DAK)	94,124,101,000.00	82,069,351,610.00	87.19	(12,054,749,390.00)
Infrastruktur Jalan	9,609,100,000.00	8,529,192,100.00	88.76	(1,079,907,900.00)
Infrastruktur Irigasi	7,900,259,000.00	6,856,028,942.00	86.78	(1,044,230,058.00)
Infrastruktur Air Minum	7,191,572,000.00	6,933,711,500.00	96.41	(257,860,500.00)
Infrastruktur Sanitasi	6,607,242,000.00	6,280,362,100.00	95.05	(326,879,900.00)
Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3,675,000,000.00	3,675,000,000.00	100.00	-
Kelautan dan Perikanan	1,385,962,000.00	1,283,968,800.00	92.64	(101,993,200.00)
Pertanian	843,978,000.00	802,199,000.00	95.05	(41,779,000.00)
Pendidikan	27,175,857,000.00	26,340,989,250.00	96.93	(834,867,750.00)
Kesehatan dan KB	28,519,207,000.00	21,367,899,918.00	74.92	(7,151,307,082.00)
Pariwisata	1,215,924,000.00	0.00	0.00	(1,215,924,000.00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	161,279,651,100.00	154,869,866,102.00	96.03	(6,409,784,998.00)
DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2,109,100,000.00	1,908,000,000.00	90.47	(201,100,000.00)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	4,688,400,000.00	4,221,900,000.00	90.05	(466,500,000.00)
Tunjangan Profesi Guru PNSD	123,886,189,000.00	123,886,189,000.00	100.00	-
DAK Tambahan Penghasilan Guru PNS	121,000,000.00	121,662,000.00	100.55	662,000.00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM	417,358,000.00	382,731,500.00	91.70	(34,626,500.00)
Bantuan Operasional Kesehatan	21,554,901,100.00	19,611,377,783.00	90.98	(1,943,523,317.00)
Akreditasi Puskesmas	979,260,000.00	0.00	0.00	(979,260,000.00)
Jaminan Persalinan	2,408,577,000.00	0.00	0.00	(2,408,577,000.00)
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3,381,620,000.00	3,246,035,947.00	95.99	(135,584,053.00)
Dana Pelayanan Kepariwisata	344,050,000.00	172,025,000.00	50.00	(172,025,000.00)
DAK Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	1,333,357,000.00	1,319,944,872.00	98.99	(13,412,128.00)
DAK Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	55,839,000.00	0.00	0.00	(55,839,000.00)
Jumlah	255,403,752,100.00	236.939.217.712,00	92.77	(18,464.534.388.00)

Secara keseluruhan, pendapatan-LRA tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp127.014.113.312,64 atau turun sebesar 9,50 % dibandingkan dengan tahun 2019. Adapun perbandingan realisasi pendapatan daerah tahun 2020 dan 2019 tersebut adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Jenis pendapatan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Diatas/(Dibawah)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	77,429,483,703.61	85,168,153,332.25	(7,738,669,628.64)	(9.09)
Pendapatan Transfer Pemerintah	1,121,707,914,904.00	1,241,675,086,681.00	(119,967,171,777.00)	(9.66)
Pusat - Dana Perimbangan	948,966,938,909.00	1,016,024,131,816.00	(67,057,192,907.00)	(6.60)
Bagi Hasil Pajak	13,360,698,775.00	10,773,957,374.00	2,586,741,401.00	24.01
Bagi Hasil SDA	1,800,038,422.00	1,897,802,801.00	(97,764,379.00)	(5.15)
Dana Alokasi Umum	696,866,984,000.00	768,836,012,000.00	(71,969,028,000.00)	(9.36)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	82,069,351,610.00	82,797,025,030.00	(727,673,420.00)	(0.88)
DAK Non Fisik	154,869,866,102.00	151,719,334,611.00	3,150,531,491.00	2.08
- Pusat – Lainnya	127,623,525,500.00	174,095,960,290.00	(46,472,434,790.00)	(26.69)
Dana Penyesuaian	127,623,525,500.00	174,095,960,290.00	(46,472,434,790.00)	(26.69)
Propinsi	45,117,450,495.00	51,554,994,575.00	(6,437,544,080.00)	(12.49)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45,117,450,495.00	9,642,270,290.00	35,475,180,205.00	367.91
Lain-lain Pendap. yang Sah	10,333,998,383.00	9,642,270,290.00	691,728,093.00	7.17
Pendapatan Hibah	10,333,998,383.00	9,642,270,290.00	691,728,093.00	7.17
Jumlah	1,209,471,396,990.61	1,336,485,510,303.25	(127,014,113,312.64)	(9.50)

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 terdapat penurunan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp127.014.113.312,64 atau turun sebesar 9.50% dibanding dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2019, dimana tahun 2019 pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp85.168.153.332,25 dan tahun 2020 turun menjadi Rp77.429.483.703,61

Pada pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan realisasinya juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 realisasi transfer dana perimbangan adalah sebesar Rp1.016.024.131.816,00 dan tahun 2020 turun menjadi Rp948.966.938.909,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp67.057.192.907,00. Namun meskipun realisasi transfer dana perimbangan mengalami penurunan, realisasi pada bagi hasil pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 realisasi bagi hasil pajak sebesar Rp13.360.698.775,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp10.773.957.374,00 atau naik sebesar 24,01%. Pada realisasi DAK Non Fisik juga mengalami peningkatan sebesar 2,08% dari tahun 2019, naik sebesar Rp3.150.531.491,00.

Disamping itu terdapat penurunan pada Bagi Hasil SDA turun sebesar 5.15% dari tahun sebelumnya Rp1.897.802.801,00 turun menjadi Rp1.800.038.422,00 pada tahun 2020. Dan DAU mengalami penurunan sebesar Rp71.969.028.000,00 atau turun 9,36% dari tahun 2019 dimana pendapatan DAU Tahun 2020 adalah sebesar Rp696.866.984.000,00,

turun dari tahun pendapatan DAU tahun 2019 yang berjumlah Rp768.836.012.000,00. Pada sisi lain terdapat penurunan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana perimbangan berupa DAK fisik mengalami penurunan sebesar Rp727.673.420,00 atau turun 0,88% dari tahun sebelumnya.

b. Belanja Daerah dan Transfer

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Pengertian dari masing-masing jenis belanja dan transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran);
- 3) Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
- 4) Transfer merupakan pengeluaran bagi hasil ke nagari atau daerah bawahan.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.217.117.589.785,37 atau 93,79% dari anggaran sebesar Rp1.297.704.549.875,00

Realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp874.999.821.692,37 atau mencapai 94,55% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp925.423.410.658,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp591.691.011.079,00 atau 96,07%, Belanja Barang dan Jasa dengan realisasi sebesar Rp220.429.184.424,37 atau 89,85%, Belanja Hibah dengan realisasi sebesar Rp53.106.806.784,00 atau 98,33%, Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi sebesar Rp9.772.819.405,00 atau 95,75%.

Pada Belanja Modal Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp177.649.954.558,00 dengan realisasi sebesar Rp152.712.089.645,00 atau mencapai 85,96%. Belanja Modal Tanah, dengan realisasi sebesar Rp913.869.539,00 atau mencapai 90,06%. Belanja Peralatan dan Mesin, dengan realisasi sebesar Rp37.329.485.325,00 atau 98,21%. Belanja Gedung dan Bangunan dengan realisasi Rp38.200.979.558,00 atau 88,87%, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan realisasi sebesar Rp61.514.075.572,00 atau mencapai 92,31%. serta Belanja Aset Tetap Lainnya mencapai realisasi sebesar Rp14.753.679.651,00 atau mencapai 50,87%.

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2020 adalah sebesar Rp36.111.744.605,00 atau 90,24% dari anggaran sebesar Rp40.017.877.625,00. Sedangkan realisasi Transfer adalah sebesar Rp153.293.933.843,00 atau 99,15% dari anggarannya. Transfer ini terbagi atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp2.715.537.370,00 atau 76,91% dari anggaran sebesar Rp3.530.620.130,00 dan

Transfer Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp150.578.396.473,00 atau 99,67%.

Jumlah anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja daerah Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.7
Anggaran dan Realisasi Masing-Masing Jenis Belanja Daerah Tahun 2020

Jenis Belanja dan Transfer	Anggaran	Realisasi	%	Diatas/(Dibawah)
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja	1,143,091,242,841.00	1,063,823,655,942.37	93.07	(79,267,586,897.63)
Belanja Operasi	925,423,410,658.00	874,999,821,692.37	94.55	(50,423,588,965.63)
- Belanja Pegawai	615,893,161,325.00	591,691,011,079.00	96.07	(24,202,150,246.00)
- Barang dan Jasa	245,316,768,308.00	220,429,184,424.37	89.85	(24,887,583,883.63)
- Belanja Hibah	54,006,772,025.00	53,106,806,784.00	98.33	(899,965,241.00)
- Bantuan Sosial	10,206,709,000.00	9,772,819,405.00	95.75	(433,889,595.00)
Belanja Modal	177,649,954,558.00	152,712,089,645.00	85.96	(24,937,864,913.00)
- Tanah	1,014,725,000.00	913,869,539.00	90.06	(100,855,461.00)
- Peralatan dan Mesin	38,008,077,819.00	37,329,485,325.00	98.21	(678,592,494.00)
- Gedung dan Bangunan	42,986,567,249.00	38,200,979,558.00	88.87	(4,785,587,691.00)
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	66,635,367,996.00	61,514,075,572.00	92.31	(5,121,292,424.00)
- Aset Tetap Lainnya	29,005,216,494.00	14,753,679,651.00	50.87	(14,251,536,843.00)
Belanja Tak Terduga	40,017,877,625.00	36,111,744,605.00	90.24	(3,906,133,020.00)
Transfer	154,613,307,034.00	153,293,933,843.00	99.15	(1,319,373,191.00)
-Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3,530,620,013.00	2,715,537,370.00	76.91	(815,082,643.00)
-Transfer Bantuan Keuangan	151,082,687,021.00	150,578,396,473.00	99.67	(504,290,548.00)
Jumlah Belanja dan Transfer	1,297,704,549,875.00	1,217,117,589,785.37	93.79	(80,586,960,089.63)

Rincian perbandingan realisasi belanja tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Jenis Belanja dan Transfer	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Diatas/(Dibawah)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Belanja	1,063,823,655,942.37	1,203,919,440,423.00	(140,095,784,479.63)	(11.64)
Belanja Operasi	874,999,821,692.37	950,349,059,201.00	(75,349,237,508.63)	(7.93)
- Belanja Pegawai	591,691,011,079.00	630,882,952,899.00	(39,191,941,820.00)	(6.21)

Jenis Belanja dan Transfer	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Diatas/(Dibawah)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
- Barang dan Jasa	220,429,184,424.37	270,235,514,066.00	(49,806,329,641.63)	(18.43)
- Belanja Hibah	53,106,806,784.00	33,749,616,407.00	19,357,190,377.00	57.36
- Bantuan Sosial	9,772,819,405.00	15,480,975,829.00	(5,708,156,424.00)	(36.87)
Belanja Modal	152,712,089,645.00	252,910,521,752.00	(100,198,432,107.00)	(39.62)
- Tanah	913,869,539.00	261,246,598.00	652,622,941.00	249.81
- Peralatan dan Mesin	37,329,485,325.00	34,310,434,344.00	3,019,050,981.00	8.80
- Gedung dan Bangunan	38,200,979,558.00	32,110,044,597.00	6,090,934,961.00	18.97
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61,514,075,572.00	171,401,890,737.00	(109,887,815,165.00)	(64.11)
-Aset Tetap Lainnya	14,753,679,651.00	14,826,905,476.00	(73,225,825.00)	(.49)
Belanja Tak Terduga	36,111,744,605.00	659,859,470.00	35,451,885,135.00	5,372.64
Transfer	153,293,933,843.00	158,196,910,009.00	(4,902,976,166.00)	(3.10)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2,715,537,370.00	2,560,879,926.00	154,657,444.00	6.04
Transfer Bantuan Keuangan	150,578,396,473.00	155,636,030,083.00	(5,057,633,610.00)	(3.25)
Jumlah Belanja dan Transfer	1,217,117,589,786.37	1,362,116,350,432.00	(144,998,760,646.63)	(10.65)

2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya, dari tiga sumber Pendapatan Daerah, yang dapat dikendalikan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota baik melalui kebijakan maupun intervensi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian realisasi penerimaan atas PAD merupakan cerminan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaannya.

Pengelolaan pendapatan asli daerah tahun 2020, dari target PAD sebesar Rp86.666.035.373,- terealisasi sebesar Rp77.429.483.703,- atau sebesar 89,34%, yang terdiri dari :

1. Pajak daerah dengan target sebesar Rp30.241.808.019,- terealisasi sebesar Rp23.556.949.207,- (77,90%)
2. Retribusi daerah dengan target sebesar Rp4.793.237.109,- terealisasi sebesar Rp3.691.643.431,- (77,90%)
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target sebesar Rp3.353.6797.260,- terealisasi sebesar Rp3.226.731.006,- (96,21%)
4. Lain lain pendapatan daerah yang sah dengan target sebesar Rp48.277.292.985,- terealisasi sebesar Rp46.954.160.059,- (97,26%)

Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah mengalami realisasi yang lebih rendah dibanding dua jenis PAD lainnya. Hal ini disebabkan kondisi covid 19 yang berdampak kepada penurunan aktifitas perekonomian masyarakat secara umum. Objek pajak daerah dan retribusi daerah yang mengalami pengaruh antara lain, pajak hotel, pajak restoran,

pajak hiburan, Pajak Penerangan Jalan, pajak bumi dan bangunan. Pandemi Covid-19 mempersempit pergerakan/aktifitas aparatur dalam bekerja dan interaksi dengan orang lain termasuk penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat pelaku usaha termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah diberikan insentif/stimulus berupa Penghentian Sementara Pemungutan Pajak Hotel, Restoran/Rumah makan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Kondisi ini tentunya telah menyebabkan berkurangnya potensi penerimaan pajak dari objek dimaksud.

Penyebab lain belum maksimalnya pencapaian PAD ini adalah antara lain ; masih terbatasnya kualitas dan jumlah sumber daya manusia aparatur penyelenggaraan pajak daerah, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan wajib pajak, administrasi perpajakan daerah masih perlu dibenahi baik kelembagaan, sistem dan prosedur maupun aplikasi penyelenggaraan pajak daerah, belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sebagai langkah solusi dari kendala yang masih ditemui antara lain : mendorong peningkatan pengetahuan aparatur melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman regulasi terkait, study dan sharing informasi dengan instansi terkait horizontal dan vertikal baik melalui pertemuan langsung maupun melalui pertemuan secara *virtual/zooming*, melakukan penyempurnaan terkait regulasi pajak dan retribusi daerah, melakukan pembinaan dan pengendalian dengan instansi terkait vertikal terutama dalam objek pajak yang kewenangan pelaksanaan kegiatan usahanya berada pada instansi vertikal dan melakukan pengawasan, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

Kegiatan-kegiatan yang pencapaian kinerja keuangannya kurang dari 75 % dan permasalahan dalam pencapaian target keuangan tersebut, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.9
Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Keuangan TA 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1.01.01.	PENDIDIKAN			
1.01.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.01.03.1.01.0 3.15.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN	172,312,000.00	93,482,700.00	54.25
	Hal ini disebabkan adanya paket paket kegiatan pembangunan jalan yang tidak terlaksana karena reconfusing anggaran.			
1.01.03.1.01.0 3.15.04.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN	52,249,000.00	29,050,000.00	55.60
	Hal ini disebabkan adanya paket paket kegiatan pembangunan jalan yang tidak terlaksana karena reconfusing anggaran.			
1.01.03.1.01.0 3.15.05.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	844,738,750.00	594,687,000.00	70.40
	Hal ini disebabkan adanya paket paket kegiatan pembangunan jalan yang tidak terlaksana karena reconfusing anggaran.			
1.01.03.1.01.0 3.18.02.	PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN	33,226,000.00	11,600,200.00	34.91

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Hal ini disebabkan adanya paket kegiatan pembangunan jalan yang tidak terlaksana karena reconfusing anggaran.			
1.01.03.1.01.0 3.23.10	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	729,054,000.00	477,182,771.00	65.45
	Hal ini disebabkan karena optimalisasi efisiensi dan rasionalisasi kegiatan.			
1.01.03.1.01.0 3.23.12.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN	137,642,240.00	60,413,900.00	43.89
	Hal ini disebabkan karena optimalisasi efisiensi dan rasionalisasi kegiatan.			
1.01.03.1.01.0 3.30.03.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN	66,916,800.00	42,465,000.00	63.46
	Hal ini disebabkan karena optimalisasi efisiensi dan rasionalisasi kegiatan.			
1.01.1.01.03.0 1.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9,502,166.00	2,784,000.00	29.30
	Hal ini disebabkan karena optimalisasi efisiensi dan rasionalisasi kegiatan dan juga karena berkurangnya volume kegiatan pada Dinas PUPR selama Tahun 2020.			
1.01.1.01.03.0 1.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	40,750,000.00	25,245,800.00	61.95
	Hal ini disebabkan karena optimalisasi efisiensi dan rasionalisasi kegiatan.			
1.01.1.01.03.0 1.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	11,000,000.00	7,680,700.00	69.82
	Hal ini disebabkan karena optimalisasi efisiensi dan rasionalisasi kegiatan.			
1.01.1.01.03.0 1.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24,000,000.00	11,470,000.00	47.79
	Hal ini disebabkan karena optimalisasi efisiensi dan rasionalisasi kegiatan.			
1.01.1.01.03.0 1.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	42,625,000.00	24,800,000.00	58.18
	Hal ini disebabkan karena optimalisasi efisiensi dan rasionalisasi kegiatan.			
1.01.01	PENDIDIKAN			
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1.01.05.1.01.0 5.15.03.	PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	554,325,000.00	316,840,500.00	57.16
	Hal ini disebabkan karena beberapa item di sub kegiatan Bimtek tidak dapat dilaksanakan karena adanya bencana/wabah Covid 19 dengan menghindari penumpukan/kerumunan banyak orang.			
1.01.1.01.05.0 1.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23,600,000.00	15,691,659.00	66.49
	Hal ini disebabkan karena pemakaian belanja air dan listrik tidak bisa di prediksi.			
1.01.01	PENDIDIKAN			
1.01.06.01	DINAS SOSIAL			
1.01.06.1.01.0 6.15.07.	IDENTIFIKASI PENDATAAN DAN PENGUATAN KAPASITAS	227,228,000.00	152,987,500.00	67.33
	Hal ini disebabkan karena honor petugas verval DTKS untuk verval bulan Desember tidak bisa di realisasikan karena verval untuk bulan Desember tersebut di undur pada tanggal 31 januari 2021 serta honor kebersihan pendataan DTKS dan biaya bimtek.			
1.01.06.1.01.0 6.16.10.	PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	96,865,613.00	53,738,000.00	55.48
	Hal ini disebabkan karena adanya anggaran yang merupakan dana cadangan untuk kejadian bencana luar biasa seperti banjir di luar tanggap darurat sedangkan bencana luar biasa tidak terjadi sampai akhir Desember 2020.			
1.02.01	TENAGA KERJA			
1.02.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI			

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.02.1.02.07.0 6.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Hal ini disebabkan laporan keuangan semesteran tetap dilaksanakan tetapi belanja perjalanan dinas tidak dibayarkan karena untuk konsultasi ke Badan Keuangan sudah di akomodir dari kegiatan lain.	512,000.00	0.00	0.00
1.02.07.1.02.0 7.15.11.	PENYELENGGARAAN, PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGEMBANGAN DAN PENGHAPUSAN BATAS NAGARI Hal ini disebabkan tidak terealisasi belanja konsultasi untuk pembuatan peta batas pada nagari karena dana tersebut dianggarkan di perubahan.	170,495,000.00	40,490,000.00	23.75
1.02.1.02.07.0 1.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Hal ini disebabkan realisasi belanja telepon dan listrik lebih kecil dari dana yang dianggarkan.	39,900,000.00	28,757,304.00	72.07
1.02.01	TENAGA KERJA			
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN			
1.02.09.1.02.0 9.17.16.	KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Hal ini disebabkan kegiatan ini tidak terlaksana dari anggaran yang telah tersedia di awal di alihkan ke dana covid-19 melalui refocussing anggaran Tahun 2020.	1,275,000.00	0.00	0.00
1.02.09.1.02.0 9.17.24.	PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI ANGKUTAN BARANG DAN KHUSUS Hal ini disebabkan karena jumlah sopir/ juru mudi yang mengikuti penyuluhan (orang) dengan capaian kinerja 0 jalur dan kegiatan ini tidak terlaksana karena anggaran yang tersedia di awal di alihkan ke dana Covid-19 melalui refocusing anggaran Tahun 2020.	6,790,000.00	4,990,000.00	73.49
1.02.1.02.09.0 1.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Hal ini disebabkan karena selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan hanya membeli materai untuk kegiatan surat menyurat sedangkan untuk benda pos lainnya tidak dibeli karena memang tidak diperlukan pada Tahun Anggaran 2020.	5,000,000.00	3,630,000.00	72.60
1.02.1.02.09.0 1.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Hal ini disebabkan peralatan dan perlengkapan di Dinas Perhubungan masih terjaga dengan baik sehingga tidak terlalu banyak diperlukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor .Selain itu Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat penambahan peralatan dan perlengkapan kantor.	17,000,000.00	4,055,000.00	23.85
1.02.1.02.09.0 1.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Hal ini disebabkan karena pembayaran pajak kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan telah ditentukan berdasarkan tarif ditetapkan oleh samsat Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ketentuan yang berlaku sesuai tahun kendaraan ,jadi tidak bisa diperkirakan secara pasti di awal perencanaan Tahun Anggaran.	22,145,200.00	10,658,550.00	48.13
1.02.01	TENAGA KERJA			
1.02.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1.02.1.02.10.0 1.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Hal ini sebabkan perencanaan anggaran diasumsikan untuk kantor yang berada di dua lokasi,satu di Tanjung Pati dan satu lagi dikantor pusat Kota Payakumbuh.Untuk kantor di Tanjung Pati diletakkan di aset- aset barang milik Daerah seperti server, genset dan perlengkapan lainnya yang tidak bisa di prediksi tingkat pemakaian arus listrik.	140,050,000.00	98,946,953.00	70.65
1.02.1.02.10.0 1.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Hal ini disebabkan dalam perencanaan anggaran di asumsikan pada tahun 2020 Dinas Kominfo akan mendapatkan kendaraan dari OPD lain.	6,950,000.00	1,768,350.00	25.44
1.02.1.02.10.0 1.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Hal ini disebabkan kebutuhan informasi dari surat kabar sudah tercukupi dari beberapa surat kabar yang menjadi langganan sehingga Dinas Kominfo bisa melakukan efisiensi kebutuhan anggaran untuk kegiatan ini.	8,044,000.00	5,800,000.00	72.10

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.02.1.02.10.0 2.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10,000,000.00	5,585,000.00	55.85
	Hal ini disebabkan biaya pembuatan parkir kendaraan dinas lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan sehingga Dinas Kominfo bisa melakukan efisiensi kebutuhan anggaran untuk kegiatan ini.			
1.02.15.1.02.1 0.01.02.	PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	17,687,000.00	8,620,000.00	48.74
	Hal ini disebabkan kegiatan ini idealnya melalui proses konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Pusat baik terkait dengan pengumpulan bahan maupun pembahasan rancangan kebijakan, namun karena pademi covid-19 hal ini tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka sehingga anggaran perjalanan dinas tidak bisa di cairkan.			
1.02.01	TENAGA KERJA			
1.02.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
1.02.1.02.12.0 1.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7,000,000.00	4,539,600.00	64.85
	Hal ini disebabkan adanya penghapusan aset tetap satu unit kendaraan roda empat.			
1.02.01.	TENAGA KERJA			
1.02.13.01.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
1.02.1.02.13.0 1.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7,500,000.00	4,620,000.00	61.60
	Hal ini disebabkan karena terjadinya pademi covid-19 yang berdampak pada pengurangan aktifitas belanja kegiatan di semua bidang di Dinas Pariwisata sehingga pembelian materiapun hanya sebatas kebutuhan.			
1.02.1.02.13.0 1.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	55,740,000.00	37,875,195.00	67.95
	Hal ini disebabkan adanya tempat yang biasa dikelola pembiayaan listrik dan air sudah diputuskan oleh Dinas yaitu Kantor Dinas Pariwisata di medan nan bapaneh sehingga berkurangnya realisasi untuk listrik dan air.			
1.02.1.02.13.0 1.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	17,130,000.00	6,680,500.00	39.00
	Hal ini disebabkan karena terjadinya pademi covid-19 yang berdampak pada pengurangan aktifitas kegiatan di kantor dan sering WFH sehingga pembelian belanja peralatan kebersihan hanya sebatas kebutuhan.			
1.02.1.02.13.0 1.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5,994,000.00	2,358,000.00	39.34
	Hal ini disebabkan karena terjadinya pademi covid-19 yang berdampak pada pengurangan aktifitas kegiatan di kantor sehingga pembelian belanja alat listrik hanya sebatas kebutuhan.			
1.02.1.02.13.0 1.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10,800,000.00	5,615,000.00	51.99
	Hal ini disebabkan pada Tahun 2020 hanya merealisasikan hanya untuk langganan koran sedangkan pengadaan buku-buku aturan dan majalah tidak, karena dirasa tidak perlu dan mendesak.			
1.02.1.02.13.0 1.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	42,590,000.00	30,353,500.00	71.27
	Hal ini disebabkan karena terjadinya pademi covid-19 yang berdampak tidak adanya kunjungan tamu baik dari dalam maupun luar daerah dan tidak terlaksanannya pertemuan bulanan Kepala Dinas Pariwisata se Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga pembelian hanya sebatas kebutuhan.			
1.02.13.1.02.1 3.20.05.	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN ROHANI	3,495,800.00	1,050,000.00	30.04
	Hal ini disebabkan lebih fokusnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dalam memutuskan rantai penyebaran covid -19 yang melaksanakan piket di gerbang Harau dalam rangka memenuhi protokol kesehatan di kawasan Pariwisata yang berdampak bagi personil di luar kantor dan tidak melaksanakan senam bersama.			
2.00.02.1.02.1 3.16.02.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PERASARANA PARIWISATA	1,304,066,200.00	84,212,000.00	6.46
	Hal ini disebabkan terjadinya refofusing sehingga kegiatan fisik di tiadakan, kemudian keluar dana cadangan alokasi khusus fisik ini juga tidak di laksanakan karena untuk pelaksanaan kontruksi saja minimal 120 hari kelender atau empat bulan sedangkan perencanaanya belum ada.			
.02.1.02.13.16.	PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA	75,146,600.00	49,110,000.00	65.35

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
06.				
	Hal ini disebabkan karena tidak jadi terlaksana kerja sama pengadaan SMS Gate Pendataan Potensi Wisata dengan telkomsel dikarenakan prosedur yang rumit.			
2.00.04.	KEHUTANAN			
2.00.03.01.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
2.00.03.2.00.0 3.20.02.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN	291,687,950.00	205,015,027.00	70.29
	Hal ini disebabkan belanja jasa konsultan diperuntukkan bagi kegiatan DAK karena pademi covid dana DAK di pangkas sehingga jasa konsultan tidak bisa di pergunakan dan belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya ada kesalahan kode rekening pada saat pengiputan RKA sehingga tidak bisa di cairkan.			
2.00.2.00.03.0 1.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	103,065,146.00	76,788,017.00	74.50
	Hal ini disebabkan realisasi fisik dapat di capai 100% karena pemakaian air, listrik dan telepon lebih efisien dari perkiraan.			
2.00.2.00.03.0 1.20.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN	6,100,000.00	3,565,000.00	58.44
	Hal ini disebabkan ada salah satu percetakan koran yang biasa mengantarkan ke Dinas tidak lagi mengantarkan koran.			
2.00.2.00.03.0 2.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	30,100,000.00	17,810,000.00	59.17
	Hal ini disebabkan tidak adanya pengajuan dari bidang- bidang lain untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor.			
3.xx.01.	INSPEKTORAT.			
3.xx.01.01.	INSPEKTORAT			
3.XX.01.3.XX. 01.20.40	EVALUASI PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI	48,344,000.00	31,089,773.00	64.31
	Hal ini disebabkan dengan realisasi 64,31 % sudah terpenuhi biaya untuk kegiatan ini .			
3.00.01.	INSPEKTORAT.			
3.00.02.01.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
3.00.02.3.00.0 2.18.05.	PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF	261,655,020.00	139,411,234.00	53.28
	Hal ini disebabkan karena kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sebab dalam kondisi covid-19.			
3.00.01.	INSPEKTORAT.			
3.00.04.01	BADAN KEUANGAN			
3.00.03.3.00.0 3.17.02.	PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA	28,249,500.00	21,156,500.00	74.89
	Hal ini disebabkan karena tidak terlaksananya honor tenaga harian lepas yang direncanakan realisasi hanya uang perjalanan dinas.			
3.00.03.3.00.0 3.17.04.	PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	27,712,600.00	16,470,000.00	59.43
	Hal ini disebabkan rapat-rapat koordinasi di pusat tidak dilaksanakan karena acara dilakukan secara virtual sehingga perjalanan dinas yang sudah di anggarkan untuk rapat- rapat koordinasi keluar daerah tidak dapat teralisasi.			
3.00.03.3.00.0 3.17.13.	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	344,510,008.00	256,510,734.00	74.46
	Hal ini disebabkan tidak terlaksananya BIMTEK yang direncanakan untuk penatausahaan Kemendagri tidak bisa dilaksanakan karena belum siapnya aplikasi penatausahaan Sistem Kemendagri.			
3.00.03.3.00.0 3.17.16.	PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH	268,455,750.00	170,743,500.00	63.60
	Hal ini disebabkan karena tidak terlaksananya pembuatan sertifikat oleh KPN tidak tuntas di Tahun 2020.			
3.00.3.00.03.0 1.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4,683,043.00	3,155,000.00	67.37
	Hal ini disebabkan kebutuhan informasi dari surat kabar sudah tercukupi dari beberapa surat kabar yang menjadi			

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	langganan sehingga Badan Keuangan bisa melakukan efisiensi kebutuhan anggaran untuk kegiatan ini.			
3.00.01.	INSPEKTORAT.			
3.00.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
3.00.3.00.04.0 1.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4,700,000.00	2,246,500.00	47.79
	Hal ini disebabkan berkurangnya anggaran karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19,berkurangnya anggaran otomatis mengurangi kwitansi yang akan di tempeli dengan materai.			
3.00.3.00.04.0 6.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3,475,000.00	1,745,000.00	50.22
	Hal ini disebabkan karena koordinasi ke instansi terkait dalam daerah lebih memanfaatkan teleconference dan sejenisnya.			
4.00.02.	SEKRETARIAT			
4.00.02.01	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
4.00.02.4.00.0 2.15.04.	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	230,830,500.00	148,914,000.00	64.51
	Hal ini disebabkan adanya kebijakan keuangan terkait anggaran kas yang menumpuk di triwulan IV sehingga kegiatan tidak bisa terlaksana maksimal karena keterbatasan waktu,disamping itu adanya kegiatan besar daerah yang tidak terlaksana berupa kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Lima Puluh Kota akibat covid-19.			
4.00.4.00.02.0 1.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	252,894,000.00	176,071,368.00	69.62
	Hal ini disebabkan adanya penghematan pemakaian air,listrik dan telepon kantor dan rumah dinas ketua DPRD.			
4.00.4.00.02.0 1.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	52,500,000.00	0.00	0.00
	Hal ini disebabkan kegiatan medical check up DPRD sudah terlaksana di akhir Desember 2019 setelah adanya pelantikan anggota DPRD periode Tahun 2019-2024 sehingga untuk tahun 2020 tidak dilakukan kembali.			
4.00.4.00.02.0 5.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	45,600,000.00	28,231,000.00	61.91
	Hal ini disebabkan adanya kebijakan keuangan terkait anggaran kas yang menumpuk di triwulan IV sehingga kegiatan tidak bisa terlaksana maksimal karena keterbatasan waktu.			
4.00.4.00.02.0 5.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30,000,000.00	22,424,400.00	74.75
	Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang memfasilitasi kegiatan DPRD dan kegiatan tidak bisa terlaksana karena tidak ada kelas yang yang dibuka di akibatkan pandemi covid-19.			
4.00.4.00.02.0 5.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	45,600,000.00	28,231,000.00	61.91
	Hal ini disebabkan adanya kebijakan keuangan terkait anggaran kas yang menumpuk di triwulan IV sehingga kegiatan tidak bisa terlaksana maksimal karena keterbatasan waktu.			
5.00.01.	KECAMATAN			
5.00.01.03.	KECAMATAN SULIKI			
1.02.07.5.00.0 1.15.01.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN	30,050,000.00	22,455,000.00	74.73
5.00.01.	KECAMATAN			
5.00.01.05.	KECAMATAN MUNGKA			
5.00.5.00.01.0 1.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2,500,000.00	1,463,850.00	58.55
	Hal ini disebabkan lebih besarnya jumlah dianggarkan dari total pembayaran pajak kendaraan di kantor Camat Mungka dengan kendaraan roda dua sepuluh kendaraan roda empat satu.			
5.00.5.00.01.0 1.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10,000,000.00	7,453,200.00	74.53
	Hal ini disebabkan di realisasikan hanya untuk belanja publikasi karena dalam pelaksanaannya hanya bisa membayarkan untuk karangan bunga.			
5.00.01.	KECAMATAN			

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.00.01.06.	KECAMATAN AKABILURU			
5.00.5.00.01.0 1.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Hal ini disebabkan realisasi perpanjangan STNK kendaraan dinas hanya 1.480.550 sisa anggaran tidak dialihkan di anggaran perubahan karena baru di belanjakan bulan Desember 2020.	3,500,000.00	1,480,550.00	42.30
5.00.01.	KECAMATAN			
5.00.01.12.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU			
5.00.5.00.01.0 6.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Hal ini disebabkan adanya efisiensi pemakaian air dan listrik yang realisasinya sudah mencapai 100%	4,625,236.00	3,165,000.00	68.43
5.00.01.	KECAMATAN			
5.00.01.13.	KECAMATAN KAPUR IX			
5.00.5.00.01.0 1.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Hal ini disebabkan adanya efisiensi pemakaian air dan listrik ,realisasinya sudah mencapai 100%	19,800,000.00	14,794,135.00	74.72
6.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
6.00.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
6.00.01.6.00.0 1.17.01.	PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA Hal ini disebabkan karena situasi covid-19 sehingga adanya kegiatan yang tidak terlaksana.	75,365,000.00	53,335,000.00	70.77
6.00.01.6.00.0 1.21.03.	KOORDINASI FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK Hal ini disebabkan adanya perjalanan dinas keluar daerah tidak dapat dilaksanakan karena situasi covid-19 sehingga banyaknya prosedur- prosedur yang harus di penuhi sebelum berangkat.	897,168,700.00	578,093,500.00	64.43
6.00.6.00.01.0 1.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Hal ini disebabkan karena pembayaran disesuaikan dengan tagihan yang ada.	19,320,000.00	14,469,285.00	74.89
6.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
6.00.01.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
6.00.6.00.01.0 1.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Hal ini sebabkan batalnya beberapa kegiatan yang seharusnya di laksanakan di Tahun Anggaran 2020.	9,100,000.00	4,874,900.00	53.57
6.00.6.00.01.0 2.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR Hal ini sebabkan batalnya beberapa kegiatan yang seharusnya di laksanakan di Tahun Anggaran 2020.	3,100,000.00	2,290,000.00	73.87
1.01.05.6.00.0 1.22.18.	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN OPERASIONAL PUSDALOP PB Hal ini sebabkan batalnya beberapa kegiatan yang seharusnya di laksanakan di Tahun Anggaran 2020.	27,060,000.00	19,740,000.00	72.95

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta penyajian Laporan Keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) dalam Tahun Anggaran 2019 adalah Badan Keuangan (BK). Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca yang disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai entitas pelaporan, maka laporan keuangan yang disusun oleh Badan Keuangan selaku SKPKD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

a. Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan SKPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan SKPKD/PPKD. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional.

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah, untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos luar biasa.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan perasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

a. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

b. Basis kas juga digunakan dalam penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Demikian juga dengan Laporan Arus Kas, menggunakan basis kas.

c. Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

d. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- e. Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota adalah sebagai berikut:

a. Kas Dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bendahara umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab OPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

5) Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

b. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

d. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

f. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

h. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

j. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh OPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran + 1.

Merubah Pengelompokan Aset Tetap Peralatan dan Mesin setelah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik daerah dengan rincian sebagai berikut :

Pengelompokan dan Masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Semula :

Kode Rekening				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5

Kode Rekening				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	40
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10

Kode Rekening				Uraian	Masa Manfaat
					(Tahun)
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Setelah dilakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan kodifikasi Barang milik Daerah, pengelompokkan menjadi :

Kode Rekening				Uraian	Masa Manfaat
					(Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5

Kode Rekening				Uraian	Masa Manfaat
					(Tahun)
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	2	35	Alat Eksplorasi	5
1	3	2	36	Alat Pengeboran	7
1	3	2	37	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	8
1	3	2	38	Alat Bantu Eksplorasi	7
1	3	2	39	Peralatan Proses /Produksi	4
1	3	2	40	Rambu-rambu lalu lintas darat	50
1	3	2	41	Rambu-rambu lalu lintas udara	50
1	3	2	42	Peralatan Olahraga	3
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	40

Kode Rekening				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

4.4.6 Reklasifikasi Aset Gedung Dan Bangunan Ke Aset Peralatan Dan Mesin

Aset Tetap Gedung dan bangunan *Rambu-rambu* direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin, mulai Tahun buku 2020 dengan mereklass akun tersebut termasuk dengan mereklass penyusutannya secara keseluruhan.

4.4.7 Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya Ke Aset Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Lainnya *Peralatan Olahraga* direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin, mulai Tahun buku 2020 dengan mereklass akun tersebut termasuk dengan mereklass penyusutannya secara keseluruhan.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dilakukan reklasifikasi dan penyesuaian struktur Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah. Beban Penyusutan pada Laporan Operasional akan dilakukan penyesuaian dan koreksi pada Laporan ekuitas.

Perubahan Pengelompokan Aset Tetap ini akan dijelaskan pada Catatan atas laporan Keuangan dengan ilustrasi sebagai berikut :

4.4.7.1 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp..... mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp..... dari tahun 2019 sebesar Rp..... dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Uraian	Permendagri 64/2013		Permendagri 108/2016
		Saldo Awal Per 31-12-2020	Saldo Akhir Per 31-12-2020	Saldo Akhir Per 31-12-2020
1.	Tanah			
2.	Peralatan dan Mesin			
3.	Gedung dan Bangunan			
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
5.	Aset Tetap Lainnya			
	Konstruksi dalam Pengerjaan			
	Akumulasi Penyusutan			
	Jumlah			

Reklasifikasi akan diilustrasikan sebagai berikut :

No	Uraian	Permendagri 64/2013				Permendagri 108/2016			
		Saldo Awal Per 31-12-2020	Realisasi Belanja Modal 2020	Penyesuaian/ Koreksi 2020		Saldo Akhir Per 31-12-2020	Penyesuaian/ Koreksi 2020		Saldo Akhir Per 31-12-2020
				Tambah	Kurang		Tambah	Kurang	
	Jumlah								

4.4.7.2 Beban Penyusutan

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Aset Tetap yang terkait beban penyusutan telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan dalam penjelasan pos ini disajikan perbandingan antara Beban Penyusutan Aset Tetap menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dengan ilustrasi sebagai berikut:

Realisasi beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2020 sebesar Rp..... dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp..... dari tahun 2019 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Beban Penyusutan TA 2020			
		Saldo Akhir Per 31-12- 2019 (Permendagri 64/2013)	Penyesuaian/ Koreksi Permendagri 108/2016		Saldo Akhir Per 31-12- 2020
			Tambah	Kurang	
	Jumlah				

4.4.8 Penjelasan Atas Pos-Pos Lektoran Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo awal ekuitas tahun berjalan yang berasal dari saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya ditambah dengan surplus atau dikurangi defisit dari Laporan Operasional serta adanya koreksi atau penyesuaian ekuitas sebagai dampak karena adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang akan berpengaruh dan yang menjadi penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Permendagri 64/2013		Permendagri 108/2016
		Saldo Akhir Per 31-12-2019	Saldo Akhir Per 31-12-2020	Saldo Akhir Per 31-12-2020
	Ekuitas Awal			
	Surplus/Defisit-Lo			
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:			
	Koreksi Nilai Persediaan			
	Selisih Revaluasi Aset Tetap			
	Lain-Lain			
	Ekuitas Akhir			

Terdapat penyesuaian koreksi terkait dengan beban penyusutan yang mempengaruhi ekuitas sebesar Rp..... yang terdiri dari:

No	Uraian	Beban Penyusutan TA 2020			
		Permendagri 64/2013	Penyesuaian/ Koreksi Permendagri 108/2016		Saldo Akhir Per 31-12- 2020
			Tambah	Kurang	
	Jumlah				

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

4.4.9.1 Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Sesuai dengan paragraf 16 PSAP 08, suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (decision tree) sebagai berikut:

1. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (objective evidences); dan
2. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form).

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, antara lain :

Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/PD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.

Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.

Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukkan.

4.4.9.2 Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.

Apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.10 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

4.4.10.1 Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan.

Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi Asuransi, misalnya asuransi kebakaran; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi

4.4.10.2 Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

4.4.10.3 Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force

majeur, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

4.4.11 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kesalahan tidak berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
 - Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih
 - Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada

saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan- LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumberdaya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

Pendapatan BLUD bersumber Dari:

- a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas /entitas pelaporan;
- c. Pendapatan hasil kerja sama;
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. Pendapatan BLUD lainnya.

Pendapatan BLUD lainnya, antara lain berupa:

- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

Beban pada BLUD diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyesuaian, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan realisasi pendapatan dan belanja Tahun 2020 terlampir pada **Lampiran 1**.

5.1.1. Pendapatan LRA	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	1.209.471.396.990,61	1.336.485.510.303,25

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun anggaran 2020, anggaran Pendapatan sebesar Rp1.260.169.657.778,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.209.471.396.990,61 atau 95,98%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp1.336.485.510.303,25 realisasi pendapatan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp47.697.016.671,00 atau sebesar 3,94%.

Sementara rincian anggaran dan realisasi pendapatan Tahun 2020 dan 2019 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	86.666.035.373,00	77.429.483.703,61	89,34	85.168.153.332,25
2	Pendapatan Transfer – LRA	1.150.589.760.364,00	1.121.707.914.904,00	97,49	1.241.675.086.681,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	22.913.862.041,00	10.333.998.383,00	45,10	9.642.270.290,00
Total		1.260.169.657.778,00	1.209.471.396.990,61	95,98	1.336.485.510.303,25

Adapun rincian realisasi pendapatan per-OPD Tahun 2020 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1.2 Realisasi Pendapatan Tahun 2020 per-OPD

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Dinas Kesehatan	17.998.285.000,00	18.989.652.695,00
2	RSUD dr.Achmad Darwis	21.384.747.000,00	22.311.076.995,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	536.164.932,00	239.185.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	15.000.000,00	5.100.000,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	17.000.000,00

NO	OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.052.000,00	
7	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	70.000.000,00	78.680.000,00
8	Dinas Perhubungan	896.811.000,00	870.639.300,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0
10	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	28.420.000,00	792.650,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	306.228.000,00	319.319.799,00
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2.005.390.000,00	1.647.550.000,00
13	Dinas Perikanan	165.601.000,00	99.837.500,00
14	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	175.740.000,00	82.237.900,00
15	PPKD	1.173.503.622.405,00	1.132.041.913.287,00
16	Badan Keuangan	42.813.826.441,00	32.592.895.582,61
17	Sekretariat Daerah	63.670.000,00	168.776.000,00
18	Kecamatan Gunung Omeh	9.500.000,00	364.500,00
19	Kecamatan Bukit Barisan	10.500.000,00	576.000,00
20	Kecamatan Suliki	15.000.000,00	
21	Kecamatan Guguak	15.000.000,00	1.735.500,00
22	Kecamatan Mungka	5.000.000,00	
23	Kecamatan Akabiluru	6.000.000,00	
24	Kecamatan Payakumbuh	7.500.000,00	
25	Kecamatan Luak	10.000.000,00	
26	Kecamatan Lareh Sago Halaban	12.200.000,00	2.508.482,00
27	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	10.500.000,00	
28	Kecamatan Harau	28.000.000,00	
29	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6.000.000,00	1.555.800,00
30	Kecamatan Kapur IX	12.900.000,00	
	JUMLAH	1.260.169.657.778,00	1.209.471.396.990,61

A. Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	77.429.483.703,61	85.168.153.332,25

Realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2020 adalah sebesar Rp77.429.483.703,61 atau 89,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp86.666.035.373,00.

Tabel V.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	30.241.808.019,00	23.556.949.207,00	77,90	24.181.111.740,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.793.237.109,00	3.691.643.431,00	77,02	4.534.569.182,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	3.353.697.260,00	3.226.731.006,00	96,21	2.675.284.188,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	48.277.292.985,00	46.954.160.059,61	97,26	53.777.188.222,25
Total		86.666.035.373,00	77.429.483.703,61	89,34	85.168.153.332,25

Adapun rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah per-OPD Tahun 2020 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah per-OPD

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Dinas Kesehatan	17.998.285.000,00	18.989.652.695,00
2	RSUD dr.Achmad Darwis	21.384.747.000,00	22.311.076.995,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	536.164.932,00	239.185.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	15.000.000,00	5.100.000,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	17.000.000,00
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.052.000,00	-
7	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman	70.000.000,00	78.680.000,00
8	Dinas Perhubungan	896.811.000,00	870.639.300,00
9	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	28.420.000,00	792.650,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	306.228.000,00	319.319.799,00
11	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2.005.390.000,00	1.647.550.000,00
12	Dinas Perikanan	165.601.000,00	99.837.500,00
13	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	175.740.000,00	82.237.900,00
14	Badan Keuangan	42.813.826.441,00	32.592.895.582,61
15	Sekretariat Daerah	63.670.000,00	168.776.000,00
16	Kecamatan Gunung Omeh	9.500.000,00	364.500,00
17	Kecamatan Bukit Barisan	10.500.000,00	576.000,00
18	Kecamatan Suliki	15.000.000,00	-
19	Kecamatan Guguk	15.000.000,00	1.735.500,00
20	Kecamatan Mungka	5.000.000,00	-
21	Kecamatan Akabiluru	6.000.000,00	-
22	Kecamatan Payakumbuh	7.500.000,00	-
23	Kecamatan Luak	10.000.000,00	-
24	Kecamatan Lareh Sago Halaban	12.200.000,00	2.508.482,00
25	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	10.500.000,00	-
26	Kecamatan Harau	28.000.000,00	-
27	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6.000.000,00	1.555.800,00

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
28	Kecamatan Kapur IX	12.900.000,00	-
	JUMLAH	86.666.035.373,00	77.429.483.703,61

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2020:

1. Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp23.556.949.207,00 atau sebesar 77,90% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp30.241.808.019,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pajak Hotel – LRA	68.160.000,00	17.181.500,00	25,21	31.936.000,00
2	Pajak Restoran – LRA	798.090.463,00	940.778.989,00	117,88	1.190.118.502,00
3	Pajak Hiburan – LRA	80.000.000,00	93.500.000,00	116,88	21.400.000,00
4	Pajak Reklame – LRA	278.000.000,00	177.816.500,00	63,96	181.905.225,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LRA	14.500.000.000,00	11.679.469.865,00	80,55	12.193.234.235,00
6	Pajak Air Tanah – LRA	290.000.000,00	838.493,00	0,29	178.258.285,00
7	Pajak sarang burung walet-LRA	500.000,00	100.000,00	20,00	0
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	6.300.000.000,00	7.007.371.721,00	111,23	6.278.959.834,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	5.175.686.635,00	1.467.459.987,00	28,35	1.747.151.684,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	2.751.370.921,00	2.172.432.152,00	78,96	2.358.147.975,00
	Total	30.241.808.019,00	23.556.949.207,00	77,90	24.181.111.740,00

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.691.643.431,00 atau sebesar 77,02% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.793.237.109,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	70.000.000,00	78.680.000,00	112,40	71.630.500,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	28.998.000,00	11.498.000,00	39,65	11.858.000,00
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	400.000.000,00	437.135.000,00	109,28	485.018.000,00
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LRA	50.000.000,00	17.000.000,00	34,00	12.150.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	28.420.000,00	792.650,00	2,79	1.791.100,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	1.116.286.109,00	637.106.000,00	57,07	781.478.500,00
7	Retribusi Terminal-LRA	447.152.000,00	397.919.300,00	88,99	426.885.580,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	20.001.000,00	24.087.000,00	120,43	23.929.500,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	2.000.000.000,00	1.643.380.000,00	82,17	1.719.850.000,00
10	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah-LRA	170.000.000,00	117.985.400,00	69,40	112.207.000,00
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	454.328.000,00	326.060.081,00	71,77	887.717.002,00
12	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	8052000	0,00	0,00	54.000,00
Total		4.793.237.109,00	3.691.643.431,00	77,02	4.534.569.182,00

Adapun rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per-OPD Tahun 2020 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1.7 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per-OPD

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	536.164.932,00	239.185.000,00
2	Dinas Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	17.000.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.052.000,00	-
4	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan	70.000.000,00	78.680.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Pemukiman		
5	Dinas Perhubungan	896.811.000,00	870.639.300,00
6	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	28.420.000,00	792.650,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	306.228.000,00	319.319.799,00
8	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2.005.390.000,00	1.647.550.000,00
9	Dinas Perikanan	165.601.000,00	99.837.500,00
10	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	175.740.000,00	82.237.900,00
11	Badan Keuangan	339.060.177,00	160.885.000,00
12	Sekretariat Daerah	63.670.000,00	168.776.000,00
13	Kecamatan Gunung Omeh	9.500.000,00	364.500,00
14	Kecamatan Bukit Barisan	10.500.000,00	576.000,00
15	Kecamatan Suliki	15.000.000,00	-
16	Kecamatan Guguk	15.000.000,00	1.735.500,00
17	Kecamatan Mungka	5.000.000,00	-
18	Kecamatan Akabiluru	6.000.000,00	-
19	Kecamatan Payakumbuh	7.500.000,00	-
20	Kecamatan Luak	10.000.000,00	-
21	Kecamatan Lareh Sago Halaban	12.200.000,00	2.508.482,00
22	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	10.500.000,00	-
23	Kecamatan Harau	28.000.000,00	-
24	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	6.000.000,00	1.555.800,00
25	Kecamatan Kapur IX	12.900.000,00	-
	JUMLAH	4.793.237.109,00	3.691.643.431,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.226.731.006,00 atau sebesar 96,21% dari anggaran sebesar Rp3.353.697.260,00 yang telah ditetapkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2020 adalah Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LRA. Adapun Rinciannya sebagai berikut:

Tabel V.1.8 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LRA

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Deviden Bank Nagari	3.195.997.260,00	3.195.997.260,00	100,00	2.642.906.107,00
2	Deviden PT Balairung	7.700.000,00	0,00	0,00	4.877.276,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
3	Deviden BPR/LPN	150.000.000,00	30.733.746,00	20,49	27.500.805,00
Total		3.353.697.260,00	3.226.731.006,00	96,21	2.675.284.188,00

Jumlah realisasi pada Tahun 2020 tersebut mencapai 96,21% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.353.697.260,00.

Pendapatan Deviden PT.Bank Nagari tahun 2020 atas deviden tahun buku 2019 sebesar Rp3.195.997.260,00 telah diterima pada rekening Kas Daerah tanggal 29 April 2020.

Deviden BPR/LPN Tahun 2020 atas deviden tahun buku 2019 sebesar Rp30.733.746,00 telah diterima pada rekening Kas daerah dengan rincian sebagai berikut:

BPR Suliki Gunung Mas	14.240.000,00	diterima tanggal: 02/03/2020
BPR Harau	16.493.746,00	diterima tanggal: 04/05/2020
Jumlah Rp	30.733.746,00	

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebesar Rp46.954.160.059,61,00 atau sebesar 97.26% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp48.277.292.985,00 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.9 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan – LRA	301.715.000,00	384.781.408,00	127,53	51.053.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro – LRA	5.737.545.985,00	3.555.832.367,00	61,97	3.047.781.849,00
3	Pendapatan Bunga Deposito-LRA	0,00	0,00	0,00	8.737.361.026,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	1.900.000.000,00	1.049.302.426,61	55,23	1.509.381.457,92
5	Pendapatan Denda Retribusi – LRA	0,00	0,00	0,00	132.750.000,00
6	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda-LRA	15.000.000,00	5.100.000,00	34,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	285.000.000,00	188.997.298,00	66,31	563.473.595,00
8	Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh-LRA	520.000.000,00	469.416.870,00	90,27	457.368.624,00
9	Pendapatan BLUD-LRA	39.383.032.000,00	41.300.729.690,00	104,87	39.257.540.422,33
10	Lain-lain PAD yang sah lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	20.478.248,00
11	Jasa Dana Revolping	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		48.277.292.985,00	46.954.160.059,61	97,26	53.777.188.222,25

Jumlah realisasi Tahun 2020 mencapai 97,26% dari jumlah anggaran sebesar Rp48.277.292.985,00.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun 2020 sebesar Rp384.781.408,00 merupakan penerimaan dari penjualan bongkaran gedung dan bangunan serta hasil dari lelang kendaraan bermotor.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah–LRA Tahun 2020 sebesar Rp1.049.302.426,61 merupakan penerimaan dari hasil pemeriksaan Inspektorat dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, dan Denda Keterlambatan Pekerjaan. Rinciannya sebagai berikut:

No.	Tanggal	URAIAN	PENYETOR / NAMA	JUMLAH (Rp.)
	Januari			
1	03-Jan-20	Setoran TLHP oleh Disdukcapil Tahun 2019	Disdukcapil	1.165.000,00
2	06-Jan-20	Setoran TLHP oleh Satpol PP	Satpol PP	925.000,00
3	07-Jan-20	Setoran Kelebihan Pemebelian Printer Canon MP 287 oleh DisdagKop UKM Tahun 2019	Disdag Kop UKM	1.031.818,00
4	07-Jan-20	Temuan Perjalanan Dinas Ganda oleh Disdag Kop UKM	Disdag Kop UKM	5.130.000,00
5	09-Jan-20	Setoran TLHP oleh Dinas Sosial	Dinas Sosial	5.392.965,00
6	09-Jan-20	Setoran TLHP Tahun 2013 oleh BKPSDM	BKPSDM	725.000,00
7	09-Jan-20	Setoran TLHP Tanun 2015 oleh DPMDN	DPM DN	300.000,00
8	09-Jan-20	Setoran TLHP Tanun 2015 oleh DPMDN	DPM DN	20.134.200,00
9	09-Jan-20	Setoran TLHP oleh Disdagkop UKM	Disdag Kop UKM	600.000,00
10	09-Jan-20	Setoran TLHP Tahun 2017 oleh Distanhortbun	Distanhortbun	460.000,00
11	15-Jan-20	Temuan Pajak Restoran Tahun 2018 oleh Nag. Sungai Rimbang	Nag. Sungai Rimbang	114.500,00
12	15-Jan-20	Setoran TLHP oleh Disdagkop UKM	Disdag Kop UKM	1.440.000,00
13	20-Jan-20	Setoran TLHP oleh Disdagkop UKM	Disdag Kop UKM	720.000,00
14	20-Jan-20	Setoran TLHP oleh Disdagkop UKM	Disdag Kop UKM	70.000,00
15	20-Jan-20	Setoran TLHP oleh Disdagkop UKM, Tahun 2018	Disdag Kop UKM	960.000,00
16	20-Jan-20	Setoran TLHP oleh Disdagkop UKM	Disdag Kop UKM	214.250,00
17	20-Jan-20	Setoran TLHP oleh Disdagkop UKM	Disdag Kop UKM	1.242.000,00
18	20-Jan-20	Setoran TLHP oleh Disdagkop UKM	Disdag Kop UKM	33.000,00
19	22-Jan-20	Setoran TLHP oleh Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	18.518.200,00
20	27-Jan-20	Setoran Temuan Pajak Restoran oleh Nag. Limbanang	Nag. Limbanang	58.000,00
21	27-Jan-20	Setoran Temuan Pajak Restoran oleh Nag. Limbanang	Nag. Limbanang	1.228.000,00
22	27-Jan-20	Setoran Temuan Pajak Restoran oleh Nag. Limbanang	Nag. Limbanang	740.000,00
23	27-Jan-20	Setoran Temuan Pajak Restoran oleh Nag. Limbanang	Nag. Limbanang	398.500,00
24	27-Jan-20	Setoran Temuan Pajak Restoran oleh Nag. Limbanang	Nag. Limbanang	400.000,00
25	27-Jan-20	Setoran Temuan Pajak Restoran oleh Nag. Limbanang	Nag. Limbanang	441.500,00
26	27-Jan-20	Setoran TLHP Tahun 2013 oleh Setda	Setda	12.500.000,00
27	29-Jan-20	Temuan Pajak Restoran oleh Badan Keuangan	Badan Keuangan	358.000,00
28	30-Jan-20	Setoran TLHP melalui Nag. Tanjung Bungo	Nag Tj. Bungo	166.900,00
29	31-Jan-20	Temuan Pajak Restoran Tahun 2018 oleh Nag. Sungai Antuan	Nag. Sungai Antuan	500.000,00

No.	Tanggal	URAIAN	PENYETOR / NAMA	JUMLAH (Rp.)
30	31-Jan-20	Temuan Pajak Restoran Tahun 2018 oleh Nag. Sungai Antuan	Nag. Sungai Antuan	15.000,00
31	31-Jan-20	Temuan Pajak Restoran Tahun 2018 oleh Nag. Sungai Antuan	Nag. Sungai Antuan	70.000,00
32	31-Jan-20	Temuan Pajak Restoran Tahun 2018 oleh Nag. Sungai Antuan	Nag. Sungai Antuan	52.500,00
			JUMLAH	76.104.333,00
	Februari			
1	11-Feb-20	Setoran TLHP oleh DPMDN	DPM DN	300.000,00
2	19-Feb-20	Setoran TLHP tahun 2019 oleh Nagari Balai Panjang	Nag. Balai Panjang	1.605.725,00
			JUMLAH	1.905.725,00
	Maret			
1	03-Mar-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Disdagkop UKM	Disdag Kop UKM	120.000,00
2	05-Mar-20	Setoran TLHP Tahun 2015 oleh DPMDN	DPM DN	300.000,00
3	11-Mar-20	Setoran TLHP oleh SDN 02 Tungka	Disdikbud	265.500,00
4	11-Mar-20	Setoran TLHP oleh SDN 02 Tungka	Disdikbud	227.200,00
5	13-Mar-20	setoran TLHP oleh Nag. Jopang Manganti	Nag. Jp. Manganti	1.145.500,00
6	13-Mar-20	setoran TLHP oleh Nag. Jopang Manganti	Nag. Jp. Manganti	1.139.000,00
7	20-Mar-20	Temuan Pajak Restoran oleh UPTD SMP N 1 Kec. Payakumbuh	Disdikbud	1.638.500,00
8	20-Mar-20	Temuan Pajak Restoran oleh UPTD SMP N 1 Kec. Payakumbuh	Disdikbud	1.958.000,00
			JUMLAH	6.793.700,00
	April			
1	08-Apr-20	Setoran TLHP Tahun 2015 oleh DPMDN	DPM DN	300.000,00
2	16-Apr-20	Setoran TLHP perjalanan dinas ganda tahun 2017,2018 & 2019 oleh Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	1.230.000,00
3	22-Apr-20	Setoran TLHP perjalanan dinas Badan Keuangan Bid. Asset & Bid. Akuntansi Th 2019	Badan Keuangan	10.350.000,00
4	22-Apr-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Nag. Pandam Gadang	Nag. Pandam Gadang	4.493.500,00
			JUMLAH	16.373.500,00
	Mei			
1	06-Mei-20	Setoran TLHP Kelebihan Biaya Hotel pada Perjalanan Dinas DPMDN	DPM DN	825.000,00
2	14-Mei-20	Temuan kelebihan pembayaran akomodasi oleh Kec. Situjuh	Kec. Situjuh Limo Nagari	600.000,00
3	14-Mei-20	Temuan kelebihan pembayaran akomodasi oleh BPBD	BPBD	7.800.000,00
4	15-Mei-20	Temuan kelebihan pembayaran akomodasi oleh Disparpora	Disparpora	2.800.000,00
5	15-Mei-20	Diterima kelebihan pembayaran akomodasi oleh Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	6.550.000,00
6	18-Mei-20	Setoran TLHP oleh Disperinaker	Disperinaker	1.228.000,00
7	19-Mei-20	Setoran TLHP oleh Dinas Sosial	Dinas Sosial	600.000,00
8	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Disperinaker	Disperinaker	1.200.000,00
9	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Disperinaker	Disperinaker	1.600.000,00
10	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Disperinaker	Disperinaker	1.200.000,00
11	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Disperinaker	Disperinaker	4.998.000,00
12	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	3.000.000,00
13	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	46.900.000,00
14	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	57.800.000,00

No.	Tanggal	URAIAN	PENYETOR / NAMA	JUMLAH (Rp.)
15	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	7.120.000,00
16	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	4.100.000,00
17	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	3.600.000,00
18	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.350.000,00
19	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	3.000.000,00
20	20-Mei-20	Setoran TLHP Tahun 2010 oleh Badan Keuangan	Badan Keuangan	6.300.000,00
21	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.350.000,00
22	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.880.000,00
23	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.140.000,00
24	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	2.700.000,00
25	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	3.000.000,00
26	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.510.000,00
27	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.350.000,00
28	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	2.700.000,00
29	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.140.000,00
30	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	740.000,00
31	20-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	11.620.000,00
32	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Disdagkop UKM	Disdagkop UKM	1.850.000,00
33	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	740.000,00
34	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.350.000,00
35	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	740.000,00
36	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	740.000,00
37	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	5.180.000,00
38	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.140.000,00
39	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	2.220.000,00
40	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.140.000,00
41	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.880.000,00
42	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.140.000,00
43	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	740.000,00
44	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.480.000,00
45	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.480.000,00
46	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	740.000,00
47	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	740.000,00
48	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	2.960.000,00
49	26-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	5.980.000,00
50	27-Mei-20	Setoran TLHP oleh Disperinaker	Disperinaker	500.000,00
51	27-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	4.050.000,00
52	27-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	5.580.000,00
53	28-Mei-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Nag. Sitanang	Nag. Sitanang	539.200,00
54	28-Mei-20	Setoran oleh PT. Pebana Adi Sarana/ Riswan	PT. Pebana Adi Sarana/ Riswan	28.774.855,16
55	28-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	3.000.000,00

No.	Tanggal	URAIAN	PENYETOR / NAMA	JUMLAH (Rp.)
56	29-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	50.400.000,00
57	29-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.695.000,00
58	29-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	2.250.000,00
59	29-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	3.390.000,00
60	29-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	11.775.000,00
61	29-Mei-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	1.695.000,00
			JUMLAH	337.590.055,16
	Juni			
1	02-Jun-20	Setoran TLHP oleh Disperinaker	Disperinaker	2.350.000,00
2	03-Jun-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	6.320.000,00
3	03-Jun-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	740.000,00
4	03-Jun-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	5.180.000,00
5	03-Jun-20	Setoran TLHP oleh Kec. Payakumbuh	Kec. Payakumbuh	600.000,00
6	03-Jun-20	Setoran TLHP kekurangan fisik paket ruas jalan Tj.Pati-Ketinggian oleh PT, Anugerah Karya Bersama Persada	PT Anugerah Karya Bersama Persada	11.524.319,28
7	03-Jun-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	75.850.000,00
8	03-Jun-20	Setoran TLHP oleh Setwan	Setwan	25.275.000,00
9	04-Jun-20	Setoran denda keterlambatan oleh CV. Adhira Karya	CV Adhira Karya	8.279.862,25
10	04-Jun-20	Setoran oleh PT. LUBUK MINTURUN	PT. LUBUK MINTURUN	37.264.169,19
11	08-Jun-20	Setoran oleh PT. MULTIKON JAGAD PERKASA	PT. MULTIKON JAGAD PERKASA	50.600.356,71
12	08-Jun-20	Setoran oleh PT. MULTIKON JAGAD PERKASA	PT. MULTIKON JAGAD PERKASA	7.201.263,00
13	08-Jun-20	Setoran oleh PT. MULTIKON JAGAD PERKASA	PT. MULTIKON JAGAD PERKASA	90.945.527,64
14	08-Jun-20	Setoran oleh PT. BANGUN JAYA PRATAMA	PT. BANGUN JAYA PRATAMA	17.242.440,70
15	08-Jun-20	Setoran TLHP oleh PT. Multikon Jagad Perkasa berupa kekurangan fisik pemeliharaan jalan DAU 2019	PT. MULTIKON JAGAD PERKASA	2.000.000,00
16	10-Jun-20	Setoran TLHP oleh PT. Anugrah Tripa Raya	PT. Anugerah Tripa Raya	192.263,28
17	23-Jun-20	Setoran TLHP oleh Disdukcapil	Disdukcapil	4.974.000,00
18	25-Jun-20	Temuan Pajak Restoran oleh Nag. Durian Gadang	Nag. Durian Gadang	1.045.060,00
19	30-Jun-20	Temuan Pajak Restoran oleh UPTD SMP N 1 Sarilamak	Disdikbud	667.500,00
20	30-Jun-20	Temuan Pajak Restoran oleh UPTD SDN. 04 Sarilamak	Disdikbud	572.200,00
			JUMLAH	348.823.962,05
	Juli			
1	02-Jul-20	Setoran TLHP oleh UPTD SDN 02 Mungo	Disdikbud	151.550,00
2	02-Jul-20	Setoran TLHP oleh UPTD SDN 02 Mungo	Disdikbud	118.950,00
3	02-Jul-20	Temuan Pajak Restoran oleh UPTD SDN 02 Mungo Tahun 2019	Disdikbud	74.200,00
4	02-Jul-20	Temuan Pajak Restoran oleh UPTD SDN 02 Mungo Tahun 2018	Disdikbud	92.000,00
5	03-Jul-20	Setoran TLHP Tahun 2017 oleh Nag. Muaro Paiti	Muaro Paiti	301.500,00
6	03-Jul-20	Setoran TLHP Tahun 2017 oleh Nag. Muaro Paiti	Muaro Paiti	962.500,00
7	07-Jul-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh BPBD	BPBD	7.369.303,00
8	09-Jul-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh BKPSDM	BKPSDM	275.000,00

No.	Tanggal	URAIAN	PENYETOR / NAMA	JUMLAH (Rp.)
9	16-Jul-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh SMP 1 Mungka	Disdikbud	1.179.500,00
10	17-Jul-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh SMPN 1 Bukik Barisan	Disdikbud	399.100,00
11	20-Jul-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Badan Keuangan	Badan Keuangan	1.448.000,00
12	21-Jul-20	Setoran Temuan Pajak Restoran oleh SMPN 1 Harau	Disdikbud	3.744.550,00
13	24-Jul-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Dinas Damkar	Damkar	6.071.200,00
14	27-Jul-20	Setoran TLHP Tahun 2011 oleh Badan Keuangan	Badan Keuangan	3.000.000,00
15	28-Jul-20	Setoran TLHP Tahun 2017 oleh Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.720.000,00
16	29-Jul-20	Setoran TLHP Tahun 2017 oleh Badan Keuangan	Nag. Balai Panjang	2.649.600,00
17	30-Jul-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Disparpora	Disparpora	10.012.475,00
			JUMLAH	39.569.428,00
	Agustus			
1	04-Agu-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh DMPDN	DPM DN	600.000,00
2	05-Agu-20	Setoran TLHP oleh UPTD SDN 03 Simp. Sugiran	Disdikbud	170.750,00
3	06-Agu-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Disparpora	Disparpora	2.131.000,00
4	07-Agu-20	Setoran TLHP Perjalanan Dinas Ganda Tahun 2017,2018 & 2019 oleh Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	325.000,00
5	11-Agu-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Disdikbud	Disdikbud	75.000,00
6	11-Agu-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Disdikbud	Disdikbud	5.000.000,00
7	13-Agu-20	Setoran TLHP Oajak Restoran oleh Nag. Mungka	Nagari Mungka	2.411.000,00
8	18-Agu-20	Setoran TLHP oleh Disdikbud	Disdikbud	7.479.800,00
			JUMLAH	18.192.550,00
	September			
1	02-Sep-20	Pengembalian Pembay. Biaya Operasional Terindikasi Ganda Petugas Penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan an. Deni Hendra Suryadi, SKM, M.Kes	Dinas Kesehatan	300.000,00
2	07-Sep-20	Pengembalian Biaya operasinal terindikasi ganda petugas penanganan Covid-19 pada dinas kesehatan an. Dila Herman	Dinas Kesehatan	120.000,00
3	09-Sep-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Nag. Koto Tinggi	Nag. Koto Tinggi	700.220,00
4	09-Sep-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Nag. Koto Tinggi	Nag. Koto Tinggi	360.000,00
5	17-Sep-20	Setoran TLHP Tahun 2017 oleh Disdikbud	Disdikbud	275.000,00
6	21-Sep-20	Diterima TLHP Tahun 2019 oleh Setwan	Setwan	169.000,00
7	21-Sep-20	Diterima TLHP Tahun 2019 oleh Setwan	Setwan	381.900,00
8	23-Sep-20	Setoran Temuan Pajak Restoran oleh Nag. Talang Anau 2019	Nag, Talang Anau	1.033.800,00
9	23-Sep-20	Setoran Temuan Pajak Restoran oleh Nag. Talang Anau 2018	Nag, Talang Anau	100.000,00
10	23-Sep-20	Setoran Temuan Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan oleh Nag. Talang Anau Tahun 2018	Nag, Talang Anau	403.750,00
11	23-Sep-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Setwan	Setwan	381.900,00
12	23-Sep-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Setwan	Setwan	164.775,00
13	23-Sep-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Setwan	Setwan	381.900,00
14	23-Sep-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Setwan	Setwan	164.775,00
15	23-Sep-20	Setoran Pajak Restoran oleh Nag. Talang Anau 2018 & 2019	Nag, Talang Anau	727.500,00
16	24-Sep-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Setwan	Setwan	480.000,00
17	24-Sep-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Setwan	Setwan	381.900,00
18	28-Sep-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Setwan	Setwan	329.550,00

No.	Tanggal	URAIAN	PENYETOR / NAMA	JUMLAH (Rp.)
19	28-Sep-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Setwan	Setwan	1.200.000,00
			JUMLAH	8.055.970,00
	Oktober			
1	05-Okt-20	Setoran TLHP oleh Disdikbud	Disdikbud	100.000,00
2	05-Okt-20	Setoran TLHP oleh Disdikbud	Disdikbud	625.000,00
3	05-Okt-20	Setoran TLHP oleh Disdikbud	Disdikbud	1.220.000,00
4	05-Okt-20	Setoran TLHP oleh Disdikbud	Disdikbud	325.000,00
5	05-Okt-20	Setoran TLHP oleh Disdikbud	Disdikbud	370.000,00
6	06-Okt-20	Setoran TLHP Tahun 2011 oleh Badan Keuangan	Badan Keuangan	7.800.000,00
7	07-Okt-20	Setoran TLHP Tahun 2017 dan 2018 oleh Nag. Koto Alam	Nag Kt Alam	3.758.000,00
8	14-Okt-20	Setoran temuan pajak mineral oleh Nag. Koto Tangah 2018	Nag Kt Tangah	1.879.535,00
9	14-Okt-20	Setoran temuan pajak restoran oleh Nag. Koto Tangah	Nag Kt Tangah	920.000,00
10	14-Okt-20	Setoran Denda Keterlambatan Pekerjaan		53.298.636,40
11	26-Okt-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Nag. Koto Tangah	Nag Kt Tangah	139.104,00
			JUMLAH	70.435.275,40
	November			
1	02-Nov-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Nag. Sungai Kamuyang	Nag. Sungai Kamuyang	503.500,00
2	02-Nov-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Nag. Sungai Kamuyang	Nag. Sungai Kamuyang	370.000,00
3	02-Nov-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Nag. Sungai Kamuyang	Nag. Sungai Kamuyang	101.440,00
4	02-Nov-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Nag. Sungai Kamuyang	Nag. Sungai Kamuyang	415.900,00
5	05-Nov-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Puskesmas Taram	Puskesmas Taram	434.250,00
6	05-Nov-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Puskesmas Taram	Puskesmas Taram	400.000,00
7	05-Nov-20	Setoran TLHP Tahun 2019 oleh Puskesmas Taram	Puskesmas Taram	4.170.000,00
8	09-Nov-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Disdikbud	Disdikbud	5.000.000,00
9	09-Nov-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Disdikbud	Disdikbud	9.600.000,00
10	11-Nov-20	Setoran TLHP oleh Nag. Taram Pajak Restoran 2018 & 2019	Nag Taram	300.500,00
11	11-Nov-20	Setoran TLHP oleh Nag. Taram Pajak Restoran 2019	Nag Taram	42.000,00
12	17-Nov-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Disdikbud	Disdikbud	10.000.000,00
13	17-Nov-20	Setoran TLHP oleh Kec. Akabiluru	Kec. Akabiluru	210.000,00
12	19-Nov-20	Setoran TLHP 2019 oleh Nag. Solok Bio-bio	Nag. Solok Bio-bio	748.000,00
13	23-Nov-20	Setoran TLHP 2018,2109 & 2020 oleh Puskesmas Situjuah	Puskesmas Situjuah	2.320.000,00
14	23-Nov-20	Setoran TLHP 2018 oleh Nag. Pilubang	Nag . Pilubang	1.714.900,00
16	23-Nov-20	Setoran TLHP 2019 oleh Nag. Pilubang	Nag . Pilubang	685.000,00
17	24-Nov-20	Setoran TLHP oleh Bapelitbang	Bapelitbang	500.000,00
18	24-Nov-20	Setoran TLHP oleh Bapelitbang	Bapelitbang	4.978.000,00
19	24-Nov-20	Setoran TLHP oleh Bapelitbang	Bapelitbang	4.210.000,00
20	27-Nov-20	Setoran TLHP oleh Nag. Tanjung Pauh	Nag Tj Pauhah	3.049.400,00
21	27-Nov-20	Setoran TLHP Pajak Restoran Tahun 2017 oleh Nag. Pilubang	Nag Pilubang	666.600,00
22	27-Nov-20	Setoran TLHP 2018 dan 2019 Perjalanan Dinas Ganda oleh Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	4.390.000,00

No.	Tanggal	URAIAN	PENYETOR / NAMA	JUMLAH (Rp.)
			JUMLAH	54.809.490,00
	Desember			
1	10-Des-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Disdikbud	Disdikbud	17.088.639,00
2	11-Des-20	Setoran TLHP Tahun 2018 oleh Nagari Simalanggang	Nag. Simalanggang	460.000,00
3	18-Des-20	Setoran TLHP kekurangan fisik pekerjaan Tahun 2018 oleh CV. Lobery	CV Lobery	15.935.877,00
4	22-Des-20	Setoran temuan pajak restoran tahun 2018 oleh Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	171.000,00
5	22-Des-20	Setoran TLHP Tahun 2011 oleh Badan Keuangan	Badan Keuangan	19.700.000,00
6	23-Des-20	Setoran TLHP 2018 oleh Bapelitbang	Bapelitbang	111.950,00
7	23-Des-20	Setoran denda keterlambatan pekerjaan oleh CV. Atan Berdikari	CV Atan Berdikari	6.147.376,00
8	28-Des-20	Setoran denda keterlambatan pekerjaan oleh CV. Alike	CV Alike	2.478.602,00
9	29-Des-20	Setoran TLHP 2019 oleh DPMDN	DPM DN	492.500,00
10	30-Des-20	Setoran TLHP oleh Nag. Sarilamak	Nag Sarilamak	4.775.100,00
11	30-Des-20	Setoran TLHP oleh Disperinaker	Disperinaker	2.787.394,00
12	30-Des-20	Setoran TLHP Tahun 2013 oleh Badan Kesbangpol	Kesbangpol	500.000,00
			JUMLAH	70.648.438,00
Total Penerimaan Kerugian Uang T.A. 2020				1.049.302.426,61

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda-LRA Tahun 2020 sebesar Rp5.100.000,00 merupakan pendapatan dari denda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pendapatan Dari Pengembalian-LRA Tahun 2020 sebesar Rp188.997.298,00 merupakan penerimaan dari pengembalian gaji dan tunjangan (Belanja Tidak Langsung) dan pengembalian dari Belanja Langsung.

B. Pendapatan Transfer	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	1.121.707.914.904,00	1.241.675.086.681,00

Realisasi pendapatan transfer Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.121.707.914.904,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer Tahun 2020 antara lain:

Tabel V.1.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	976.499.906.392,00	948.966.938.909,00	97,18	1.016.024.131.816,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	127.396.498.000,00	127.623.525.500,00	100,18	174.095.960.290,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	46.693.355.972,00	45.117.450.495,00	96,62	51.554.994.575,00
Total		1.150.589.760.364,00	1.121.707.914.904,00	97,49	1.241.675.086.681,00

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Tahun 2020 adalah sebesar Rp948.966.938.909,00 atau sebesar 97,18% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp979.499.906.392,00 Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.11 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak – LRA	15.797.052.016,00	13.360.698.775,00	84,58	10.773.957.374,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	2.934.040.276,00	1.800.038.422,00	61,35	1.897.802.801,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	702.365.062.000,00	696.866.984.000,00	99,22	768.836.012.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	94.124.101.000,00	82.069.351.610,00	87,19	82.797.025.030,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) – LRA	161.279.651.100,00	154.869.866.102,00	96,03	151.719.334.611,00
Total		976.499.906.392,00	948.966.938.909,00	97,18	1.016.024.131.816,00

a) Bagi Hasil Pajak

Anggaran pendapatan bagi hasil pajak Tahun 2020 adalah sebesar Rp15.797.052.016,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp13.360.698.775,00 atau sebesar 84,58%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.12 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan – LRA	6.309.877.892,00	4.040.209.187,00	64,03	5.523.554.537,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan – LRA	0,00	186.149.097,00	0,00	171.822.643,00
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	8.500.330.402,00	8.231.570.951,00	96,84	2.530.694.198,00
4	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau – LRA	986.843.722,00	902.769.540,00	91,48	2.547.885.996,00
Total		15.797.052.016,00	13.360.698.775,00	84,58	10.773.957.374,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.

Anggaran pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam adalah sebesar Rp2.934.040.276 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.800.038.422,00 atau sebesar 61,35%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.13 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	152.429.455,00	118.531.450,00	77,76	165.295.800,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LRA	53.156.256,00	51.209.400,00	96,34	55.749.400,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LRA	506.225.000,00	460.716.083,00	91,01	784.981.400,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	1.647.661.150,00	788.276.289,00	47,84	590.155.800,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	14.526.000,00	13.494.000,00	92,90	0,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	560.042.415,00	367.811.200,00	65,68	50.620.360,00
7	Bagi Hasil Dari Mineral– LRA	0,00	0,00	0,00	251.000.041,00
Total		2.934.040.276,00	1.800.038.422,00	61,35	1.897.802.801,00

c) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum ini merupakan Dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebesar Rp702.365.062.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp696.866.984.000,00 atau sebesar 99,22% adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel V.1.14 Rincian Dana Alokasi Umum

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Dana Alokasi Umum – LRA	702.365.062.000,00	696.866.984.000,00	99,22	768.836.012.000,00
Total		702.365.062.000,00	696.866.984.000,00	99,22	768.836.012.000,00

d) Dana Alokasi Khusus

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus adalah sebesar Rp94.124.101.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp82.069.351.610,00 atau sebesar 87,19%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.15 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LRA	9.609.100.000,00	8.529.192.100,00	88,76	26.680.657.000,00
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi – LRA	7.900.259.000,00	6.856.028.942,00	86,78	6.753.207.661,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum – LRA	7.191.572.000,00	6.933.711.500,00	96,41	3.189.423.000,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	6.607.242.000,00	6.280.362.100,00	95,05	1.850.000.000,00
5	DAK Bidang Kehutanan-LRA	0,00	0,00	0,00	1.750.830.200,00
6	DAK Bidang Pariwisata-LRA	1.215.924.000,00	0,00	0,00	0,00
7	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman-LRA	3.675.000.000,00	3.675.000.000,00	100,00	3.262.144.000,00
8	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.385.962.000,00	1.283.968.800,00	92,64	1.186.566.893,00
9	DAK Bidang Pertanian – LRA	843.978.000,00	802.199.000,00	95,05	3.176.536.441,00
10	DAK Bidang Pendidikan – LRA	27.175.857.000,00	26.340.989.250,00	96,93	10.046.311.725,00
11	DAK Bidang Pasar - LRA	0,00	0,00	0,00	3.805.191.000,00
12	DAK Bidang Sentra Industri Menengah – LRA	0,00	0,00	0,00	2.093.280.000,00
13	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- LRA	0,00	0,00	0,00	682.880.000,00
14	DAK Bidang Kesehatan dan KB- LRA	28.519.207.000,00	21.367.899.918,00	74,92	18.319.997.110,00
Total		94.124.101.000,00	82.069.351.610,00	87,19	82.797.025.030,00

e) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus Non Fisik adalah sebesar Rp161.279.651.100,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp154.869.866.102,00 atau sebesar 96,03%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.16 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.109.100.000,00	1.908.000.000,00	90,47	1.496.000.000,00
2	Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	4.688.400.000,00	4.221.900.000,00	90,05	4.349.700.000,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	123.886.189.000,00	123.886.189.000,00	100,00	123.714.982.255,00
4	DAK Tambahan Penghasilan Guru PNS-LRA	121.000.000,00	121.662.000,00	100,55	483.463.000,00
5	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00	382.731.500,00	91,70	360.500.000,00
6	DAK Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	55.839.000,00	0,00	-	-
7	Bantuan Operasional Kesehatan	21.554.901.100,00	19.611.377.783,00	90,98	16.511.349.384,00
8	DAK Non Fisik	0,00	0,00	0,00	2.349.593.472,00
9	Akreditasi Puskesmas	979.260.000,00	0,00	0,00	0
10	Jaminan Persalinan (Jampersal)	2.408.577.000,00	0,00	0,00	0
11	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.381.620.000,00	3.246.035.947,00	95,99	1.932.010.500,00
12	DAK Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.333.357.000,00	1.319.944.872,00	98,99	0
13	Dana Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	172.025.000,00	50,00	521.736.000,00
Total		161.279.651.100,00	154.869.866.102,00	96,03	151.719.334.611,00

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Rp127.623.525.500,00 atau sebesar 100,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp127.396.498.000,00 Rincian transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.17 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Dana Penyesuaian – LRA	127.396.498.000,00	127.623.525.500,00	100,18	174.095.960.290,00
Total		127.396.498.000,00	127.623.525.500,00	100,18	174.095.960.290,00

Rincian Transfer Pemerintah Pusat lainnya tersebut dapat pula dibagi menjadi:

a) Dana Penyesuaian

Realisasi dana penyesuaian Tahun 2020 adalah sebesar Rp127.623.525.500,00 atau 100,18% dari anggaran sebesar Rp127.396.498.000,00. Adapun rincian dana penyesuaian Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1.18 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah – LRA	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	45.357.649.000,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
2	Bantuan Operasional Sekolah-LRA	49.570.800.000,00	49.797.827.500,00	100,46	53.291.706.290,00
3	Dana Desa yang Berasal dari APBN	77.575.698.000,00	77.575.698.000,00	100,00	75.446.605.000,00
Total		127.396.498.000,00	127.623.525.500,00	100,18	174.095.960.290,00

3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA Tahun 2020 merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA dari Propinsi Sumatera Barat yang target anggarannya sebesar Rp46.693.355.972,00 dan realisasinya sebesar Rp45.117.450.495,00 atau 96,62%, dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel V.1.19 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	46.693.355.972,00	45.117.450.495,00	96,62	51.554.994.575,00
Total		46.693.355.972,00	45.117.450.495,00	96,62	51.554.994.575,00

Adapun rincian dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel V.1.20 Rincian dan Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	10.755.826.067,00	9.404.315.152,00	87,43
2	Bagi hasil dari BBNKB	5.511.034.437,00	4.691.349.018,00	85,13
3	Bagi hasil dari PBBKB	16.130.017.085,00	13.685.965.619,00	84,85
4	Bagi hasil dari PAP	385.233.784,00	281.337.403,00	73,03
5	Bagi hasil dari pajak rokok	13.911.244.599,00	17.054.483.303,00	122,59
Jumlah		46.693.355.972,00	45.117.450.495,00	96,62

Berikut rincian penetapan penyaluran dana bagi hasil pajak Provinsi Tahun 2020:

NO	TRIWULAN	JENIS PAJAK	JUMLAH	SK PENETAPAN
1	Triwulan I	BHP PKB	2.585.503.963,00	Keputusan Kepala Bakeuda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/13/Pjk-B.Keuda/2020 tentang penetapan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Bagian Kab/Kota se-Sumbar triwulan I Tahun 2020 tanggal 2 April 2020.
		BHP BBNKB	1.298.793.177,00	
		BHP BBKB	3.469.177.934,00	
		BHP Air Permukaan	108.889.700,00	
		BH Pajak Rokok	6.484.682.255,00	

NO	TRIWULAN	JENIS PAJAK	JUMLAH	SK PENETAPAN
				Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020.
2	Triwulan II	BHP PKB	1.128.311.228,00	Keputusan Kepala Bakeuda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/18/Pjk-B.Keuda/2020 tentang penetapan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Bagian Kab/Kota se-Sumbar triwulan II Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020
		BHP BBNKB	661.303.067,00	
		BHP BBKB	2.411.740.505,00	
		BHP Air Permukaan	29.638.809,00	
		BH Pajak Rokok	4.054.592.276,00	
3	Triwulan III	BHP PKB	2.785.361.393,00	Keputusan Kepala Bakeuda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/23/Pjk-B.Keuda/2020 tentang penetapan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB) Provinsi Sumatera Barat Bagian Kab/Kota se-Sumbar triwulan III Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020
		BHP BBNKB	1.470.072.183,00	
		BHP BBKB	4.410.688.829,00	
		BHP Air Permukaan	103.896.381,00	
		BH Pajak Rokok	3.420.526.035,00	
4	Triwulan IV	BHP PKB	2.905.138.568,00	Sampai penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota belum memperoleh SK penetapan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV Tahun 2020 sehingga pencatatan berdasarkan realisasi uang masuk ke Kas Daerah.
		BHP BBNKB	1.261.180.591,00	
		BHP BBKB	3.394.358.351,00	
		BHP Air Permukaan	38.912.513,00	
		BH Pajak Rokok	3.094.682.737,00	
JUMLAH			45.117.450.495,00	

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	10.333.998.383,00	9.642.270.290,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya – LRA Tahun 2020 mempunyai target anggaran Rp22.913.862.041,00 yang mana realisasinya adalah sebesar Rp10.333.998.383,00 atau 45,10%, dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel V.1.21 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya – LRA

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah – LRA	22.913.862.041,00	10.333.998.383,00	45,10	9.642.270.290,00
Total		22.913.862.041,00	10.333.998.383,00	45,10	9.642.270.290,00

1. Pendapatan Hibah-LRA

Pendapatan Hibah – LRA Tahun 2020 mempunyai target anggaran Rp22.913.862.041,00 yang mana realisasinya adalah sebesar Rp10.333.998.383,00 atau 45,10% dengan rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Hibah Air Minum	1.950.000.000,00	9.000.000.000,00
2	Hibah IPDMIP	8.383.998.383,00	642.270.290,00
Total		10.333.998.383,00	9.642.270.290,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2018 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019 terdapat Program Pengelolaan Hibah Negara atau hibah air minum yang bersumber dari penerimaan dalam negeri yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum rumah tangga yang diberikan berdasarkan capaian kinerja yang terukur dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota salah satu Pemda yang menerima dana hibah tersebut.

Tujuan dana Hibah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan.

Berdasarkan perjanjian hibah daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Hibah air minum perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2020 Nomor:PHD-265/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 27 Agustus 2020. Untuk melaksanakan kegiatan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan dengan menggunakan dana talangan melalui pengeluaran pembiayaan dengan bukti pengeluaran SP2D Nomor 294/LS/2020 tanggal 2 Juni 2020 dengan nilai Rp2.350.000.000,00 yang terdiri dari :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Keterangan
1	Pemasangan SR MBR	1.950.000.000,00	Talangan MBR
2	Pemasangan Jaringan Pipa Asrama Polres	100.000.000,00	Permohonan Polres
3	Pembebasan Lahan IPA Gunuang Omeh	150.000.000,00	-
4	Pembebasan Lahan IPA Pauh Sangik	150.000.000,00	-
JUMLAH		2.350.000.000,00	

Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota untuk Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program-IPDMIP (Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu) nomor : PHD-025/IPDMIP/PK/2018 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana dana hibah tersebut diperoleh dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) dan ASEAN Infrastruktur Fund (AIF)

yang diperuntukkan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Parsipatif Terpadu. Dana Hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan Pengembangan irigasi Parsipatif terpadu yang didanai terlebih dahulu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019.

Dana pengganti kegiatan berupa Hibah IPDMIP tahun anggaran 2019 sebesar Rp8.383.998.383,00 telah diterima pada rekening Kas Daerah dengan rincian:

Tanggal diterima Pada Rekening Kasda	Uraian	Jumlah		
18-Sep-20	Hibah IPDMIP	Rp	79.150.000,00	Rembes 2019 Tapanhol
17-Nov-20	Hibah IPDMIP	Rp	117.786.372,00	Rembes 2019 ADB PU dan Bapelitbang
17-Nov-20	Hibah IPDMIP	Rp	23.562.928,00	Rembes 2019 AIF PU dan Bapelitbang
21-Dec-20	Hibah IPDMIP	Rp	1.336.666.051,00	Rembes 2020 dinas PU
21-Dec-20	Hibah IPDMIP	Rp	6.681.726.578,00	Rembes 2020 dinas PU
21-Dec-20	Hibah IPDMIP	Rp	51.034.587,00	Rembes 2020 Bapelitbang
21-Dec-20	Hibah IPDMIP	Rp	10.209.367,00	Rembes 2020 Bapelitbang
11-Dec-20	Hibah IPDMIP	Rp	83.862.500,00	Rembes 2020 Tapanhol
	JUMLAH	Rp	8.383.998.383,00	

5.1.2. Belanja	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	1.063.823.655.942,37	1.203.919.440.423,00

Realisasi belanja Tahun 2020 sebesar Rp1.063.823.655.942,37,00 atau 93,07% dari anggaran belanja sebesar Rp1.143.091.242.841,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp1.203.919.440.423,00 terdapat penurunan belanja sebesar Rp140.095.784.480,63 atau 13,17% dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.22 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Operasi	925.423.410.658,00	874.999.821.692,37	94,55	950.349.059.201,00
2	Belanja Modal	177.649.954.558,00	152.712.089.645,00	85,96	252.910.521.752,00
3	Belanja Tak Terduga	40.017.877.625,00	36.111.744.605,00	90,24	659.859.470,00
	Total	1.143.091.242.841,00	1.063.823.655.942,37	93,07	1.203.919.440.423,00

Adapun rincian realisasi belanja per-OPD Tahun 2020 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.1.23 Rincian Realisasi Belanja Per OPD Tahun 2020

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	493.630.845.305,00	471.738.313.603,00
2	Dinas Kesehatan	151.934.671.206,00	125.449.140.647,37
3	RSUD dr.Achmad Darwis	47.404.809.344,00	42.991.125.104,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	80.676.824.859,00	74.534.564.518,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.713.929.728,00	7.008.056.608,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	8.917.599.083,00	8.807.318.764,00
7	Dinas Sosial	7.054.060.187,00	6.652.773.301,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.685.097.767,00	3.604.880.528,00
9	Dinas Pangan	2.986.211.475,00	2.864.460.078,00
10	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	10.961.963.554,00	10.849.058.125,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.428.361.076,00	5.341.178.024,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.686.184.376,00	3.496.424.235,00
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A	9.525.911.648,00	8.823.916.032,00
14	Dinas Perhubungan	15.857.509.782,00	15.127.366.798,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.809.425.027,00	7.559.865.826,00
16	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	5.797.245.999,00	4.914.264.500,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	3.818.931.361,00	3.738.661.722,00
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8.865.549.353,00	7.298.494.108,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.271.407.108,00	3.236.609.513,00
20	Dinas Perikanan	5.355.295.774,00	5.042.938.759,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	18.668.911.740,00	17.374.826.811,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.279.566.150,00	7.013.947.464,00
23	Inspektorat	6.592.024.963,00	6.404.608.428,00
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	4.460.269.677,00	4.135.975.616,00
25	PPKD	91.625.123.625,00	86.858.554.011,00
26	Badan Keuangan	27.826.442.507,00	26.497.905.122,00
27	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.596.901.825,00	5.375.131.831,00
28	Sekretariat Daerah	27.064.945.473,00	26.020.617.505,00
29	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	540.559.497,00	513.016.456,00
30	Sekretariat DPRD	25.331.969.958,00	22.802.401.271,00
31	DPRD	11.634.047.557,00	11.229.520.380,00
32	Kecamatan Gunung Omeh	1.292.657.798,00	1.268.115.681,00
33	Kecamatan Bukit Barisan	1.502.470.228,00	1.451.793.176,00
34	Kecamatan Suliki	1.641.732.536,00	1.614.604.424,00
35	Kecamatan Guguak	1.633.807.811,00	1.609.529.394,00
36	Kecamatan Mungka	1.575.099.645,00	1.503.232.653,00
37	Kecamatan Akabiluru	1.575.177.316,00	1.496.503.842,00
38	Kecamatan Payakumbuh	1.891.541.911,00	1.734.378.866,00

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
39	Kecamatan Luak	1.557.133.419,00	1.487.100.922,00
40	Kecamatan Lareh Sago Halaban	2.028.767.672,00	1.856.780.241,00
41	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	1.715.369.037,00	1.705.054.986,00
42	Kecamatan Harau	1.989.920.335,00	1.966.968.912,00
43	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1.431.621.464,00	1.410.261.459,00
44	Kecamatan Kapur IX	2.243.818.672,00	2.131.486.028,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.699.724.158,00	5.112.244.223,00
46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.309.803.855,00	4.169.685.447,00
	JUMLAH	1.143.091.242.841,00	1.063.823.655.942,37

A. Belanja Operasi	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	874.999.821.692,37	950.349.059.201,00

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp874.999.821.692,37 atau 94,55% dari total anggaran Belanja Operasi sebesar Rp925.423.410.658,00 terdiri dari obyek belanja sebagai berikut:

Tabel V.1.24 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Pegawai	615.893.161.325,00	591.691.011.079,00	96,07	630.882.952.899,00
2	Belanja Barang dan Jasa	245.316.768.308,00	220.429.184.424,37	89,85	270.235.514.066,00
3	Belanja Hibah	54.006.772.025,00	53.106.806.784,00	98,33	33.749.616.407,00
4	Belanja Bantuan Sosial	10.206.709.000,00	9.772.819.405,00	95,75	15.480.975.829,00
	Total	925.423.410.658,00	874.999.821.692,37	94,55	950.349.059.201,00

Rincian realisasi masing-masing jenis belanja operasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp591.691.011.079,00 atau 96,07% dari total anggaran belanja pegawai sebesar Rp615.893.161.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.25 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	552.322.867.070,00	533.565.607.029,00	96,60	568.968.466.257,00
2	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	272.846.769.354,00	268.713.609.827,00	98,49	277.546.428.623,00
3	Tunjangan Keluarga	26.599.366.905,00	25.809.269.676,00	97,03	26.762.183.902,00
4	Tunjangan Jabatan	7.080.555.730,00	6.946.234.729,00	98,10	6.802.453.750,00
5	Tunjangan Fungsional	19.122.626.135,00	18.625.504.000,00	97,40	19.033.243.911,00
6	Tunjangan Fungsional Umum	3.517.122.050,00	3.161.042.500,00	89,88	3.571.187.000,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
7	Tunjangan Beras	15.565.733.742,00	15.131.199.579,00	97,21	15.761.835.427,00
8	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	564.530.570,00	498.178.335,00	88,25	508.114.037,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan	13.334.871.547,00	12.964.237.964,00	97,22	9.206.844.602,00
10	Uang Paket	67.115.790,00	67.032.000,00	99,88	66.937.500,00
11	Tunjangan Badan Musyawarah	24.329.474,00	24.299.100,00	99,88	21.238.876,00
12	Tunjangan Komisi	44.354.025,00	44.213.400,00	99,68	39.874.275,00
13	Tunjangan Badan Anggaran	24.329.474,00	23.385.600,00	96,12	22.061.025,00
14	Tunjangan Badan Kehormatan	8.000.000,00	7.856.100,00	98,20	7.201.425,00
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	17.012.339,00	16.991.100,00	99,88	15.392.475,00
16	Tunjangan Perumahan	1.687.920.000,00	1.639.920.000,00	97,16	1.480.000.000,00
17	Uang Jasa Pengabdian	50.000.000,00	-	-	319.410.000,00
18	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian Kesehatan	2.658.322.373,00	2.579.131.700,00	97,02	2.664.237.321,00
19	Tunjangan Profesi Guru PNSD	125.608.863.093,00	117.953.490.550,00	93,91	134.603.208.092,00
20	Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	945.775.500,00	908.385.000,00	96,05	655.300.000,00
21	Tunjangan Khusus Guru	2.919.980.600,00	-	-	463.309.200,00
22	Tunjangan Transportasi	4.333.807.500,00	4.224.000.000,00	97,47	4.290.000.000,00
23	Tunjangan Reses	735.000.000,00	661.500.000,00	90,00	735.000.000,00
24	Gaji ke tiga belas	26.771.232.854,00	26.771.232.854,00	100,00	32.127.786.360,00
25	Tunjangan Hari Raya	26.795.248.015,00	26.794.893.015,00	100,00	32.265.218.456,00
26	Honor dan Tunjangan PPPK/Guru Kontrak	1.000.000.000,00	-	-	-
27	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	57.012.128.809,00	52.474.588.603,00	92,04	50.433.238.243,00
28	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	48.774.387.763,00	44.749.120.395,00	91,75	43.260.342.103,00
29	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas	3.019.852.424,00	2.824.001.478,00	93,51	2.385.320.019,00
30	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	2.799.894.809,00	2.527.939.270,00	90,29	2.563.138.839,00
31	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi	2.417.993.813,00	2.373.527.460,00	98,16	2.224.437.282,00
32	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH	3.358.480.000,00	3.129.634.000,00	93,19	4.976.900.000,00
33	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	100,00	4.410.000.000,00
34	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	373.330.000,00	93,33	566.900.000,00
35	Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	110.304.000,00	35,30	-

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
36	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	113.409.061,00	-	-	-
37	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan	113.409.061,00	-	-	-
38	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.512.090.401,00	1.101.673.253,00	72,86	806.737.710,00
39	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel LRA	3.408.000,00	511.200,00	15,00	1.275.000,00
40	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran LRA	39.904.523,00	29.928.392,00	75,00	-
41	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan LRA	4.000.000,00	3.520.000,00	88,00	-
42	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame LRA	13.900.000,00	5.560.000,00	40,00	-
43	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan LRA	725.000.000,00	543.750.000,00	75,00	479.062.500,00
44	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak air tanah LRA	14.500.000,00	-	-	2.175.000,00
45	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet- LRA	25.000,00	3.750,00	15,00	-
46	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan logam dan batuan LRA	315.000.000,00	315.000.000,00	100,00	221.237.828,00
47	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2 LRA	258.784.332,00	100.223.501,00	38,73	72.527.399,00
48	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB LRA	137.568.546,00	103.176.410,00	75,00	30.459.983,00
49	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	239.661.856,00	130.556.394,00	54,48	109.631.438,00
50	Insentif PemungutanRetribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
51	Insentif PemungutanRetribusi Daerah-Parkir Tepi Jalan Umum-LRA	1.449.900,00	-	-	-
52	Insentif PemungutanRetribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor –LRA	20.000.000,00	15.000.000,00	75,00	-
53	Insentif PemungutanRetribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran –LRA	2.500.000,00	-	-	-
54	Insentif PemungutanRetribusi Daerah- Pelayanan Tera/ Tera Ulang–LRA	1.421.000,00	-	-	-
55	Insentif PemungutanRetribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA	55.814.306,00	3.494.288,00	6,26	4.450.000,00
56	Insentif PemungutanRetribusi Daerah-Terminal –LRA	22.357.600,00	16.768.200,00	75,00	16.768.200,00
57	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir –LRA	1.000.050,00	750.038,00	75,00	750.038,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
58	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga –LRA	100.000.000,00	78.972.900,00	78,97	50.163.200,00
59	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah –LRA	8.500.000,00	-	-	-
60	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan –LRA	22.716.400,00	12.070.968,00	53,14	37.500.000,00
61	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) –LRA	402.600,00	-	-	-
62	Uang Lembur	1.334.524.128,00	1.288.951.800,00	96,59	5.587.979.251,00
63	Uang Lembur PNS	-	-	-	4.180.619.900,00
64	Uang Lembur Non PNS	1.334.524.128,00	1.288.951.800,00	96,59	1.407.359.351,00
	Jumlah	615.893.161.325,00	591.691.011.079,00	96,07	630.882.952.899,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi barang dan jasa sebesar Rp220.429.184.424,37 atau 89,85% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp245.316.768.308,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.26 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.596.578,00	10.229.963.072,00	89,73	11.595.970.147,00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	3.325.081.443,00	3.227.382.974,00	97,06	4.038.827.118,00
3	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	17.700.000,00	17.279.200,00	97,62	1.500.000,00
4	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	299.325.500,00	284.851.660,00	95,16	379.683.519,00
5	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	249.206.090,00	225.892.000,00	90,64	361.325.500,00
6	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.157.173.491,00	1.088.921.891,00	94,10	986.698.523,00
7	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.178.297.280,00	2.082.179.238,00	95,59	2.767.894.198,00
8	Belanja Pengisian Tabung Pemadam kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Pengisian Tabung Gas	9.600.000,00	1.410.000,00	14,69	1.656.000,00
10	Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor pakai habis	266.593.250,00	236.247.950,00	88,62	149.561.420,00
11	Belanja Logistik Kantor	78.443.149,00	68.990.300,00	87,95	27.044.600,00
12	Belanja Alat Tulis/ Seminar Kit Peserta	351.523.750,00	165.183.000,00	46,99	89.315.000,00
13	Belanja Spanduk, Bendera, Marawa, Umbul-umbul	458.947.125,00	345.985.850,00	75,39	686.053.220,00
14	Belanja Penghargaan) Tropi, Plakat, Tabanas)	204.123.000,00	182.855.000,00	89,58	1.462.750.286,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
15	Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien	10.250.000,00	5.000.000,00	48,78	3.775.000,00
16	Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis	1.604.071.800,00	1.384.751.154,00	86,33	146.071.575,00
17	Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis	449.344.700,00	201.557.855,00	44,86	109.140.550,00
18	Belanja Peralatan Pendidikan Pakai Habis	626.500.000,00	597.059.000,00	95,30	118.482.000,00
19	Belanja Kelengkapan Kerja lapangan	82.416.000,00	82.416.000,00	100,00	266.191.638,00
20	Belanja Peralatan Olah Raga	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Bahan/Material	5.267.877.528,00	4.767.619.206,00	90,50	5.419.778.894,00
22	Belanja Bahan Baku Bangunan	508.975.000,00	481.943.190,00	94,69	710.373.362,00
23	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	60.350.000,00	60.010.000,00	99,44	135.279.830,00
24	Belanja Bibit Ternak	63.340.000,00	63.340.000,00	100,00	12.903.750,00
25	Belanja Bahan obat-obatan	2.994.307.110,00	2.817.182.743,00	94,08	2.917.667.278,00
26	Belanja Bahan Kimia	19.159.330,00	18.751.400,00	97,87	81.164.173,00
27	Belanja Persediaan makanan pokok	947.965.063,00	666.607.893,00	70,32	637.952.776,00
28	Belanja Bahan Percontohan	74.161.000,00	71.831.000,00	96,86	92.399.700,00
29	Belanja Bahan Percobaan	0,00	0,00	0,00	23.997.500,00
30	Belanja Bahan Pengujian Kendaraan	187.500.000,00	187.500.000,00	100,00	194.094.500,00
31	Belanja Bahan Dokumen (Film,VCD,cuci cetak,Frame)	77.477.100,00	69.430.000,00	89,61	109.098.500,00
32	Belanja Bahan makanan ternak	230.022.925,00	229.652.980,00	99,84	92.430.125,00
33	Belanja Bahan material pameran	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	268.907.400,00
34	Belanja bahan material keterampilan	103.620.000,00	100.370.000,00	96,86	143.510.000,00
35	Belanja Jasa Kantor	59.647.921.501,00	53.826.959.732,00	90,24	48.205.083.557,00
36	Belanja Telepon	440.294.288,00	355.445.143,00	80,73	344.956.381,00
37	Belanja Air	473.336.720,00	341.365.903,00	72,12	301.618.978,00
38	Belanja Listrik	8.902.000.254,00	8.212.783.589,00	92,26	8.350.634.429,00
39	Belanja Surat Kabar/Majalah	551.415.943,00	506.051.500,00	91,77	665.111.000,00
40	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.996.098.309,00	2.882.156.135,00	96,20	1.267.549.366,00
41	Belanja Paket/Pengiriman	4.002.166,00	1.461.792,00	36,53	3.478.472,00
42	Belanja Sertifikasi	200.359.500,00	133.334.500,00	66,55	82.936.905,00
43	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	2.204.520.000,00	2.160.020.149,00	97,98	1.652.612.710,00
44	Belanja Jasa Informasi/ Promosi/ Peliputan Media Cetak/ massa/Elektronik	509.245.000,00	460.495.000,00	90,43	1.017.284.000,00
45	Belanja Jasa Pengganti Transportasi	2.236.850.000,00	2.023.410.000,00	90,46	3.560.670.200,00
46	Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi	75.200.000,00	72.473.200,00	96,37	330.688.279,00
47	Belanja jasa Laboratorium	26.855.000,00	26.489.000,00	98,64	78.633.600,00
48	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	6.900.000,00	4.563.247,00	66,13	4.939.089,00
49	Belanja Jasa Lembaga (keagamaan,kebudayaan,kebersihan,	2.152.827.212,00	2.059.844.118,00	95,68	2.361.842.086,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	pendidikan)				
50	Belanja jasa kebersihan kantor	1.835.080.000,00	1.741.509.972,00	94,90	1.701.974.000,00
51	Belanja jasa Pegawai Harian Lepas	22.319.792.200,00	20.701.400.775,00	92,75	18.668.381.514,00
52	Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/buruh/mechanik/mandor	3.646.618.500,00	3.482.594.800,00	95,50	5.662.034.660,00
53	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	8.576.756.409,00	7.105.952.309,00	82,85	2.144.337.888,00
54	Belanja Jasa Piket Malam	715.700.000,00	694.680.000,00	97,06	0,00
55	Belanja Uang Saku Peserta	340.560.000,00	209.530.000,00	61,53	0,00
56	Belanja Pengganti Transportasi	1.433.510.000,00	651.398.600,00	45,44	0,00
57	Belanja Jasa Pelaksana Upacara	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
58	Belanja Premi Asuransi	14.376.060.000,00	12.078.002.620,00	84,01	6.919.009.287,00
59	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.299.850.000,00	12.005.493.545,00	83,96	122.797.632,00
60	Belanja Premi Asuransi Kebakaran/Jiwa	76.210.000,00	72.509.075,00	95,14	69.400.055,00
61	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	6.726.811.600,00
62	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.486.893.472,00	6.136.918.508,00	94,60	8.133.489.334,00
63	Belanja Jasa Service	697.251.854,00	643.376.678,00	92,27	751.262.066,00
64	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.635.480.402,00	1.577.206.544,00	96,44	2.444.820.822,00
65	Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas	3.604.164.866,00	3.506.458.286,00	97,29	4.510.300.546,00
66	Belanja Jasa Kir	13.435.200,00	6.662.500,00	49,59	5.071.900,00
67	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	536.561.150,00	403.214.500,00	75,15	422.034.000,00
68	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.915.443.305,00	3.541.048.991,00	90,44	6.007.303.256,00
69	Belanja Cetak	1.742.430.346,00	1.605.273.845,00	92,13	3.183.873.543,00
70	Belanja Penggandaan	1.677.868.382,00	1.500.240.146,00	89,41	2.401.321.502,00
71	Belanja Penjilidan	192.114.236,00	170.021.000,00	88,50	191.595.711,00
72	Belanja Publikasi	303.030.341,00	265.514.000,00	87,62	230.512.500,00
73	Belanja sewa rumah /gedung/gudang/parkir	441.100.000,00	136.076.000,00	30,85	344.040.000,00
74	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	90.000.000,00	57.000.000,00	63,33	54.600.000,00
75	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	249.400.000,00	49.300.000,00	19,77	204.550.000,00
76	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	101.700.000,00	29.776.000,00	29,28	84.890.000,00
77	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.150.000,00	41.298.384,00	68,66	491.696.250,00
78	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.150.000,00	41.298.384,00	68,66	491.696.250,00
79	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	335.332.500,00	199.717.500,00	59,56	931.559.750,00
80	Belanja sewa meja kursi	30.717.500,00	22.867.500,00	74,44	136.591.750,00
81	Belanja sewa tenda	188.040.000,00	94.625.000,00	50,32	579.175.000,00
82	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	7.500.000,00	4.500.000,00	60,00	49.150.000,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
83	Belanja sewa Sound system	9.475.000,00	4.175.000,00	44,06	62.625.000,00
84	Belanja sewa taman/bunga untuk taman hias	91.100.000,00	73.550.000,00	80,74	84.598.000,00
85	Belanja sewa peralatan khusus	8.500.000,00	0,00	0,00	19.420.000,00
86	Belanja makanan dan minuman	9.062.833.583,00	6.959.417.922,00	76,79	9.364.224.127,00
87	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.154.427.500,00	1.079.491.200,00	93,51	1.227.061.300,00
88	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.144.728.500,00	1.685.270.800,00	78,58	2.740.520.288,00
89	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.508.620.849,00	1.295.218.285,00	85,85	1.894.630.646,00
90	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	4.205.036.734,00	2.896.897.637,00	68,89	3.497.601.893,00
91	Belanja Makan Minum Pasien	50.020.000,00	2.540.000,00	5,08	4.410.000,00
92	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	271.750.000,00	271.386.000,00	99,87	1.154.368.609,00
93	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	105.000.000,00	104.720.000,00	99,73	93.820.000,00
94	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	42.000.000,00
95	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	66.750.000,00	66.750.000,00	100,00	814.513.609,00
96	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	15.000.000,00
97	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	70.000.000,00	69.916.000,00	99,88	189.035.000,00
98	Belanja Pakaian Kerja	297.000.000,00	296.680.000,00	99,89	556.535.952,00
99	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	297.000.000,00	296.680.000,00	99,89	556.535.952,00
100	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	230.649.200,00	230.427.200,00	99,90	998.114.000,00
101	Belanja Pakaian KORPRI	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
102	Belanja Pakaian adat daerah	146.000.000,00	145.778.000,00	99,85	278.500.000,00
103	Belanja Pakaian Olahraga	31.069.200,00	31.069.200,00	100,00	219.150.000,00
104	Belanja Pakaian Paskibraka	6.080.000,00	6.080.000,00	100,00	90.404.000,00
105	Belanja Pakaian Peserta	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	400.060.000,00
106	Belanja Perjalanan Dinas	38.340.476.967,00	32.361.235.782,00	84,40	59.322.944.896,00
107	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.330.150.447,00	10.417.445.000,00	72,70	14.825.411.842,00
108	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.010.326.520,00	21.943.790.782,00	91,39	44.398.191.850,00
109	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	99.341.204,00
110	Belanja Pemeliharaan	2.487.076.642,00	2.261.382.266,00	90,93	1.731.090.941,00
111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	884.719.079,00	866.722.820,00	97,97	521.542.108,00
112	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	155.109.825,00	152.152.745,00	98,09	83.167.790,00
113	Belanja Pemeliharaan Atap/Loteng	199.566.000,00	199.566.000,00	100,00	0
114	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	162.325.000,00	161.207.100,00	99,31	91.990.000,00
115	Belanja Pemeliharaan lang nama gedung/ tugu /monumen	30.000.000,00	27.750.000,00	92,50	35.970.000,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
116	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	825.076.738,00	633.908.601,00	76,83	851.810.163,00
117	Belanja Pemeliharaan Mesin Fogging	2.000.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
118	Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman	132.830.000,00	125.755.000,00	94,67	110.900.000,00
119	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	23.410.880,00
120	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	95.450.000,00	94.320.000,00	98,82	9.900.000,00
121	Belanja Jasa Konsultansi	783.835.000,00	530.249.000,00	67,65	3.218.588.905,00
122	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	342.140.000,00	185.526.000,00	54,23	35.000.000,00
123	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	284.195.000,00	242.323.000,00	85,27	2.431.417.180,00
124	Belanja Jasa Konsultasi Keuangan	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	78.750.000,00
125	Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	50.000.000,00	0,00	0,00	98.804.000,00
126	Belanja Jasa Konsultasi Sistem Informasi	57.500.000,00	52.450.000,00	91,22	574.617.725,00
127	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	66.750.000,00
128	Belanja Pendidikan / Beasiswa/ Pelatihan PNS	0,00	0,00	0,00	66.750.000,00
129	Belanja Kursus-kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.390.637.110,00	2.835.321.107,00	83,62	23.798.311.911,00
130	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	1.922.715.710,00	1.712.856.707,00	89,09	9.977.722.057,00
131	Belanja Sosialisasi	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	10.469.315.832,00
132	Belanja Bimbingan Teknis	1.455.521.400,00	1.110.064.400,00	76,27	3.351.274.022,00
133	Belanja Honorarium Non Pegawai	12.800.000,00	11.900.000,00	92,97	10.100.000,00
134	Moderator	12.800.000,00	11.900.000,00	92,97	10.100.000,00
135	Honorarium PNS	11.847.255.000,00	11.123.667.000,00	93,89	11.341.073.000,00
136	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.370.800.000,00	4.243.380.000,00	97,08	3.871.765.000,00
137	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	166.125.000,00	159.075.000,00	95,76	143.750.000,00
138	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	81.975.000,00	66.050.000,00	80,57	72.425.000,00
139	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	939.850.000,00	873.700.000,00	92,96	1.019.000.000,00
140	Honorarium PPK dan Pembantu PPK	510.550.000,00	466.850.000,00	91,44	490.820.000,00
141	Honorarium PPTK dan Pembantu PPTK	3.474.435.000,00	3.150.572.000,00	90,68	3.549.020.000,00
142	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	2.303.520.000,00	2.164.040.000,00	93,94	2.192.793.000,00
143	Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
144	Honorarium Non PNS	3.841.244.400,00	3.072.235.725,00	79,98	3.933.683.322,00
145	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.616.869.400,00	1.131.220.725,00	69,96	1.876.633.322,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
146	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	2.041.750.000,00	1.921.140.000,00	94,09	1.970.940.000,00
147	Honorarium MC/ Pembawa Acara	8.575.000,00	5.325.000,00	62,10	9.225.000,00
148	Honorarium Pembaca Doa/ Pembaca Alquran	10.250.000,00	4.550.000,00	44,39	12.025.000,00
149	Honorarium Penceramah Agama/ Konselor	4.700.000,00	1.750.000,00	37,23	20.550.000,00
150	Honorarium Pemimpin Lagu	6.700.000,00	3.150.000,00	47,01	6.375.000,00
151	Honorarium Juri/Penilai/Pembina	152.400.000,00	5.100.000,00	3,35	37.935.000,00
152	Belanja Pendidikan/ Beasiswa/ Pelatihan Non PNS (Umum)	36.566.000,00	35.826.000,00	97,98	63.790.000,00
153	Belanja Buku	36.566.000,00	35.826.000,00	97,98	8.640.000,00
154	Belanja Bulanan	0,00	0,00	0,00	55.150.000,00
155	Belanja Pegawai ,Barang dan Jasa BLUD	38.000.077.817,00	32.449.843.164,37	85,39	32.944.830.897,00
156	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	22.953.374.255,00	20.014.903.776,00	87,20	21.812.322.913,00
157	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	15.046.703.562,00	12.434.939.388,37	82,64	11.132.507.984,00
158	Belanja Rawatan Pasien Rumah Sakit	250.000.000,00	183.829.648,00	73,53	249.534.336,00
159	Belanja Rawatan Pasien Rumah Sakit	250.000.000,00	183.829.648,00	73,53	249.534.336,00
160	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.533.191.705,00	36.848.179.597,00	106,70	33.433.642.695,00
161	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.533.191.705,00	36.848.179.597,00	106,70	33.433.642.695,00
	Jumlah	245.316.768.308,00	220.429.184.424,37	89,85	270.235.514.066,00

3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp53.106.806.784,00 atau 98,33% dari total anggaran Belanja Hibah sebesar Rp54.006.772.025,00.

Dari Jumlah Hibah Tahun 2020 dan 2019 tersebut terdapat pada:

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Hibah di PPKD	47.055.184.406,00	10.369.060.000,00
2	Hibah di OPD	6.051.622.378,00	23.380.556.407,00
	Total	53.106.806.784,00	33.749.616.407,00

Tabel V.1.27 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	13.794.381.025,00	13.196.926.878,00	95,67	29.623.933.227,00
3	Belanja Hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga	726.150.000,00	726.053.000,00	99,99	672.723.180,00
4	Belanja Hibah Jasa yang	188.125.000,00	183.742.500,00	97,67	0,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
	Diserahkan ke Masyarakat				
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	39.298.116.000,00	39.000.084.406,00	99,24	3.412.960.000,00
	Total	54.006.772.025,00	53.106.806.784,00	98,33	33.749.616.407,00

Rincian Belanja Hibah Per OPD dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Nama OPD	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Hibah Jasa Kepada Masyarakat	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	182.498.000,00	0,00	183.742.500,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	726.053.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	66.010.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	567.517.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perikanan	175.336.300,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	4.150.465.578,00	0,00	0,00	0,00
7	PPKD	8.055.100.000,00	0,00	0,00	39.000.084.406,00
	Jumlah	13.196.926.878,00	726.053.000,00	183.742.500,00	39.000.084.406,00

Belanja Hibah di PPKD yang terdiri dari belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp8.055.100.000,00 dan Belanja Hibah kepada Lembaga/Badan/Organisasi sebesar Rp39.000.084.406,00.

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2020 dan 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	23.844.650.000,00	518.400.000,00
2	KONI	800.000.000,00	1.060.000.000,00
3	BAZNAS	250.000.000,00	250.000.000,00
4	LVRI	35.500.000,00	0,00
5	Pramuka	340.000.000,00	50.000.000,00
6	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	10.000.000.000,00	994.560.000,00
7	Polres Lima Puluh Kota	1.587.405.000,00	0,00
8	Polres Kota Payakumbuh	1.328.461.000,00	0,00
9	KODIM 0306 Lima Puluh Kota KOREM 032 WIRABRAJA	302.100.000,00	0,00
10	PMI	195.341.000,00	0,00
11	GOW	171.210.706,00	0,00
12	DWP	145.416.700,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
13	Yayasan Darul Funun El Abbsiyah	0,00	40.000.000,00
14	LKAM Kabupaten Lima Puluh Kota	0,00	200.000.000,00
15	KNPI	0,00	150.000.000,00
16	PWI	0,00	150.000.000,00
Total		39.000.084.406,00	3.412.960.000,00

Rekap Belanja Hibah di PPKD terdapat pada Lampiran 25 Laporan Keuangan ini.

4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.9.772.819.405,00 atau 95,75% dari total anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.10.206.709.000,00.

Dari Jumlah Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019 tersebut terdapat pada:

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1.	Bantuan Sosial di PPKD	3.691.625.000,00	3.881.037.500,00
2.	Bantuan Sosial Di OPD	6.081.194.405,00	11.599.938.329,00
Total		9.772.819.405,00	15.480.975.829,00

Tabel V.1.28 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Bansos kepada Individu dan/keluarga yang direncanakan	3.765.815.000,00	3.500.000.000,00	92,94	3.590.950.000,00
2	Belanja Bansos kepada Individu dan/keluarga yang tidak direncanakan	265.815.000,00	191.625.000,00	72,09	290.087.500,00
3	Belanja Bansos Barang yang diserahkan ke Masyarakat	6.175.079.000,00	6.081.194.405,00	98,48	11.599.938.329,00
Total		10.206.709.000,00	9.772.819.405,00	95,75	15.480.975.829,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial Per OPD dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Nama OPD	Belanja Bansos kepada Individu dan/keluarga yang direncanakan	Belanja Bansos kepada Individu dan/keluarga yang tidak direncanakan	Belanja Bansos Barang yang diserahkan ke Masyarakat
1	Dinas Sosial	0,00	0,00	2.146.517.355,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	3.934.677.050,00
3	PPKD	3.500.000.000,00	191.625.000,00	0,00
Jumlah		3.500.000.000,00	191.625.000,00	6.081.194.405,00

B. Belanja Modal	Tahun 2020 (Rp) 152.712.089.645,00	Tahun 2019 (Rp) 252.910.521.752,00
-------------------------	---	---

Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp152.712.089.645,00 atau 85,96% dari total anggaran Belanja Modal sebesar Rp177.649.954.558,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.29 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	1.014.725.000,00	913.869.539,00	90,06	261.246.598,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.008.077.819,00	37.329.485.325,00	98,21	34.310.434.344,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.986.567.249,00	38.200.979.558,00	88,87	32.110.044.597,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.635.367.996,00	61.514.075.572,00	92,31	171.401.890.737,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.005.216.494,00	14.753.679.651,00	50,87	14.826.905.476,00
Total		177.649.954.558,00	152.712.089.645,00	85,96	252.910.521.752,00

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp913.869.539,00 atau 90,06% dari total anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.014.725.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan	1.014.725.000,00	913.869.539,00	90,06	261.246.598,00
Total		1.014.725.000,00	913.869.539,00	90,06	261.246.598,00

Realisasi Belanja Modal Tanah-Pengadaan Kolam Ikan sebesar Rp913.869.539,00 terdapat pada Dinas Perikanan berupa Pembangunan/Rehabilitasi Kolam Air Tawar Balai Benih Induk (BBI) Aia Putih.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.329.485.325,00 atau 98,21% dari total anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.008.077.819,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.31 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat besar Darat	0,00	0,00	0,00	933.255.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat bantu	11.140.000,00	10.577.176,00	94,95	77.628.210,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.432.725.000,00	5.073.515.489,00	93,39	2.588.609.800,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	86.487.006,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	36.810.000,00	23.642.500,00	64,23	6.250.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	554.745.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	5.050.175.000,00	2.550.000,00	0,05	1.715.905.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	26.950.000,00	26.853.600,00	99,64	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	1.242.150.000,00	1.216.021.440,00	97,90	934.115.900,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	812.869.500,00	784.251.400,00	96,48	1.873.259.685,00
12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.059.617.532,00	2.968.000.801,00	97,01	3.942.748.608,00
13	Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	561.742.000,00	531.835.000,00	94,68	1.657.846.713,00
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	657.617.000,00	624.045.274,00	94,89	706.097.972,00
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	213.390.250,00	211.451.350,00	99,09	476.545.325,00
16	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	2.414.304.295,00	2.304.669.035,00	95,46	1.442.985.545,00
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	5.296.570.000,00	4.660.503.521,00	87,99	8.395.157.674,00
19	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.731.603.742,00	1.356.619.230,00	78,34	687.005.000,00
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	6.416.283.500,00	5.329.159.344,00	83,06	1.689.972.150,00
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	87.050.000,00	86.950.000,00	99,89	314.330.727,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.957.080.000,00	12.118.840.165,00	244,48	6.227.489.029,00
Jumlah		38.008.077.819,00	37.329.485.325,00	98,21	34.310.434.344,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp38.200.979.558,00 atau 88,87% dari total anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.986.567.249,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.160.343.749,00	37.923.537.808,00	94,43	30.305.308.327,00
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	119.233.500,00	38.095.750,00	31,95	959.194.811,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	99.036.459,00
4	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	547.775.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu lalu lintas udara	0,00	0,00	0,00	198.730.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembangunan Gerbang/ Gapura	228.450.000,00	225.846.000,00	98,86	0,00
7	Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BOS	2.478.540.000,00	13.500.000,00	0,54	0,00
Total		42.986.567.249,00	38.200.979.558,00	88,87	32.110.044.597,00

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp61.514.075.572,00 atau 92,31% dari total anggaran Belanja Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp66.635.367.996,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	14.877.315.246,00	13.544.180.741,00	91,04	100.674.284.966,00
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	898.163.750,00	664.286.107,00	73,96	14.389.345.458,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	30.374.470.000,00	27.689.609.913,00	91,16	32.112.395.592,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	966.375.000,00	966.374.245,00	100,00	202.320.550,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber air dan air tanah	1.595.575.000,00	1.588.490.500,00	99,56	1.657.069.702,00
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	7.330.947.000,00	6.813.792.000,00	92,95	5.208.488.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air kotor	9.986.942.000,00	9.650.792.066,00	96,63	11.183.017.112,00
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0,00	0,00	0,00	63.334.757,00
9	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0	0	0,00	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	605.580.000,00	596.550.000,00	98,51	5.909.434.600,00

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
11	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Total		66.635.367.996,00	61.514.075.572,00	92,31	171.401.890.737,00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.753.679.651,00 atau 50,87% dari total anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp29.005.216.494,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.34 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Buku	1.794.621.352,00	1.778.578.306,00	99,11	733.736.533,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal barang bercorak kebudayaan	0,00	0,00	0,00	28.978.023,00
4	Belanja Modal Pengadaan Hewan	50.150.000,00	49.950.000,00	99,60	141.349.900,00
5	Belanja Modal BLUD	7.345.835.142,00	5.708.769.374,00	77,71	4.864.931.447,00
6	Belanja Modal Jasa Konstruksi	2.137.650.000,00	1.890.234.177,00	88,43	1.555.677.439,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Kebersihan	759.200.000,00	756.535.000,00	99,65	315.815.000,00
8	Belanja Modal Pekarangan/Taman	0,00	0,00	0,00	150.341.620,00
9	Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS	16.914.160.000,00	4.566.012.794,00	27,00	7.036.075.514,00
Total		29.005.216.494,00	14.753.679.651,00	50,87	14.826.905.476,00

C. Belanja Tak Terduga	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	36.111.744.605,00	659.859.470,00

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp36.111.744.605,00 atau 90,24% dari total anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp40.017.877.625,00 terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp35.451.885.135,00. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2020 terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja Penanganan Covid-19	36.109.477.583,00
2.	Pembayaran Utang PFK BUD Tahun 2019	2.267.022,00
	JUMLAH	36.111.744.605,00

Adapun rincian Belanja Tak terduga (BTT) dalam Penanganan Covid-19 sebagai berikut:

kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA	39.264.129.900,00	36.109.477.583,00	3.154.652.317,00	91,97
5.1.	BELANJA OPERASI	35.727.324.160,00	32.827.313.066,00	2.900.011.094,00	91,88
5.1.1.	Belanja Pegawai	8.066.242.732,00	6.509.035.000,00	1.557.207.732,00	80,69
5.1.1.07.	Insentif tenaga kesehatan	1.448.490.000,00	462.975.000,00	985.515.000,00	31,96
5.1.1.07.01.	Insenti tenaga kesehatan	1.448.490.000,00	462.975.000,00	985.515.000,00	31,96
5.1.1.09.	Uang Lelah/uang operasional	6.617.752.732,00	6.046.060.000,00	571.692.732,00	91,36
5.1.1.09.01.	Uang Lelah/uang operasional	6.617.752.732,00	6.046.060.000,00	571.692.732,00	91,36
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.830.281.428,00	8.692.678.066,00	1.137.603.362,00	88,43
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.377.892.723,00	6.729.153.847,00	648.738.876,00	91,21
5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	101.227.000,00	97.032.850,00	4.194.150,00	95,86
5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.645.000,00	15.583.000,00	62.000,00	99,60
5.1.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	7.215.000,00	6.313.000,00	902.000,00	87,50
5.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	146.256.000,00	126.007.700,00	20.248.300,00	86,16
5.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.370.856.011,00	1.119.642.534,00	251.213.477,00	81,67
5.1.2.01.09.	Belanja peralatan/perengkapan kantor pakai habis	29.875.000,00	22.608.050,00	7.266.950,00	75,68
5.1.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	26.803.000,00	26.094.316,00	708.684,00	97,36
5.1.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara	141.896.500,00	129.126.500,00	12.770.000,00	91,00
5.1.2.01.15.	Belanja Penguburan dan pemulangan klien	41.300.000,00	41.300.000,00	-	100,00
5.1.2.01.16.	Belanja peralatan Dokter habis pakai	5.105.054.394,00	4.624.922.979,00	480.131.415,00	90,59
5.1.2.01.17.	Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis	356.944.818,00	494.456.618,00	(137.511.800,00)	138,52
5.1.2.01.19.	Belanja Kelengkapan Kerja Lapangan	34.820.000,00	26.066.300,00	8.753.700,00	74,86
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	109.372.000,00	137.233.505,00	(27.861.505,00)	125,47
5.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	23.839.000,00	16.659.005,00	7.179.995,00	69,88
5.1.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	70.383.000,00	105.574.500,00	(35.191.500,00)	150,00
5.1.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (Film, VCD/ DVD, Cuci Cetak, frame)	15.150.000,00	15.000.000,00	150.000,00	99,01
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	318.557.605,00	144.328.000,00	174.229.605,00	45,31
5.1.2.03.03.	Belanja listrik	10.100.000,00	100.000,00	10.000.000,00	0,99

kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
5.1.2.03.14.	Belanja Jasa Pengganti Transportasi	62.640.000,00	62.640.000,00	-	100,00
5.1.2.03.15.	Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi	2.730.000,00	2.730.000,00	-	100,00
5.1.2.03.23.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	199.887.605,00	78.858.000,00	121.029.605,00	39,45
5.1.2.03.25.	Belanja Jasa Piket Malam	43.200.000,00	-	43.200.000,00	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	221.021.600,00	203.182.822,00	17.838.778,00	91,93
5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	43.416.600,00	39.434.000,00	3.982.600,00	90,83
5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.000.000,00	41.396.822,00	603.178,00	98,56
5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	135.605.000,00	122.352.000,00	13.253.000,00	90,23
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.536.500,00	202.067.600,00	19.468.900,00	91,21
5.1.2.06.01.	Belanja cetak	87.190.000,00	70.679.600,00	16.510.400,00	81,06
5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	61.296.500,00	61.038.000,00	258.500,00	99,58
5.1.2.06.03.	Belanja Penjilidan(non cetak cover)	150.000,00	150.000,00	-	100,00
5.1.2.06.04.	Belanja Publikasi	72.900.000,00	70.200.000,00	2.700.000,00	96,30
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	500.000,00	500.000,00	-	100,00
5.1.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	500.000,00	500.000,00	-	100,00
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.850.000,00	8.950.000,00	21.900.000,00	29,01
5.1.2.10.05.	Belanja sewa tenda	29.350.000,00	8.950.000,00	20.400.000,00	30,49
5.1.2.10.09.	Belanja Sewa Peralatan Khusus	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.441.291.000,00	1.191.952.292,00	249.338.708,00	82,70
5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.356.776.000,00	1.157.099.792,00	199.676.208,00	85,28
5.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	38.755.000,00	22.092.500,00	16.662.500,00	57,01
5.1.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.760.000,00	12.760.000,00	-	100,00
5.1.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman pasien	33.000.000,00	-	33.000.000,00	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.660.000,00	42.000.000,00	7.660.000,00	84,58
5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.500.000,00	39.500.000,00	3.000.000,00	92,94
5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.160.000,00	2.500.000,00	4.660.000,00	34,92
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	12.800.000,00	12.660.000,00	140.000,00	98,91
5.1.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.800.000,00	12.660.000,00	140.000,00	98,91
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	20.650.000,00	26.150.000,00	44,12
5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	46.800.000,00	20.650.000,00	26.150.000,00	44,12

kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	17.830.800.000,00	17.625.600.000,00	205.200.000,00	98,85
5.1.6.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	17.830.800.000,00	17.625.600.000,00	205.200.000,00	98,85
5.1.6.02.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu / Keluarga	17.830.800.000,00	17.625.600.000,00	205.200.000,00	98,85
5.2.	BELANJA MODAL	3.536.805.740,00	3.282.164.517,00	254.641.223,00	92,80
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.423.082.740,00	3.168.441.517,00	254.641.223,00	92,56
5.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.655.000.000,00	1.655.000.000,00	-	100,00
5.2.2.04.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.655.000.000,00	1.655.000.000,00	-	100,00
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	245.609.945,00	194.709.945,00	50.900.000,00	79,28
5.2.2.14.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	243.709.945,00	192.809.945,00	50.900.000,00	79,11
5.2.2.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Tangki (Tempat Penampungan)	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	475.476.000,00	316.253.000,00	159.223.000,00	66,51
5.2.2.15.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	81.200.000,00	29.982.000,00	51.218.000,00	36,92
5.2.2.15.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	140.476.000,00	140.476.000,00	-	100,00
5.2.2.15.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00
5.2.2.15.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	205.800.000,00	97.795.000,00	108.005.000,00	47,52
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	257.420.000,00	235.922.977,00	21.497.023,00	91,65
5.2.2.16.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.925.000,00	14.925.000,00	-	100,00
5.2.2.16.05.	Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
5.2.2.16.06.	Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop	170.696.000,00	159.031.000,00	11.665.000,00	93,17
5.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer/ Ploter	46.899.000,00	42.150.977,00	4.748.023,00	89,88
5.2.2.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (mouse, keyboard, Hardisk, speaker)	19.900.000,00	19.816.000,00	84.000,00	99,58

kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
5.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.000.000,00	13.978.800,00	13.021.200,00	51,77
5.2.2.17.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.000.000,00	11.880.000,00	8.120.000,00	59,40
5.2.2.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.000.000,00	2.098.800,00	4.901.200,00	29,98
5.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	166.877.500,00	157.817.500,00	9.060.000,00	94,57
5.2.2.18.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.047.500,00	30.047.500,00	-	100,00
5.2.2.18.07.	Belanja modal Pengadaan Proyektor	24.850.000,00	24.850.000,00	-	100,00
5.2.2.18.08.	Belanja Modal Pengadaan Kamera/Handicam	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
5.2.2.18.09.	Pengadaan Peralatan Audio	56.965.000,00	52.905.000,00	4.060.000,00	92,87
5.2.2.18.10.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00
5.2.2.18.11.	Belanja modal pengadaan Televisi/ Parabola	42.015.000,00	42.015.000,00	-	100,00
5.2.2.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	13.881.000,00	13.881.000,00	-	100,00
5.2.2.19.08.	Belanja modal Pengadaan Billboard/ Baliho/ Whiteboard	9.460.000,00	9.460.000,00	-	100,00
	Belanja Modal Pengadaan Handphone	4.421.000,00	4.421.000,00	-	100,00
5.2.2.21.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	212.563.800,00	211.623.800,00	940.000,00	99,56
5.2.2.21.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	212.563.800,00	211.623.800,00	940.000,00	99,56
5.2.2.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	369.254.495,00	369.254.495,00	-	100,00
5.2.2.22.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	369.254.495,00	369.254.495,00	-	100,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.723.000,00	113.723.000,00	-	100,00
5.2.3.01	BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	113.723.000,00	113.723.000,00	-	100,00
5.2.3.01.01	BM Pengadaan Bangunan Gedung kantor	113.723.000,00	113.723.000,00	-	100,00
	JUMLAH BELANJA	39.264.129.900,00	36.109.477.583,00	3.154.652.317,00	91,97

Rincian realisasi penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) per OPD untuk penanganan Covid-19 sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	ANGGARAN	REALISASI BELANJA TAK TERDUGA				TOTAL BELANJA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA MODAL	
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.726.835.000,00	2.784.270.000,00	1.556.417.322,00	-	137.700.000,00	4.478.387.322,00
2	Dinas Kesehatan	6.422.870.000,00	614.735.000,00	3.791.433.632,00	-	1.511.824.800,00	5.917.993.432,00
3	RSUD dr. Achmad Darwis	5.055.982.000,00	462.975.000,00	1.812.866.307,00	-	1.324.694.440,00	3.600.535.747,00
4	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1.209.445.000,00	694.400.000,00	378.850.950,00	-	73.953.050,00	1.147.204.000,00
5	Dinas Sosial	118.107.300,00	75.800.000,00	11.107.300,00	-	-	86.907.300,00
6	Dinas Pangan	309.538.000,00	6.900.000,00	5.054.650,00	-	6.465.000,00	18.419.650,00
7	Dinas Perhubungan	1.759.278.500,00	1.119.300.000,00	472.076.500,00	-	-	1.591.376.500,00
8	Dinas Kominfo	360.400.000,00	56.155.000,00	149.280.000,00	-	144.087.500,00	349.522.500,00
9	Sekretariat Daerah	145.924.900,00	129.300.000,00	11.567.000,00	-	4.923.727,00	145.790.727,00
10	Kecamatan Gunuang Omeh	767.798.000,00	43.900.000,00	43.805.000,00	667.800.000,00	6.900.000,00	762.405.000,00
11	Kecamatan Bukit Barisan	1.630.000.000,00	30.200.000,00	55.905.000,00	1.528.200.000,00	9.560.000,00	1.623.865.000,00
12	Kecamatan Suliki	565.479.000,00	17.100.000,00	17.150.000,00	455.400.000,00	4.500.000,00	494.150.000,00
13	Kecamatan Guguk	1.557.890.000,00	33.400.000,00	33.625.000,00	1.458.000.000,00	3.196.000,00	1.528.221.000,00
14	Kecamatan Mungka	1.514.800.000,00	48.600.000,00	44.200.000,00	1.396.800.000,00	7.200.000,00	1.496.800.000,00
15	Kecamatan Akabiluru	1.522.885.000,00	52.500.000,00	40.535.000,00	1.423.800.000,00	6.050.000,00	1.522.885.000,00
16	Kecamatan Payakumbuh	1.570.579.500,00	52.900.000,00	44.078.400,00	1.470.600.000,00	3.000.000,00	1.570.578.400,00
17	Kecamatan Luak	1.300.600.000,00	56.500.000,00	33.720.000,00	1.186.200.000,00	8.380.000,00	1.284.800.000,00
18	Kecamatan Lareh Sago Halaban	2.211.122.200,00	58.100.000,00	52.210.005,00	2.064.600.000,00	5.150.000,00	2.180.060.005,00
19	Kecamatan Situjuh	1.030.600.000,00	50.800.000,00	41.821.000,00	925.200.000,00	5.050.000,00	1.022.871.000,00
20	Kecamatan Harau	2.553.400.000,00	19.300.000,00	13.791.000,00	2.358.000.000,00	6.850.000,00	2.397.941.000,00
21	Kecamatan Pangkalan	1.280.795.500,00	55.400.000,00	36.799.000,00	1.141.200.000,00	5.565.000,00	1.238.964.000,00
22	Kecamatan Kapur IX	1.649.800.000,00	46.500.000,00	46.385.000,00	1.549.800.000,00	7.115.000,00	1.649.800.000,00
	TOTAL	39.264.129.900,00	6.509.035.000,00	8.692.678.066,00	17.625.600.000,00	3.282.164.517,00	36.109.477.583,00

Dari seluruh penerbitan SP2D Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Covid-19 selama tahun 2020 sebesar Rp38.619.346.200,00 telah terealisasi sebesar Rp36.109.477.583,00 sehingga terdapat pengembalian belanja (CP) sebesar Rp2.509.868.617,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	NO SP2D	TANGGAL	JUMLAH	JUMLAH TOTAL PER OPD	PENGEMBALIAN BELANJA (CP)	BELANJA KASDA
1.	Dinas Kesehatan	203/TU/2020	30 April 2020	5.422.870.000,00	6.422.870.000,00	504.876.568,00	5.917.993.432,00
		1453/TU/2020	19 November 2020	1.000.000.000,00			
2	RSUD	211/TU/2020	5 Mei 2020	4.555.982.000,00	4.555.982.000,00	955.446.253,00	3.600.535.747,00

NO	NAMA OPD	NO SP2D	TANGGAL	JUMLAH	JUMLAH TOTAL PER OPD	PENGEMBALIAN BELANJA (CP)	BELANJA KASDA
3	BPBD	2142TU/2020	3 April 2020	1.200.000.000,00			
		210/TU/2020	5 Mei 2020	3.026.835.000,00			
		1650/TU/2020	1 Desember 2020	500.000.000,00	4.726.835.000,00	248.447.678,00	4.478.387.322,00
4	Dinas Sosial	291/TU/2020	29 Mei 2020	118.107.300,00	118.107.300,00	31.200.000,00	86.907.300,00
5	Dinas Pangan	1698/TU/2020	3 Desember 2020	164.754.300,00	164.754.300,00	146.334.650,00	18.419.650,00
6	Dinas Kominfo	226/LS/2020	18 Mei 2020	260.400.000,00			
		2028/TU/2020	22 Desember 2020	100.000.000,00	360.400.000,00	10.877.500,00	349.522.500,00
7	Dinas Perhubungan	350/TU/2020	30 Juni 2020	1.759.278.500,00	1.759.278.500,00	167.902.000,00	1.591.376.500,00
8	Satpol PP	1404/TU/2020	16 November 2020	810.480.000,00			
		2062/TU/2020	23 Desember 2020	398.965.000,00	1.209.445.000,00	62.241.000,00	1.147.204.000,00
9	Setda Bag.Perekonomian	314/LS/2020	11 Juni 2020	52.324.900,00	145.924.900,00	134.173,00	145.790.727,00
		498/TU/2020	7 Agustus 2020	93.600.000,00			
10	Kec. Payakumbuh	287/TU/2020	29 Mei 2020	99.979.500,00			
		388/TU/2020	9 Juli 2020	63.000.000,00			
		445/TU/2020	24 Juli 2020	1.407.600.000,00	1.570.579.500,00	1.100,00	1.570.578.400,00
11	Kec. Guguk	286/TU/2020	29 Mei 2020	99.890.000,00			
		364/TU/2020	3 Juli 2020	180.000.000,00			
		442/TU/2020	24 Juli 2020	1.236.600.000,00			
		456/TU/2020	28 Juli 2020	41.400.000,00	1.557.890.000,00	29.669.000,00	1.528.221.000,00
12	Kec. Mungka	273/TU/2020	26 Mei 2020	100.000.000,00			
		358/TU/2020	1 Juli 2020	81.000.000,00			
		443/TU/2020	24 Juli 2020	790.200.000,00			
		463/TU/2020	29 Juli 2020	306.000.000,00			
		891/TU/2020	15 September 2020	237.600.000,00	1.514.800.000,00	18.000.000,00	1.496.800.000,00
13	Kec. Suliki	289/TU/2020	29 Mei 2020	99.279.000,00			
		357/TU/2020	1 Juli 2020	77.400.000,00			
		459/TU/2020	29 Juli 2020	333.000.000,00			
		958/TU/2020	22 September 2020	55.800.000,00	565.479.000,00	71.329.000,00	494.150.000,00
14	Kec. Gn.Omeh	292/TU/2020	29 Mei 2020	99.998.000,00			
		457/TU/2020	28 Juli 2020	504.000.000,00			
		1649/TU/2020	1 Desember 2020	163.800.000,00	767.798.000,00	5.393.000,00	762.405.000,00

NO	NAMA OPD	NO SP2D	TANGGAL	JUMLAH	JUMLAH TOTAL PER OPD	PENGEMBALIAN BELANJA (CP)	BELANJA KASDA
15	Kec. Bukit Barisan	280/TU/2020	28 Mei 2020	100.000.000,00			
		452/TU/2020	28 Juli 2020	1.150.200.000,00			
		1023/LS/2020	1 Oktober 2020	379.800.000,00	1.630.000.000,00	6.135.000,00	1.623.865.000,00
16	Kec. Akabiluru	250/TU/2020	20 Mei 2020	99.085.000,00			
		376/TU/2020	7 Juli 2020	48.600.000,00			
		458/TU/2020	29 Juli 2020	1.299.600.000,00			
		955/TU/2020	22 September 2020	75.600.000,00	1.522.885.000,00		1.522.885.000,00
17	Kec. Situjuh	281/TU/2020	28 Mei 2020	100.000.000,00			
		440/TU/2020	24 Juli 2020	896.400.000,00			
		959/TU/2020	22 September 2020	34.200.000,00	1.030.600.000,00	7.729.000,00	1.022.871.000,00
18	Kec. Luak	285/TU/2020	29 Mei 2020	100.000.000,00			
		397/TU/2020	14 Juli 2020	59.400.000,00			
		441/TU/2020	24 Juli 2020	973.800.000,00			
		997/TU/2020	22 September 2020	167.400.000,00	1.300.600.000,00	15.800.000,00	1.284.800.000,00
19	Kec. Lareh SH	288/TU/2020	29 Mei 2020	99.083.200,00			
		395/TU/2020	14 Juli 2020	178.200.000,00			
		444/TU/2020	24 Juli 2020	1.458.000.000,00			
		453/LS/2020	28 Juli 2020	27.639.000,00			
		954/TU/2020	22 September 2020	448.200.000,00	2.211.122.200,00	31.062.195,00	2.180.060.005,00
20	Kec. Harau	251/TU/2020	20 Mei 2020	237.600.000,00			
		290/TU/2020	29 Mei 2020	100.000.000,00			
		439/TU/2020	24 Juli 2020	1.528.200.000,00			
		960/TU/2020	22 September 2020	687.600.000,00	2.553.400.000,00	155.459.000,00	2.397.941.000,00
21	Kec. Pangkalan	284/TU/2020	20 Mei 2020	99.995.500,00			
		396/TU/2020	14 Juli 2020	113.400.000,00			
		454/TU/2020	28 Juli 2020	810.000.000,00			
		1024/LS/2020	1 Oktober 2020	257.400.000,00	1.280.795.500,00	41.831.500,00	1.238.964.000,00
22	Kec. Kapur IX	282/TU/2020	28 Mei 2020	100.000.000,00			
		448/LS/2020	27 Juli 2020	1.117.800.000,00			
		895/LS/2020	16 September 2020	432.000.000,00	1.649.800.000,00		1.649.800.000,00
TOTAL BTT COVID				38.619.346.200,00	38.619.346.200,00	2.509.868.617,00	36.109.477.583,00

Pembayaran utang PFK BUD Tahun 2019 sebesar Rp2.267.022,00 merupakan jasa giro sekolah swasta yang masuk ke Kas Daerah sehingga diperlakukan sebagai utang di tahun 2019. Utang Jasa Giro tersebut telah dilunasi menggunakan dana BTT dengan SP2D nomor : 1725/LS/2020 tanggal 7 Desember 2020.

5.1.3. Transfer	ahun 2020 (Rp) 153.293.933.843,00	Tahun 2019 (Rp) 158.196.910.009,00
------------------------	--	---

Realisasi transfer Tahun 2020 sebesar Rp153.293.933.843,00 atau 99,15% dari anggaran transfer sebesar Rp154.613.307.034,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp158.196.910.009,00 terdapat penurunan belanja sebesar Rp4.902.976.166,00.

Tabel V.1.35 Rincian Anggaran Dan Realisasi Transfer

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3.530.620.013,00	2.715.537.370,00	76,91	2.560.879.926,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	151.082.687.021,00	150.578.396.473,00	99,67	155.636.030.083,00
Total		154.613.307.034,00	153.293.933.843,00	99,15	158.196.910.009,00

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2020 sebesar Rp2.715.537.370,00 atau 76,91% dari anggaran belanja sebesar Rp3.530.620.013,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.36 Rincian Anggaran Dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah pada Pemerintahan Desa	3.034.680.802,00	2.363.287.249,00	77,88	2.126.651.808,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah pada Pemerintahan Desa	495.939.211,00	352.250.121,00	71,03	0,00
3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	434.228.118,00
Total		3.530.620.013,00	2.715.537.370,00	76,91	2.560.879.926,00

2. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2020 sebesar Rp150.578.396.473,00 atau 99,67% dari anggaran Transfer Bantuan Keuangan Rp151.082.687.021,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.37 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	150.183.855.700,00	149.803.583.386,00	99,75	154.771.387.194,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	898.831.321,00	774.813.087,00	86,20	864.642.889,00
Total		151.082.687.021,00	150.578.396.473,00	99,67	155.636.030.083,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020 sebesar Rp149.803.583.386,00 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari (Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBN)	77.575.698.000,00	77.575.698.000,00	100,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	72.608.157.700,00	72.227.885.386,00	99,48
Total		150.183.855.700,00	149.803.583.386,00	99,75

Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing nagari dapat dilihat pada **Lampiran 24**. Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp774.813.087,00 berupa Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.1.38 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Partai Politik

No	Partai Politik	Anggaran 2019 Rp	Realisasi 2019 Rp
1	Partai Kebangkitan Bangsa	61.149.471,00	61.149.471,00
2	Partai Keadilan Sejahtera	112.986.113,00	112.986.113,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	53.192.972,00	0,00
4	Partai Golongan Karya	99.059.851,00	99.059.851,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	155.595.890,00	155.595.890,00
6	Partai Demokrat	113.181.921,00	113.181.921,00
7	Partai Amanat Nasional	90.310.567,00	90.310.567,00
8	Partai Persatuan Pembangunan	70.825.262,00	0,00
9	Partai Hanura	83.309.230,00	83.309.230,00
10	Partai Nasional Demokrat	59.220.044,00	59.220.044,00
Jumlah		898.831.321,00	774.813.087,00

5.1.4. Surplus / (Defisit)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	(7.646.192.794,76)	(25.630.840.128,75)

Sampai dengan 31 Desember 2020, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami Defisit sebesar Rp(7.646.192.794,76).

5.1.5. Penerimaan Pembiayaan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	38.843.992.097,42	80.874.732.226,17

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp38.843.992.097,42 atau 97,39% dari anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp39.884.892.097,00. Terdapat selisih sebesar Rp1.040.900.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Silpa Tahun 2019. Selisih ini merupakan nilai lebih salur Dana BOS tahun yang tersebar pada 281 (dua ratus delapan puluh satu) sekolah tingkat SD dan 30 (tiga puluh) sekolah tingkat SMP.

5.1.6. Pengeluaran Pembiayaan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	2.350.000.000,00	15.359.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 merupakan Penyertaan modal ke PDAM sebesar Rp2.350.000.000,00.

5.1.7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	28.847.799.302,66	39.884.892.097,42

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2020 sebesar Rp28.847.799.302,66. Dibandingkan Tahun 2019 terjadi Penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp11.037.092.794,76. Rincian SILPA dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
-Kas di Kas Daerah	15.145.768.088,53	24.484.049.093,92
-Kas di Bendahara Pengeluaran	100.093.586,00	156.556.542,00
-Utang PFK tahun berjalan	(30.073.511,00)	(28.901.104,00)
-Utang PFK tahun 2018	(1.805.099,00)	(1.805.099,00)
-Silpa di BLUD RSUD	4.065.373.463,50	2.718.567.255,50
-Silpa di BLUD Puskesmas	5.033.046.604,63	3.244.253.704,00
-Silpa Dana BOS	4.522.566.649,00	9.312.171.705,00
- lebih setor pajak	12.829.521,00	0,00
Jumlah	28.847.799.302,66	39.884.892.097,42

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Adapun rincian perhitungan perubahan SAL Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	39.884.892.097,42	80.874.732.226,17

Nilai SAL awal sebesar Rp39.884.892.097,42 merupakan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2019. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit Tahun 2020.

Saldo Anggaran Lebih Awal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

-Kas	24.484.049.093,92	73.391.225.484,00
-Kas di Bendahara Pengeluaran	156.556.542,00	255.741.807,00
-Kas di Bendahara Penerimaan		2.996.500,00
-Utang PFK tahun 2018	(1.805.099,00)	0,00
-Utang PFK tahun berjalan	(28.901.104,00)	(7.947.099,00)
-Kas di BLUD RSUD	2.718.567.255,50	1.851.299.082,17
-Kas di BLUD Puskesmas	3.244.253.704,00	2.663.743.799,00
-Kas Dana BOS	9.312.171.705,00	2.717.672.653,00
Jumlah	39.884.892.097,42	80.874.732.226,17

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	38.843.992.097,42	80.874.732.226,17

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2020 adalah seluruh SAL akhir Tahun 2019. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp38.843.992.097,42.

5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA/SILPA)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	28.847.799.302,66	39.884.892.097,42

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SILPA pada akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp28.847.799.302,66.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	(1.040.900.000,00)	0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan selisih antara SILPA LRA dan SILPA Neraca Tahun Anggaran 2020. Nilai koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp1.040.900.000,00, berupa nilai lebih salur dana BOS Tahun Anggaran 2019 yang tersebar pada 281 (dua ratus delapan puluh satu) sekolah tingkat SD dan 30 (tiga puluh) sekolah tingkat SMP dengan rincian sebagai berikut:

No.	UPTD	Pengembalian Lebih Salur
1	UPTD SD NEGERI 01 DURIAN GADANG ex 02 BATU HAMPA	960.000,00
2	UPTD SD NEGERI 01 KOTO TANGAH BATU HAMPAR	4.800.000,00
3	UPTD SD NEGERI 01 PAUAH SANGIK	2.880.000,00
4	UPTD SD NEGERI 01 SARIAK LAWEH	960.000,00
5	UPTD SD NEGERI 01 SUAYAN	1.280.000,00
6	UPTD SD NEGERI 01 SUNGAI BALANTIAK	4.480.000,00
7	UPTD SD NEGERI 02 DURIAN GADANG ex 06 BATU HAMPA	3.840.000,00
8	UPTD SD NEGERI 02 KOTO TANGAH BATU HAMPA	10.880.000,00
9	UPTD SD NEGERI 02 SARIAK LAWEH	1.280.000,00
10	UPTD SD NEGERI 02 SUAYAN	960.000,00
11	UPTD SD NEGERI 03 BATU HAMPA (EX 05 BATU HAMPA)	1.280.000,00
12	UPTD SD NEGERI 03 KOTO TANGAH BATU HAMPA	2.560.000,00
13	UPTD SD NEGERI 03 SUAYAN	4.480.000,00
14	UPTD SD NEGERI 02 BATU HAMPAR EX 04 BATUHAMPAR	4.480.000,00
15	UPTD SD NEGERI 04 KOTO TANGAH BATU HAMPA	3.840.000,00
16	UPTD SD NEGERI 04 SARIAK LAWEH	2.240.000,00
17	UPTD SD NEGERI 05 KOTO TANGAH BATUHAMPAR	640.000,00
18	UPTD SD NEGERI 05 SARIAK LAWEH	3.520.000,00
19	UPTD SD NEGERI 05 SUAYAN	1.280.000,00
20	UPTD SD NEGERI 06 KOTO TANGAH BATU HAMPA	1.920.000,00
21	UPTD SD NEGERI 06 SARIAK LAWEH	2.880.000,00
22	UPTD SD NEGERI 07 SARIAK LAWEH	2.240.000,00
23	UPTD SD NEGERI 01 BANJA LOWEH	3.200.000,00
24	UPTD SD NEGERI 01 BARUAH GUNUANG	1.600.000,00
25	UPTD SD NEGERI 01 MAEK	1.600.000,00
26	UPTD SD NEGERI 01 SUNGAI NANIANG	1.920.000,00
27	UPTD SD NEGERI 02 BANJA LOWEH	3.840.000,00

No.	UPTD	Pengembalian Lebih Salur
28	UPTD SD NEGERI 02 BARUAH GUNUANG	320.000,00
29	UPTD SD NEGERI 02 KOTO TANGAH	960.000,00
30	UPTD SD NEGERI 02 MAEK	320.000,00
31	UPTD SD NEGERI 02 SUNGAI NANIANG	2.240.000,00
32	UPTD SD NEGERI 03 BANJA LOWEH	4.160.000,00
33	UPTD SD NEGERI 03 BARUAH GUNUANG ex 04 baruah gunuang	320.000,00
34	UPTD SD NEGERI 03 KOTO TANGAH	1.280.000,00
35	UPTD SD NEGERI 03 MAEK	4.480.000,00
36	UPTD SD NEGERI 03 SUNGAI NANIANG	1.600.000,00
37	UPTD SD NEGERI 04 BARUAH GUNUANG ex 05 baruah gunuang	640.000,00
38	UPTD SD NEGERI 04 MAEK	2.560.000,00
39	UPTD SD NEGERI 05 BANJA LOWEH	960.000,00
40	UPTD SD NEGERI 05 BARUAH GUNUANG ex 06 baruah gunuang	2.560.000,00
41	UPTD SD Negeri 05 Sungai Naniang	3.200.000,00
42	UPTD SD NEGERI 06 BARUAH GUNUANG ex 07 baruah gunuang	4.160.000,00
43	UPTD SD NEGERI 06 MAEK	7.040.000,00
44	UPTD SD NEGERI 07 MAEK ex 08 MAEK	1.280.000,00
45	UPTD SD NEGERI 08 MAEK ex 09 maek	320.000,00
46	UPTD SD NEGERI 09 MAEK ex 10 maek	1.920.000,00
47	UPTD SD NEGERI 10 MAEK ex 11 maek	600.000,00
48	UPTD SD NEGERI 11 MAEK ex 12 maek	2.880.000,00
49	UPTD SD NEGERI 01 GUGUAK VIII KOTO	2.240.000,00
50	UPTD SD NEGERI 01 KUBANG	2.240.000,00
51	UPTD SD NEGERI 01 VII KOTO TALAGO	3.840.000,00
52	UPTD SD NEGERI 02 GUGUAK VIII KOTO	640.000,00
53	UPTD SD NEGERI 02 KUBANG	2.560.000,00
54	UPTD SD NEGERI 02 SIMPANG SUGIRAN	640.000,00
55	UPTD SD NEGERI 02 SUNGAI TALANG	3.200.000,00
56	UPTD SD NEGERI 02 VII KOTO TALAGO	1.600.000,00
57	UPTD SD NEGERI 03 GUGUAK VIII KOTO	7.040.000,00
58	UPTD SD NEGERI 03 KUBANG	2.240.000,00
59	UPTD SD NEGERI 03 SIMPANG SUGIRAN	2.880.000,00
60	UPTD SD NEGERI 03 VII KOTO TALAGO	1.280.000,00
61	UPTD SD NEGERI 04 GUGUAK VIII KOTO	1.600.000,00
62	UPTD SD NEGERI 04 KUBANG	1.920.000,00
63	UPTD SD NEGERI 04 SUNGAI TALANG	960.000,00
64	UPTD SD NEGERI 05 GUGUAK VIII KOTO	1.600.000,00
65	UPTD SD NEGERI 05 KUBANG	4.800.000,00
66	UPTD SD NEGERI 05 SUNGAI TALANG	7.360.000,00
67	UPTD SD NEGERI 05 VII KOTO TALAGO	2.880.000,00

No.	UPTD	Pengembalian Lebih Salur
68	UPTD SD NEGERI 06 KUBANG ex 07 KUBANG	1.600.000,00
69	UPTD SD NEGERI 06 VII KOTO TALAGO	5.760.000,00
70	UPTD SD NEGERI 07 GUGUAK VIII KOTO	2.240.000,00
71	UPTD SD NEGERI 07 KUBANG ex 08 KUBANG	960.000,00
72	UPTD SD NEGERI 08 GUGUAK VIII KOTO	2.240.000,00
73	UPTD SD NEGERI 08 VII KOTO TALAGO	320.000,00
74	UPTD SD NEGERI 09 GUGUAK VIII KOTO	320.000,00
75	UPTD SD NEGERI 09 VII KOTO TALAGO	320.000,00
76	UPTD SD NEGERI 10 VII KOTO TALAGO	2.560.000,00
77	UPTD SD NEGERI 11 GUGUAK VIII KOTO	1.920.000,00
78	UPTD SD NEGERI 12 GUGUAK VIII KOTO	2.560.000,00
79	UPTD SD NEGERI 13 GUGUAK VIII KOTO	1.600.000,00
80	UPTD SD NEGERI 01 KOTO TINGGI	960.000,00
81	UPTD SD NEGERI 01 PANDAM GADANG.	1.920.000,00
82	UPTD SD NEGERI 01 TALANG ANAU	1.920.000,00
83	UPTD SD NEGERI 02 PANDAM GADANG	640.000,00
84	UPTD SD NEGERI 02 TALANG ANAU	3.200.000,00
85	UPTD SD NEGERI 03 PANDAM GADANG	2.880.000,00
86	UPTD SD NEGERI 05 PANDAM GADANG	1.280.000,00
87	UPTD SD NEGERI 06 PANDAM GADANG	960.000,00
88	UPTD SD NEGERI 07 PANDAM GADANG	640.000,00
89	UPTD SD NEGERI 08 KOTO TINGGI	320.000,00
90	UPTD SD NEGERI 09 KOTOTINGGI	960.000,00
91	UPTD SD NEGERI 11 KOTO TINGGI	1.600.000,00
92	UPTD SD NEGERI 01 GURUN	3.520.000,00
93	UPTD SD NEGERI 01 HARAU	5.440.000,00
94	UPTD SD NEGERI 01 KOTO TUO	2.880.000,00
95	UPTD SD NEGERI 01 LUBUAK BATINGKOK	3.200.000,00
96	UPTD SD NEGERI 01 SARILAMAK	9.600.000,00
97	UPTD SD NEGERI 01 SOLOK BIO-BIO	4.480.000,00
98	UPTD SD NEGERI 02 BATU BALANG	2.560.000,00
99	UPTD SD NEGERI 02 GURUN	1.920.000,00
100	UPTD SD NEGERI 02 LUBUAK BATINGKOK	1.600.000,00
101	UPTD SD NEGERI 03 BATU BALANG	2.880.000,00
102	UPTD SD NEGERI 03 HARAU	320.000,00
103	UPTD SD NEGERI 03 KOTO TUO	8.640.000,00
104	UPTD SD NEGERI 03 LUBUAK BATINGKOK	1.920.000,00
105	UPTD SD NEGERI 03 SARILAMAK	3.840.000,00
106	UPTD SD NEGERI 03 TARAM	9.920.000,00
107	UPTD SD NEGERI 04 BATU BALANG	3.520.000,00

No.	UPTD	Pengembalian Lebih Salur
108	UPTD SD NEGERI 04 KOTO TUO	2.880.000,00
109	UPTD SD NEGERI 04 SARILAMAK	12.480.000,00
110	UPTD SD NEGERI 05 SARILAMAK	2.880.000,00
111	UPTD SD NEGERI 05 TARAM	6.080.000,00
112	UPTD SD NEGERI 06 TARAM	3.200.000,00
113	UPTD SD NEGERI 09 SARILAMAK ex 10 SARILAMAK	640.000,00
114	UPTD SD NEGERI 01 DURIAN TINGGI	1.280.000,00
115	UPTD SD NEGERI 01 GALUGUA	320.000,00
116	UPTD SD NEGERI 01 KOTO BANGUN	3.520.000,00
117	UPTD SD NEGERI 01 KOTO LAMO	3.520.000,00
118	UPTD SD NEGERI 01 LUBUAK ALAI	2.560.000,00
119	UPTD SD NEGERI 01 MUARO PAITI	1.280.000,00
120	UPTD SD NEGERI 01 SIALANG	2.240.000,00
121	UPTD SD NEGERI 02 DURIAN TINGGI	320.000,00
122	UPTD SD NEGERI 02 GALUGUA	320.000,00
123	UPTD SD NEGERI 02 KOTO BANGUN	1.280.000,00
124	UPTD SD NEGERI 02 KOTO LAMO	5.760.000,00
125	UPTD SD NEGERI 02 LUBUAK ALAI	1.280.000,00
126	UPTD SD NEGERI 02 MUARO PAITI	2.240.000,00
127	UPTD SD NEGERI 02 SIALANG	2.880.000,00
128	UPTD SD NEGERI 03 DURIAN TINGGI	1.600.000,00
129	UPTD SD NEGERI 03 GALUGUA	320.000,00
130	UPTD SD NEGERI 03 KOTO BANGUN	960.000,00
131	UPTD SD NEGERI 03 KOTO LAMO	960.000,00
132	UPTD SD NEGERI 03 LUBUAK ALAI	3.200.000,00
133	UPTD SD NEGERI 03 MUARO PAITI	3.840.000,00
134	UPTD SD NEGERI 03 SIALANG	640.000,00
135	UPTD SD NEGERI 04 DURIAN TINGGI	320.000,00
136	UPTD SD NEGERI 04 GALUGUA	320.000,00
137	UPTD SD NEGERI 04 KOTO BANGUN	5.440.000,00
138	UPTD SD NEGERI 04 LUBUAK ALAI	3.200.000,00
139	UPTD SD NEGERI 04 MUARO PAITI	1.920.000,00
140	UPTD SD NEGERI 04 SIALANG	320.000,00
141	UPTD SD NEGERI 05 KOTO BANGUN	320.000,00
142	UPTD SD NEGERI 05 MUARO PAITI	640.000,00
143	UPTD SD NEGERI 05 SIALANG	8.320.000,00
144	UPTD SD NEGERI 06 SIALANG	4.480.000,00
145	UPTD SD NEGERI 01 AMPALU	7.040.000,00
146	UPTD SD NEGERI 01 BALAI PANJANG	2.240.000,00
147	UPTD SD NEGERI 01 BATU PAYUANG	960.000,00

No.	UPTD	Pengembalian Lebih Salur
148	UPTD SD NEGERI 01 BUKIK SIKUMPA	960.000,00
149	UPTD SD NEGERI 01 HALABAN	4.160.000,00
150	UPTD SD NEGERI 01 LABUAH GUNUANG	320.000,00
151	UPTD SD NEGERI 02 AMPALU	2.880.000,00
152	UPTD SD NEGERI 02 BALAI PANJANG	4.480.000,00
153	UPTD SD NEGERI 02 BATU PAYUANG	2.240.000,00
154	UPTD SD NEGERI 02 BUKIK SIKUMPA	960.000,00
155	UPTD SD NEGERI 02 HALABAN	5.120.000,00
156	UPTD SD NEGERI 02 LABUAH GUNUANG	4.480.000,00
157	UPTD SD NEGERI 02 TANJUANG GADANG	2.240.000,00
158	UPTD SD NEGERI 03 BATU PAYUANG	2.560.000,00
159	UPTD SD NEGERI 03 BUKIK SIKUMPA	1.280.000,00
160	UPTD SD NEGERI 03 LABUAH GUNUANG	4.480.000,00
161	UPTD SD NEGERI 03 SITANANG	3.520.000,00
162	UPTD SD NEGERI 03 TANJUNG GADANG	3.840.000,00
163	UPTD SD NEGERI 04 AMPALU	320.000,00
164	UPTD SD NEGERI 04 BUKIK SIKUMPA	5.120.000,00
165	UPTD SD NEGERI 04 HALABAN	640.000,00
166	UPTD SD NEGERI 04 LABUAH GUNUANG	2.560.000,00
167	UPTD SD NEGERI 04 SITANANG	2.240.000,00
168	UPTD SD NEGERI 04 TANJUANG GADANG	320.000,00
169	UPTD SD NEGERI 05 BATU PAYUANG	1.920.000,00
170	UPTD SD NEGERI 05 HALABAN	6.400.000,00
171	UPTD SD NEGERI 06 BATU PAYUANG	6.720.000,00
172	UPTD SD NEGERI 01 MUNGO	2.560.000,00
173	UPTD SD NEGERI 01 SUNGAI KAMUYANG	640.000,00
174	UPTD SD NEGERI 01 TANJUNG HARO SIKABU KABU	3.200.000,00
175	UPTD SD NEGERI 02 ANDALEH	1.920.000,00
176	UPTD SD NEGERI 02 MUNGO	5.120.000,00
177	UPTD SD NEGERI 02 SUNGAI KAMUYANG	1.600.000,00
178	UPTD SD NEGERI 03 MUNGO	3.520.000,00
179	UPTD SD NEGERI 03 SUNGAI KAMUYANG	3.520.000,00
180	UPTD SD NEGERI 03 TANJUNG HARO SIKABU KABU (EX 04 TJH)	960.000,00
181	UPTD SD NEGERI 04 ANDALEH	5.440.000,00
182	UPTD SD NEGERI 04 MUNGO	3.200.000,00
183	UPTD SD NEGERI 04 SUNGAI KAMUYANG	4.800.000,00
184	UPTD SD NEGERI 05 ANDALEH	2.240.000,00
185	UPTD SD NEGERI 05 MUNGO	1.920.000,00
186	UPTD SD NEGERI 06 MUNGO	1.280.000,00
187	UPTD SD NEGERI 06 SUNGAI KAMUYANG	4.160.000,00

No.	UPTD	Pengembalian Lebih Salur
188	UPTD SD NEGERI 07 SUNGAI KAMUYANG	2.240.000,00
189	UPTD SD NEGERI 01 JOPANG MANGANTI	2.560.000,00
190	UPTD SD NEGERI 01 MUNGKA EX O3 MUNGKA	1.600.000,00
191	UPTD SD NEGERI 01 SIMPANG KAPUAK	3.200.000,00
192	UPTD SD NEGERI 02 JOPANG MANGANTI	1.920.000,00
193	UPTD SD NEGERI 02 MUNGKA ex 01 mungka	2.300.000,00
194	UPTD SD NEGERI 02 SIMPANG KAPUAK	7.680.000,00
195	UPTD SD NEGERI 02 SUNGAI ANTUAN ex 04 mungka	4.160.000,00
196	UPTD SD NEGERI 02 TALANG MAUA	1.920.000,00
197	UPTD SD NEGERI 03 MUNGKA ex 05 mungka	3.520.000,00
198	UPTD SD NEGERI 04 MUNGKA ex 07 mungka	1.600.000,00
199	UPTD SD NEGERI 04 SIMPANG KAPUAK	2.240.000,00
200	UPTD SD NEGERI 04 SUNGAI ANTUAN ex 08 mungka	5.120.000,00
201	UPTD SD NEGERI 04 TALANG MAUA	1.920.000,00
202	UPTD SD NEGERI 05 MUNGKA ex 09 mungka	4.480.000,00
203	UPTD SD NEGERI 06 MUNGKA EX 10 MUNGKA	4.160.000,00
204	UPTD SD NEGERI 01 KOTO ALAM	2.240.000,00
205	UPTD SD NEGERI 01 MANGGILANG	5.760.000,00
206	UPTD SD NEGERI 01 PANGKALAN	640.000,00
207	UPTD SD NEGERI 01 TANJUNG BALIK	5.120.000,00
208	UPTD SD NEGERI 02 GUNUANG MALINTANG	640.000,00
209	UPTD SD NEGERI 02 MANGGILANG	640.000,00
210	UPTD SD NEGERI 02 PANGKALAN	1.280.000,00
211	UPTD SD NEGERI 02 TANJUNG PAUAH	640.000,00
212	UPTD SD NEGERI 03 GUNUANG MALINTANG	1.920.000,00
213	UPTD SD NEGERI 03 KOTO ALAM	1.280.000,00
214	UPTD SD NEGERI 03 MANGGILANG	3.840.000,00
215	UPTD SD NEGERI 03 PANGKALAN	320.000,00
216	UPTD SD NEGERI 03 TANJUANG BALIK	2.880.000,00
217	UPTD SD NEGERI 04 PANGKALAN	8.000.000,00
218	UPTD SD NEGERI 05 GUNUANG MALINTANG	4.160.000,00
219	UPTD SD NEGERI 05 PANGKALAN	6.400.000,00
220	UPTD SD NEGERI 06 GUNUANG MALINTANG	1.920.000,00
221	UPTD SD NEGERI 06 PANGKALAN	1.920.000,00
222	UPTD SD NEGERI 08 PANGKALAN	3.840.000,00
223	UPTD SD NEGERI 09 PANGKALAN	3.840.000,00
224	UPTD SD NEGERI 10 PANGKALAN	2.880.000,00
225	UPTD SD NEGERI 01 KOTO BARU SIMALANGGANG	7.040.000,00
226	UPTD SD NEGERI 01 KOTO TANGAH SIMALANGGANG	6.400.000,00
227	UPTD SD NEGERI 01 PIOBANG	2.240.000,00

No.	UPTD	Pengembalian Lebih Salur
228	UPTD SD NEGERI 01 SIMALANGGANG	2.240.000,00
229	UPTD SD NEGERI 01 SUNGAI BERINGIN	2.560.000,00
230	UPTD SD NEGERI 01 TAEH BARUAH	5.760.000,00
231	UPTD SD NEGERI 02 KOTO BARU SIMALANGGANG	960.000,00
232	UPTD SD NEGERI 02 KOTO TANGAH SIMALANGGANG	1.920.000,00
233	UPTD SD NEGERI 02 PIOBANG	8.320.000,00
234	UPTD SD NEGERI 02 TAEH BARUAH	3.840.000,00
235	UPTD SD NEGERI 02 TAEH BUKIK	3.840.000,00
236	UPTD SD NEGERI 03 KOTO BARU SIMALANGGANG	5.440.000,00
237	UPTD SD NEGERI 03 KOTO TANGAH SIMALANGGANG	1.920.000,00
238	UPTD SD NEGERI 03 PIOBANG	1.600.000,00
239	UPTD SD NEGERI 03 SUNGAI BERINGIN	2.560.000,00
240	UPTD SD NEGERI 03 TAEH BARUAH	5.120.000,00
241	UPTD SD NEGERI 03 TAEH BUKIK	5.120.000,00
242	UPTD SD NEGERI 04 KOTO BARU SIMALANGGANG	1.280.000,00
243	UPTD SD NEGERI 04 PIOBANG	960.000,00
244	UPTD SD NEGERI 04 SIMALANGGANG	4.800.000,00
245	UPTD SD NEGERI 04 TAEH BARUAH	1.600.000,00
246	UPTD SD NEGERI 04 TAEH BUKIK	3.200.000,00
247	UPTD SD NEGERI 05 KOTO BARU SIMALANGGANG	3.520.000,00
248	UPTD SD NEGERI 05 TAEH BARUAH	2.880.000,00
249	UPTD SD NEGERI 06 TAEH BARUAH	640.000,00
250	UPTD SD NEGERI 01 SITUJUAH BANDA DALAM	7.040.000,00
251	UPTD SD NEGERI 01 SITUJUAH BATUA	3.200.000,00
252	UPTD SD NEGERI 01 SITUJUAH LADANG LAWEH	4.480.000,00
253	UPTD SD NEGERI 01 TUNGKAR	4.480.000,00
254	UPTD SD NEGERI 02 LADANG LAWEH	1.280.000,00
255	UPTD SD NEGERI 02 SITUJUAH BANDA DALAM	1.600.000,00
256	UPTD SD NEGERI 02 SITUJUAH BATUA	1.600.000,00
257	UPTD SD NEGERI 02 SITUJUAH GADANG	1.280.000,00
258	UPTD SD NEGERI 02 TUNGKA	3.200.000,00
259	UPTD SD NEGERI 03 SITUJUAH BANDA DALAM	1.920.000,00
260	UPTD SD NEGERI 03 SITUJUAH GADANG	3.840.000,00
261	UPTD SD NEGERI 03 TUNGKA	640.000,00
262	UPTD SD NEGERI 04 SITUJUAH BANDA DALAM	1.600.000,00
263	UPTD SD NEGERI 04 SITUJUAH BATUA	1.920.000,00
264	UPTD SD NEGERI 04 SITUJUAH GADANG	7.360.000,00
265	UPTD SD NEGERI 05 SITUJUAH BATUA	2.560.000,00
266	UPTD SD NEGERI 06 SITUJUAH BATUA	640.000,00
267	UPTD SD NEGERI 07 SITUJUAH GADANG	2.240.000,00

No.	UPTD	Pengembalian Lebih Salur
268	UPTD SD NEGERI 01 KURAI	320.000,00
269	UPTD SD NEGERI 01 SULIKI	640.000,00
270	UPTD SD NEGERI 01 SUNGAI RIMBANG ex 02 sungai rimbang	2.880.000,00
271	UPTD SD NEGERI 02 ANDIANG ex 04 limbanang	1.920.000,00
272	UPTD SD NEGERI 02 KURAI	3.200.000,00
273	UPTD SD NEGERI 02 LIMBANANG ex 03 limbanang	3.200.000,00
274	UPTD SD NEGERI 02 SUNGAI RIMBANG ex 03 sunai rimbang	2.560.000,00
275	UPTD SD NEGERI 02 TANJUANG BUNGO	2.240.000,00
276	UPTD SD NEGERI 03 KURAI	1.920.000,00
277	UPTD SD NEGERI 03 LIMBANANG ex 05 limbanang	3.200.000,00
278	UPTD SD NEGERI 03 SUNGAI RIMBANG EX 05 SUNGAI RIMBANG	2.240.000,00
279	UPTD SD NEGERI 03 TANJUANG BUNGO	960.000,00
280	UPTD SD NEGERI 04 LIMBANANG EX 06 LIMBANANG	1.920.000,00
281	UPTD SD NEGERI 05 SULIKI	960.000,00
282	SMP NEGERI 3 KEC. PAYAKUMBUH	12.400.000,00
283	SMP NEGERI 1 KEC. LUAK	19.600.000,00
284	SMP NEGERI 2 KEC. LUAK	8.800.000,00
285	SMP NEGERI 3 KEC. HARAU	2.400.000,00
286	SMP NEGERI 1 KEC. GUGUAK	23.200.000,00
287	SMP NEGERI 2 KEC. GUGUAK	22.400.000,00
288	SMP NEGERI 3 KEC. GUGUAK	4.800.000,00
289	SMP NEGERI 4 KEC. GUGUAK	2.800.000,00
290	SMP NEGERI 1 KEC. SULIKI	2.000.000,00
291	SMP NEGERI 1 KEC. GUNUANG OMEH	3.600.000,00
292	SMP NEGERI 1 KEC. KAPUR IX	9.200.000,00
293	SMP NEGERI 2 KEC. KAPUR IX	26.000.000,00
294	SMP NEGERI 3 KEC. KAPUR IX	800.000,00
295	SMP NEGERI 4 KEC. KAPUR IX	2.400.000,00
296	SMP NEGERI 1 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	800.000,00
297	SMP NEGERI 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	12.000.000,00
298	SMP NEGERI 3 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	8.400.000,00
299	SMP NEGERI 4 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	1.200.000,00
300	SMP NEGERI 1 KEC. BUKIK BARISAN	7.200.000,00
301	SMP NEGERI 2 KEC. BUKIK BARISAN	7.200.000,00
302	SMP NEGERI 1 KEC. MUNGKA	30.000.000,00
303	SMP NEGERI 1 KEC. AKABILURU	4.000.000,00
304	SMP NEGERI 2 KEC. AKABILURU	7.600.000,00
305	SMP NEGERI 3 KEC. AKABILURU	2.400.000,00
306	SMP NEGERI 1 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	19.200.000,00
307	SMP NEGERI 2 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	6.800.000,00

No.	UPTD	Pengembalian Lebih Salur
308	SMP NEGERI 1 KEC. LAREH SAGO HALABAN	12.800.000,00
309	SMP NEGERI 3 KEC. LAREH SAGO HALABAN	800.000,00
310	SMP NEGERI 5 KEC. LAREH SAGO HALABAN	5.200.000,00
311	SMPN 4 Kec. BUKIK BARISAN	2.400.000,00
	TOTAL	1.040.900.000

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	28.847.799.302,66	39.884.892.097,42

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang berkenaan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp28.847.799.302,66.

Saldo Anggaran lebih akhir sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
-Kas di Kas Daerah	15.145.768.088,53	24.484.049.093,92
-Kas di Bendahara Pengeluaran	100.093.586,00	156.556.542,00
-Utang PFK tahun berjalan	(30.073.511,00)	(28.901.104,00)
-Utang PFK tahun 2018	(1.805.099,00)	(1.805.099,00)
-Silpa di BLUD RSUD	4.065.373.463,50	2.718.567.255,50
-Silpa di BLUD Puskesmas	5.033.046.604,63	3.244.253.704,00
-Silpa Dana BOS	4.522.566.649,00	9.312.171.705,00
- lebih setor pajak	12.829.521,00	0,00
Jumlah	28.847.799.302,66	39.884.892.097,42

Rincian Silpa tahun 2020 sebesar Rp28.847.799.302,66 dan tahun 2019 sebesar Rp39.884.892.097,42 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
	Silpa tahun anggaran sebelumnya	39.884.892.097,42	80.874.732.226,17
	Pelampauan Penerimaan PAD	9.236.551.669,39	11.898.710.690,75
	Pajak Daerah	6.684.858.812,00	4.318.888.260,00
	Retribusi Daerah	1.101.593.678,00	1.853.273.927,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	126.966.254,00	282.415.812,00
	Lain-lain PAD yang Sah	1.323.132.925,39	5.444.132.691,75
	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	27.532.967.483,00	35.848.802.429,00
	Bagi Hasil Pajak	2.436.353.241,00	2.192.524.871,00
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.134.001.854,00	1.807.638.199,00

NO	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
	Dana Alokasi Umum	5.498.078.000,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus	12.054.749.390,00	9.084.396.970,00
	DAK Khusus Non Fisik	6.409.784.998,00	22.764.242.389,00
	Pelampauan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	13.928.741.635,00	15.287.975.258,00
	Hibah Pemerintah Pusat	12.579.863.658,00	12.857.729.710,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	1.575.905.477,00	(469.848.162,00)
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-227.027.500,00	2.900.093.710,00
	Sisa Penghematan Belanja	80.586.960.089,63	102.920.380.475,00
	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	24.156.577.918,00	20.610.811.769,83
	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	3.813.484.756,00	3.370.655.876,00
	Belanja Barang Jasa	21.593.089.697,63	31.677.111.007,17
	Belanja Modal	24.937.864.913,00	43.384.150.348,00
	Belanja Hibah	520.431.594,00	237.500.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	340.005.000,00	1.447.262.500,00
	Belanja Bagi Hasil	815.082.643,00	1.178.416.114,00
	Belanja Bantuan Keuangan	504.290.548,00	674.332.330,00
	Belanja tidak terduga	3.906.133.020,00	340.140.530,00
	Selisih pembiayaan	0,42	0,17
	Koreksi Silpa	1.040.900.000,00	
	Total Silpa	28.847.799.302,66	39.884.892.097,42

Dari Silpa Tahun 2020 Sebesar Rp28.847.799.302,66 dan Silpa tahun 2019 sebesar Rp39.884.892.097,42 terdapat Silpa dari dana yang diarahkan berupa sisa Dana DAK Fisik dan Non Fisik serta Silpa dana DBH Cukai dengan total jumlah sebesar Rp25.380.118.116,00 dan Rp15.890.784.577,00 dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
	DAK FISIK	4.465.195.290,00	3.850.867.715,00
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan	234.347.400,00	800,00
2	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	2.678.890.201,00	2.563.019.201,00
3	DAK Fisik Bidang Kesehatan	352.058.208,00	352.058.208,00
4	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman	0,00	10.854.000,00
5	DAK Fisik Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	471.466.500,00	471.466.500,00
6	DAK Fisik Bidang Pariwisata	453.469.000,00	453.469.000,00
7	DAK Fisik Irigasi	1.981,00	6,00
8	DAK Fisik Jalan	12.250.000,00	0,00
9	DAK Bidang Infrastruktur air minum	262.698.000,00	0,00

NO	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
10	DAK Bidang Infrastruktur sanitasi		0,00
11	DAK Bidang pertanian	14.000,00	0,00
	DAK NON FISIK	20.867.673.314,00	11.904.378.120,00
1	DAK BOP PAUD	212.400.000,00	466.500.000,00
2	Tambahan Penghasilan PNSD		824.775.500,00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	7.650.987.513,00	1.722.674.093,00
4	Tunjangan khusus guru	2.919.980.600,00	2.919.980.600,00
5	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM		15.205.000,00
6	DAK Tambahan Penghasilan Guru	35.937.500,00	0,00
7	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	24.894.100,00	0,00
8	BOP Kesetaraan		201.100.000,00
9	Bantuan Operasional Kesehatan	9.530.556.675,00	5.370.858.246,00
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	421.160.000,00	135.584.053,00
11	Dana Pelayanan Kepariwisata	71.423.500,00	236.146.000,00
12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	333.426,00	11.554.628,00
	Dana Cukai Tembakau	47.249.512,00	135.538.742,00
1	DBH CHT	47.249.512,00	135.538.742,00
	Total Silpa Dana Diarahkan	25.380.118.116,00	15.890.784.577,00

Dari Silpa dana diarahkan sebesar Rp25.380.118.116,00 telah digunakan untuk dana talangan IPDMIP yang belum dirembes oleh Pemerintah Pusat senilai Rp5.730.778.612,00 dan digunakan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 700/40/INSP-LK/KHS/VIII/2020 sebesar Rp. 4.503.571.415,47 dari total kewajiban sebesar Rp12.996.845.078,00 yang direncanakan awalnya sumber dana dari Pendapatan Kurang Salur Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp4.614.577.292,00 dan Kurang Salur Dana Bagi Hasil Propinsi Tahun 2019 sebesar Rp3.548.715.418,00 dan bersumber dari rasionalisasi belanja OPD. Namun realisasi penerimaan pendapatan Dana Bagi Hasil tidak 100% tersalur ke RKUD.

Selain itu terdapat juga Silpa Dari BLUD RSUD, Silpa BLUD Puskesmas dan Silpa Dana BOS Tahun 2020 dan Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
1	Silpa BLUD RSUD	4.065.373.463,50	2.718.567.255,50
2	Silpa BLUD Puskesmas	5.033.046.604,63	3.244.253.704,00
3	Silpa Dana BOS :	4.522.566.649,00	9.312.171.705,00
	- Tingkat Sekolah Dasar (SD)	2.802.707.899,00	6.165.990.747,00
	- Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.719.858.750,00	3.146.180.958,00
	Total Silpa BLUD dan BOS	13.620.986.717,13	15.274.992.664,50

5.3. NERACA

Dalam penjelasan Akun-akun neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca per 31 Desember 2020, adalah Aset lancar, Investasi Jangka Panjang Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. Aset Lancar	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
	66.727.365.468,28	69.989.261.991,11

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp66.727.365.468,28 terdiri dari Kas dan Bank, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

Tabel V.3.39 Rincian Aset Lancar

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persen Tase
1	Kas dan Bank	28.880.279.995,66	39.915.769.904,42	(11.035.489.908,76)	(27,65)
2	Piutang	22.553.331.478,76	23.116.492.707,76	(563.161.229,00)	(2,44)
3	Penyisihan Piutang	(3.100.289.526,59)	(4.430.078.043,30)	1.329.788.516,71	(30,02)
4	Persediaan	18.394.043.520,45	11.387.077.422,23	7.006.966.098,22	61,53
	Jumlah	66.727.365.468,28	69.989.261.991,11	(3.261.896.522,83)	(4,66)

Nilai saldo aset lancar per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.261.896.522,83 atau sebesar 4,66%, penurunan nilai saldo aset lancar disebabkan karena adanya penurunan pada nilai saldo kas dan bank sebesar Rp11.035.489.908,76 atau 27,65% dan saldo piutang sebesar Rp563.161.229,00 atau 2,44%. Disisi lain untuk saldo penyisihan piutang juga terjadi penurunan sebesar Rp1.329.788.516,71 atau 30,02, saldo persediaan bertambah sebesar Rp7.006.966.098,22 atau sebesar 61,53%.

5.3.1.1 Kas dan Bank	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
	28.880.279.995,66	39.915.769.904,42

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.880.279.995,66 merupakan saldo buku kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya.

Jika dibandingkan dengan nilai Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.915.769.904,42 maka terdapat penurunan sebesar Rp11.035.489.908,76 atau sebesar 27,65%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.40 Rincian Kas dan Bank

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persen Tase
1	Kas di Kas Daerah	15.145.768.088,53	24.484.049.093,92	(9.338.281.005,39)	(38,14)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	13.260.000,00	0,00	13.260.000,00	100,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	100.093.586,00	156.556.542,00	(56.462.956,00)	(36,07)
4	Kas di Bendahara BLUD RSUD	4.065.373.463,50	2.718.567.255,50	1.346.806.208,00	49,54
5	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	5.033.046.604,63	3.244.253.704,00	1.788.792.900,63	55,14
6	Kas di Bendahara BOS	4.522.566.649,00	9.312.171.705,00	(4.789.605.056,00)	(51,43)
7	Kas Lainnya	171.604,00	171.604,00	0,00	0,00
	Jumlah	28.880.279.995,66	39.915.769.904,42	(11.035.489.908,76)	(27,65)

Berdasarkan Berita acara Rekonsiliasi pencatatan transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bank Nagari Cabang Payakumbuh pada hari Senin tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu tercatat :

PENCATATAN KUASA BUD			
PENERIMAAN			
1	Saldo bulan November (bulan lalu)	Rp.	134.722.706.593,53
2	Dana Transfer	Rp.	10.235.161.083,00
3	Hibah Pemerintah	Rp.	0,00
4	DBH Propinsi	Rp.	0,00
5	Penerimaan PAD	Rp.	21.502.493.032,00
	Jumlah	Rp.	166.460.360.708,53
PENGELUARAN			
1	SP2D	Rp.	151.314.592.620,00
	Jumlah	Rp.	151.314.592.620,00
	Saldo menurut Kuasa BUD	Rp.	15.145.768.088,53
PENCATATAN BANK*			
PENERIMAAN			
1	Saldo bulan lalu	Rp.	150.203.293.464,53
2	Penerimaan bulan Desember 2020	Rp.	<u>35.107.281.910,00</u>
	Jumlah	Rp.	185.310.575.374,53
PENGELUARAN			
	Pengeluaran bulan Desember 2020	Rp.	<u>170.164.807.286,00</u>
	Saldo menurut Bank	Rp.	15.145.768.088,53
SELISIH			0,00

Berita Acara Rekonsiliasi antara BUD dengan Bank Nagari Cabang Payakumbuh terlampir pada **Lampiran 3** Laporan Keuangan ini.

a. Kas di Kas Daerah

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.145.768.088,53 terdiri dari rekening:

Kas:

-0100.0101.00208.5 Kas Daerah	15.145.768.088,53	23.467.246.586,92
-0100.0101.00202.9 Penerimaan	0,00	0,00
-0100.0101.00219.2 Pengeluaran	0,00	0,00
-Kas di Kasda Pemkot Payakumbuh	0,00	1.016.802.507,00
Jumlah Kas	15.145.768.088,53	24.484.049.093,92

b. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp100.093.586,00 dan tahun anggaran 2019 sebesar Rp156.556.542,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.41 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Nama OPD		2020	2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UYHD	19.658.000,00	65.138.534,00
		Hutang PFK	0,00	1.378.050,00
		Jumlah	19.658.000,00	66.516.584,00
2	BPBD	UYHD	12.938.120,00	0,00
		Hutang PFK	0,00	0,00
		Jumlah	12.938.120,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	UYHD	42.956.249,00	62.036.904,00
		Hutang PFK	23.762.033,00	22.199.695,00
		Jumlah	66.718.282,00	84.236.599,00
4	Kecamatan Lareh Sago Halaban	UYHD	129.184,00	0,00
		Hutang PFK	0,00	0,00
		Jumlah	129.184,00	0,00
5	Kecamatan Harau	UYHD	650.000,00	0,00
		Hutang PFK	0,00	0,00
		Jumlah	650.000,00	0,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB P3A	UYHD	0,00	480.000,00
		Hutang PFK	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	480.000,00
7	Badan Keuangan	UYHD	0,00	0,00

No	Nama OPD	2020	2019
	Hutang PFK	0,00	5.323.359,00
	Jumlah	0,00	5.323.359,00
	Jumlah UYHD	76.331.553,00	127.655.438,00
	Hutang PFK OPD	23.762.033,00	28.901.104,00
	Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	100.093.586,00	156.556.542,00

Terdapat penurunan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019, dimana pada Tahun 2020 Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp100.093.586,00, sedangkan Tahun 2019 adalah sebesar Rp156.556.542,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari UYHD dan Utang PFK. Utang PFK berupa pajak yang belum disetor per 31 Desember 2020. UYHD telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Penerimaan Daerah Nomor 0100.0101.00202.9 dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Jumlah setoran	Tanggal bukti Setoran
1	UYHD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	- Penyetoran UYHD Perjalanan Dinas dan Pelatihan	1.035.000,00	18 Januari 2021
	-Penyetoran UYHD Perjalanan Dinas	2.000,00	15 Januari 2021
	-Penyetoran UYHD Perjalanan Dinas	9.060.500,00	16 Januari 2021
	- Setoran TU	9.560.500,00	15 Januari 2021
2	UYHD Dinas Pekerjaan Umum		
	-Penyetoran sisa TU	42.667.735,00	7 Januari 2021
	-Penyetoran sisa UP	288.514,00	7 Januari 2021
3	UYHD Badan penanggulangan bencana Daerah		
	-Penyetoran sisa TU	11.114.984,00	4 Januari 2021
	-Penyetoran sisa UP	1.823.136,00	4 Januari 2021
4	UYHD Kecamatan Lareh Sago Halaban		
	-Penyetoran sisa UP	129.184,00	5 Januari 2021
5	UYHD Kecamatan Harau		
	-Penyetoran sisa UP	650.000,00	13 Januari 2021
	JUMLAH	76.331.553,00	

Rekap penyetoran UYHD Tahun 2019 terdapat pada **Lampiran 4 dan 5** laporan keuangan ini.

c. Kas Dibendahara Penerimaan

Saldo Kas Dibendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.260.000,00 merupakan Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang terdiri atas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar

Rp12.040.000,00 dan Retribusi Sewa Kios dan Tempat Wisata Lainnya sebesar Rp1.220.000,00.

Kas di bendahara Penerimaan tahun 2020 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut diatas telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 11 Januari 2021.

d. Kas di BLUD

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdiri dari saldo kas pada:

- BLUD RSUD Dr.Achmad Darwis sebesar Rp4.065.373.463,50
- BLUD Puskesmas sebesar Rp5.033.046.604,63

Kas di BLUD RSUD dr.Achmad Darwis per 31 Desember 2020 dan 2019 tersebut dapat terinci sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
- Kas di Bank Bend.Penerima (Bank Nagari Cabang Dangung-dangung) Rek 0104.0101.00002-3	2.934.385.392,33	1.642.452.681,33
- Kas Tunai Bend.Penerima	1.742.000,00	480.000,00
- Kas di Bank Bend.Pengeluaran (Bank Nagari Cabang Dangung-dangung) Rek 0104.0101.00001-0	1.078.213.073,17	1.075.634.574,17
- Kas Tunai Bend. Pengeluaran BLUD	51.032.998,00	0,00
Jumlah	4.065.373.463,50	2.718.567.255,50

Laporan Keuangan BLUD RSUD dr Achmad Darwis terlampir pada **Lampiran 7**

Kas di BLUD Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat terinci sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
- Kas di Bank Bendahara BLUD	5.001.682.791,34	3.242.965.847,00
- Kas Tunai Bendahara BLUD	31.363.813,29	1.287.857,00
Jumlah	5.033.046.604,63	3.244.253.704,00

e. Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Sebesar Rp4.522.566.649,00 dan Rp9.312.171.705,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian Saldo BOS	Tahun 2020	Tahun 2019
-	Saldo Dana BOS SD	2.802.707.899,00	6.165.990.747,00
-	Saldo Dana BOS SMP	1.719.858.750,00	3.146.180.958,00
	Jumlah	4.522.566.649,00	9.312.171.705,00

Laporan Penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana BOS ada pada **Lampiran 6**.

Dalam tahun anggaran 2020 selain BOS Reguler beberapa sekolah juga mendapatkan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, maka pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (satu) disebutkan bahwa :

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi adalah Program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja adalah Program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dinilai berkinerja baik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

Sekolah yang mendapatkan dana BOS Afirmasi dan Kinerja pada tahun 2020 antara lain :

NO	NAMA SEKOLAH	AFIRMASI/KINERJA	JUMLAH
1	UPTD SD NEGERI 01 MAEK	Kinerja	60.000.000
2	UPTD SD NEGERI 02 MAEK	Kinerja	60.000.000
3	UPTD SD NEGERI 03 MAEK	Afirmasi	60.000.000
4	UPTD SD NEGERI 04 MAEK	Afirmasi	60.000.000
5	UPTD SD NEGERI 06 MAEK	Kinerja	60.000.000
6	UPTD SD NEGERI 07 MAEK ex 08 MAEK	Afirmasi	60.000.000
7	UPTD SD NEGERI 08 MAEK ex 09 maek	Kinerja	60.000.000
8	UPTD SD NEGERI 09 MAEK ex 10 maek	Afirmasi	60.000.000
9	UPTD SD NEGERI 10 MAEK ex 11 maek	Kinerja	60.000.000
10	UPTD SD NEGERI 11 MAEK ex 12 maek	Afirmasi	60.000.000
11	SMP NEGERI 1 KEC. BUKIK BARISAN	Afirmasi	60.000.000
JUMLAH			660.000.000

Realisasi belanja BOS tahun anggaran 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	Belanja barang dan Jasa	34.533.191.705,00	36.848.179.597,00	106,70	(2.314.987.892,00)
2	Belanja Modal :	24.349.780.000,00	16.698.352.959,00	68,58	7.651.427.041,00
	- Belanja Modal Peralatan & Mesin	4.957.080.000,00	12.118.840.165,00	244,48	(7.161.760.165,00)
	- Belanja Modal Gedung Bangunan	2.478.540.000,00	13.500.000,00	0,54	2.465.040.000,00

	- Belanja Modal Aset tetap Lainnya	16.914.160.000,00	4.566.012.794,00	27,00	12.348.147.206,00
	JUMLAH	58.882.971.705,00	53.546.532.556,00	90,94	5.336.439.149,00

Pada tahun 2020 realisasi Belanja BOS sebesar Rp53.546.532.556,00 atau 90,94% dari total anggaran Rp58.882.971.705,00. Tetapi nilai Belanja BOS yang disahkan melalui Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh BUD (bendahara Umum Daerah) hanya sebesar Rp39.357.395.401,00 yang terbagi dalam 2 (dua) SPB. Tindakan ini diambil karena realisasi belanja yang diajukan oleh Dinas Pendidikan telah melebihi dari nilai anggaran yang telah ditetapkan. Ini terlihat pada realisasi belanja barang dan jasa yang realisasi mencapai 106,70% dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin 244,48%. Rincian belanja BOS yang disahkan oleh BUD adalah sebagai berikut:

a. Realisasi SPB Sekolah Dasar (SD)

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	SPB Semester I	SPB Semester II	total Realisasi SPB	SISA ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	5.395.920.000,00	2.000.968.168,00		2.000.968.168,00	3.394.951.832,00
2	Belanja barang dan Jasa	19.152.390.747,00	5.826.967.091,00	13.325.423.656,00	19.152.390.747,00	0,00
3	Belanja Modal :	17.590.480.000,00	2.732.076.112,00	4.166.502.182,00	6.898.578.294,00	10.691.901.706,00
	- Belanja Modal Peralatan Mesin	3.597.280.000,00	234.020.400,00	3.363.259.600,00	3.597.280.000,00	0,00
	- Belanja Modal Gedung Bangunan	1.798.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.798.640.000,00
	- Belanja Modal Aset tetap Lainnya	12.194.560.000,00	2.498.055.712,00	803.242.582,00	3.301.298.294,00	8.893.261.706,00
	JUMLAH	42.138.790.747,00	10.560.011.371,00	17.491.925.838,00	28.051.937.209,00	14.086.853.538,00

b. Realisasi SPB Sekolah Menengah Pertama (SMP)

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	SPB Semester I	SPB Semester II	total Realisasi SPB	SISA ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	2.039.700.000,00	1.357.310.000,00	682.390.000,00	2.039.700.000,00	0,00
2	Belanja barang dan Jasa	7.945.180.958,00	2.724.460.765,00	3.903.282.927,00	6.627.743.692,00	1.317.437.266,00
3	Belanja Modal :	6.759.300.000,00	2.056.540.350,00	581.474.150,00	2.638.014.500,00	4.121.285.500,00
	- Belanja Modal Peralatan Mesin	1.359.800.000,00	1.321.452.260,00	38.347.740,00	1.359.800.000,00	0,00
	- Belanja Modal Gedung Bangunan	679.900.000,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	666.400.000,00
	- Belanja Modal Aset tetap Lainnya	4.719.600.000,00	721.588.090,00	543.126.410,00	1.264.714.500,00	3.454.885.500,00
	JUMLAH	16.744.180.958,00	6.138.311.115,00	5.167.147.077,00	11.305.458.192,00	5.438.722.766,00

Dalam Transaksi Keuangan Dinas Pendidikan juga terdapat Dana Bantuan Pemerintah Kemendikbud Tahun Anggaran 2020 berupa sarana pembelajaran berbasis TIK dan bantuan untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan sekolah. Rinciannya sebagai berikut:

NO	Nama Sekolah	Nama Barang	Vol	Harga Satuan	Jumlah
1	SMPN 1 KEC. SULIKI	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00

NO	Nama Sekolah	Nama Barang	Vol	Harga Satuan	Jumlah
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
2	SMPN 2 KEC. GUNUANG OMEH	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
3	SMPN 2 KEC. KAPUR IX	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
4	SMPN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
5	SMPN 2 KEC. MUNGKA	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
6	SMPN 3 KEC. KAPUR IX	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
7	SMPN 3 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
8	SMPN 3 KEC. BUKIK BARISAN	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
9	SMPN 3 KEC. MUNGKA	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
10	SMPN 4 KEC. HARAU	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
11	SMPN 4 KEC. KAPUR IX	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
12	SMPN 4 KEC. LAREH SAGO HALABAN	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
13	SMPN 4 KEC. PAYAKUMBUH	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00

NO	Nama Sekolah	Nama Barang	Vol	Harga Satuan	Jumlah
14	SMPN 4 KEC. BUKIK BARISAN	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
15	SMPN 5 KEC. KAPUR IX	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
16	SMPN 5 KEC. LAREH SAGO HALABAN	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
17	SMPN 5 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
18	SMPN 6 KEC. KAPUR IX	43211503-PKM-004862284 Croomebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
		43222609-PKM-004813238 Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
		45111600-PKM-004862194 Projector DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
19	SDN 03 TAEH BARUAH	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
20	SDN 04 BATU HAMPA	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
21	SDN 02 BANJA LOWEH	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
22	SDN 01 MAEK	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
23	SDN 01 GUGUAK VIII KOTO	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
24	SDN 05 KOTO TINGGI	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
25	SDN 03 TALANG ANAU	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
26	SDN 03 LABUAH GUNUANG	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
27	SDN 04 BATU PAYUANG	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
28	SDN 01 BALAI PANJANG	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00

NO	Nama Sekolah	Nama Barang	Vol	Harga Satuan	Jumlah
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	200.000,00	200.000,00
29	SDN 03 MUNGKA	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
30	SDN 06 SITUJUAH GADANG	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
31	SDN 01 SULIKI	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
32	SDN 01 SITUJUAH BATUA	ASUS Chromebook Flip C214MA (N4020, 4GB,32GB, Touchscreen, 3Y) CDM	15	5.870.000,00	88.050.000,00
		B-SAVE CONECTOR 2 IN 1 USB Type C To VGA & HDMI	1	125.000,00	125.000,00
33	SDN 03 TAEH BARUAH	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
34	SDN 04 BATU HAMPA	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
35	SDN 02 BANJA LOWEH	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
36	SDN 01 MAEK	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
37	SDN 01 GUGUAK VIII KOTO	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
38	SDN 05 KOTO TINGGI	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
39	SDN 03 TALANG ANAU	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
40	SDN 03 LABUAH GUNUANG	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
41	SDN 04 BATU PAYUANG	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
42	SDN 03 MUNGKA	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
43	SDN 06 SITUJUAH GADANG	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
44	SDN 01 SULIKI	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
45	SDN 01 SITUJUAH BATUA	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00

NO	Nama Sekolah	Nama Barang	Vol	Harga Satuan	Jumlah
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
46	SDN 01 BALAI PANJANG	Projector Acer DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
		D-Link Wireless Router DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
47	SDN 01 SARILAMAK	Acer Notebook Aspire 3 A315-42 AMD Ryzen	4	6.355.000,00	25.420.000,00
		Microsoft Office std 2019 SNGL OLP Acd	4	1.019.000,00	4.076.000,00
		Acer Projector Optoma XA510	2	4.465.000,00	8.930.000,00
		HP-Printer Ink Tank 319	1	1.650.000,00	1.650.000,00
		D-Link Modem Route DWR 932C	2	634.500,00	1.269.000,00
48	SDN 04 SARILAMAK	Acer Notebook Aspire 3 A315-42 AMD Ryzen	4	6.355.000,00	25.420.000,00
		Microsoft Office std 2019 SNGL OLP Acd	4	1.019.000,00	4.076.000,00
		Acer Projector Optoma XA510	2	4.465.000,00	8.930.000,00
		HP-Printer Ink Tank 319	1	1.650.000,00	1.650.000,00
		D-Link Modem Route DWR 932C	2	634.500,00	1.269.000,00
49	SDN MANGGILANG	Acer Notebook Aspire 3 A315-42 AMD Ryzen	4	6.355.000,00	25.420.000,00
		Microsoft Office std 2019 SNGL OLP Acd	4	1.019.000,00	4.076.000,00
		Acer Projector Optoma XA510	2	4.465.000,00	8.930.000,00
		HP-Printer Ink Tank 319	1	1.650.000,00	1.650.000,00
		D-Link Modem Route DWR 932C	2	634.500,00	1.269.000,00
50	SDN 02 KOTO TANGAH SIMALANGGANG	WASTAFEL PORTABEL PHBS	6	2.150.000,00	12.900.000,00
		WASTAFEL PORTABEL PHBS	1	2.100.000,00	2.100.000,00
51	SDN 03 SARILAMAK	WASTAFEL PORTABEL PHBS	6	2.150.000,00	12.900.000,00
		WASTAFEL PORTABEL PHBS	1	2.100.000,00	2.100.000,00
52	SDN 03 HARAU	WASTAFEL PORTABEL PHBS	6	2.150.000,00	12.900.000,00
		WASTAFEL PORTABEL PHBS	1	2.100.000,00	2.100.000,00
53	SDN 02 TARANTANG	WASTAFEL PORTABEL PHBS	6	2.150.000,00	12.900.000,00
		WASTAFEL PORTABEL PHBS	1	2.100.000,00	2.100.000,00
54	SDN 01 HARAU	WASTAFEL PORTABEL PHBS	6	2.150.000,00	12.900.000,00
		WASTAFEL PORTABEL PHBS	1	2.100.000,00	2.100.000,00
55	SDN 01 SOLOK BIO-BIO	WASTAFEL PORTABEL PHBS	6	2.150.000,00	12.900.000,00
		WASTAFEL PORTABEL PHBS	1	2.100.000,00	2.100.000,00
56	SDN 03 LUBUAK BATINGKOK	WASTAFEL PORTABEL PHBS	6	2.150.000,00	12.900.000,00
		WASTAFEL PORTABEL PHBS	1	2.100.000,00	2.100.000,00
57	SDN 01 TARANTANG	WASTAFEL PORTABEL PHBS	6	2.150.000,00	12.900.000,00
		WASTAFEL PORTABEL PHBS	1	2.100.000,00	2.100.000,00
58	SDN 04 TAEH BARUAH	WASTAFEL PORTABEL PHBS	6	2.150.000,00	12.900.000,00
		WASTAFEL PORTABEL PHBS	1	2.100.000,00	2.100.000,00
59	SDN 04 TAEH BUKIK	WASTAFEL PORTABEL PHBS	6	2.150.000,00	12.900.000,00
		WASTAFEL PORTABEL PHBS	1	2.100.000,00	2.100.000,00
		TOTAL			3.213.380.000,00

Selain hibah dari Kemendikbud, pada tahun 2020 Dinas Pendidikan juga mendapatkan hibah dari komite sekolah senilai Rp174.121.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	37.500.000,00
2	Peralatan dan Mesin	74.486.500,00
3	Gedung dan Bangunan	62.134.500,00
	JUMLAH	174.121.000,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Kas Lainnya	171.604,00	171.604,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp171.604,00 merupakan sisa dana bantuan pemerintah Kemendikbud pada kegiatan pembinaan pengelolaan SMP Bermutu di SMPN 1 Payakumbuh.

5.3.1.2. Piutang	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	22.553.331.478,76	23.116.492.707,76

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Tahun 2020 dan Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
a. Piutang Pajak	7.765.182.316,00	8.210.452.851,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019. Tagihan Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019 yang sampai dengan tanggal Neraca belum dilunasi/disetorkan Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah/Bendahara Penerimaan, yang terinci atas:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
- Piutang pajak Restoran	18.005.800,00	19.453.800,00
- Piutang Pajak Reklame	5.100.000,00	4.650.000,00
- Piutang PBB-P2	7.742.076.516,00	8.186.349.051,00
Jumlah	7.765.182.316,00	8.210.452.851,00

- Piutang Pajak Restoran sebesar Rp18.005.800,00 merupakan piutang pajak restoran sejak Tahun 2008 sebesar Rp18.005.800,00 yang timbul sebagai akibat dari penetapan masa yang dikeluarkan setiap bulannya pada tahun tersebut.

- Piutang Pajak Reklame sebesar Rp5.100.000,00 merupakan piutang pajak reklame Tahun 2020.
- Piutang PBB-P2 Tahun 2020 dan 2019 merupakan Piutang PBB sampai dengan 2020 dan 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah menetapkan bahwa PBB tergolong sebagai pajak pusat. Walaupun berstatus sebagai pajak pusat, penerimaan pajak tersebut diserahkan kepada daerah kabupaten/kota .

Banyak hal yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola pajak bumi dan bangunan. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian ialah masalah piutang pajak bumi dan bangunan. Yang diserahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh per 31 Desember 2013 sesuai dengan BA-/WPJ.27/KP.05/2014 Tentang Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan terdapat piutang PBB-P2 sebesar Rp2.462.493.746,-.

Sesuai dengan pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah Yang Sudah Kadaluwarsa, dimana Bupati berwenang melakukan penghapusan pajak yang sudah kedaluwarsa (berumur 5 tahun) agar terwujudnya tertib administrasi terhadap pengelolaan pajak daerah;

Dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun Anggaran 2019 Nomor: 34.B/LHP/XVIII.PDG/06/2020 Tanggal 18 Juni 2020 maka dibentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemutakhiran dan validasi keakuratan data PBB-P2 Nomor 20/BK-2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka menghilangkan data tagihan pajak dari data yang seharusnya dilakukan penagihan kepada wajib pajak karena sudah melampaui waktu tagihan maka dilakukan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan yang sudah kadaluarsa. Dengan prioritas penghapusan pada piutang tahun 2009-2013.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 tahun 2014 tersebut diatas, maka dilakukan rekap data piutang dan verifikasi lapangan terhadap objek pajak PBB-P2 kenagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota dan dilanjutkan dengan penagihan piutang. Setelah dilakukan penagihan piutang, namun tidak dapat ditagih lagi sesuai dengan surat wali nagari se Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya menyatakan dokumen penagihan sudah tidak ditemukan lagi disebabkan beberapa hal diantaranya kebakaran, bencana alam, perpindahan kantor wali nagari dan wajib pajak yang tidak mungkin ditemukan lagi.

Selanjutnya disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Nota Dinas untuk persetujuan penghapusan piutang yang telah kadaluarsa dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 332 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah kadaluarsa sebesar Rp2.384.279.347,00 dengan rincian :

No	Jenis Piutang Pajak	Tahun Pajak	Jumlah Nagari	Jumlah piutang yang telah kadaluarsa (Rp.)
1.	Piutang PBB-P2	2009	12	83.933.522,00
2.	Piutang PBB-P2	2010	22	179.262.012,00
3.	Piutang PBB-P2	2011	23	443.698.186,00
4.	Piutang PBB-P2	2012	37	528.051.221,00
5.	Piutang PBB-P2	2013	47	1.149.334.376,00
			Jumlah	2.384.279.347,00

Dengan dilakukannya penghapusan piutang tahun 2009-2013 maka per 31 Desember 2020 keadaan piutang PBB di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

NO	TAHUN PAJAK	JUMLAH PIUTANG PER 31 DES 2019	PIUTANG TERTAGIH TAHUN 2020	PENGHAPUSAN PIUTANG (SK BUPATI NO.332 TH 2020)	JUMLAH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020
1	2009	84.917.149,00	983.597,00	83.933.552,00	-
2	2010	181.129.095,00	1.867.083,00	179.262.012,00	-
3	2011	445.649.224,00	1.951.038,00	443.698.186,00	-
4	2012	531.431.250,00	3.380.029,00	528.051.221,00	-
5	2013	1.153.463.072,00	4.128.696,00	1.149.334.376,00	-
6	2014	571.284.115,00	3.313.981,00	-	567.970.134,00
7	2015	750.172.461,00	3.553.883,00	-	746.618.578,00
8	2016	677.003.174,00	3.138.209,00	-	673.864.965,00
9	2017	692.766.394,00	4.265.756,00	-	688.500.638,00
10	2018	1.297.124.968,00	8.453.566,00	-	1.288.671.402,00
11	2019	1.801.408.149,00	54.970.409,00	-	1.746.437.740,00
12	2020	-	-	-	2.030.013.059,00
JUMLAH		8.186.349.051,00	90.006.247,00	2.384.279.347,00	7.742.076.516,00

Tahun 2020

(Rp)

12.636.000,00

Tahun 2019

(Rp)

188.286.000,00

b. Piutang Retribusi

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019, yaitu tagihan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019 yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi ke Rekening Kas Daerah/Bendahara Penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran bersangkutan. Piutang Retribusi dengan rincian sebagai berikut:

- Retr. Pelayanan Persampahan	9.636.000,00	9.636.000,00
- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00	3.590.000,00
- Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0,00	175.060.000,00
Jumlah	12.636.000,00	188.286.000,00

Piutang Retribusi Tahun 2019 tersebut terdapat pada:

- Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp9.636.000,00 atas pelayanan pengambilan sampah masyarakat yang belum dibayarkan oleh pemilik rumah, rumah makan, toko, dan kios. Piutang tersebut merupakan Piutang 2013 yang belum terbayar sampai dengan Tahun 2020. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan pada tahun anggaran 2018 masih menjadi target Anggaran Dinas Pekerjaan umum, dan pada Tahun Anggaran 2019 menjadi target Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman.
- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan atas Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah berupa sewa alat *hand tractor* pada Tahun 2011 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Uraian	Saldo Awal		Saldo Akhir
	piutang	Pelunasan	piutang
• <i>Hand Tractor</i> Singkal (6,5 PK)	590.000,00	590.000,00	0,00
• <i>Hand Tractor</i> Singkal (6 PK)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Jumlah	3.590.000,00	590.000,00	3.000.000,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2019 berupa Sewa Alat Hand Tractor telah dicicil sebesar Rp590.000,00 oleh Kelompok Tani Tunas Baru di Kecamatan Kapur IX a/n Amir dan telah diterima di rekening Kas Daerah tanggal 28 Desember 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.070.000,00	3.227.588.506,00

Piutang tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020 yang terdiri atas:

- Piutang deviden BPR Kampung Baru Muara Paiti Kecamatan Kapur IX sebesar Rp2.070.000,00 atas penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Deviden Tahun 2013 yang harusnya disetor ke Kas Daerah di 2014. Namun BPR tersebut sesuai dengan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Propinsi Sumatera Barat Nomor S-572/KO.52/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Informasi Kondisi BPR disampaikan bahwa PT. BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti ditetapkan Bank dengan status Dalam Pengawasan Khusus (DPK).

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
d. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.	2.926.747.273,76	7.741.246.900,76

Piutang tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah per 31 Desember 2020 dan 2019, yang terinci atas:

Uraian Piutang	Tahun 2020	Tahun 2019
- Piutang Kendaraan Roda Dua-Kades	76.500.000,00	76.500.000,00
- Bunga Dana Bergulir	76.851.310,00	76.851.310,00
- Denda Dana Bergulir	15.169.048,76	15.169.048,76
- Klaim Jasa Layanan BLUD-RSUD	2.403.478.415,00	7.529.596.542,00
- Piutang Non Kapitasi BLUD-Puskesmas	354.748.500,00	43.130.000,00
Jumlah	2.926.747.273,76	7.741.246.900,76

- Piutang Kendaraan Roda Dua-Kades sebesar Rp76.500.000,00 merupakan pemberian fasilitas cicilan kendaraan roda dua kepada beberapa kepala desa yang ada di 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA DESA	KECAMATAN	PIUTANG (Rp.)
	I. Yang Belum Dilunasi			
1	Irwandi	Tarantang Lubuak Limpato	Harau	1.500.000
2	Sofinar	Balai	Harau	1.500.000
3	Zulhamidi	Ampek Suku	Situjuah Limo Nagari	1.500.000
4	Syahrial	Koto Tangah Koto Lamo	Kapur IX	1.500.000
5	Nizam Ramli	Batu Hampar	Akabiluru	1.500.000
JUMLAH I				7.500.000
	II. Belum Pernah Dibayar			
1	Taharuddin	Tj. Haro Sikabu-kabu	Luak	3.000.000
2	Dasmon	Talago	Harau	3.000.000
3	Zainal S	Gunung Sanggul	Harau	3.000.000
4	Zamratul Fuad	Dalam Nagari	Situjuah Limo Nagari	3.000.000
5	Syamsir M	Alang Laweh Halaban	Lareh Sago Halaban	3.000.000
6	Al Husni Fuad	Balai Panjang Ateh	Lareh Sago Halaban	3.000.000
7	Azhar Harun	Pangkalan Utara	Pangkalan	3.000.000
8	Nasrul Salim	III Koto Tanjuang Pauh	Pangkalan	3.000.000
9	Afkar Dt. Padukak	Pantai Cermin	Pangkalan	3.000.000
10	Shahrul	Sungai Pimping	Pangkalan	3.000.000
11	Rusydi	Bukit Talao	Pangkalan	3.000.000
12	Effendi	Tanjuang Medan	Pangkalan	3.000.000
13	H. Dt. Rajo M Dalulang	Koto Tuo	Kapur IX	3.000.000
14	Dailami Khatib	II Koto Gelugur	Kapur IX	3.000.000
15	Arius M	Lubuk Koto	Kapur IX	3.000.000
16	Sari Yusri	Sialang Atas	Kapur IX	3.000.000
17	Khaidir	Tanjuang Bungo Lalo	Kapur IX	3.000.000
18	K Dt. Rajo Mangkolang	Kayu Gadang Galugur	Kapur IX	3.000.000
19	Sy. Mt. Kayo	Ronah Bengkek	Kapur IX	3.000.000
20	Makmur/ Irman Tedi	Lubuk Alai	Kapur IX	3.000.000
21	Zulhamid	Nenan	Bukik Barisan	3.000.000
22	Yahudus	Paruso Mahat	Bukik Barisan	3.000.000
23	Suharmi Warman	Piladang	Akabiluru	3.000.000
JUMLAH II				69.000.000
JUMLAH TOTAL (I+II)				76.500.000

- Piutang Bunga dan Denda Dana Bergulir per 31 Desember 2020 terdapat pada:

OPD	Bunga Dana Bergulir	Denda Dana Bergulir
-----	---------------------	---------------------

- Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag	39.264.470,00	9.356.068,76
- Dinas Peternakan dan Keswan	20.946.000,00	0,00
- Dinas Tanaman Pangan dan Holtbun	16.640.840,00	5.812.980,00
Jumlah	76.851.310,00	15.169.048,76

Rincian perhitungan bunga dan denda dari Investasi Non Permanen Lainnya ini sebagaimana terlihat pada **Lampiran 12** Laporan Keuangan ini.

- Klaim Jasa Layanan BLUD-RSUD dr. Achmad Darwis tahun 2020 sebesar Rp2.403.478.415,00 yang terdiri dari Piutang Klaim Pelayanan BPJS, Piutang Pelayanan Ambulance, Piutang Obat dan Piutang Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

1 Piutang Layanan BPJS	1.943.701.500,00
Klaim Susulan Juli thp I RITL 2020	93.822.700,00
Klaim Susulan Juli RITL Thp II 2020	19.084.500,00
Klaim November RJTL 2020	523.312.600,00
Klaim November RITL 2020	400.674.100,00
Klaim Desember RJTL 2020	453.998.100,00
KLaim Desember RITL 2020	452.809.500,00
2 Piutang Klaim Ambulance	3.585.000,00
Klaim Juli 2020	140.000,00
Klaim Agustus 2020	725.000,00
Klaim September 2020	560.000,00
Klaim Oktober 2020	560.000,00
Klaim November 2020	560.000,00
Klaim Desember 2020	1.040.000,00
3 Piutang klaim obat kronis	131.432.915,00
Obat kolektif luar paket	11.191.994,00
Klaim Agustus 2020	120.240.921,00
4 Piutang pasien umum	3.939.000,00
By Mareta	520.000,00
Ildeni	940.000,00
Sahlinar	2.479.000,00
5 Klaim Covid-19 Dana Kemenkes	320.820.000,00
Klaim April Dispute I 2020	37.500.000,00
Klaim April Dispute II 2020	60.000.000,00
Klaim Mei Dispute I 2021	134.960.000,00
Klaim Mei Dispute I 2020	50.860.000,00
Klaim Juni Dispute II 2020	37.500.000,00
JUMLAH	2.403.478.415,00

Untuk piutang klaim rawatan BPJS RSUD dr. Achmad darwis telah dilunasi oleh pihak BPJS dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jenis Piutang	Nilai Piutang	Tanggal Pembayaran
	KLAIM PELAYANAN RITL & RJTL BPJS 2019	1.943.701.500,00	
1	Klaim Susulan Juli thp I RITL 2020	93.822.700,00	13 Januari 2021
2	Klaim Susulan Juli RITL Thp II 2020	19.084.500,00	26 Januari 2021
3	Klaim November RJTL 2020	523.312.600,00	11 Januari 2021
4	Klaim November RITL 2020	400.674.100,00	
5	Klaim Desember RJTL 2020	453.998.100,00	15 Februari 2021
6	KLaim Desember RITL 2020	452.809.500,00	
	AMBULANCE	3.585.000,00	
1	Klaim Juli 2020	140.000,00	10 Februari 2021
2	Klaim Agustus 2020	725.000,00	
3	Klaim September 2020	560.000,00	
4	Klaim Oktober 2020	560.000,00	
5	Klaim November 2020	560.000,00	
6	Klaim Desember 2020	1.040.000,00	
	JUMLAH PIUTANG	1.947.286.500,00	

-Piutang Non Kapitasi BLUD Puskesmas tahun 2020 sebesar Rp354.748.500,00 merupakan piutang jasa layanan puskesmas yang terdapat pada beberapa BLUD Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Unit Kerja	Total Piutang Non Kapitasi	Bulan			
			September	Oktober	November	Desember
1	Puskesmas Situjuh	22.759.000,00	0,00	7.030.000,00	5.849.000,00	9.880.000,00
2	Puskesmas Suliki	5.030.000,00	0,00	1.440.000,00	680.000,00	2.910.000,00
3	Puskesmas Dandung-Dandung	14.100.000,00	0,00	4.200.000,00	3.600.000,00	6.300.000,00
4	Puskesmas Batu Hampar	16.805.000,00	0,00	5.110.000,00	4.290.000,00	7.405.000,00
5	Puskesmas Piladang	9.190.000,00	0,00	1.240.000,00	4.775.000,00	3.175.000,00
6	Puskesmas Tanjung Pati	28.440.000,00	0,00	12.015.000,00	3.050.000,00	13.375.000,00
7	Puskesmas Mungka	4.095.000,00	0,00	260.000,00	1.760.000,00	2.075.000,00
8	Puskesmas Rimbo Data	3.174.200,00	0,00	2.477.100,00	697.100,00	0,00
9	Puskesmas Baruah Gunuang	13.025.000,00	0,00	4.295.000,00	2.355.000,00	6.375.000,00
10	Puskesmas Pangkalan	23.987.000,00	0,00	9.368.000,00	6.786.000,00	7.833.000,00
11	Puskesmas Halaban	10.144.000,00	0,00	3.527.000,00	2.417.000,00	4.200.000,00
12	Puskesmas Banja Loweh	6.361.300,00	0,00	2.327.100,00	1.357.100,00	2.677.100,00
13	Puskesmas Koto Tinggi	4.260.000,00	700.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00
14	Puskesmas Pakan Rabaa	23.235.000,00	0,00	4.075.000,00	7.930.000,00	11.230.000,00
15	Puskesmas Taram	23.150.000,00	0,00	5.015.000,00	7.770.000,00	10.365.000,00
16	Puskesmas Koto Baru Simalanggang	39.385.000,00	0,00	14.455.000,00	12.655.000,00	12.275.000,00
17	Puskesmas Gunung Malintang	10.193.000,00	0,00	3.100.000,00	4.026.000,00	3.067.000,00
18	Puskesmas Muaro Paiti	44.500.000,00	10.348.000,00	9.888.000,00	11.470.000,00	12.794.000,00

19	Puskesmas Sialang	19.486.000,00	0,00	0,00	0,00	19.486.000,00
20	Puskesmas Mungo	13.430.000,00	0,00	4.075.000,00	1.740.000,00	7.615.000,00
21	Puskesmas Maek	19.999.000,00	3.997.000,00	3.208.000,00	8.266.000,00	4.528.000,00
Jumlah		354.748.500,00	15.045.000,00	97.105.200,00	91.473.200,00	151.125.100,00

Tidak terdapat piutang TPTGR Tahun 2020 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Piutang TPTGR merupakan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlaknya (SKTJM) oleh Majelis TPTGR.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2.202.891.322,00	3.748.918.450,00

Piutang tersebut merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp2.202.891.322,00 dan Rp3.748.918.450,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
1	Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	2.202.891.322,00	3.748.918.450,00
	JUMLAH	2.202.891.322,00	3.748.918.450,00

Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.202.891.322,00. Besaran piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019 ditetapkan dengan mengacu kepada PMK Nomor No.20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil tahun 2018 dan PMK Nomor 36/PMK.07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2019 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2018 dan 2019 untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp3.748.918.450,00 dan telah terealisasi sebesar Rp2.932.966.268,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp815.952.182,00. Karena kondisi Keuangan Negara dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) yang dapat mengancam dan membahayakan perekonomian nasional maka Penyaluran terhadap kekurangan piutang tidak dapat ditindaklanjuti. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 Tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun 2020.

Berikut realisasi piutang Transfer Pemerintah Pusat selama tahun 2020 :

NO	KETERANGAN	PIUTANG TRANSFER 2019	PENETAPAN 2020	REALISASI 2020	KURANG/ TIDAK SALUR	TGL TERIMA DI KASDA
1.	Piutang DBH PPH	2.134.108.549,00	2.134.108.549,00	2.134.108.549,00	-	
	PPH Pasal 21 (PMK No.20/PMK.07/2020)		708.018.602,00	708.018.602,00	-	27 Juli 2020

NO	KETERANGAN	PIUTANG TRANSFER 2019	PENETAPAN 2020	REALISASI 2020	KURANG/ TIDAK SALUR	TGL TERIMA DI KASDA
	PPH Pasal 21 (PMK No.36/PMK.07/2020)		1.122.288.926,00	1.122.288.926,00	-	28 Juli 2020
	PPH Pasal 25/29 (PMK No.20/PMK.07/2020)		141.400.998,00	141.400.998,00	-	27 Juli 2020
	PPH Pasal 25/29 (PMK No.36/PMK.07/2020)		162.400.023,00	162.400.023,00	-	28 Juli 2020
2.	Piutang DBH PBB bagi rata	782.615.269,00	782.615.269,00	585.974.334,00	196.640.935,00	
	DBH PBB Bagi rata (PMK No.20/PMK.07/2020)		585.974.334,00	585.974.334,00	-	27 Juli 2020
	DBH PBB Bagi rata (PMK No.36/PMK.07/2020)		196.640.935,00	-	196.640.935,00	Tidak Salur
3.	DBH PBB Perkebunan	473.024.873,00	473.024.873,00	119.999.109,00	353.025.764,00	-
	DBH PBB Perkebunan (PMK No.20/PMK.07/2020)		71.132.768,00	71.132.768,00	-	27 Juli 2020
	DBH PBB Perkebunan (PMK No.36/PMK.07/2020)		87.078.684,00	-	87.078.684,00	Tidak Salur
	DBH PBB minyak Bumi dan Gas (PMK No.20/PMK.07/2020)		6.316.736,00	6.316.736,00	-	27 Juli 2020
	DBH PBB minyak Bumi dan Gas (PMK No.36/PMK.07/2020)		188.721.232,00	-	188.721.232,00	Tidak Salur
	DBH PBB non minyak Bumi dan Gas lainnya (PMK No.20/PMK.07/2020)		5.203.107,00	5.203.107,00	-	27 Juli 2020
	DBH PBB non minyak Bumi dan Gas lainnya (PMK No.36/PMK.07/2020)		53.670.100,00	-	53.670.100,00	Tidak Salur
	DBH PBB Sektor Lainnya (PMK No.20/PMK.07/2020)		37.346.498,00	37.346.498,00	-	27 Juli 2020
	DBH PBB Sektor Lainnya (PMK No.36/PMK.07/2020)		23.555.748,00	-	23.555.748,00	Tidak Salur
4.	Piutang DBH PBB Biaya Pemungutan	15.336.950,00	15.336.950,00	4.321.263,00	11.015.687,00	
	Biaya Pungut Perkebunan (PMK No.20/PMK.07/2020)		2.963.865,00	2.963.865,00	-	27 Juli 2020

NO	KETERANGAN	PIUTANG TRANSFER 2019	PENETAPAN 2020	REALISASI 2020	KURANG/ TIDAK SALUR	TGL TERIMA DI KASDA
	Biaya Pungut Perkebunan (PMK No.36/PMK.07/2020)		3.628.204,00	-	3.628.204,00	Tidak Salur
	Biaya Pungut Pertambangan minyak bumi dan gas (PMK No.20/PMK.07/2020)		175.465,00	175.465,00	-	27 Juli 2020
	(PMK No.36/PMK.07/2020) Biaya Pungut Pertambangan minyak bumi dan gas		5.242.198,00	-	5.242.198,00	Tidak Salur
	Biaya Pungut Pertambangan non minyak bumi dan gas lainnya (PMK No.20/PMK.07/2020)		144.530,00	144.530,00	-	27 Juli 2020
	Biaya Pungut Pertambangan non minyak bumi dan gas lainnya (PMK No.36/PMK.07/2020)		1.490.914,00	-	1.490.914,00	Tidak Salur
	Biaya Pungut Pertambangan sektor lainnya (PMK No.20/PMK.07/2020)		1.037.403,00	1.037.403,00	-	27 Juli 2020
	Biaya Pungut Pertambangan sektor lainnya (PMK No.36/PMK.07/2020)		654.371,00	-	654.371,00	Tidak Salur
5.	Piutang DBH CHT	84.885.724,00	84.885.724,00	84.885.724,00	-	27 Juli 2020
	DBH CHT (PMK No.20/PMK.07/2020)		84.885.724,00	84.885.724,00	-	27 Juli 2020
6.	Piutang DBH Bukan Pajak/SDA	258.947.085,00	258.947.085,00	3.677.289,00	255.269.796,00	
	DBH Sumber daya alam perikanan (PMK No.20/PMK.07/2020)		3.677.289,00	3.677.289,00	-	27 Juli 2020
	DBH SDA Kehutanan (PMK No.36/PMK.07/2020)		55.098.742,00	-	55.098.742,00	Tidak Salur
	DBH SDA Mineral dan Batubara (PMK No.36/PMK.07/2020)		24.286.734,00	-	24.286.734,00	Tidak Salur
	SDA Panas Bumi (PMK No.36/PMK.07/2020)		5.256.417,00	-	5.256.417,00	Tidak Salur

NO	KETERANGAN	PIUTANG TRANSFER 2019	PENETAPAN 2020	REALISASI 2020	KURANG/ TIDAK SALUR	TGL TERIMA DI KASDA
	SDA Perikanan (PMK No.36/PMK.07/2020)		170.627.903,00	-	170.627.903,00	Tidak Salur
	JUMLAH	3.748.918.450,00	3.748.918.450,00	2.932.966.268,00	815.952.182,00	

Piutang Kurang Salur Dana Bagi Hasil Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 25/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut maka piutang kurang salur dana bagi hasil untuk Kabupaten Lima puluh kota yang masih tersisa tahun 2020 sebesar Rp815.952.182,00 dilakukan penyesuaian menjadi :

Rincian Kurang Bayar Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Jenis	Tahun	Jumlah (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	2020	40.039.775,00
2	Dana Bagi Hasil PPH pasal 21 dan 25/29	2020	1.106.967.000,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	2020	702.216.578,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2020	70.963.184,00
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu bara	2020	40.108.150,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	2020	53.297.675,00
7	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	2020	316.881.000,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi	2020	516.000,00
	Jumlah kurang Bayar TA 2020		2.330.989.362,00

Rincian Lebih Bayar Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Jenis	Tahun	Jumlah (Rp)
1	Dana Bagi Hasil sampai TA 2018 yang belum diselesaikan Sumber Daya Alam Kehutanan	2018	18.335.098,00
2	Dana Bagi Hasil sampai TA 2018 yang belum diselesaikan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	2018	49.653.012,00
3	Dana Bagi Hasil sampai TA 2018 yang belum diselesaikan Sumber Daya Alam Panas Bumi	2018	722.577,00
4	Dana Bagi Hasil sampai TA 2019 yang belum diselesaikan Sumber Daya Alam Kehutanan	2019	13.894.144,00
5	Dana Bagi Hasil sampai TA 2019 yang belum diselesaikan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	2019	45.493.209,00
	Jumlah lebih Bayar TA 2020		128.098.040,00

Sehingga untuk Tahun Anggaran 2020 ditetapkan jumlah Piutang Transfer Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.202.891.322,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
f. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.643.804.567,00	0,00
Besaran Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Pajak Provinsi ditetapkan dengan mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/Pjk-B.Keuda/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Penetapan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.		
Rincian piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut:		
1. PKB	4.853.137.856,00	0,00
2. BBNKB	989.170.243,00	0,00
3. PBBKB	3.792.668.814,00	0,00
4. PAP	8.827.654,00	0,00
5. Pajak Rokok	0,00	0,00
Jumlah	9.643.804.567,00	0,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.1.3. Penyisihan Piutang Pendapatan	(3.100.401.521,59)	(4.430.078.043,30)

Jumlah tersebut merupakan penyisihan Piutang Tahun 2020 dan 2019, penyisihan piutang tersebut dapat dirinci atas:

1 Penyisihan Piutang Pajak	(2.845.234.103,80)	(4.186.483.307,05)
2 Penyisihan Piutang Retribusi	(12.636.000,00)	(4.465.300,00)
3 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	(2.070.000,00)	(17.162.592,53)
4 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(181.115.943,34)	(203.222.251,47)
5 Penyisihan Piutang Transfer pemerintah pusat /dana perimbangan	(11.014.456,61)	-
6 Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	(48.219.022,84)	-
7 Penyisihan Piutang Lainnya	-	(18.744.592,25)
Jumlah	(3.100.289.526,59)	(4.430.078.043,30)

Rincian perhitungan Penyisihan Piutang tersebut sebagaimana terlihat pada **Lampiran 8** Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.1.4.4. Persediaan	18.394.043.520,45	11.387.077.422,23

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

a.	ATK, Barang Cetak	658.207.325,00	646.164.521,00
b.	Obat-Obatan	5.435.011.814,33	4.561.204.479,17
c.	Bahan Kimia	0,00	42.550.000,00
d.	Alat Listrik	24.074.500,00	16.895.730,00
e.	Alat Kebersihan	61.701.950,00	48.897.762,00
f.	Alat Kesehatan	614.863.407,42	457.937.279,59
g.	Alat Labor	172.704.592,60	0,00
h.	Bahan Gizi	41.985.653,00	43.736.410,00
i.	Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi	383.150.725,00	295.219.775,00
j.	Lain-Lain	11.002.343.553,10	5.274.471.465,47
	Jumlah	18.394.043.520,45	11.387.077.422,23

Rekapitulasi Persediaan per OPD sebagaimana terlihat pada **Lampiran 9** Laporan Keuangan-Daerah ini.

Persediaan Obat-obatan senilai Rp5.435.011.814,33 yang terdapat pada lima OPD sebagaimana terlihat pada **Lampiran 10** Laporan Keuangan ini.

Berdasarkan hasil stock opname obat dan BMHP pada Instalasi Farmasi RSUD dr Achmad Darwis maka dilaporkan obat dan BMHP yang *expire date* selama Tahun 2020 adalah senilai Rp3.550.342,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA OBAT	SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL
1	Benzatin Benzil Penisilin	Vial	10,00	10.289,00	102.890,00
2	Cetirizin Syrup	Botol	100,00	2.907,30	290.730,00
3	Fenobarbital Injeksi	Ampul	10,00	1.740,00	17.400,00
4	Fenoglisierol	Botol	48,00	2.590,00	124.320,00
5	Infuset Anak	Picis	50,00	20.900,00	1.045.000,00
6	KAEN 3 B Infus	Botol	40,00	10.285,00	411.400,00
7	Phetidin Injeksi	Ampul	16,00	13.191,44	211.063,00
8	Sotatic injeksi	Ampul	261,00	2.798,40	730.382,00
9	Vascon Tetes mata	Botol	14,00	16.981,00	237.734,00
10	HES Infus	Botol	17,00	22.319,00	379.423,00
	Total				3.550.342,00

Persediaan Lain-lain tahun 2020 terdapat pada 12 (dua belas) OPD dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp1.579.375.465,10 terdiri atas:
 - Persediaan PMT Rp. 882.475.453,10
 - Persediaan Peralatan Dokter Pakai Habis Rp. 694.780.412,00

- | | | | |
|---|-----------------------------------|-----|--------------|
| - | Persediaan Barang Logistik Kantor | Rp. | 2.119.600,00 |
|---|-----------------------------------|-----|--------------|
2. RSUD dr.Achmad Darwis sebesar Rp1.407.081.111,00 terdiri atas:
- | | | | |
|---|--|-----|----------------|
| - | Persediaan Oksigen | Rp. | 3.139.000,00 |
| - | Persediaan BBM Operasional Kantor | Rp. | 3.571.750,00 |
| - | Persediaan Rumah Tangga (Dana BTT) | Rp. | 26.918.760,00 |
| - | Persediaan donasi Rumah Tangga | Rp. | 2.375.000,00 |
| - | Persediaan BHP Farmasi (Donasi Covid-19) | Rp. | 12.718.000,00 |
| - | Persediaan BHP Ruang Logistik (Donasi Covid-19) | Rp. | 708.987.000,00 |
| - | Persediaan BHP Farmasi (Dana BTT) | Rp. | 649.371.601,00 |
3. Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp2.350.000,00 terdiri dari:
- | | | | |
|---|--------------|-----|--------------|
| - | Tali webbing | Rp. | 1.000.000,00 |
| - | Tali Perusik | Rp. | 500.000,00 |
| - | Tali plastik | Rp. | 850.000,00 |
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp594.259.000,00 berupa Alat Pendidikan Pakai Habis (BKB KIT,BKL BID,BKBD)
5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman sebesar Rp19.002.750,00 terdiri dari:
- | | | | |
|---|-------------------------------|-----|---------------|
| - | Persediaan Bahan Bakar Minyak | Rp. | 11.100.000,00 |
| - | Persediaan Tong Sampah Pilah | Rp. | 7.902.750,00 |
6. Dinas Perhubungan sebesar Rp187.500.000,00 berupa smart card bukti lulus uji.
7. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp469.320.000,00 berupa persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat yang terdiri dari:
- | | | | |
|---|-------------------------|-----|----------------|
| - | Rehab Lubuak Alai | Rp. | 159.780.000,00 |
| - | Rehab Pasar Koto Baru | Rp. | 149.760.000,00 |
| - | Rehab Pasar Muara Paiti | Rp. | 159.780.000,00 |
8. Dinas Perikanan sebesar Rp130.103.280,00 berupa persediaan benih ikan Rp7.650.000,00 dan persediaan pakan ikan Rp122.453.280,00.
9. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebesar Rp30.532.000,00 berupa persediaan bibit tanaman.
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp35.997.575,00 berupa Persediaan Bibit Ternak Rp22.842.575,00 dan persediaan peralatan dokter pakai habis Rp13.155.000,00.
11. Sekretariat Daerah sebesar Rp119.919.872,00 berupa persediaan alat kantor dan rumah tangga.

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp135.540.000,00 berupa persediaan Perlengkapan Kantor Pakai Habis Rp10.250.000,00 dan Peralatan Dokter Pakai Habis Rp125.290.000,00.
13. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6.291.362.500,00 berupa pekerjaan MCK yang masih belum dilengkapi Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI
1	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Batu Hampa Kecamatan Akabiluru	314.550.000,00
2	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru	314.550.000,00
3	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh	314.550.000,00
4	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru	314.550.000,00
5	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru	314.550.000,00
6	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Pauah Sangik Kecamatan Akabiluru	314.550.000,00
7	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban	314.550.000,00
8	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban	314.550.000,00
9	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban	314.550.000,00
10	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	314.550.000,00
11	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Taram Kecamatan Harau	314.550.000,00
12	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Mungka Kecamatan Mungka	314.550.000,00
13	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka	314.562.500,00
14	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka	314.600.000,00
15	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Limbanang Kecamatan Suliki	314.600.000,00
16	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki	314.600.000,00
17	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Andiang Kecamatan Suliki	314.600.000,00
18	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan	314.600.000,00
19	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan	314.600.000,00

NO	URAIAN	NILAI
20	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan	314.600.000,00
	JUMLAH	6.291.362.500,00

Persediaan Lain-lain senilai Rp11.002.343.553,10 yang terdapat pada 13 (tiga belas) OPD sebagaimana terlihat pada **Lampiran 11** Laporan Keuangan ini.

5.3.2 Investasi Jangka Panjang	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	50.254.026.938,49	48.050.608.052,01

Investasi Jangka Panjang Tahun 2020 dan tahun 2019 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1 Investasi Non Permanen bersih	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	317.789.237,00	448.392.938,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019. Investasi dimaksud berupa penyaluran Dana Bergulir kepada sekelompok masyarakat, unit usaha kecil dan menengah. Penerima berkewajiban mengembalikan dana tersebut ke instansi teknis pengelola, guna digulirkan kembali ke masyarakat atau kelompok lainnya yang memerlukan. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir tersebut masih merupakan Investasi Non Permanen-Dana Bergulir lama yang dikelola oleh tiga OPD dan belum dalam bentuk BLU.

Nilai Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir tersebut disajikan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 07 Akuntansi Dana bergulir, dimana nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang dicatat di neraca menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Telah dilakukan penyisihan terhadap Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang tidak tertagih berdasarkan jatuh temponya (*aging schedule*). Hal ini diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun Nilai Bersih Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh tiga OPD tersebut untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

No	SKPD Pengelola	2020	2019
1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		
a.	Investasi Non Permanen Lainnya	256.000.000,00	256.000.000,00
b.	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(234.696.141,00)	(104.546.690,00)
c.	Investasi Non Permanen Bersih	21.303.859,00	151.453.310,00
2	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan		
a.	Investasi Non Permanen Lainnya	389.196.328,00	389.196.328,00

No	SKPD Pengelola		2020	2019
	b.	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(141.817.450,00)	(141.817.450,00)
	c.	Investasi Non Permanen Bersih	247.378.878,00	247.378.878,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
	a.	Investasi Non Permanen Lainnya	115.000.000,00	115.000.000,00
	b.	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(65.893.500,00)	(65.439.250,00)
	c.	Investasi Non Permanen Bersih	49.106.500,00	49.560.750,00
Jumlah Kabupaten Lima Puluh Kota				
	a.	Investasi Non Permanen Lainnya	760.196.328,00	760.196.328,00
	b.	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(442.407.091,00)	(311.803.390,00)
	c.	Investasi Non Permanen Bersih	317.789.237,00	448.392.938,00

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, maka penyisihan investasi non permanen lainnya dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dimulai sejak jatuh tempo.

Saldo dana pada rekening penampung pengembalian pokok, bunga dan denda disimpan oleh Pengelola Investasi Non Permanen lainnya dari 3 OPD Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.788.824.705,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD Pengelola	No Rekening di Bank Nagari	Saldo per 31 Des 2020	Saldo per 31 Des 2019
1	Dinas Koperasi,UMKM dan Perindag	0100.0207.05310-1	234.696.141,00	232.274.206,00
2	Dinas Tanpanhol			
	• Eks Tanaman Pangan	0100.0207.18667-1	1.375.796.328,00	1.279.850.525,00
	• Eks Perkebunan untuk pengembalian pokok	0100.0207.03451-8	7.706.817,00	7.706.817,00
	• Eks Perkebunan untuk pengembalian bunga	0100.0207.03449-1	111.208.140,00	111.208.140,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
	• Pokok RRMCM	0100.0207.01387-4	11.009.144,00	11.004.529,00
	• Pokok KSP	0100.0210.01672-6	48.408.135,00	48.082.948,00
	• Bunga KSP	0100.0210.01673-8	0,00	0,00
		Jumlah	1.788.824.705,00	1.690.127.165,00

Dana Bergulir pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura bersumber dari Dana APBN dan Dana APBD. Dana Bergulir yang bersumber dari dana APBN diperoleh Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2008 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan kelembagaan pangan di pedesaan Tahun 2001 dengan jumlah dana sebesar Rp1.350.000.000,00
2. Rice Milling Unit (PMI) Tahun 2002 dengan jumlah dana sebesar Rp123.500.000,00
3. Peningkatan mutu intensitas padi Tahun 2002 s/d 2006 dengan jumlah dana sebesar Rp1.894.350.000,00
4. Pengembangan Agribisnis Jagung Tahun 2002 s/d 2003 dengan jumlah dana sebesar Rp489.219.350,00
5. Pengembangan Agribisnis Manggis Tahun 2002 s/d 2006 dengan jumlah dana sebesar Rp1.186.762.500,00
6. Pengembangan dan Perluasan Jeruk Tahun 2006 s/d 2007 dengan jumlah dana sebesar Rp659.512.925,00
7. Pengembangan Sayur Organik dan Holtikultura Terintegrasi Ternak Tahun 2007 dengan jumlah dana sebesar Rp135.300.000,00
8. Konservasi Lahan Tahun 2007 dengan jumlah dana sebesar Rp124.979.750,00
9. Pembinaan dan Ketahanan Masyarakat Tahun 2002 s/d 2006 dengan jumlah dana sebesar Rp404.500.000,00
10. P2TP (Kredit Mikro) Tahun 2001 dengan jumlah dana sebesar Rp15.000.000,00
11. Penangkar SPL OCEF Tahun 2002 dengan jumlah dana sebesar Rp39.576.200,00
12. Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Tahun 2008 dengan jumlah dana sebesar Rp269.960.000,00

Seluruh dana awal tersebut dan gulirannya disatukan menjadi Dana Revolving yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mulai Tahun 2004 s/d Tahun 2018. Mulai tahun 2019 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tidak menggulirkan lagi dana revolving dan hanya menerima setoran pinjaman dari yang belum lunas dengan jumlah pengembalian sebesar ± Rp615.000.000,00 dari Januari 2019 s/d Desember 2020 yang disetor langsung ke rekening Bendahara Revolving. Jumlah dana yang tersedia di rekening sampai keadaan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.375.796.328,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Dana bergulir pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota digulirkan dari tahun 2002 s/d 2008 dengan debitur kelompok dan perorangan dengan jumlah total dana awal sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Seiring berjalannya waktu pembayaran debitur, mulai terjadi penunggakan pengembalian dana.

Dana bergulir yang direalisasikan pada tahun 2003, 2007 dan 2008 yaitu diperuntukan untuk menunjang / penguatan modal usaha bagi peternak ayam buras dan ras dengan dana yang diterima sebanyak Rp5.000.000,00/orang dengan perguliran I (pertama) tahun 2003 sebanyak Rp65.000.000,00. Pada tahun 2007 digulirkan lagi sebanyak Rp30.000.000,00 dan tahun 2008 sebanyak Rp25.000.000,00. Jadi uang yang digulirkan kepada masyarakat/perorangan sebanyak Rp120.000.000,00 dengan modal awal Rp65.000.000,00 (tahun 2007 dan 2008 uang hasil perguliran). Selanjutnya setelah berjalannya kegiatan dana bergulir ini dengan berbagai

kendala mengalami penunggakan. Sampai tahun 2016 hanya 12 (dua belas) orang debitur yang melunasi dana bergulir dari 24 (dua puluh empat) debitur dan yang lainnya tidak tertagih dengan beberapa alasan dan selanjutnya sampai tahun 2020 tidak ada debitur melunasi dana bergulir.

Dari hasil monitoring, evaluasi penagihan kredit tidak dapat dilakukan karena :

1. Terjadinya wabah penyakit ayam, menyebabkan ayam banyak mati.
2. Pindahanya debitur ke tempat lain berdasarkan keterangan Wali Nagari.
3. Debitur menyatakan tidak sanggup lagi membayar dana bergulir dengan alasan masyarakat ekonomi lemah (Keterangan Wali Nagari).

Dana bergulir pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berawal dari guliran dana APBD Tahun 2003 sebanyak Rp106.000.000,00 untuk 3 (tiga) koperasi sebagai berikut:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.	KUD TARAM	53.000.000,00
2.	KUD SEMANGAT BARU	26.500.000,00
3.	KOPINKRA BERKAH	26.500.000,00
	JUMLAH	106.000.000,00

Tahun 2004 terdapat lagi guliran sebesar Rp150.000.000,00 untuk 3 (tiga) koperasi dan 5 (lima) pengusaha kecil sebagai berikut :

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.	KSU BALAI TALANG	40.000.000,00
2.	KSU BINA AL FALAH	40.000.000,00
3.	KSU PKK KOTO TINGGI	40.000.000,00
4.	PENGUSAHA KECIL BERINGIN PROJECT	6.000.000,00
5.	PENGUSAHA KECIL PATOGA KERAMIK	6.000.000,00
6.	PENGUSAHA KECIL BORDIR MUTIARA	6.000.000,00
7.	PENGUSAHA KECIL 4 BERSAUDARA	6.000.000,00
8.	PENGUSAHA KECIL KARYA BERKAH	6.000.000,00
	JUMLAH	150.000.000,00

Dari penerimaan angsuran pokok dana tersebut diatas tahun 2003 dan 2004 digulirkan kembali tahun 2006 sebesar Rp75.000.000,00 untuk 15 (lima belas) pengusaha kecil dengan rincian:

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.	PENGUSAHA KECIL MUTIA	5.000.000,00
2.	PENGUSAHA KECIL SINTANI MAKMUR	5.000.000,00
3.	PENGUSAHA KECIL STAR MOTOR SPORT	5.000.000,00
4.	PENGUSAHA KECIL PUTRA BUNGSU	5.000.000,00
5.	PENGUSAHA KECIL FAIZAH COLLECTION	5.000.000,00
6.	PENGUSAHA KECIL IKHTIA	5.000.000,00

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rp)
7.	PENGUSAHA KECIL LADIES KONVEKSI	5.000.000,00
8.	PENGUSAHA KECIL BUNGA TANJUNG	5.000.000,00
9.	PENGUSAHA KECIL REMANTA	5.000.000,00
10.	PENGUSAHA KECIL GODEFA	5.000.000,00
11.	PENGUSAHA KECIL CIPTA	5.000.000,00
12.	PENGUSAHA KECIL EVI	5.000.000,00
13.	PENGUSAHA KECIL KARYA BERSAMA	5.000.000,00
14.	PENGUSAHA KECIL MITRA KARYA SEJATI	5.000.000,00
15.	PENGUSAHA KECIL MUKMIN TAILOR	5.000.000,00
	JUMLAH	75.000.000,00

5.3.2.2 Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	49.936.237.701,49	47.602.215.114,01

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan pada posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Investasi Jangka Panjang sejumlah tersebut ditempatkan pada satu Perusahaan Daerah yang hak kepemilikannya berada pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada perusahaan lembaga keuangan dengan hak kepemilikan minoritas dan tidak memiliki kendali signifikan atas manajemen serta pada PT Balairung Citrajaya Sumbar. Jumlah penyertaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada masing-masing Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V.3.42 Rincian Investasi Permanen

No	Jenis Penyertaan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota	24.927.237.701,49	22.593.215.114,01
2	PT Bank Nagari	23.584.000.000,00	23.584.000.000,00
3	Bank Perkreditan Rakyat (6 BPR)	425.000.000,00	425.000.000,00
4	PT.Balairung Citrajaya Sumbar	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	49.936.237.701,49	47.602.215.114,01

a. Nilai penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan 31 Desember 2020 setelah diakumulasikan dengan kerugian adalah sebesar Rp24.925.559.155,86 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Rincian Perhitungan Kepemilikan Modal sebelum memperhitungkan laba/rugi PDAM

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Penyertaan Pemerintah Pusat	15.875.036.144,00	15.875.036.144,00
2	Penyertaan Pemerintah Daerah (Pemda)	44.007.327.693,00	39.532.955.693,00
3	Penyertaan Pemerintah Daerah yang	1.975.884.400,00	1.975.884.400,00

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	belum ditetapkan statusnya		
4	Hibah	198.000.000,00	198.000.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal	62.056.248.237,00	57.581.876.237,00

2) Berdasarkan informasi Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Unaudit, didapatkan informasi bahwa:

a. Akumulasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 2020	(24.596.946.906,00)
b. Rugi Tahun Berjalan 2020	(2.310.912.017,00)
Jumlah Akumulasi kerugian	(26.907.858.923,00)

Berdasarkan data nilai penyertaan modal Pemda dan nilai kerugian PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota serta persentase saham Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota, maka nilai penyertaan modal Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 berdasarkan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

- Persentase modal netto (Penyertaan modal Pemda per total Penyertaan modal PDAM x 100 %)	70,92%
- Modal Netto (Total Modal- Akumulasi kerugian)	35.148.389.314,00
- Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota (% persentase Modal netto x Modal Netto)	24.927.237.701,49

Nilai Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota ke PDAM per 31 Desember 2019 24.927.237.701,49

Sehingga terdapat peningkatan nilai Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota pada PDAM Tahun 2020 sebesar Rp2.334.022.587,47 (Rp24.927.237.701,49–Rp.22.593.215.114,01).

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk PDAM sebesar Rp2.350.000.000,00 dengan bukti pengeluaran SP2D Nomor 294/LS/2020 tanggal 2 Juni 2020.

Laporan Keuangan PDAM tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 13** Laporan Keuangan Daerah ini.

PT Bank Nagari 23.584.000.000,0 17.225.000.000,00

Nilai Penyertaan modal pada Bank Nagari Sumatera Barat per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.584.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Penyertaan Modal PT.Bank Nagari	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Modal ditempatkan dan disetor penuh (15.225 lembar. saham seri A @ Rp1.000.000,00)	15.225.000.000,00	15.225.000.000,00
2.	Tambahan modal disetor s.d 31 Desember	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

No	Penyertaan Modal PT.Bank Nagari	Tahun 2020	Tahun 2019
	2017		
3.	Tambahan Modal disetor s.d 31 Desember 2019	6.359.000.000,00	6.359.000.000,00
	Jumlah	23.584.000.000,00	23.584.000.000,00

Penyertaan Modal pada Bank Nagari Sumatera Barat tersebut telah memberikan kontribusi dalam bentuk setoran laba/deviden tunai sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada Tahun 2020 berjumlah Rp3.195.997.260,00 yang merupakan penerimaan Dividen tahun buku 2019 yang diterima pada Kas Daerah tanggal 29 April 2020.

Bank Perkreditan Rakyat **425.000.000,00** **425.000.000,00**

Jumlah tersebut merupakan Investasi Jangka Panjang yang ditempatkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Enam PT Bank Perkreditan Rakyat berupa Penyertaan dalam Modal Saham pada posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Penyertaan modal tersebut disalurkan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 925/BLK-2003 tanggal 30 Desember 2003. Rincian penyaluran dana dan besarnya persentase penyertaan adalah sebagai berikut:

	Jumlah Penyertaan Modal	Total Saham BPR	% Kepemilikan
- BPR Suliki Gunung Mas	100.000.000,00	5.000.000.000,00	2,00
- BPR Harau	75.000.000,00	6.400.000.000,00	1,17
- BPR Padang Kuning	50.000.000,00	1.338.260.000,00	3,74
- BPR Labuh Gunung	50.000.000,00	1.764.310.000,00	2,83
- BPR Taeh Baruah	50.000.000,00	2.756.180.000,00	1,81
- LPN Tambun Ijuk	100.000.000,00	1.950.000.000,00	5,13
Jumlah	425.000.000,00		

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPD dulunya ada pada 7 (tujuh) BPR dan sekarang pada 6 (enam) BPR, karena Penyertaan Modal pada BPR Kampuang Baru dipindahkan ke Aset Lainnya. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada BPR Kampung Baru sebesar Rp100.000.000,00. Namun sesuai dengan Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Nomor S-572/KO.52/2014 tanggal 18 November 2014 menginformasikan bahwa PT BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti ditetapkan Dalam status Pengawasan Khusus (DPK), dan pada Website LPS.BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti telah dinyatakan berstatus Dalam Liquidasi (DL) pada tanggal 2 Maret 2015, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/KDK.03/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti. BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti tersebut Selesai Likuidasi.

Penyertaan Modal pada PT Bank Perkreditan Rakyat tersebut telah memberikan kontribusi dalam bentuk setoran laba/deviden tunai sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada Tahun 2020, jumlah deviden yang diterima senilai Rp30.733.746,00

Penerimaan Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, hanya diperoleh dari:

BPR Suliki Gunung Mas	14.240.000,00	diterima tanggal: 02/03/2020
BPR Harau	16.493.746,00	diterima tanggal: 04/05/2020
Jumlah Rp	<u>30.733.746,00</u>	

Terkait dengan kecilnya deviden yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari BPR, hal ini disebabkan larangan distribusi laba dalam rangka pemenuhan modal inti minimum BPR sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar) oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016.

RUPS PT BPR Lumbang Pitih Nagari Taeh Baruh tanggal 28 Januari 2021 (setelah tanggal neraca) memutuskan dan menetapkan jumlah kepemilikan saham Pemda Kab Lima Puluh Kota naik dari Rp50.000.000,00 menjadi Rp80.650.000,00 atau dari 1,41% menjadi 1,61%. Penambahan penyertaan modal berasal dari laba bersih tahun 2015 sd 2020 yang tidak dibagikan karena mengikuti Peraturan OJK Nomor 5 /POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR.

PT Balairung Citrajaya Sumbar **1.000.000.000,00** **1.000.000.000,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pembiayaan bersama Pembangunan Mess (PT. Balairung) Perwakilan Sumatera Barat di Jakarta. Realisasi pencairan dana APBD Tahun 2007 ke rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.000.000.000,00, sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3355/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.

5.3.3 Aset Tetap	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
	1.617.261.307.389,36	1.595.265.752.945,69

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Tahun 2020 dan Tahun 2019 Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2019 tersebut meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo dan mutasi dari masing-masing golongan Aset Tetap per 31 Desember 2020 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.3.43 Rincian Aset Tetap

No	Uraian	Permendagri 64/2013		Permendagri 108/2016
		saldo awal Per 31-12-2019	Saldo Akhir Per 31-12-2020	Saldo Akhir Per 31-12-2020
1	Tanah	116.865.485.811,00	115.939.065.391,00	115.939.065.391,00
2	Peralatan dan Mesin	384.956.130.842,98	426.594.201.933,02	437.276.755.985,61
3	Gedung dan Bangunan	771.612.773.814,18	813.444.997.602,18	808.776.804.375,18
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.547.785.073.839,82	1.603.703.199.908,82	1.603.703.199.908,82
5	Aset Tetap Lainnya	100.230.824.023,00	108.952.159.020,00	102.937.798.194,41
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.535.339.346,00	14.724.865.154,00	14.724.865.154,00
7	Jumlah Aset Tetap	2.940.985.627.676,98	3.083.358.489.009,02	3.083.358.489.009,02
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	(290.093.201.130,03)	(335.365.494.441,86)	(336.507.520.209,85)
9	Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan	(310.433.641.316,49)	(323.915.598.643,67)	(323.000.842.207,35)
10	Akumulasi Penyusutan JIJ	(744.605.859.222,16)	(817.966.322.324,31)	(805.443.542.842,73)
11	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(587.173.062,61)	(1.372.545.691,40)	(1.145.276.359,73)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.345.719.874.731,29)	(1.478.619.961.101,24)	(1.466.097.181.619,66)
	Total Aset Tetap	1.595.265.752.945,69	1.604.738.527.907,78	1.617.261.307.389,36

5.3.3.1 Tanah

	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
	115.939.065.391,00	116.865.485.811,00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Terdapat pengurangan Nilai Aset nilai Aset Tanah pada Tahun 2020 sebesar Rp926.420.420,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Penambahan		
- Modal Tahun 2020	Rp	913.869.539,00
- Hibah/Mutasi antar OPD	Rp	1.455.500.000,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	<u>214.033.684,00</u>
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	2.583.403.223,00
Mutasi Pengurangan		
- Reklasifikasi Keluar	Rp	913.869.539,00
- Penghapusan	Rp	829.000.000,00
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	<u>1.766.954.104,00</u>
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	3.509.823.643,00
Jumlah Bersih Mutasi	Rp	(926.420.420,00)

- a. Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Tanah sebesar Rp913.869.539,00 merupakan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 berupa Rehab Kolam Ikan pada Dinas Perikanan.
- b. Hibah/Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp1.455.500.000,00 merupakan penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebagai akibat dari mutasi pemakaian Aset Tanah dan Hibah dari Pusat/Provinsi/Pihak Lain pada 2 (dua) OPD sebagai berikut :

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.500.000,00	Hibah Masuk Dari Komite Sekolah
2.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.418.000.000,00	Mutasi Dari Dinas Setda Tanah Seluas 3545 M2 Tahun 2014.
	Jumlah Mutasi Masuk	1.455.500.000,00	

- c. Reklasifikasi Masuk ke Akun Tanah Sebesar Rp214.033.684,00 merupakan Reklasifikasi masuk dari Akun Gedung Bangunan Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa Pematangan Lahan Gedung Kantor Tahun 2020.
- d. Reklasifikasi Keluar Akun Aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp913.869.539,00 terdiri dari :

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perikanan	233.631.339,00	Reklasifikasi Ke Akun Gedung Bangunan berupa Rehab Kolam/bak BBI Aia Putih
		332.523.147,00	Reklasifikasi Ke Akun Gedung Bangunan berupa Rehab Kolam/bak Pemijahan BBI Aia Putih
		347.715.053,00	Reklasifikasi Ke Akun Gedung Bangunan berupa Rehab Kolam/bak Induk/ calon induk dan kolam induk BBI Aia Putih.
	Jumlah Reklas Keluar	913.869.539,00	

- e. Penghapusan Aset tanah Pada Tahun 2020 Sebesar Rp829.000.000,00 terdiri dari :

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	5.000.000,00	Penghapusan tanah perkebunan entres Pangkalan Seluas 625m2 untuk pembangunan tower PLN.
2		824.000.000,00	Penghapusan tanah di jln Ade Irma Suryani 8000m2

Jumlah Reklasifikasi Masuk	829.000.000,00
-----------------------------------	-----------------------

- f. Mutasi Keluar Antar OPD Aset Tanah pada Tahun 2020 adalah Sebesar Rp1.766.954.104,00 terdiri dari:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	78.154.104,00	Mutasi Ke Pemda Propinsi Sumbar, P3D SMK 1 Suliki.
2.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.	121.000.000,00	Mutasi Ke Pemda Provinsi Sumbar Berupa Jalan Kototinggi- Puah Data-Pagadih (R-85)
3.	Sekretariat Daerah	1.418.000.000,00	Mutasi Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Tanah Seluas 3545m2
		149.800.000,00	Mutasi Ke Pemerintah Propinsi berupa Tanah SMA Dandung Dandung.
	Jumlah Mutasi Keluar	1.766.954.104,00	

Selengkapnya tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun anggaran 2020 dan tersebar pada 43 OPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kategori Status Kepemilikan Tanah	Jumlah Persil
1	Sertifikat atas nama pemda kab. Lima Puluh Kota	296
2	Sertifikat atas nama pemilik sebelumnya	31
3	Pelepasan hak atas nama pemilik sebelumnya	12
4	Peta bidang dan surat ukur An. Pemda Lima Puluh Kota	45
5	Akta perdamaian	1
6	Berita acara ganti rugi	14
7	Surat pernyataan hibah	13
8	Surat pernyataan hak/pinjam pakai	9
9	Surat penyerahan tanah	40
10	Berita acara P3D	64
11	Surat keterangan jual beli	18
12	Surat keterangan wakaf	6
13	Sporadik tanah	1
14	Surat keterangan tanah	67
15	Belum ada dokumen pendukung	223
16	Tanah Jalan Kabupaten	238
JUMLAH		1.078

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	437.276.755.985,61	384.956.130.842,98

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

Penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Tahun 2020 adalah sebesar 52.320.625.142,63.dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

- Belanja Modal Tahun 2020	Rp	37.329.485.325,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	170.394.400,00
- Hibah/Mutasi antar OPD	Rp	10.973.478.295,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	6.223.713.855,89
- Reklasifikasi Dari Akun Aset Tetap Lainnya (Permendagri 108)	Rp	6.014.360.825,59
- Reklasifikasi Dari Akun Aset Gedung Bangunan (Permendagri 108)	Rp	4.668.193.227,00
- Koreksi Tambah	Rp	448.989.242,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	65.828.615.170,48

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	Rp	2.134.136.142,00
- Reklasifikasi Keluar	Rp	2.456.483.991,00
- Penghapusan	Rp	592.115.000,00
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	5.060.124.506,00
- Koreksi kurang	Rp	704.575.301,00
- Aset Ekstrakomtable	Rp	2.560.555.087,85
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	13.507.990.027,85

Jumlah Mutasi Bersih Rp 52.320.625.142,63

- Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.329.485.325,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020.
- Kapitalisasi terhadap Belanja Barang/Jasa sebesar Rp170.394.400,00 yang dikapitalisir sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pada 14 (Empat Belas) OPD sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.000.000,00
	BOS	11.500.000,00
2	Dinas Kesehatan	400.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	700.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.000.000,00
5	Dins Perhubungan	77.007.500,00
6	Dinas Kominfo	525.000,00
7	Dinas Perdagangan, Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah.	3.474.000,00
8	Dinas Pariwisata	1.200.000,00
9	Dinas Perikanan	1.588.000,00
10	Badan Keuangan	865.000,00
11	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.177.000,00
12	Sekretariat Daerah	45.807.900,00

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
13	Sekretariat DPRD	4.950.000,00
14	Kecamatan Harau	1.200.000,00
	Jumlah Kapitalisasi	170.394.400,00

- c. Hibah/Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp10.973.478.295,00 merupakan penambahan nilai akun peralatan dan mesin sebagai akibat dari mutasi pemakaian aset peralatan dan mesin dan Hibah dari Pusat/Provinsi/Pihak Lain pada 38 (tiga puluh delapan) OPD sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.213.380.000,00	Hibah dari APBN
	BOS	74.486.500,00	Hibah dari Komite Sekolah
2.	Dinas Kesehatan	685.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa Mobil Ambulance Covid-19
		285.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa Mobil Jenazah 1 Unit
		206.445.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga
		415.000,00	Hibah Dari Basnaz Kab Lima Puluh Kota Berupa Dispenser Dan Kipas Angin.
		5.900.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa box vtm 2 unit.
		34.108.800,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa Thermogun 40 Unit
		21.600.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa bilik pengambilan sampel 6 unit.
		160.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa Thermogun 160 unit.
		16.500.000,00	Hibah Dari Baznas Berupa Thermogun
		71.500.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Puskesmas Baruah Gunuang Berupa Tempat tidur Pasien 10 unit
		29.350.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Puskesmas Baruah Gunuang Berupa Lemari Pasien 10 unit
		71.500.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Puskesmas Koto Tinggi Berupa Tempat tidur Pasien 10 unit
		29.350.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Puskesmas Koto Tinggi

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
			Berupa Lemari Pasien 10 unit
		68.100.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa Alat backpack Sprayer 150 unit.
		22.500.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa Alat backpack Sprayer Manual 25 buah.
		18.100.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa Alat backpack Sprayer Manual Elektrik 25 unit
		11.155.000,00	Hibah Berupa Alat Semprot Manual 23 unit
		4.421.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa HP Android 1 Buah
		650.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa Toa Speaker 1 Buah
3.	RSUD Achmad Darwis Suliki	685.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa Mobil Ambulance Transport 1 Unit.
		157.816.945,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga
		8.398.000,00	Hibah dari Bank Nagari Berupa Televisi 1 Unit.
		360.154.495,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa Alat Alat Kedokteran.
		120.000.000,00	Hibah dari Universitas Indonesia Berupa Ventilator 2 Unit.
		3.000.000,00	Hibah Dari DPRD Propinsi Berupa thermogun 5 Unit
		8.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 Tahun 2020 Berupa CCTV 8 Unit.
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.000.000,00	Mutasi Masuk Dari Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Daihatsu hilux Tahun 1995 BA 1117 C.
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	178.000.000,00	Mutasi Masuk Dari Setwan Berupa Kendaraan Roda 4 Mobil Mitsubishi Kuda
		1.980.000,00	Mutasi Masuk dari Belanja BTT Berupa Gerobak 4 Unit.
		1.937.047,00	Hibah Masuk dari Dinas Lingkungan Hidup Berupa Tong Sampah.
		68.233.050,00	Mutasi Masuk dari Dana BTT Berupa Laptop, Printer, meja kerja, kursi dan hardisk eksternal.
		3.740.000,00	Mutasi Masuk dari Dana BTT Berupa pengeras Suara Toa 5 Buah
		2.000.000,00	Hibah masuk Dari Dinkes(Dana BTT Covid-19) Berupa thermometer

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
			Infrared Forehead 2 Unit
6.	Dinas Pemadam Kebakaran	95.800.000,00	Mutasi Dari Setda Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 merk Colt L300 Tahun 2002
		161.150.000,00	Mutasi Dari Setda Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 merk APV.
		326.579.000,00	Mutasi dari DLHPP berupa Kendaraan Roda 4 Merk strada Triton Tahun 2008.
		450.000,00	Hibah Dari Dinkes berupa Alat Semprot Manual merk Solo 1 Unit.
		1.000.000,00	Hibah masuk Dari Dinkes(Dana BTT Covid-19) Berupa thermometer Infrared Forehead 1 Unit
7.	Dinas Sosial	44.693.650,00	Mutasi Dari Dinas Sosial Provinsi berupa kendaraan Roda 2 Kawasaki tahun 2020 1 Unit.
		454.000,00	Hibah Dari Dinkes berupa Alat Semprot Manual merk Solo 1 Unit.
		1.000.000,00	Hibah masuk Dari Dinkes(Dana BTT Covid-19) Berupa thermogun 1 Unit
8.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.000.000,00	Hibah Masuk Dari Dinkes berupa thermogun dan Alat semprot manual
		450.000,00	Hibah Dari Dinkes berupa Alat Semprot Manual merk Solo 1 Unit.
9.	Dins Pangan	852.720,00	Hibah masuk dari Dinas Kesehatan BTT berupa Termogun 1 Unit
		4.035.000,00	Mutasi Masuk Dari Pengadaan Dana BTT Berupa Mesin Penjahit Karung 3 buah
		2.430.000,00	Mutasi Masuk Dari Pengadaan Dana BTT Berupa Timbangan Digital 3 Buah.
10.	Dinas Lingkungan Hidup	120.000.000,00	Mutasi Masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran berupa kendaraan roda 4 merk Mitshubishi Kuda.
11.	Dinas Kependudukan dan Cakil	88.600.000,00	Mutasi Masuk dari Setda Berupa Mobil mitshubishi L300 Tahun 2000 1 Unit
		454.000,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Alat Semprot Manual 1 Unit.
		852.720,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Alat Thermogun 1 Unit, dan Infrared Thermometer Forehead 2 unit
		2.000.000,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa dan Infrared Thermometer Forehead 2 unit
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	178.000.000,00	Mutasi Dari Setda Berupa Mobil Mitshubishi Kuda Grandia
		852.720,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Thermogun 2 Unit

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
13.	Dinas Kominfo.	161.150.000,00	Mutasi Dari Setda Berupa Mobil Suzuki APV Tahun 2001 1 Unit.
		14.925.000,00	Penagadaan Dari Dana BTT Covid-19 Berupa Komputer PC Merk Lenovo
		24.900.000,00	Penagadaan Dari Dana BTT Covid-19 Berupa webcam camera merk Logitec
		14.900.000,00	Penagadaan Dari Dana BTT Covid-19 Berupa Laptop Merk Asus
		29.890.000,00	Penagadaan Dari Dana BTT Covid-19 Berupa LED TV
		14.700.000,00	Penagadaan Dari Dana BTT Covid-19 Berupa PC Lenovo
		14.775.000,00	Penagadaan Dari Dana BTT Covid-19 Berupa Laptop Merk Asus
		5.147.500,00	Penagadaan Dari Dana BTT Covid-19 Berupa webcam
		19.900.000,00	Penagadaan Dari Dana BTT Covid-19 Berupa Proyektor 1 Unit Merk Epson
		4.950.000,00	Penagadaan Dari Dana BTT Covid-19 Berupa Layar Proyektor.
		852.720,00	Hibah Dari Dinkes berupa Thermogun 1 Unit.
14.	DPMPTSP	1.937.044,00	Hibah Tong Sampah dari DLHPP
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	128.000.000,00	Mutasi dari Setda Berupa Mobil Toyota Kijang kapsul Tahun 2000
		349.910.000,00	Mutasi dari Setda Berupa Mobil Ford Tahun 2008
		47.000.000,00	Mutasi dari Setda Berupa Mobil Kijang Kapsul Tahun 1994 BA 1941 C
		450.000,00	Hibah dari Dinkes Berupa Pompa Semprot manual
		1.000.000,00	Hibah Dari Dinkes berupa Thermogun 1 Unit.
16.	DP2KBP3A	852.720,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Thermogun 2 Unit
17.	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura	1.939.610,00	Hibah dari DLHPP Berupa Tong Sampah
		852.720,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Thermogun 2 Unit
18.	Inspektorat	852.720,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Thermogun 2 Unit
19	Bapeltibang	102.300.000,00	Hibah dari Dinas PUPR berupa Kendaraan Roda 4
		454.000,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa back Sprayer SOLD 1 Unit
		852.720,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Thermogun 1 set
20.	Badan Keuangan	15.250.000,00	Hibah Dari Bank Nagari Berupa TV 1 buah
		3.900.000,00	Hibah Dari PT Taspen Berupa AC 1

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
			Buah
		1.000.000,00	Hibah Dari Dinas Kesehatan Berupa Termogun 1 Buah.
		454.000,00	Hibah Masuk Dari Dinkes berupa Alat semprot manual
21.	BKPSDM	450.000,00	Hibah Masuk Dari Dinkes berupa thermogun dan Alat semprot manual
		852.720,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Thermogun 1 set
		1.000.000,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Thermogun 1 set
22.	Sekretariat Daerah	161.150.000,00	Mutasi dari Setwan berupa mobil Suzuki APV
		128.000.000,00	Mutasi dari Setwan berupa mobil Toyota Kijang Kapsul
		88.600.000,00	Mutasi dari Setwan berupa mobil Colt L300
		95.800.000,00	Mutasi dari Setwan berupa mobil Colt L300
		98.000.000,00	Mutasi dari Setwan berupa mobil Colt L300
		178.000.000,00	Mutasi dari Setwan berupa mobil Mitshubishi Kuda
		178.000.000,00	Mutasi dari Setwan berupa mobil Mitshubishi Kuda
		161.150.000,00	Mutasi dari Setwan berupa mobil Suzuki APV
		88.600.000,00	Mutasi dari Setwan berupa mobil Colt L300
		193.515.000,00	Mutasi dari Setwan berupa mobil Mitshubishi Terrano
		257.225.000,00	Mutasi dari Setwan berupa mobil Kijang Innova
		4.103.727,00	Hibah Dari Dana BTT covid 19 Berupa Printer Epson
		820.000,00	Hibah Dari Dana BTT covid 19 Berupa hardisk.
		3.300.000,00	Hibah dari Dinkes Berupa Thermogun
		852.720,00	Hibah dari Dinkes Berupa Infra red Thermometer.
		1.000.000,00	Hibah dari Dinkes Berupa Thermogun
23.	Sekretariat DPRD.	454.000,00	Hibah Masuk Dari Dinkes berupa thermogun dan Alat semprot manual
		852.720,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Thermogun 1 set
24.	Kec. Gunung Omeh	900.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel I unit
		3.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Alat Pengeras Suara
		900.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Termogun.

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		2.100.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Alat Penyemprot 3 buah
		1.816.000,00	Hibah Dari BPBD Berupa Alat Penyemprot Manual 4 Buah Dan Dimutasikan Ke nagari Sebanyak 3 Buah
25.	Kec. Bukik Barisan	1.600.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel I unit
		960.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Papan Informasi 2 Unit
		1.900.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Thermometer Digital Infrared Aicare 1 Unit.
		1.400.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Sprayer Tangki Semprot Elektrik 16, sebanyak 2 Unit.
		700.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Sprayer Tangki Semprot Elektrik 16, sebanyak 1 Unit.
		2.724.000,00	Hibah dari BPBD dari Dana BTT Covid-19 berupa Sprayer Tangki Semprot , sebanyak 11 Unit.
		3.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Toa Patroli Sirine Patwal 1 Unit.
26.	Kecamatan Suliki	600.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel I unit
		450.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Thermogun 1 Unit
		650.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Sprayer cas Jitu
		300.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Sprayer Biasa
		3.178.000,00	Hibah dari BPBD dan Mutasi ke Nagari berupa Sprayer Tangki 7 Buah dan Sparayer Tangki Semprot 16 buah
		2.500.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Audio Amply (Toa) 1 Unit
27.	Kecamatan Guguk	396.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel I unit
		2.724.000,00	Hibah dari BPBD berupa Sprayer Tangki 6 Buah.
		2.800.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Audio Amply (Toa) 1 Unit
28.	Kec Mungka	1.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Papan Informasi 2 Unit
		900.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Thermometer 1 unit
		900.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel 2 unit
		1.400.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Hand Spray 2 unit

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		2.724.000,00	Hibah dari BPBD dan Mutasi ke Nagari berupa Sprayer Tangki 6 Buah dan Sparayer Tangki Semprot 5 buah
		3.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Soundsystem.
29.	Kec. Akabiluru	1.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Papan Informasi 2 Unit
		900.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel 2 unit
		750.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Thermometer 2 unit
		1.400.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Thermometer Digital.
		3.632.000,00	Hibah dari BPBD Berupa Sprayer Tangki 8 buah dan dimutasikan ke nagari sebanyak 7 Buah.
		2.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Toa Patroli 1 Unit.
30.	Kec Payakumbuh	3.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel 1 unit
		3.632.000,00	Hibah dari BPBD Berupa Sprayer Tangki 8 buah dan dimutasikan ke nagari sebanyak 7 Buah.
31.	Kec Luak	1.500.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel 1 unit
		1.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Papan Informasi 2 Unit
		2.270.000,00	Hibah dari BPBD Berupa Sprayer Tangki 5 buah dan dimutasikan ke nagari sebanyak 4 Buah.
		1.400.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Thermometer 1 unit
		1.980.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Sprayer Tangki Semprot Elektrik 3 buah
		2.500.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Toa Patroli 1 Unit.
32.	Kec Lareh Sago Halaban.	750.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel 1 unit
		900.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Thermometer Infra Red 1 unit
		500.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Sprayer Tangki semprot Elektrik 16 1 unit
		4.086.000,00	Hibah dari BPBD Berupa Sprayer Tangki 9 buah dan dimutasikan ke nagari sebanyak 8 Buah.
		3.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Toa Patroli 1 Unit.
33.	Kec Situjuh Limo Nagari	1.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Papan Informasi 2 Unit

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		1.500.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel 1 Unit
		1.937.047,00	Hibah Dari Dinas Lingkungan Hidup Berupa Tong Sampah 1 Buah.
		1.400.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Thermometer Digital Infrared Aicare 1 Unit.
		1.150.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Sprayer Tangki semprot Elektrik 16 2 unit
		2.724.000,00	Hibah dari BPBD Berupa Sprayer Tangki 6 buah dan dimutasikan ke nagari sebanyak 5 Buah.
		9.692.000,00	Hibah Dari Sekretariat Daerah Berupa Hinda Supra Fit Cakram 1 Unit.
34.	Kec Harau	4.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel 2 Unit
		500.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Papan Informasi 1 Unit
		950.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Partisi Meja 12 Unit
		1.400.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa termometer Digital
		5.448.000,00	Hibah dari BPBD Berupa Sprayer Tangki 12 buah dan dimutasikan ke nagari sebanyak 11 Buah.
35.	Kec Pangkalan Koto Baru	450.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel 1 Unit
		715.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa termometer Digital
		1.400.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa alat Penyemprot Tangan 2 buah.
		3.178.000,00	Hibah dari BPBD Berupa Sprayer Tangki 7 buah dan dimutasikan ke nagari sebanyak 6 Buah.
		3.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa alat Komunikasi dan Lain lain.
36.	Kec Kapur IX	900.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Wastafel 2 Unit
		1.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Papan Informasi 2 Unit
		900.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa termometer Digital
		1.400.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 berupa Sprayer Tangki semprot Elektrik 16 2 unit
		3.632.000,00	Hibah dari BPBD Berupa Sprayer Tangki 8 buah dan dimutasikan ke nagari sebanyak 7 Buah.
		2.915.000,00	Mutasi Masuk dari Dana BTT Berupa pengeras Suara Toa.

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
37.	Badan Kesbangpol.	1.000.000,00	Hibah dari Dinkes Dana BTT Covid-19 berupa Thermometer Infra Red 1 unit
		454.000,00	Hibah Masuk Dari Dinkes berupa Alat semprot manual
38.	BPBD	190.000.000,00	Hibah dari BPBD Provinsi Sumbar Tahun 2020 Berupa Perahu Politeline 2 Unit
		56.750.000,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Alat Semprot Manual 125 Unit
		18.100.000,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Alat Semprot Elektrik 25 Unit
		6.516.000,00	Hibah dari BPBD Provinsi Sumbar Tahun 2020 Berupa Pompa Semprot Elektrik 9 Unit.
		128.700.000,00	Penagadaan dari Dana BTT Covid-19 tahun 2020 Berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga
		90.000.000,00	Hibah Dari BPBD Propinsi tahun 2020 berupa tenda Pengungsi 2 Buah
		2.500.000,00	Hibah Dari BPBD Propinsi tahun 2020 berupa Wastafel 1 Buah.
		3.000.000,00	Dikapitalisasi dari Barang dan Jasa BTT berupa Papan Informasi 1 Set
		6.000.000,00	Pengadaan dari Dana BTT Covid-19 tahun 2020 Berupa Alat wireless sistim Rapat 1 Set
		12.790.800,00	Hibah dari Dinas Kesehatan (BTT Covid-19) Berupa Alat Thermogun H90815 Unit.
		2.558.160,00	Hibah Dari BPBD Propinsi tahun 2020 berupa Wastafel 1 Buah.
	Jumlah Mutasi Masuk	10.973.478.295,00	

- d. Reklasifikasi masuk ke dalam akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut dari akun Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp6.223.713.855,89 pada 9 (sembilan) OPD sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	405.617.943,00	Reklasifikasi Dari Akun Aset Gedung Bangunan Berupa Peralatan Meubleur.
2.	Dinas Kesehatan	1.560.426.471,00	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Alat Kantor Dan Rumah Tangga Puskesmas Puskesmas
		2.045.966.670,89	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Alat Alat Kedokteran di Puskesmas Puskesmas
		1.450.000,00	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Alat Pertanian Mesin

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
			Potong Rumput Puskesmas
		101.984.523,00	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Alat Studio dan Komunikasi Puskesmas Puskesmas
3.	RSUD Achmad Darwis Suliki	274.632.250,00	Reklasifikasi Masuk dari Akun aset tetap lainnya Pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Alat Kantor Dan Rumah Tangga
		52.800.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Gedung Bangunan Berupa Wastafel Trans Sensore
		61.136.000,00	Reklasifikasi Mauk dari Akun aset tetap lainnya Pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Alat Studio Komunikasi
		59.985.761,00	Reklasifikasi Masuk dari Akun aset tetap lainnya Pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Alat Kedokteran
		796.604.237,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Gedung Bangunan Berupa Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (Ruang Bougenville dan ICU)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.000.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun JIJ berupa GPS 2 Unit
		7.000.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun JIJ berupa GPS 1 Unit
5.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	25.000.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Gedung Bangunan Berupa Plang Nama Kantor Beton.
6.	Dinas Lingkungan Hidup	439.675.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya Berupa Damtruk Sampah 1 Unit.
		98.500.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya Berupa Becak Motor 3 Unit.
		155.860.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya Berupa Kontainer Sampah, dan Tong Sampah.
7.	Dinas Perhubungan	3.900.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Gedung Bangnan Berupa Lampu Rotari 1 paket.
		13.240.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset JIJ Berupa Kelengkapan GPS
		12.240.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset JIJ Berupa Tooli Set 2 paket
		28.620.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset JIJ Berupa Kelengkapan Peralatan PJU
8.	Dinas Kominfo	3.575.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Gedung Bangunan Berupa Papan PPID
9.	Dinas Pariwisata Pemuda dan dan Olah Raga	18.000.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya Berupa Tong Sampah 10 Set
		38.500.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
			Tetap Lainnya Berupa Mesin Potong Rumput 11 Unit
		6.000.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya Berupa Gerobak 8 Buah.
	Jumlah Reklasifikasi Masuk	6.223.713.855,89	

- e. Koreksi tambah pada Aset Peralatan Mesin Sebesar Rp448.989.242,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS) Sebesar Rp446.197.242,00 Merupakan Koreksi atas Peralatan Pada Sekolah yang pada saat inventarisasi barang tersebut ditemukan dan pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp2.792.000,00 Merupakan Koreksi Atas Pencatatan aset berupa lemari yang pada awal nya termasuk Ekstrakomtabel.
- f. Reklasifikasi Masuk Ke Akun Peralatan Mesin penyesuaian terhadap Permendagri 108 tahun 2016 Dari Akun Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp6.014.360.825,59 dan Aset Gedung Bangunan Sebesar Rp4.668.193.227,00 Dengan Rincian sebagai berikut :

REKLASIFIKASI MASUK ASET TETAP LAINNYA KE ASET PERALATAN MESIN

No	NAMA OPD	Uraian	JUMLAH
1	BPBD	Alat Tenis Meja dan Kelengkapan	5.710.000,00
			5.710.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Meja pimpong	3.000.000,00
			3.000.000,00
3	Dinas Lingkuagn Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Meja pimpong	1.784.000,00
			1.784.000,00
4	Sekretariat Dewan	Meja pimpong	7.250.000,00
		Meja pimpong	5.000.000,00
		Treadmill	30.000.000,00
			42.250.000,00
5	Disparpora	Matras Judo	86.838.000,00
		Sepeda Air	34.000.000,00
		Sepeda Air	74.998.000,00
		Gawang Sepak Bola Mini	2.100.000,00
		Jaring Bola Kaki	1.240.000,00
		Sepeda Air	89.760.000,00
		Seluncuran Kolam Anak	42.250.000,00
		Stik Bilyard	30.000.000,00
		Gawang Sepak Bola Mini	8.000.000,00
		Jaring Gawang Sepak Bola	4.200.000,00
		Jaring Gawang Sepak Bola	3.600.000,00
			376.986.000,00

No	NAMA OPD	Uraian	JUMLAH
6	Setda	Tenis Meja	4.000.000,00
		Tenis Meja	5.000.000,00
		Raket	1.350.000,00
		Lembing fibre	900.000,00
		Net takrwa	600.000,00
		Raket Yonex	5.000.000,00
		Lembing fibre	700.000,00
		Matras	4.000.000,00
		Raket Yonex	5.000.000,00
		Stopwacth HS-3	350.000,00
		Alat Pancing	3.000.000,00
		Net Takraw TO	300.000,00
		Net Voli	700.000,00
		Net Voli GTO	900.000,00
		Ring Basket	350.000,00
		Matras Genos RD Bupati	6.000.000,00
			38.150.000,00
7	Dinas PU dan PR	Meja Pimpong 2 Bah	10.000.000,00
			10.000.000,00
8	Dinas Kesehatan	Alata Tennis Meja	1.500.000,00
			1.500.000,00
9	Dinas Pendidikan	Peralatan Olah Raga	5.534.980.825,59
			5.534.980.825,59
	JUMLAH		6.014.360.825,59

REKLASIFIKASI MASUK ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET PERALATAN MESIN

No	NAMA OPD	Uraian	JUMLAH
1	BPBD	Rambu Rambu	67.200.000,00
			67.200.000,00
2	Dinas Perhubungan	Rambu Rambu	4.600.993.227,00
			4.600.993.227,00
	JUMLAH		4.668.193.227,00

- g. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp2.134.136.142,00 merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Aset Tetap dan yang akan diserahkan kepada pihak lain, terdiri dari 9(sembilan) OPD sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	866.294.353,00

	BOS	1.081.342.275,00
2.	Dinas Kesehatan	121.541.914,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.000.000,00
4.	Dinas Pemadam Kebakaran	42.250.000,00
5.	Dinas Kominfo	2.660.000,00
6.	Dinas Perikanan	2.800.000,00
7.	Badan Keuangan	373.600,00
8.	Sekretariat Daerah	5.874.000,00
9.	BPBD	9.000.000,00
	Jumlah Tidak Dikapitalisasi	2.134.136.142,00

h. Reklasifikasi keluar sebesar Rp2.456.483.991,00 dari akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut ke akun lain pada 8 (delapan) OPD sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.831.526.991,00	Reklasifikasi Ke Akun Aset tetap lainnya berupa buku.
	BOS	21.200.000,00	Reklasifikasi Ke Akun JIJ
2.	Dinas Kesehatan	12.177.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap JIJ Berupa Pekerjaan Instalasi Perangkat SIKDA Online Puskesmas Halaban, Maek, dan Koto Tinggi.
3.	Dinas Pemadam Kebakaran.	2.500.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa Bunga Hias.
4.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja.	1.600.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa Patung Manekin 4 buah.
5.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	2.500.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa Bunga Hias 10 Buah.
6.	Badan Keuangan	163.300.000,00	Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa Software BPHTB.
7.	Sekretariat Daerah.	88.600.000,00	Reklasifikasi Ke Aset lainnya berupa Mobil Colt L 300.
		44.000.000,00	Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa Toyota Kijang Standar kf40 short.
		23.000.000,00	Reklasifikasi Ke Aset lainnya berupa Mobil Suzuki carry.

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		90.400.000,00	Reklasifikasi Ke Aset lainnya berupa Toyota Kijang Standar KF 60 Short pick up.
		49.600.000,00	Reklasifikasi Ke Aset lainnya berupa Mobil Isuzu Panter.
		100.000.000,00	Reklasifikasi Ke Aset lainnya berupa Mobil Mitshubishi Galand.
		3.700.000,00	Reklasifikasi Ke Aset lainnya berupa Honda Astrea.
		12.280.000,00	Reklasifikasi Ke Aset lainnya berupa Honda Kharisma.
		5.100.000,00	Reklasifikasi Ke Aset lainnya berupa Honda Win.
8.	Sekretariat DPRD	5.000.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa Meja Pimpong.
	Jumlah Reklasifikasi Keluar	2.456.483.991,00	

- i. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp592.115.000 terdapat pada Sekretariat Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 364 Tanggal 28 Desember Tahun 2020. Berupa Peralatan Dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	40.000.000,00	Penghapusan Kendaraan Roda 4 Berupa Mini Bus Mitshubishi L300
		44.000.000,00	Penghapusan Kendaraan Roda 4 Berupa Mini Bus Toyota KF50 Long
2.	Satuan Polisi Pamong Praja	42.000.000,00	Penghapusan Kendaraan Roda 4 Berupa Mobil Kijang
3.	Dinas Kependudukan dan Capil	88.600.000,00	Penghapusan Kendaraan Roda 4 Berupa Mobil
4.	DPMPPTSP	46.000.000,00	Penghapusan Mobil Kijang BA 1937 C
5.	Sekretariat Daerah	193.515.000,00	Penghapusan Kendaraan Roda 4 Mobil Nissan Terrano
		47.000.000,00	Penghapusan Kendaraan Roda 4 Mobil Kijang Toyota KF 40 Short.
		42.000.000,00	Penghapusan Kendaraan Roda 4 Mobil Kijang Toyota kf 50 Short

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		49.000.000,00	Penghapusan Kendaraan Roda 4 Mobil Kijang Toyota KF 42 Short
	Jumlah Penghapusan	592.115.000,00	

j. Koreksi kurang Saldo Awal Aset Peralatan Mesin Sebesar Rp704.575.301,00 terdapat pada OPD sebagai berikut :

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	507.625.301,00	Koreksi Kurang Akibat double catat barang yang diperoleh tahun sebelum nya di sekolah sekolah
2.	Dinas Sosial	196.950.000,00	Koreksi Kurang yang merupakan kendaraan untuk pemerintah pusat yang tercatat pada akun Peralatan Mesin
	Jumlah	704.575.301,00	

k. Hibah/Mutasi keluar antar OPD adalah sebesar Rp5.060.124.506,00 merupakan pengurangan nilai peralatan dan mesin sebagai akibat dari mutasi pemakaian aset peralatan dan mesin antar OPD yang terdapat pada 35 (tiga puluh lima) OPD sebagai berikut :

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	24.000.000,00	Mutasi Keluar Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Minibus Toyota Kijang kf 50 Long BA 9910 CK
		26.700.000,00	Mutasi Keluar Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Dinkes
		11.300.000,00	Mutasi Keluar Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Mungka.
		7.200.000,00	Mutasi Keluar Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Mungo
		11.300.000,00	Mutasi Keluar Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Taram
		13.400.000,00	Mutasi Keluar Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Pangkalan
		3.700.000,00	Mutasi Keluar Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Koto Tinggi.
		15.000.000,00	Mutasi Keluar Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Koto Baru
		13.550.000,00	Mutasi Keluar Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Maek.

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		9.100.000,00	Mutasi Keluar Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Danggung Danggung.
		1.705.440,00	Mutasi Thermogun Ke Dinas Pariwisata.
		12.790.800,00	Mutasi Thermogun Ke BPBD
		852.720,00	Mutasi Thermogun Ke BKPSDM
		852.720,00	Mutasi Thermogun Ke Dinas Tanaman Pangan Holtukultura dan Perkebunan
		852.720,00	Mutasi Thermogun Ke Dinas Kominfo.
		852.720,00	Mutasi Thermogun Ke Dinas Pangan
		852.720,00	Mutasi Thermogun Ke Setda
		852.720,00	Mutasi Thermogun Ke KPU
		852.720,00	Mutasi Thermogun Ke Dinas Capil
		852.720,00	Mutasi Thermogun Ke DP2KBP3A
		852.720,00	Mutasi Thermogun Ke Setwan.
		852.720,00	Mutasi Thermogun Ke Inspektorat
		852.720,00	Mutasi Thermogun Ke Bapelitbang
		852.720,00	Mutasi Thermogun Ke DPMDN
		3.300.000,00	Mutasi Ke Setda berupa Thermogun
		1.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip
		1.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke Badan Kesbangpol
		1.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke Dinas Sosial
		1.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke Badan Keuangan.
		2.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke Dinas Kependudukan dan Capil.
		1.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		1.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke Dinas Damkar
		1.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke BKPSDM
		2.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke Satpol PP

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		1.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke Pengadilan Tinggi Tanjung Pati.
		1.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke TK Pertiwi.
		1.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke Polres 50 Kota.
		1.000.000,00	Mutasi Thermogun Ke Setda.
		454.000,00	Mutasi Ke Dinas Parpora Berupa Alat Backpack Sprayer 1 Unit
		56.750.000,00	Mutasi Ke BPBD Berupa Alat Backpack Sprayer 1 unit.
		454.000,00	Mutasi Ke Setwan Berupa Alat Backpack Sprayer 1 unit.
		454.000,00	Mutasi Ke Bapelitbang Berupa Alat Backpack Sprayer 1 unit.
		18.100.000,00	Mutasi Ke BPBD Berupa Alat Backpack Sprayer 23 unit.
		450.000,00	Mutasi Ke Dinas Arsip Berupa Alat Semprot Manual 1 Unit.
		454.000,00	Mutasi Ke Badan Kesbangpol Berupa Alat Semprot Manual 1 Unit.
		454.000,00	Mutasi Ke Badan Keuangan Berupa Alat Semprot Manual 1 Unit.
		454.000,00	Mutasi Ke Dinas Sosial Berupa Alat Semprot Manual 1 Unit.
		454.000,00	Mutasi Ke Dinas Capil Berupa Alat Semprot Manual 1 Unit.
		450.000,00	Mutasi Ke Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Berupa Alat Semprot Manual 1 Unit.
		450.000,00	Mutasi Ke Dinas Damkar Berupa Alat Semprot Manual 1 Unit.
		450.000,00	Mutasi Ke Dinas BKPSDM Berupa Alat Semprot Manual 1 Unit.
		450.000,00	Mutasi Ke Pengadilan Tinggi Tanjung Pati Berupa Alat Semprot Manual 1 Unit.
2.	RSUD Achmad Darwis Suliki	13.970.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Suzuki Thunder 1 Unit.
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	102.300.000,00	Mutasi Ke Bapelitbang Berupa Kendaraan Roda 4 Toyota Pick Up.
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	59.400.000,00	Mutasi ke Setda Berupa Mobil Toyota Kijang BA1923 C
5.	Dinas Pemadam Kebakaran	120.000.000,00	Mutasi Ke DLHPP Berupa Kendaraan Roda 4
6.	Dinas Sosial	13.700.000,00	Mutasi ke Setda berupa Kendaraan Roda 2 Merk Honda Win 3 Unit Tahun 1994, 1994 dan 1997

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
7.	Dinas Lingkungan Hidup	326.579.000,00	Mutasi ke Damkar Berupa Mitshubishi Kuda Tahun 2002
		176.098.250,00	Hibah ke Nagari Berupa Becak Motor
		163.569.750,00	Mutasi Ke Setda (Penghapusan) Berupa Kendaraan Operasional
8.	Dinas Kependudukan dan Capil	42.000.000,00	Mutasi ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Mobil Toyota Kijang Tahun 1992 1 Unit.
		5.600.000,00	Mutasi ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Yamaha Cryptn Tahun 1997 1 Unit.
9.	Dinas Koperasi dan KUKM	10.400.000,00	Mutasi ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 GL Pro 2 Unit
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	11.400.000,00	Mutasi ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 GL Pro 2 Unit
11.	Dinas Pariwisata Pemuda dan dan Olah Raga	15.832.625,00	Mutasi ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Merk Honda Supra tahun 2013 1 Unit.
12.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	47.000.000,00	Mutasi Ke Setda Mobil Kijang Kapsul Tahun 1994 BA 1941 C.
13.	Dinas Perikanan	93.100.000,00	Mutasi ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Mobil Kijang Pick Up tahun 2004 1 Unit.
		20.439.834,00	Mutasi ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Honda Tahun 2004
14.	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan.	83.300.000,00	Mutasi ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Mobil Kijang Pick Up 1 Unit(lelang)
		101.056.000,00	Mutasi ke Setda Berupa 10 Unit Sepeda Motor (lelang)
15.	Inspektorat	40.000.000,00	Mutasi ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4
		4.900.000,00	Mutasi ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2
		3.800.000,00	Mutasi ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2
		8.988.500,00	Mutasi ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2
16.	Badan Keuangan.	53.800.000,00	Mutasi Ke Setda Berpa Kendaraan Roda 2
17.	Bapelitbang	40.800.000,00	Mutasi ke Setda berupa Kendaraan Roda 2 (Lelang)
18.	BKPSDM	28.200.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 (lelang)
19.	Sekretariat Daerah	60.000.000,00	Mutasi Ke Dinas PU Berupa Mobil Daihatsu HI Lux.
		161.150.000,00	Mutasi Ke Dinas Kominfo berupa mobil Suzuki APV
			Mutasi Ke Dinas Perpustakaan dan

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		128.000.000,00	Arsip berupa mobil Toyota Kijang Kapsul
		88.600.000,00	Mutasi Ke Dinas Capil berupa mobil Colt L300
		95.800.000,00	Mutasi Ke Dinas Pemadam Kebakaran berupa mobil Colt L300
		178.000.000,00	Mutasi ke DPMDN berupa mobil Mitshubishi Kuda
		178.000.000,00	Mutasi Ke Satpol PP berupa mobil Mitshubishi Kuda
		161.150.000,00	Mutasi Ke dinas damkar berupa mobil Suzuki APV
		349.910.000,00	Mutasi Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Berupa Mobil ford
20.	Sekretariat DPRD	161.150.000,00	Mutasi ke Setda berupa mobil Suzuki APV
		128.000.000,00	Mutasi ke Setda berupa mobil Toyota Kijang Kapsul
		88.600.000,00	Mutasi ke Setda berupa mobil Colt L300
		95.800.000,00	Mutasi ke Setda berupa mobil Colt L300
		98.000.000,00	Mutasi ke Setda berupa mobil Colt L300
		178.000.000,00	Mutasi ke Setda berupa mobil Mitshubishi Kuda
		178.000.000,00	Mutasi ke Setda berupa mobil Mitshubishi Kuda
		161.150.000,00	Mutasi ke Setdaberupa mobil Suzuki APV
		88.600.000,00	Mutasi ke Setda berupa mobil Colt L300
		193.515.000,00	Mutasi ke Setda berupa mobil Mitshubishi Terrano
		257.225.000,00	Mutasi ke Setda berupa mobil Kijang Innova
		29.966.667,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 (lelang)
21.	Kec Gn Omeh	1.362.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 3 Buah.
22.	Kec Bukik Barisan	2.270.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 5 Buah.
23.	Kecamatan Suliki	2.724.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 6 Buah.
24.	Kecamatan Guguk	2.270.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 5 Buah.
25.	Kec Mungka	2.270.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 5 Buah.
26.	Kec. Akabiluru	3.178.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 7 Buah

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
27.	Kec Payakumbuh	13.500.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Jenis Honda
		3.178.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 7 Buah
28.	Kec Luak	1.816.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 4 Buah
29.	Kec Lareh Sago Halaban.	3.632.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 8 Buah
30.	Kec Situjuah Limo Nagari	2.270.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 5 Buah.
31.	Kec Harau	4.994.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 11 Buah
32.	Kec Pangkalan Koto Baru	2.724.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 6 Buah.
33.	Kec Kapur IX	3.178.000,00	Hibah ke Nagari berupa Alat Penyemprot 7 Buah
34.	Badan Kesbangpol	19.583.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Jenis Honda 3 Unit. (lelang)
35.	BPBD	46.000.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Mobil Kijang tahun 1994 1 Unit. (Lelang)
		41.768.000,00	Mutasi Ke 13 Kecamatan Berupa Alat Semprot Manual Sebanyak 92 Buah
	Jumlah Mutasi Keluar	5.060.124.506,00	

1. Aset Ekstrakomtable sebesar Rp2.560.555.087,85 yang merupakan aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat nilainya ke Neraca Aset Tetap sesuai Kebijakan Akuntansi Nomor 88 tahun 2020 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota pada 43 (empat puluh tiga) OPD sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	417.526.328,00
	BOS	1.595.596.081,00
2	DIN. KESEHATAN	265.353.978,85
3	RSUD Dr.AHCMAD DARWIS	25.076.000,00
4	DIN. PU	
5	SATPOL PP	7.818.800,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	8.630.000,00
7	DINAS SOSIAL	454.000,00
8	DINAS PERINDUSTRIAN	1.850.000,00
9	DINAS PANGAN	
10	DINAS LING.HIDUP	
11	DINAS CAPIL	454.000,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
13	DINAS PENG.PENDUDUK & KBPP	

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
14	DINAS PERHUBUNGAN	
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.186.000,00
16	DINAS PERDAGANGAN KUKM	1.300.000,00
17	DINAS DMPPTSP	
18	DINAS PARIWISATA	2.500.000,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP	450.000,00
20	DINAS PERIKANAN	10.250.500,00
21	DINAS TANPAHOL	
22	DINAS PETERNAKAN & KSHN HEWAN	
23	INSPEKTORAT	
24	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	454.000,00
25	BADAN KEUANGAN	1.443.000,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM	14.450.000,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	41.103.400,00
28	SEKRETARIAT DPRD	4.554.000,00
29	KECAMATAN GUNUNG OMEH	3.454.000,00
30	KECAMATAN BUKIK BARISAN	3.514.000,00
31	KECAMATAN SULIKI	2.454.000,00
32	KECAMATAN GUGUK	850.000,00
33	KECAMATAN MUNGKA	3.754.000,00
34	KECAMATAN AKABILURU	3.754.000,00
35	KAECAMATAN PAYAKUMBUH	36.654.000,00
36	KECAMATAN LUAK	3.434.000,00
37	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	954.000,00
38	KECAMATAN SITUJUH LIMO NAGARI	2.604.000,00
39	KECAMATAN HARAU	1.904.000,00
40	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	3.019.000,00
41	KECAMATAN KAPUR IX	11.254.000,00
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.704.000,00
43	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	40.798.000,00
	JUMLAH	2.560.555.087,85

5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

Tahun 2020
(Rp)
808.776.804.375,18

Tahun 2019
(Rp)
771.612.773.814,18

Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Terdapat Penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp37.164.030.561,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

Belanja Modal Tahun 2020	Rp	38.200.979.558,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.180.315.480,00
- Hibah/Mutasi antar OPD	Rp	2.714.520.500,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	5.496.320.764,00
- Koreksi Tambah	Rp	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	47.592.136.302,00

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	Rp	17.180.000,00
- Reklasifikasi Keluar	Rp	2.618.443.514,00
- Penghapusan	Rp	475.537.000,00
-Reklasifikasi Keluar Ke Akun Peralatan Mesin (Permendagri 108)	Rp	4.668.193.227,00
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	2.648.752.000,00
- Koreksi kurang	Rp	-
- Aset <i>Ekstrakomptable</i>	Rp	-
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	10.428.105.741,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	37.164.030.561,00

- Jumlah pembelian/pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp38.200.979.558,00 merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020.
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.180.315.480,00 terdapat pada 10 (sepuluh) OPD berikut:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (BOS)	27.453.000,00
2.	Sekretariat Daerah	52.505.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	437.652.000,00
4.	Dinas Pangan	110.687.875,00
5.	Dinas Perhubungan	102.287.500,00
6.	Dinas Kominfo	5.585.000,00
7.	Dinas Perdagangan KUKM	22.751.280,00
8.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	199.566.000,00
9.	Dinas Tanaman Pangan	123.452.375,00
10.	Badan Keuangan	98.375.450,00
	Jumlah	1.180.315.480,00

- Hibah/Mutasi masuk antar OPD sebesar Rp2.714.520.500,00 terjadi pada 5 (lima) OPD akibat mutasi pemakaian bangunan dan gedung kantor antar OPD sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
-----	----------	-------------	------------

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS)	62.134.500,00	Merupakan Hibah dari Komite Sekolah berupa Taman, Pagar,dan Musholla
2.	Dinas Kesehatan	5.585.000,00	Mutasi Dari Dinas Kominfo Berupa Pemasangan Kanopi Parkir.
3.	RSUD Achmad Darwis Suliki	113.723.000,00	Pengadaan dari Dana Covid 19 Tahun 2020 Berupa Parisi Ruang Dan Wastafel.
4.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	94.846.000,00	Mutasi dari Setda berupa Los Terbuka Pasar Jumat Piladang
		47.730.000,00	Mutasi dari Setda berupa Kios Pasar Jumat Piladang
		28.638.000,00	Mutasi dari Setda berupa Los Daging Pasar Jumat Piladang
		8.314.000,00	Mutasi dari Setda berupa wc Pasar Jumat Piladang
		133.646.000,00	Mutasi dari Setda berupa Kios Pasar Dandung dangung.
		202.061.000,00	Mutasi dari Setda berupa Los Mini Dan Los Kayu Pasar Dandung Dangung.
		83.529.000,00	Mutasi dari Setda berupa Los Sederhana Pasar Dandung Dangung
		11.785.000,00	Mutasi dari Setda berupa Rumah Bulat Pasar Dandung Dangung
		62.646.000,00	Mutasi dari Setda berupa Kafe Pasar Dandung Dangung
		20.285.000,00	Mutasi dari Setda berupa Kantor Pasar Jumat Piladang
		23.673.000,00	Mutasi dari Setda berupa Wc Pasar Dandung Dangung
		342.523.000,00	Mutasi dari Setda berupa Kios Pasar Jumat Piladang
		788.583.000,00	Mutasi dari Setda berupa Rehab Pasar Dandung Dangun Tahun 2016
		89.855.000,00	Mutasi dari Setda berupa Rehab Pasar Dandung Dangun Tahun 2017
		149.393.000,00	Mutasi dari Setda berupa Rehab Pasar Dandung Dangung Tahun 2020
5.	Sekretariat Daerah	225.846.000,00	Mutasi Dari Dinas Pu Berupa Rehab Mess Labuah Basilang
		219.725.000,00	Mutasi Dari Dinas Pu Berupa Gedung Arsip mess Pemda Payakumbuh Tahun Perolehan 2018
	Jumlah	2.714.520.500,00	

- d. Reklasifikasi masuk sebesar Rp5.496.320.764,00 ke dalam akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut dari akun lain (yang berada dalam kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya) yang terdapat pada 6 (enam) OPD yaitu:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.850.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun KDP pada SMP 1 Luak dan SMP 1 Harau.
2.	Dinas Kesehatan	136.390.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun KDP berupa honor Tim asistensi dari PPHD ded Relokasi Puskesmas Baruah Gunuang.
		3.475.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun KDP berupa DED Relokasi Puskesmas Dandung Dandung.
		4.125.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun KDP berupa Honor Pokja Relokasi Puskesmas Baruah Gunuang
		117.857.605,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Pengadaan Tempat Parkir , Kanopi dan Partisi Ruangan Pada Puskesmas Koto Baru Simalanggang.
		197.365.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Pengadaan Renovasi Gedung Pada Puskesmas Dandung Dandung.
		46.978.001,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Pembangunan Tempat Parkir Puskesmas Maek.
		13.960.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Pengadaan Konstruksi Rumah Genset Puskesmas Pangkalan.
		29.792.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Pembangunan Rumah Genset Puskesmas Pangkalan.
		6.074.250,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Pengadaan Pegangan Tangga Puskesmas Situjuah.
		157.510.500,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Rehap Puskesmas Taram.
		197.296.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
			Aset Tetap Lainnya berupa Pengadaan Tempat Parkir , Kanopi dan Partisi Ruang Pada Puskesmas Tanjung Pati.
		216.351.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Pembangunan Runag TB Dan Ruang Rekam Medik Pada Puskesmas Mungo
3.	RSUD Dr. Achmad Darwis	49.050.000,00	Reklasifikasi Masuk dari pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Pembangunan Lanjutan Ruang Operasi
		184.420.000,00	Reklasifikasi Masuk dari pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Pembuatan Selasar
		35.000.000,00	Reklasifikasi Masuk dari pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Pembuatan Portal RS
		67.750.000,00	Reklasifikasi Masuk dari pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Pembuatan Ante Room
		56.917.000,00	Reklasifikasi Masuk dari pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Pembuatan Kanopi Ruang NICU
		56.736.000,00	Reklasifikasi Masuk dari pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Rehab gudang ICU
		18.040.000,00	Reklasifikasi Masuk dari pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Pembangunan Ruang Isolasi Gedung IGD
		2.200.000,00	Reklasifikasi Masuk dari pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Pemasangan Shower
		5.000.000,00	Reklasifikasi Masuk dari pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Panggung Farmasi
		38.500.000,00	Reklasifikasi Masuk dari pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Pembuatan wc Ruang Isolasi.
		2.798.363.869,00	Reklasifikasi Masuk dari Akun KDP Berupa Pembangunan Geding Instalasi Ruang Operasi (DAK) Tahun 2018.
4.	Dinas Perhubungan	77.600.000,00	Reklasifikasi Dari Akun Aset Tetap Lainnya Berupa Pembangaun WC Terminal Rimbo Data Dan Pangkalan.

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
5.	Dinas Perdagangan KUKM	45.850.000,00	Reklasifikasi Dari Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa Perencanaan Pasar Dangung dangung
6.	Dinas Perikanan	233.631.339,00	Reklasifikasi Dari Akun Aset Tetap Tanah berupa Rehab Kolam/bak BBI Ai Putih
		332.523.147,00	Reklasifikasi Dari Akun Aset Tetap Tanah berupa Rehab Kolam/bak Pemijahan BBI Aia Putih
		347.715.053,00	Reklasifikasi Dari Akun Aset Tetap Tanah berupa Rehab Kolam/bak Induk/ calon induk dan kolam induk BBI Aia Putih.
	Jumlah	5.496.320.764,00	

- e. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp17.180.000,00 merupakan belanja modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Aset Tetap dan/atau diserahkan kepada pihak lain yaitu terdapat pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga yakni berupa pengecatan GOR Singa Harau.
- f. Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp475.537.000,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 359 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang terdapat Pada:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	187.669.000,00	Penghapusan Rumah Dinas Guru, dan Mushalla.
2.	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	92.145.000,00	Penghapusan Berupa Rumah PPS
		65.694.000,00	Penghapusan Berupa Rumah Dinas Kepala KBPTN
		56.253.000,00	Penghapusan Berupa Gedung Kantor
		26.947.000,00	Penghapusan Berupa Tempat Penyimpanan Alsistan
		24.892.000,00	Penghapusan Berupa Tempat Tinggal Pegawai
		21.937.000,00	Penghapusan Berupa Rehab Pagar Kantor Dinas
	Jumlah	475.537.000,00	

- e. Mutasi keluar sebesar Rp2.648.752.000,00 merupakan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan sebagai akibat dari mutasi pemakaian gedung dan bangunan antar OPD sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	110.089.000,00	Mutasi Keluar Ke Pemerintah Propinsi merupakan Peralihan SD I Sungai Rimbang yang menjadi SMK I Suliki.
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	219.725.000,00	Mutasi Keluar Ke Setda Berupa Pembangunan Gedung Arsip di Mess Pemda
		225.846.000,00	Mutasi Keluar Ke Setda Berupa Rehab Mess Pemda LB Basilang.
3.	Dinas Kominfo	5.585.000,00	Mutasi ke Dinas Kesehatan Berupa Pemasangan Kanopi Parkir.
4.	Sekretariat Daerah	94.846.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Los Terbuka Pasar Jumat Piladang
		47.730.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Kios Pasar Jumat Piladang
		28.638.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Los Daging Pasar Jumat Piladang
		8.314.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa wc Pasar Jumat Piladang
		133.646.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Kios Pasar Dandung dangung.
		202.061.000,00	Mutasi dari Setda berupa Los Mini Dan Los Kayu Pasar Dandung Dandung.
		83.529.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Los Sederhana Pasar Dandung Dandung
		11.785.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Rumah Bulat Pasar Dandung Dandung
		62.646.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Kafe Pasar Dandung Dandung
		20.285.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Kantor Pasar Jumat Piladang
		23.673.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Wc Pasar Dandung Dandung

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		342.523.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Kios Pasar Jumat Piladang
		788.583.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Rehab Pasar Dandung Dandung Tahun 2016
		89.855.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Rehab Pasar Dandung Dandung Tahun 2017
		149.393.000,00	Mutasi Ke Dinas Perdagangan dan KUKM berupa Rehab Pasar Dandung Dandung Tahun 2020
	Jumlah Mutasi Keluar	2.648.752.000,00	

- f. Reklasifikasi Keluar pada Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.618.443.514,00 pada 7 (tujuh) OPD dengan rincian:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.311.895.593,00	Reklasifikasi ke Akun Peralatan mesin dan Akun KDP.
2.	Dinas Kesehatan	100.695.000,00	Reklasifikasi Ke akun KDP Berupa Relokasi Poskesri Jorong III Koto Bangun.
3.	RSUD Achmad Darwis Suliki	81.400.000,00	Reklasifikasi ke akun Aset Lainnya Berupa Jasa Konsultan Perencanaan DED Pemasangan MOT
		28.540.000,00	Reklasifikasi ke Aset Lainnya Berupa Jasa Konsultan Perencanaan DED Pagar RS
		796.604.237,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin Berupa Rehab Ruangan Isolasi Tekanan Negatif (ruang bougenville ICU)
		52.800.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin Berupa Wastafel Trans Sensore 8 Unit
4.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	25.000.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin Berupa Plang nama kantor beton
5.	Dnas Perhubungan	3.900.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin Berupa Lampu Rotari
6.	Dinas Kominfo	3.575.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin Berupa Papan PPID.
7.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	214.033.684,00	Reklasifikasi ke Aset Tanah Berupa Pematangan Lahan Gedung Kantor Tahun 2020

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Jumlah	2.618.443.514,00	

- g. Reklasifikasi Keluar Aset Gedung dan Bangunan Ke Aset Peralatan Dan Mesin (Permendagri 108) Sebesar Rp4.668.193.227,00 dengan rincian sebagai berikut:

REKLASIFIKASI MASUK ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KE ASET PERALATAN MESIN

No.	NAMA OPD	Uraian	JUMLAH
1	BPBD	Rambu Rambu	67.200.000,00
			67.200.000,00
2	Dinas Perhubungan	Rambu Rambu	4.600.993.227,00
			4.600.993.227,00
	JUMLAH		4.668.193.227,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.603.703.199.908,82	1,547,785,073,839.82

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota posisi per 31 Desember 2020 dan 2019. Terdapat Penambahan Terhadap Nilai Aset Tetap Jalan, irigasi dan Jaringan Sebesar Rp55.918.126.069,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Penambahan		
Belanja Modal Tahun 2020	Rp	61.514.075.572,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	32.609.400,00
- Hibah/Mutasi antar OPD	Rp	9.366.625.667,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	3.807.595.430,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	74.720.906.069,00
Mutasi Pengurangan		
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	Rp	8.827.711.000,00
- Reklasifikasi Keluar	Rp	687.895.000,00
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	1.466.064.000,00
- Koreksi kurang	Rp	4.650.000,00
- Penghapusan	Rp	7.816.460.000,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	18.802.780.000,00
Jumlah Mutasi Bersih		55.918.126.069,00

- a. Jumlah pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp61.514.075.572,00 merupakan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020.
- b. Kapitalisasi Barang dan Jasa sebesar Rp32.609.400,00, terdiri dari pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS).
- c. Hibah/mutasi masuk antar OPD sebesar Rp9.366.625.667,00 pada OPD sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	653.927.900,00	Mutasi Masuk Dari Pemda Propinsi Sumbar Berupa Jembatan Taeh Baruah.
		454.878.627,00	Mutasi Masuk Dari Pemda Propinsi Sumbar Berupa Jembatan Gantung Taeh Baruah.
		8.257.819.140,00	Mutasi Masuk Dari Pemda Propinsi Sumbar Berupa Daerah Irigasi dan PAM
	Jumlah Mutasi Masuk	9.366.625.667,00	

- d. Reklasifikasi masuk sebesar Rp3.807.595.430,00 ke dalam akun Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut dari akun lain (yang masih berada dalam kelompok Aset Tetap), yaitu terdiri dari 4 (empat) OPD yaitu:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS)	21.200.000,00	Reklasifikasi masuk dari Akun Peralatan Mesin
2.	Dinas Kesehatan	12.177.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Peralatan Mesin Berupa Pekerjaan Instalasi Perangkat SIKDA Online Puskesmas Halaban, Maek, Dan Koto Tinggi.
		2.054.280,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya Berupa Pengadaan Jarinagn Sambungan Air Ke Kantor Puskesmas Banja Loweh
		2.500.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya Berupa Pengadaan Jarinagn Sambungan Air Ke Kantor Puskesmas Muoro Piti.
		8.574.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Aset Tetap Lainnya Berupa Pengadaan Jaringan Internet Puskesmas Tanjung Pati
3.	RSUD Ach. Darwis Suiki	40.000.000,00	Pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Pemasangan Jaringan IPAL.
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.810.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun KDP Beruap Perencanaan Jembatan Maek/Penawan
		2.567.385.250,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
			KDP Berupa Jembatan Maek/Penawan
		16.645.750,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun KDP Berupa Perencanaan Jembatan Sungai Mangkirai.
		1.112.249.150,00	Reklasifikasi Dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Dan Perencanaan Pembangunan Irigasi
	Jumlah	3.807.595.430,00	

- e. Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp8.827.711.000,00 terdapat pada OPD Sebagai Berikut :

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.632.111.000,00	Ini merupakan Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga
2.	Dinas Perhubungan	195.600.000,00	ini merupakan perbaikan lampu dan perbaikan pemeliharaan PJU
	Jumlah	8.827.711.000,00	

- f. Reklasifikasi keluar pada Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp687.895.000,00 terdapat Pada OPD Sebagai Berikut :

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.000.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Akun Aset Peralatan Mesin Berupa GPS 2 unit
		7.000.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Akun Aset Peralatan Mesin Berupa GPS 1 unit
		472.835.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Akun Aset Tetap Lainnya Berupa Buku Kondisi Jalan Kabupaten 2020.
		63.360.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Akun Aset Tetap Lainnya Berupa Buku Kondisi Jembatan Kabupaten 2020.
2	Dinas Perhubungan	13.240.000,00	Reklasifikasi Ke Akun Peralatan Mesin Berupa Kelengkapan GPS

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		12.240.000,00	Reklasifikasi Ke Akun Peralatan Mesin Berupa Tooli Set 2 paket
		28.620.000,00	Reklasifikasi Ke Akun Peralatan Mesin Berupa Kelengkapan Peralatan PJU
		77.600.000,00	Reklasifikasi Ke Akun Peralatan Mesin Berupa Jaringan Lampu PJU
	Jumlah Reklas Keluar	687.895.000,00	

- g. Koreksi Kurang Terhadap Saldo Awal Terdapat Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS) Sebesar Rp4.650.000,00 berupa jaringan air dan jaringan listrik yang double catat.
- h. Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.816.460.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Aset yang telah digunakan oleh PDAM tetapi belum dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	Pemasangan Pipa JPU SPAM IKK Batu Malanca SPAM IKK Batu Malanca Nagari Tarantang (PU-2017)	2017	1.640.878.000,00
2	Pemasangan Pipa JPU SPAM IKK Sarilamak Nagari Sarilamak (PU-2017)	2017	519.225.000,00
3	Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Nagari Solok Bio - Bio Kec. Harau (PU-2017)	2017	202.550.000,00
4	Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Sarilamak Nagari Sarilamak Kec. Harau (PU-2017)	2017	202.520.000,00
5	Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Jorong Pulutan Nagari Sarilamak Kec. Harau (PU-2017)	2017	202.540.000,00
6	Optimalisasi Jaringan Pipa Distribusi Nagari Batu Balang Kec. Harau (PU-2017)	2017	202.580.000,00
7	Pemasangan Pipa IKK Suliki, IKK Sarilamak dan IKK Muaro Paiti (DDUB) (PU-2017)	2017	954.645.000,00
8	DDUB SPAM IKK Batu Hampar Kec. Akabiluru (PU 2018)	2018	169.700.000,00
9	Pembangunan jaringan pipa IKK Suliki Nagari Suliki (PU 2018)	2018	199.600.000,00
10	Interkoneksi SPAM IKK Muaro Paiti Kec. Kapur IX (PU 2018)	2018	199.650.000,00
11	Pembangunan jaringan pipa Nagari Koto Tuo Kec. Harau (PU 2018)	2018	199.750.000,00
12	Pembangunan jaringan pipa Nagari Batu Balang Kec. Harau (PU 2018)	2018	199.700.000,00
13	Pembangunan jaringan pipa distribusi sarilamak residence ketinggian Kec. Harau (PU 2018)	2018	199.550.000,00
14	Pebangunan jaringan pipa Pandam Gadang Nagari Pandam Gadang (PU 2018)	2018	199.750.000,00

NO	KEGIATAN	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
15	Pembangunan jaringan pipa IKK Harau Kec. Harau (PU 2018)	2018	199.700.000,00
16	Pembangunan jaringan pipa PDAM Nagari Sialang (PU 2018)	2018	199.750.000,00
17	Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Sarilamak Residence Ketinggian (PU 2019)	2019	131.411.000,00
18	Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi ke Perumahan Bukit Palano Samping Kompi C (PU 2019)	2019	132.213.000,00
19	Optimalisasi SPAM IKK Sialang (Durian Tinggi) PU 2019	2019	111.060.000,00
20	Optimalisasi SPAM IKK Pauh Sangik (PU 2019)	2019	147.139.000,00
21	Optimalisasi Jaringan Pipa IKK Sarilamak (Arah Kantor Bupati) PU 2019	2019	162.114.000,00
22	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sarilamak Nagari Harau , Nagari Bukik Limbuku, Nagari Sarilamak, Kec. Harau (PU 2019)	2019	866.349.000,00
23	Pengembangan Jaringan Perpipaan IKK Situjuh Gadang Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota (PU 2019)	2019	187.147.000,00
24	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Muaro Paiti Nagari Sialang, Kec. Kapur IX (PU 2019)	2019	202.199.000,00
25	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh (PU 2019)	2019	184.740.000,00
	Jumlah		7.816.460.000,00

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
102.937.798.194,41	100.230.824.023,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.706.974.171,41 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

Belanja Modal Tahun 2020	Rp	14.753.679.651,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp	30.000.000,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	2.379.321.991,00
- Koreksi Tambah	Rp	58.013.096,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	17.221.014.738,00

Mutasi Pengurangan

- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir	Rp	780.491.056,11
- Reklasifikasi Keluar	Rp	7.603.176.488,89

-Reklasifikasi Keluar Ke Akun Peralatan Mesin (Permendagri 108)	Rp	6.014.360.825,59
- Koreksi kurang	Rp	116.012.196,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	<u>14.514.040.566,59</u>
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	2.706.974.171,41

- Jumlah pembelian / pengadaan Aset Tetap Lainnya tahun 2020 sebesar Rp14.753.679.651,00.
- Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp30.000.000,00 pada Sekretariat DPRD.
- Reklasifikasi masuk sebesar Rp2.379.321.991,00 ke dalam akun Aset Tetap Lainnya merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut pada:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.831.526.991,00	Reklasifikasi Dari Aset Peralatan dan Mesin Berupa Buku.
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	472.835.000,00	Reklasifikasi dari Akun Aset JIJ Berupa Buku Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020
		63.360.000,00	Reklasifikasi dari Akun Aset JIJ Berupa Buku Kondisi Jembatan Kabupaten Tahun 2020
3.	Dinas Pemadam Kebakaran.	2.500.000,00	Reklasifikasi dari Akun Aset Peralatan Mesin berupa Bunga Hias 5 Buah.
4.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja.	1.600.000,00	Reklasifikasi dari Akun Aset Peralatan Mesin berupa Patung Manekin 4 buah.
5.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.	2.500.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Peralatan Mesin Berupa Bunga Hias 10 Buah.
6.	Sekretariat DPRD	5.000.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Akun Peralatan Mesin Berupa Meja pingpong 1 Set.
	Jumlah	2.379.321.991,00	

- Koreksi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp58.013.096,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS).
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp780.491.056,11 pada 2 (dua) OPD yaitu:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	251.240.818,00	Ini merupakan Pengadaan Buku Rapor Siswa
	BOS	475.988.176,00	Ini merupakan Pengadaan Buku Rapor Siswa
2.	Dinas Kesehatan	53.262.062,11	Merupakan Pembelian Peralatan dan Belanja BLUD yang tidak merupakan kategori aset tetap

	Jumlah	780.491.056,11
--	---------------	-----------------------

- f. Reklasifikasi keluar sebesar Rp7.603.176.488,89 dari akun Aset Tetap Lainnya merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut pada 5 (lima) OPD sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	1.560.426.471,00	Reklasifikasi Ke Akun Peralatan Mesin berupa Alat Kantor Dan Rumah Tangga Puskesmas Puskesmas
		2.045.966.670,89	Reklasifikasi Ke Akun Peralatan Mesin berupa Alat Alat Kedokteran di Puskesmas Puskesmas
		1.450.000,00	Reklasifikasi Ke Akun Peralatan Mesin berupa Alat Pertanian Mesin Potong Rumput Puskesmas
		101.984.523,00	Reklasifikasi Ke Akun Peralatan Mesin berupa Alat Studio dan Komunikasi Puskesmas Puskesmas
		117.857.605,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan berupa Pengadaan Tempat Parkir , Kanopi dan Partisi Ruangan Pada Puskesmas Koto Baru Simalanggang.
		197.365.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan berupa Pengadaan Renovasi Gedung Pada Puskesmas Dandung Dandung.
		46.978.001,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan berupa Pembangunan Tempat Parkir Puskesmas Maek.
		13.960.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan berupa Pengadaan Konstruksi Rumah Genset Puskesmas Pangkalan.
		29.792.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan berupa Pembangunan Rumah Genset Puskesmas Pangkalan.
		6.074.250,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan berupa Pengadaan Pegangan Tangga Puskesmas Situjuah.
		157.510.500,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan berupa Rehap Puskesmas Taram.
		197.296.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan berupa Pengadaan Tempat Parkir , Kanopi dan Partisi Ruangan Pada Puskesmas Tanjung Pati.
		216.351.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan berupa Pembangunan Runag TB Dan Ruang Rekam Medik Pada Puskesmas Mungo
		2.054.280,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun JIJ

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
			Berupa Pengadaan Jaringan Sambungan Air Ke Kantor Puskesmas Banja Loweh
		2.500.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Aku JIJ Berupa Pengadaan Jaringan Sambungan Air Ke Kantor Puskesmas Muoro Paiti.
		8.574.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Aku JIJ Berupa Pengadaan Jaringan Internet Puskesmas Tanjung Pati
2.	RSUD Ach. Darwis Suliki	61.136.000,00	Reklasifikasi Ke Luar ke Akun Aset Peralatan Mesin Pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Alat Studio Komunikasi
		59.985.761,00	Reklasifikasi Ke Luar ke Akun Aset Peralatan Mesin Pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Alat Kedokteran.
		274.632.250,00	Reklasifikasi keluar ke Akun Peralatan Mesin Pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Alat Kantor Dan Rumah Tangga.
		513.613.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan Berupa Pemabngunan Lanjutan Ruang Operasi, Ruang Selasar, Portal RS, dll.
		40.000.000,00	Reklasifikasi keluar ke Akun JIJ Pengadaan BLUD Tahun 2020 Berupa Pemasangan Jaringan IPAL
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.112.249.150,00	Reklasifikasi Keluar ke Akun JIJ berupa Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Dan Perencanaan Pembangunan Irigasi
		28.449.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke KDP Berupa DI Perencanaan Talang Beton Irigasi Ampang Baromban Nagari Suayan.
		50.436.027,00	Reklasifikasi Keluar Ke KDP Berupa Perencanaan Jalan Kabupaten Paket 1
4.	Dinas lingkungan Hidup Perumahan Dan Pemukiman.	439.675.000,00	Reklasifikasi Ke Akun Aset Peralatan Mesin Berupa Damtruk Sampah 1 Unit.
		98.500.000,00	Reklasifikasi Ke Akun Aset Peralatan Mesin Berupa Becak Motor 3 Unit.
		155.860.000,00	Reklasifikasi Ke Akun Aset Peralatan Mesin Berupa Kontainer Sampah, dan Tong Sampah.
5.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.	18.000.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Akun Peralatan Mesin Berupa Tong Sampah 10 Set
		6.000.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Akun Peralatan Mesin Berupa Gerobak 8 Buah
		38.500.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Akun Peralatan

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
			Mesin berupa Mesin Potong Rumput.
	Jumlah	7.603.176.488,89	

- g. Koreksi Kurang Aset tetap lainnya sebesar Rp116.012.196,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS) dimana terdapat double catat.
- h. Reklasifikasi Keluar Ke Aset Peralatan Mesin (Permendagri 108) Sebesar Rp6.014.360.825,59 dengan Rincian Sebagai Berikut :

REKLASIFIKASI KELUAR ASET TETAP LAINNYA KE ASET PERALATAN MESIN

No	NAMA OPD	Uraian	JUMLAH
1	BPBD	Alat Tennis Meja dan Kelengkapan	5.710.000,00
			5.710.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Meja pimpong	3.000.000,00
			3.000.000,00
3	Dinas Lingkuagn Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Meja pimpong	1.784.000,00
			1.784.000,00
4	Sekretariat Dewan	Meja pimpong	7.250.000,00
		Meja pimpong	5.000.000,00
		Treadmill	30.000.000,00
			42.250.000,00
5	Disparpora	Matras Judo	86.838.000,00
		Sepeda Air	34.000.000,00
		Sepeda Air	74.998.000,00
		Gawang Sepak Bola Mini	2.100.000,00
		Jaring Bola Kaki	1.240.000,00
		Sepeda Air	89.760.000,00
		Seluncuran Kolam Anak	42.250.000,00
		Stik Billyard	30.000.000,00
		Gawang Sepak Bola Mini	8.000.000,00
		Jaring Gawang Sepak Bola	4.200.000,00
		Jaring Gawang Sepak Bola	3.600.000,00
			376.986.000,00
6	Setda	Tennis Meja	4.000.000,00
		Tennis Meja	5.000.000,00
		Raket	1.350.000,00
		Lembing fibre	900.000,00
		Net takrwa	600.000,00
		Raket Yonex	5.000.000,00
		Lembing fibre	700.000,00

No	NAMA OPD	Uraian	JUMLAH
		Matras	4.000.000,00
		Raket Yonex	5.000.000,00
		Stopwath HS-3	350.000,00
		Alat Pancing	3.000.000,00
		Net Takraw TO	300.000,00
		Net Voli	700.000,00
		Net Voli GTO	900.000,00
		Ring Basket	350.000,00
		Matras Genos RD Bupati	6.000.000,00
			38.150.000,00
7	Dinas PU dan PR	Meja Pimpong 2 Bah	10.000.000,00
			10.000.000,00
8	Dinas Kesehatan	Alata Tenis Meja	1.500.000,00
			1.500.000,00
9	Dinas Pendidikan	Peralatan Olah Raga	5.534.980.825,59
			5.534.980.825,59
	JUMLAH		6.014.360.825,59

5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
	14.724.865.154,00	19.535.339.346,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Penambahan		
- Reklasifikasi Masuk	Rp	1.195.797.677,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	1.195.797.677,00
Mutasi Pengurangan		
- Reklasifikasi Keluar	Rp	6.006.271.869,00
Jumlah Mutasi Pengurangans	Rp	6.006.271.869,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	(4.810.474.192,00)

- a. Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.195.797.677,00 ke dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pemindahbukuan atas nilai Aset Tetap tersebut pada:

No.	Nama OPD	Jumlah	Keterangan
-----	----------	--------	------------

		(Rp)	
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	906.277.650,00	Reklasifikasi Masu dari Akun Gedung Bangunan Berupa Perencanaan Rehab Sekolah
2.	Dinas Kesehatan	100.695.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Akun Gedung Bangunan Berupa Relokasi Poskesri Jorong III Koto Bangun.
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.449.000,00	Reklasifikasi Masuk dari aset tetap lainnya Berupa DI Perencanaan Talang Beton Irigasi Ampang Baromban Nagari Suayan.
		50.436.027,00	Reklasifikasi Masuk dari aset tetap lainnya Berupa Perencanaan Jalan Kabupaten Paket 1
4.	RSUD Ach. Darwis Suliki	81.400.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset Gedung dan Bangunan Berupa Jasa Konsultan Perencanaan DED Pemasangan MOT.
		28.540.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset Gedung dan Bangunan Berupa Jasa Konsultan Perencanaan Pagar Rumah Sakit
	Jumlah	1.195.797.677,00	

- b. Reklasifikasi keluar merupakan pemindahbukuan atas nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah tuntas dilaksanakan sehingga menjadi Aset Tetap yaitu pada :

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.850.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan paad Sekolah SMP 2 Luak Dan SMP 1 Harau.
2	Dinas Kesehatan	136.390.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan berupa Honor Tim asistensi dari PPHD DED Relokasi Puskesmas Baruah Gunuang.
		3.475.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan berupa DED Relokasi Puskesmas Dangung Dangung.
		4.125.000,00	Reklasifikasi Keluar Ke Akun Gedung Bangunan berupa Honor Pokja Relokasi Puskesmas Baruah Gunuang

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	24.810.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Akun KDP Berupa Perencanaan Jembatan Maek/Penawan
		2.567.385.250,00	Reklasifikasi Keluar ke Akun KDP Berupa Jembatan Maek/Penawan
		16.645.750,00	Reklasifikasi Keluar ke Akun KDP Berupa Perencanaan Jembatan Sungai Mangkirai.
		49.840.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset lainnya Berupa DED Pembukaan Jalan dari Sei antuan Ke Simpang Kapuak
		39.840.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset lainnya Berupa Perencanaan Jembatan Lombah Sei Rimbang.
		49.890.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset lainnya Berupa DED Jembatan Lubuak Sati.
		49.920.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset lainnya Berupa DED Jembatan Aia Gonang.
		65.788.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset lainnya Berupa Saluran Irigasi Banda Ketaping Suayan.
4	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	45.850.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset Gedung Bangunan Berupa Perencanaan Pasar Dandung Dandung.
5	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.	34.571.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset lainnya Berupa perencanaan Gedung Kantor tahun 2009
		24.588.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset lainnya Berupa DED Jembatan Kolam Jalan Trail Tahun 2009
		74.940.000,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset lainnya Berupa Perencanaan Taman Megalitikum Tahun 2008,
	RSUD Ach. Darwis Suliki	2.798.363.869,00	Reklasifikasi Keluar ke Aset Gedung Bangunan Berupa Pembangunan Gedung Instalasi Ruang Operasi (DAK) Tahun 2018.
	Jumlah	6.006.271.869,00	

Daftar rekapitulasi Aset Tetap tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 14** Laporan Keuangan Daerah ini.

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	(1.466.097.181.619,66)	(1.345.719.874.731,29)

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	(336.507.520.209,85)	(290.093.201.130,03)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	(323.000.842.207,35)	(310.433.641.316,49)
3	Akumulasi Penyusutan JIJ	Rp	(805.443.542.842,73)	(744.605.859.222,16)
4	Akumulasi Penyusutan ATL	Rp	(1.145.276.359,73)	(587.173.062,61)
	Jumlah	Rp	(1.466.097.181.619,66)	(1.345.719.874.731,29)

Daftar rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 15** Laporan Keuangan Daerah ini.

5.3.4 Aset Lainnya	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	9.995.036.864,97	11.607.551.776,97

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019. Jumlah tersebut terdiri dari:

		2020	2019	
• UYHD TA 2011	Rp	337.500.000,00	337.500.000,00	
• PM- PD Gonjong Limo Sakato	Rp	29.318.493,00	29.318.493,00	
• PM-BPR Kampung Baru	Rp	100.000.000,00	100.000.000,00	
• Aset Tidak Berwujud	Rp	2.344.291.820,00	2.180.991.820,00	
• Aset Lain-lain	Rp	10.772.464.279,97	8.959.741.463,97	
• Akumulasi Penyusutan	Rp	(3.588.537.728,00)		
	Jumlah	Rp	9.995.036.864,97	11.607.551.776,97

UYHD sebesar Rp337.500.000,00 merupakan UYHD Dinas PU Tahun 2011 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1122/TU/2013/1543 K/PID.SUS/2013 tanggal 3 September 2013 dan Nomor 1097/TU/2013/1537/K/PID.SUS/ 2013 tanggal 26 September 2013.

Penyertaan Modal pada PD. Gonjong Limo Sakato sebesar Rp29.318.493,00 merupakan reklasifikasi dari akun Penyertaan Modal Pemda.

Penyertaan Modal pada BPR Kampung Baru sebesar Rp100.000.000,00 merupakan reklasifikasi dari akun Penyertaan Modal Pemda

Disamping itu terdapat juga asset lain-lain yang berasal dari Aset Tidak berwujud, mutasi aset rusak berat dan lain-lain, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

- Hibah/Mutasi antar OPD	Rp	1.578.697.316,00
- Reklasifikasi Masuk	Rp	<u>969.357.000,00</u>
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp	2.548.054.316,00

Mutasi Pengurangan

- Penghapusan	Rp	54.000.000,00
- Mutasi Keluar antar OPD	Rp	<u>518.031.500,00</u>
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp	572.031.500,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	1.976.022.816,00

- a. Reklasifikasi masuk sebesar Rp969.357.000,00 adalah pemindahbukuan ke akun Aset Lainnya dari akun Aset Tetap pada 4 (empat) OPD sebagai berikut :

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	88.600.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Aset Peralatan Mesin Berupa Mobil Mitsubishi L300
		44.000.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Aset Peralatan Mesin Berupa Mobil Toyota Kijang Standar Kf40 Short
		23.000.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Aset Peralatan Mesin Berupa Mobil Suzuki Carry
		90.400.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Aset Peralatan Mesin Berupa Mobil Toyota Kijang Standar Kf60 Pickup
		49.600.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Aset Peralatan Mesin Berupa Mobil Isuzu Panter
		100.000.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Aset Peralatan Mesin Berupa Mitsubishi Galand
		3.700.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Aset Peralatan Mesin Berupa Honda Astrea
		12.280.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Aset Peralatan Mesin Berupa Honda Kharisma
		5.100.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Aset Peralatan Mesin Berupa Honda Win

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
2.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	34.571.000,00	Reklasifikasi Masuk dari aset KDP Berupa perencanaan Gedung Kantor tahun 2009
		24.588.000,00	Reklasifikasi Masuk dari aset KDP Berupa DED Jembatan Kolam Jalan Trail Tahun 2009
		74.940.000,00	Reklasifikasi Masuk dari aset KDP Berupa Perencanaan Taman Megalitikum Tahun 2008.
3.	Badan Keuangan	163.300.000,00	Reklasifikasi Masuk Dari Peralatan Mesin berupa Software
4.	Dinas Pekerjaan Umu Dan Penataan Ruang	49.840.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset KDP Berupa DED Pembukaan Jalan dari Sei antuan Ke Simpang Kapuak
		39.840.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset KDP Berupa Perencanaan Jembatan Lombah Sei Rimbang.
		49.890.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset KDPa Berupa DED Jembatan Lubuak Sati.
		49.920.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset KDP Berupa DED Jembatan Aia Gonang.
		65.788.000,00	Reklasifikasi Masuk dari Aset KDP Berupa Saluran Irigasi Banda Ketaping Suayan.
	Jumlah Reklasifikasi Masuk	969.357.000,00	

- b. Mutasi Masuk antar OPD Pada Aset Lain Lain Terdapat Sejumlah Rp1.578.697.316,00 terdapat pada 2 (dua) OPD yaitu :

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.	1.705.440,00	Hibah Dari Dinkes Berupa Thermo gun 2 Unit
		454.000,00	Hibah Dari Dinkes Berupa Alat Backpack Sprayer 1 Unit
2.	Sekretariat Daerah	42.000.000,00	Mutasi Dari Dinas Lingkungnagn Hidup berupa Mobil Toyota Kijang Standar kf short
		47.000.000,00	Mutasi Dari Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa Mobil Toyota Kijang Super.
		46.000.000,00	Mutasi Dari BPBD berupa Mobil Toyota Kijang Super.
		40.000.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Minibus Toyota KF 50 BA 1716 C
		174.157.500,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Minibus L300 BA1721 CK
		31.000.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Minibus L300 BA 8036 C

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		32.000.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Minibus L300 BA 8030 C
		24.000.000,00	Mutasi Masuk Dari Dinas Kesehatan Berupa Kendaraan Roda 4 Minibus Toyota Kijang kf 50 Long BA 9910 CK
		40.000.000,00	Mutasi Masuk Dari Inspektorat Berupa Mobil Colt L300
		42.000.000,00	Mutasi Masuk Dari Disdukcapil Berupa Mobil Toyota Kijang Super kf50 long
		59.400.000,00	Mutasi Masuk Dari Satpol PP Berupa Mobil Toyota Kijang Super kf60
		93.100.000,00	Mutasi Masuk Dari Dinas Perikanan Berupa Mobil Toyota Kijang Super kf60
		83.300.000,00	Mutasi Dari Dinas Tanaman Pangan Berupa Mobil Kijang Standar kf60
		101.056.000,00	Mutasi dari dinas tanaman pangan Berupa 10 Unit Sepeda Motor (lelang)
		163.569.750,00	Mutasi Dari Dinas Lingkungan Hidup Berupa Kendaraan Roda 2
		40.800.000,00	Mutasi dari Bapelitbang berupa Kendaraan Roda 2 (Lelang)
		15.832.625,00	Mutasi dari Dinas Parpora Berupa Kendaraan Roda 2 Merk Honda Supra tahun 2013 1 Unit.
		4.900.000,00	Mutasi dari Inspektorat Berupa Kendaraan Roda 2
		3.800.000,00	Mutasi dari Inspektorat Berupa Kendaraan Roda 2
		8.988.500,00	Mutasi dari Inspektorat Berupa Kendaraan Roda 2
		29.966.667,00	Mutasi Dari Setwan Berupa Kendaraan Roda 2 (lelang)
		19.583.000,00	Mutasi dari Kesbangpol Berupa Kendaraan Roda 2 Jenis Honda 3 Unit. (lelang)
		20.439.834,00	Mutasi dari Perikanan Berupa Kendaraan Roda 2 Honda Tahun 2004
		13.700.000,00	Mutasi dari Dinas Sosial berupa Kendaraan Roda 2 Merk Honda Win 3 Unit Tahun 1994, 1994 dan 1997
		13.970.000,00	Mutasi ke dari RSUD Berupa Kendaraan Roda 2 Suzuki Thunder 1 Unit.
		13.500.000,00	Mutasi Dari Kec. Payakumbuh Berupa Kendaraan Roda 2 Jenis Honda
		28.200.000,00	Mutasi Dari BKPSDM Berupa Kendaraan Roda 2 (lelang)
		5.600.000,00	Mutasi Dari Dinas Kependudukan dan Capil berupa kendaraan Roda 2 Yamaha Crypton
		3.300.000,00	Mutasi Dari Kec. Luak Berupa Kendaraan Roda 2
			Mutasi Dari Badan Keuangan Berupa

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		53.800.000,00	Kendaraan Roda 2
		11.400.000,00	Mutasi dari dpmdn Berupa Kendaraan Roda 2
		14.358.000,00	Mutasi Dari DP2KBP2A Kendaraan Roda 2 Yamaha.
		15.900.000,00	Mutasi Dari Kec Kapur IX Berupa Kendaraan Roda 2
		239.916.000,00	Mutasi Dari Dinkes Kendaraan Roda 2
	Jumlah	1.578.697.316,00	

- c. Penghapusan terhadap Aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 364 Tanggal 28 Desember 2020 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang, terdapat 2 (OPD) sebesar Rp54.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	28.000.000,00	Penghapusan Berupa Minibus Toyota KF20 BA 8017 C
2.	Sekretariat Daerah	26.000.000,00	Penghapusan Berupa Mobil Suzuki Katana
	Jumlah	54.000.000,00	

- d. Mutasi Keluar Antar OPD pada Aset lainnya terdapat sebesar Rp518.031.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	40.000.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Minibus Toyota KF 50 BA 1716 C
		174.157.500,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Minibus L300 BA1721 CK
		31.000.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Minibus L300 BA 8036 C
		32.000.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 4 Minibus L300 BA 8030 C
		6.200.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Baruah Gunuang Sepeda Motor Suzuki RC 100
		5.300.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Baruah Gunuang Sepeda Motor Suzuki a100
		6.400.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Halaban Sepeda Motor Astrea c100
		6.200.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Halaban Sepeda Motor Astrea c100

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		4.900.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Halaban Sepeda Motor Astrea c86
		6.200.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Halaban Sepeda Motor Suzuki RC
		3.700.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 PuskesmasMungo Sepeda Motor Suzuki RC
		4.700.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Halaban Sepeda Motor Astrea c80
		4.900.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Padang Kandis Sepeda Motor Astrea Star
		4.700.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Suliki Sepeda Motor win
		4.700.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Suliki Sepeda Motor Astrea Star
		4.700.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Suliki Sepeda Motor Astrea Star
		4.900.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Koto Tinggi Sepeda Motor Astrea C100
		3.700.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Koto Baru Sepeda Motor Honda rc100
		4.700.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Koto Baru Sepeda Motor Honda C85
		4.600.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Koto Baru Sepeda Motor Honda 86
		4.700.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Murao Paiti Sepeda Motor Honda 86
		3.800.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Murao Paiti Sepeda Motor Honda rc100
		4.000.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Muaro Paiti Sepeda Motor Honda mcb
		3.700.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Murao Paiti Suzuki rc100
		4.900.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Maek Honda Astrea

No.	Nama OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		11.500.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Maek Honda kf125
		3.200.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Maek Honda Kirana.
		2.000.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Tanjung Pati Honda Astrea
		4.900.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Tanjung Pati Suzuki a100
		3.400.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Tanjung Pati honda c100
		4.700.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2 Puskesmas Dandung Dandung Honda Astrea Star.
2.	Sekretariat Daerah	47.000.000,00	Mutasi Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Berupa Kendaraan Roda 4 Mobil kijang BA 1941 C
3.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	25.600.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2
4.	Badan Keuangan	3.416.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2
5.	DP2KBP3A	14.358.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2
6.	Kec. Luak	3.300.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2
7.	Kec. Kapur IX	15.900.000,00	Mutasi Ke Setda Berupa Kendaraan Roda 2
	Jumlah Mutasi Keluar	518.031.500,00	

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.4.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(3.588.537.728,00)	0,00

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2020 merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat berupa alat angkutan, alat pertanian, alat laboratorium, alat keamanan dan alat bengkel yang terdapat pada OPD sebagai berikut:

NO	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat Daerah	2.118.262.876,00

NO	OPD	Akumulasi Penyusutan
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	96.800.000,00
3	Dinas Kesehatan	688.652.000,00
4	Dinas PU dan Penataan Ruang	158.900.000,00
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	17.300.000,00
6	Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga	431.888,00
7	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	286.207.564,00
8	Dinas Perikanan	30.445.400,00
9	Badan Keuangan	13.800.000,00
10	Inspektorat	24.000.000,00
11	Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM	13.000.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A	9.298.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa/Nagari	35.700.000,00
14	RSUD dr. Achmad Darwis	29.500.000,00
15	Kecamatan Harau	5.200.000,00
16	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	3.500.000,00
17	Kecamatan Akabiluru	2.500.000,00
18	Kecamatan Guguak	4.900.000,00
19	Kecamatan Kapur IX	2.800.000,00
20	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	34.790.000,00
21	Kecamatan Luak	12.550.000,00
	Jumlah	3.588.537.728,00

5.3.5 KEWAJIBAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	2.086.795.695,61	5.616.395.699,00

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban di kelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban sebesar Rp2.086.795.695,61 dan Rp5.616.395.699,00 merupakan jumlah kewajiban per 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri dari:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek	2.086.795.695,61	5.616.395.699,00

Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka pendek, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.086.795.695,61 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.616.395.699,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp3.529.600.003,39 atau 62,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.3.44 Kewajiban Jangka Pendek

Jenis Kewajiban Jangka Pendek	31-Des-20 (Rp)	31-Des-19 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30.073.511,00	34.004.364,00	(3.930.853,00)	(11,56)
Pendapatan diterima dimuka	80.510.378,00	56.070.433,00	24.439.945,00	43,59
Utang Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi & Bangunan	4.523.307,71	0,00	4.523.307,71	100,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.971.688.498,90	5.526.320.902,00	(3.554.632.403,10)	(64,32)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.086.795.695,61	5.616.395.699,00	(3.529.600.003,39)	(62,84)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.5.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30.073.511,00	34.004.364,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2020 sebesar Rp30.073.511,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp34.004.364,00. Utang PFK tahun 2020 tersebut merupakan Utang PPh dan Utang PPN kepada Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	BLUD Puskesmas	Total
1	PPN	6.428.215,00	1.343.303,00	7.771.518,00
2	PPH Ps 21	14.325.000,00	4.797.064,00	19.122.064,00
3	PPH Ps 22	1.101.850,00	168.186,00	1.270.036,00
4	PPH Ps 23	1.099.696,00	2.925,00	1.102.621,00
5	PPH FINAL	807.272,00	-	807.272,00
	Jumlah	23.762.033,00	6.311.478,00	30.073.511,00

Rincian utang PFK tahun 2020 terlampir pada **Lampiran 16** Laporan keuangan Daerah ini.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka	80.510.378,00	56.070.433,00

Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp80.510.378,00 dan sebesar Rp56.070.433,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Diterima Dimuka	31-Des-20 (Rp)	31-Des-19 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Pendapatan atas pajak reklame	80.510.378,00	56.070.433,00	10.303.743,00
Jumlah	80.510.378,00	56.070.433,00	10.303.743,00

Rincian Pendapatan Diterima dimuka atas Pajak Reklame Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 26** Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.5.4 Utang Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi & Bangunan	4.523.307,71	0,00

Pada Tahun 2020 terdapat utang belanja insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan senilai Rp4.523.307,71.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 127 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 memutuskan bahwa Pemerintah Nagari selaku Petugas Pelaksana Pemungutan PBB-P2, menerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan) dari hasil pemungutan PBB yang telah disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Tempat Pembayaran PBB-P2 yakni Bank Nagari Cabang Payakumbuh.

Pembayaran insentif Pajak Bumi dan Bangunan untuk nagari dilakukan oleh Bendaharawan Badan Keuangan dengan mengajukan permintaan (permohonan pencairan insentif), berdasarkan permohonan tersebut dikeluarkan rekomendasi dari kepala Badan Keuangan untuk pembayaran insentif sebagai dasar bendahara untuk permintaan dana.

Adapun terkendala pembayaran insentif tersebut pada akhir tahun karena setoran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dilakukan oleh beberapa nagari melewati tanggal 28 Desember 2020, sehingga tidak dapat diproses oleh bendaharawan untuk pencairan insentif tersebut, dengan jumlah sebagai berikut:

No	Nama Nagari	Target	Realisasi	Besaran insentif
1	Koto Tinggi	37.733.495,00	24.870.433,00	870.465,16
2	Mungka	50.655.857,00	10.725.329,00	375.386,52
3	Sariak Laweh	51.282.836,00	93.618,00	3.276,63
4	Situjuah Banda Dalam	39.123.504,00	4.567.267,00	159.854,35
5	Simpang Sugiran	24.053.883,00	7.867.993,00	275.379,76
6	VII Koto talago	133.405.471,00	39.938.937,00	1.397.862,80
7	Koto Tuo	81.387.952,00	22.080.321,00	772.811,24
8	Sungai Naniang	29.456.907,00	16.863.535,00	590.223,73
9	Tungka	28.087.717,00	2.229.930,00	78.047,55
	Jumlah	475.187.622,00	129.237.363,00	4.523.307,71

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.3.5.5 Utang Jangka Pendek Lainnya	1.971.688.498,90	5.526.320.902,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya yang harus dibayar kepada *supplier* dan atau pemberi jasa, berupa tagihan pemakaian listrik, air, telepon, Internet, tagihan iuran JKK dan JKM, lebih salur Dana BOS serta Utang Lainnya Tahun 2020 dan 2019 yang sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 belum dilunasi, yaitu:

-	Tagihan Rekening Listrik	32.960.767,00	40.721.362,00
-	Tagihan Rekening Telepon	1.569.213,00	5.555.730,00
-	Tagihan Internet	4.223.000,00	3.603.500,00
-	Tagihan Rekening Air	8.085.605,00	4.425.685,00
-	Tagihan Rekening Koran	140.000,00	140.000,00
-	Utang Lainnya	1.924.709.913,90	4.034.000.875,00
-	Lebih Salur Dana BOS		998.160.000,00
-	Utang BLUD Puskesmas		439.713.750,00
	Jumlah	1.971.688.498,90	5.526.320.902,00

Pada tahun 2020 terdapat utang lainnya sebesar Rp1.924.709.913,90 yang tersebar pada 3 (tiga) OPD dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Dinas Kesehatan terdapat utang BLUD Puskesmas sebesar Rp85.774.200,00 berupa utang persalinan dan utang prolanis yang klaim jasanya telah dibayarkan BPJS ke Puskesmas tetapi belum dibayarkan pada tenaga kesehatan. Rinciannya sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	HUTANG
1	Puskesmas Gunung Malintang	25.290.000,00
2	Puskesmas Koto Tinggi	1.704.000,00
3	Puskesmas Suliki	2.012.000,00
4	Puskesmas Danggung-Danggung	343.000,00
5	Puskesmas Pakan Rabaa	4.492.000,00
6	Puskesmas Maek	7.999.600,00
7	Puskesmas Halaban	3.780.000,00
8	Puskesmas Mungo	5.372.000,00
9	Puskesmas Tanjung Pati	5.350.000,00
10	Puskesmas Muaro Paiti	17.800.000,00
11	Puskesmas Sialang	7.794.400,00
12	Puskesmas Pangkalan	3.133.200,00
13	Puskesmas Situjuh	144.000,00
14	Puskesmas Taram	560.000,00
	Jumlah	85.774.200,00

2. Pada RSUD dr. Achmad Darwis Suliki sebesar Rp1.833.595.713,90 berupa utang jasa layanan Rp1.805.560.713,90 dan utang pemeriksaan penunjang Rp28.035.000,00.
3. Pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman sebesar Rp5.340.000,00 berupa utang kompensasi pelayanan pemrosesan sampah pada TPA Regional Payakumbuh dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh kota.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya terdapat pada **Lampiran 17**.

5.3.6 Ekuitas	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	1.742.150.940.965,49	1.719.296.779.066,78

Saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.749.125.736.098,49 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah Rp1.719.296.779.066,78.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2020. Laporan Operasional menyajikan Pendapatan-LO dan Beban.

5.4.1. Pendapatan – LO	Tahun 2020 (Rp) 1.148.425.953.675,61	Tahun 2019 (Rp) 1.352.345.704.032,05
-------------------------------	---	---

Pendapatan-LO Tahun 2020 dengan realisasi Rp1.148.425.953.675,61 sedangkan Tahun 2019 realisasi Rp1.352.345.704.032,05 terjadi penurunan sebesar Rp203.919.750.355,64 atau 15,08% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.45 Rincian Pendapatan-LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	68.757.365.090,61	91.384.175.638,25	(22.626.810.547,64)	(24,76)
2	Pendapatan Transfer-LO	1.052.229.994.343,00	1.245.424.005.131,00	(193.194.010.788,00)	(15,51)
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO	27.438.594.242,00	15.537.523.262,00	11.901.070.980,00	76,60
Jumlah		1.148.425.953.675,61	1.352.345.704.031,25	(203.919.750.355,64)	(15,08)

	Tahun 2020 (Rp) 68.757.365.090,61	Tahun 2019 (Rp) 91.384.175.638,25
A. Pendapatan Asli Daerah-LO		

Pendapatan asli daerah (PAD)-LO merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp68.757.365.090,61 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp91.384.175.638,25 terjadi penurunan sebesar Rp22.626.810.547,64 atau 24,76%. Kelompok Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel V.4.46 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	23.087.238.727,00	25.940.427.255,00	(2.853.188.528,00)	(11,00)
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	3.529.253.431,00	4.543.974.182,00	(1.014.720.751,00)	(22,33)

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	1.212.500,00	5.900.802.694,00	(5.899.590.194,00)	(99,98)
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	42.139.660.432,61	54.998.971.507,25	(12.859.311.074,64)	(23,38)
Jumlah		68.757.365.090,61	91.384.175.638,25	(22.626.810.547,64)	(24,76)

1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2020 sebesar Rp23.087.238.727,00 dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp25.940.427.255,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.853.188.528,00 atau 11,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.47 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Persen tase
1	Pajak Hotel-LO	17.181.500,00	31.936.000,00	(14.754.500,00)	(46,20)
2	Pajak Restoran-LO	939.330.989,00	1.190.118.502,00	(250.787.513,00)	(21,07)
3	Pajak Hiburan-LO	93.500.000,00	21.400.000,00	72.100.000,00	336,92
4	Pajak Reklame-LO	153.826.555,00	171.601.482,00	(17.774.927,00)	(10,36)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	11.679.469.865,00	12.193.234.235,00	(513.764.370,00)	(4,21)
6	Pajak Air Tanah-LO	838.493,00	178.258.285,00	(177.419.792,00)	(99,53)
	Pajak Sarang Burung walet-LO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7	Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	7.007.371.721,00	6.278.959.834,00	728.411.887,00	11,60
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	1.023.187.452,00	3.516.770.942,00	(2.493.583.490,00)	(70,91)
9	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	2.172.432.152,00	2.358.147.975,00	(185.715.823,00)	(7,88)
Jumlah		23.087.238.727,00	25.940.427.255,00	(2.853.188.528,00)	(11,00)

Dari Pendapatan Pajak Daerah - LO diatas tersebut diperbandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA sebagai mana tabel dibawah ini:

Tabel V.4.48 Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah – LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah -LO

No	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi- LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pajak Hotel-	17.181.500,00	17.181.500,00	0,00
2	Pajak Restoran-	940.778.989,00	939.330.989,00	(1.448.000,00)
3	Pajak Hiburan-	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00
4	Pajak Reklame-	177.816.500,00	153.826.555,00	(23.989.945,00)
5	Pajak Penerangan Jalan-	11.679.469.865,00	11.679.469.865,00	0,00
6	Pajak Air Tanah	838.493,00	838.493,00	0,00
7	Pajak Sarang Burung Walet-	100.000,00	100.000,00	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-	7.007.371.721,00	7.007.371.721,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan -	1.467.459.987,00	1.023.187.452,00	(444.272.535,00)
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-	2.172.432.152,00	2.172.432.152,00	0,00
	Jumlah	23.556.949.207,00	23.087.238.727,00	(469.710.480,00)

2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp3.529.253.431,00 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp4.543.974.182,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.014.720.751,00 atau 22,33% dengan Rincian masing masing Hasil Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel V.4.49 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan	Persen Tase
1	Retribusi Pelayanan Persampahan– LO	78.680.000,00	71.630.500,00	7.049.500,00	9,84
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	11.498.000,00	11.858.000,00	(360.000,00)	(3,04)
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	437.135.000,00	485.018.000,00	(47.883.000,00)	(9,87)
4	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	17.000.000,00	12.150.000,00	4.850.000,00	39,92
5	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	792.650,00	1.791.100,00	(998.450,00)	(55,75)
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	636.516.000,00	780.878.500,00	(144.362.500,00)	(18,49)
7	Retribusi Terminal – LO	397.919.300,00	426.885.580,00	(28.966.280,00)	(6,79)
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir –LO	24.087.000,00	23.929.500,00	157.500,00	0,66
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO	1.481.580.000,00	1.729.855.000,00	(248.275.000,00)	(14,35)
10	Penjualan Produk Usaha Daerah-LO	117.985.400,00	112.207.000,00	5.778.400,00	5,15
11	Retribusi Izin Mendirikan	326.060.081,00	887.717.002,00	(561.656.921,00)	(63,27)

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan	Persen Tase
	Bangunan – LO				
12	Retribusi Izin Trayek – LO	0,00	54.000,00	(54.000,00)	(100,00)
Jumlah		3.529.253.431,00	4.543.974.182,00	(1.014.720.751,00)	(22,33)

Rekapitulasi pendapatan Retribusi Daerah-LO per OPD adalah sebagai berikut:

No	Nama OPD	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	239.185.000,00	274.599.000,00
2	Dinas Pemadam Kebakaran	17.000.000,00	12.150.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	78.680.000,00	81.266.500,00
4	Dinas Perhubungan	870.639.300,00	953.745.080,00
5	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	792.650,00	1.791.100,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	319.319.799,00	869.668.280,00
7	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.485.750.000,00	1.736.135.000,00
8	Dinas Perikanan	99.837.500,00	141.750.000,00
9	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	81.647.900,00	74.157.000,00
10	Badan Keuangan	160.885.000,00	155.005.500,00
11	Sekretariat Daerah	168.776.000,00	225.658.000,00
12	Kecamatan Gunung Omeh	364.500,00	480.000,00
13	Kecamatan Bukit Barisan	576.000,00	1.173.000,00
14	Kecamatan Guguak	1.735.500,00	6.251.700,00
15	Kecamatan Payakumbuh	0,00	2.951.190,00
16	Kecamatan Luak	0,00	281.820,00
17	Kecamatan Lareh Sago Halaban	2.508.482,00	242.550,00
18	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	0,00	1.080.692,00
19	Kecamatan Harau	0,00	3.674.770,00
20	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1.555.800,00	780.000,00
21	Kecamatan Kapur IX	0,00	1.133.000,00
Jumlah		3.529.253.431,00	4.543.974.182,00

Dari Pendapatan Retribusi Daerah –LO diatas apabila diperbandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah –LRA Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel V.4.50 Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO per OPD

No	Nama OPD	Realisasi - LRA (Rp)	Realisasi - LO (Rp)	Selisih (Rp)
----	----------	-------------------------	------------------------	-----------------

No	Nama OPD	Realisasi - LRA (Rp)	Realisasi - LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	239.185.000,00	239.185.000,00	0,00
2	Dinas Pemadam Kebakaran	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	78.680.000,00	78.680.000,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	870.639.300,00	870.639.300,00	0,00
5	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	792.650,00	792.650,00	0,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	319.319.799,00	319.319.799,00	0,00
7	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.647.550.000,00	1.485.750.000,00	(161.800.000,00)
8	Dinas Perikanan	99.837.500,00	99.837.500,00	0,00
9	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	82.237.900,00	81.647.900,00	(590.000,00)
10	Badan Keuangan	160.885.000,00	160.885.000,00	0,00
11	Sekretariat Daerah	168.776.000,00	168.776.000,00	0,00
12	Kecamatan Gunung Omeh	364.500,00	364.500,00	0,00
13	Kecamatan Bukit Barisan	576.000,00	576.000,00	0,00
14	Kecamatan Guguk	1.735.500,00	1.735.500,00	0,00
15	Kecamatan Lareh Sago Halaban	2.508.482,00	2.508.482,00	0,00
16	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1.555.800,00	1.555.800,00	0,00
Jumlah		3.691.643.431,00	3.529.253.431,00	(162.390.000,00)

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah LRA dengan Pendapatan Retribusi - LO dikarenakan:

1. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdapat penyesuaian sebesar Rp161.800.000,00 yang merupakan selisih Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2019 sebesar Rp175.060.000,00 dengan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 yang belum disetor sebesar Rp13.260.000,00.
2. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan terdapat penyesuaian sebesar Rp590.000,00 yang merupakan selisih Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp3.590.000 dengan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp3.000.000,00.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.212.500,00 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp5.900.802.694,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.899.590.194,00 atau 99,97% merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada beberapa Perusahaan Daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2020 sebesar Rp42.139.660.432,61 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp54.998.971.507,25 maka terjadi penurunan sebesar Rp12.859.311.074,64 atau 23,34% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.51 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO	384.781.408,00	51.053.000,00	333.728.408,00
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	3.555.832.367,00	3.047.781.849,00	508.050.518,00
4	Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh	469.416.870,00	457.368.624,00	12.048.246,00
5	Pendapatan Bunga Deposito	0,00	8.737.361.026,00	(8.737.361.026,00)
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)-LO	1.049.302.426,61	1.509.381.457,92	(460.079.031,31)
7	Pendapatan Denda Retribusi-LO	0,00	132.750.000,00	(132.750.000,00)
8	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda-LO	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
9	Pendapatan Dari Pengembalian-LO	188.997.298,00	563.473.595,00	(374.476.297,00)
10	Pendapatan BLUD-LO	36.486.230.063,00	40.479.323.707,33	(3.993.093.644,33)
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO	0,00	20.478.248,00	(20.478.248,00)
Jumlah		42.139.660.432,61	54.998.971.507,25	(12.859.311.074,64)

Tabel V.4.52 Rincian Perbedaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA dengan Perbedaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2020

No	Uraian Lain-lain PAD Yang Sah -	Realisasi LRA (Rp)	Realisasi LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO	384.781.408,00	384.781.408,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro –LO	3.555.832.367,00	3.555.832.367,00	0,00
3	Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh	469.416.870,00	469.416.870,00	0,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)-LO	1.049.302.426,61	1.049.302.426,61	0,00
5	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda-LO	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
6	Pendapatan Dari Pengembalian-LO	188.997.298,00	188.997.298,00	0,00
7	Pendapatan BLUD-LO	41.300.729.690,00	36.486.230.063,00	(4.814.499.627,00)
Jumlah		46.954.160.059,61	42.139.660.432,61	(4.814.499.627,00)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perbedaan antara Lain-Lain PAD Yang Sah-LO dengan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA terdapat pada Pendapatan BLUD dimana terdapat penyesuaian piutang klaim jasa layanan Tahun 2020 sebesar Rp2.758.226.915 dengan klaim piutang jasa layanan Tahun 2019 sebesar Rp7.572.726.542,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp4.814.499.627,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
B. Pendapatan Transfer – LO	1.052.229.994.343,00	1.245.424.005.131,00

Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2020 terdapat sebesar Rp1.052.229.994.343,00 dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp1.245.424.005.131,00 terjadi penurunan sebesar Rp193.194.010.788,00 atau 15,51% yang mana di dalamnya terdiri dari:

Tabel V.4.53 Rincian Pendapatan Transfer –LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO	947.420.911.781,00	1.019.773.050.266,00	(72.352.138.485,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	50.047.827.500,00	174.095.960.290,00	(124.048.132.790,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi– LO	54.761.255.062,00	51.554.994.575,00	3.206.260.487,00
J u m l a h		1.052.229.994.343,00	1.245.424.005.131,00	(193.194.010.788,00)

Rincian masing-masing jenis Pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2020 sebesar Rp947.420.911.781,00 dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp1.019.773.050.266,00 terjadinya penurunan sebesar Rp72.352.138.485,00 atau 7,09%

**Tabel V.4.54 Rincian Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat- LO**

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan	Persen Tase
1	Bagi Hasil Pajak-LO	12.344.388.942,00	14.263.928.739,00	(1.919.539.797,00)	(13,46)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	1.270.321.127,00	2.156.749.886,00	(886.428.759,00)	(41,10)
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	696.866.984.000,00	768.836.012.000,00	(71.969.028.000,00)	(9,36)
4	Dana Alokasi Khusus	82.069.351.610,00	82.797.025.030,00	(727.673.420,00)	(0,88)

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan	Persen Tase
	(DAK)-LO				
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	154.869.866.102,00	151.719.334.611,00	3.150.531.491,00	2,08
Jumlah		947.420.911.781,00	1.019.773.050.266,00	(72.352.138.485,00)	(7,09)

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya/Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp50.047.827.500,00 yang didalamnya adalah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Dana BOS. Pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus-LO dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp174.095.960.290,00 terjadi penurunan sebesar Rp124.048.132.790,00 atau 71,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.55 Rincian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus – LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan	Persen tase
1	Dana Insentif Daerah-LO	250.000.000,00	45.357.649.000,00	(45.107.649.000,00)	(99,45)
2	Bantuan Operasional Sekolah-LO	49.797.827.500,00	53.291.706.290,00	(3.493.878.790,00)	(6,56)
3	Dana Desa yang berasal dari APBN-LO	0,00	75.446.605.000,00	(75.446.605.000,00)	(100,00)
Jumlah		50.047.827.500,00	174.095.960.290,00	(124.048.132.790,00)	(71,25)

3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Propinsi) – LO

Transfer Pemerintah Propinsi-LO Tahun 2020 sebesar Rp54.761.255.062,00 dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp51.554.994.575,00 terjadi kenaikan sebesar Rp3.206.260.487,00 atau sebesar 6,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.56 Rincian Transfer Pemerintah Propinsi – LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan	Persen tase
1	Pajak Kendaraan Bermotor-LO	14.257.453.008,00	12.662.403.915,00	1.595.049.093,00	12,60
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	5.680.519.261,00	7.145.382.716,00	(1.464.863.455,00)	(20,50)
3	Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	17.478.634.433,00	16.494.992.173,00	983.642.260,00	5,96
4	Pajak Air Permukaan	290.165.057,00	486.509.080,00	(196.344.023,00)	(40,36)
5	Pajak Rokok-LO	17.054.483.303,00	14.765.706.691,00	2.288.776.612,00	15,50
Jumlah		54.761.255.062,00	51.554.994.575,00	3.206.260.487,00	6,22

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
C. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	27.438.594.242,00	15.537.523.262,80

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO pada Tahun 2020 sebesar Rp27.438.594.242,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp15.537.523.262,80 terjadi kenaikan sebesar Rp11.901.070.979,20 atau 76,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.57 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan	Persen tase
1	Pendapatan Hibah – LO	27.438.594.242,00	15.537.523.262,80	11.901.070.979,20	76,60
	Jumlah	27.438.594.242,00	15.537.523.262,80	11.901.070.979,20	76,60

Rincian Pendapatan Hibah-LO Tahun 2020 dan 2019 terdapat pada OPD sebagai berikut:

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.387.501.000,00	4.938.527.567,00
2	Dinas Kesehatan	2.273.373.142,00	806.881.578,80
3	RSUD dr.Achmad Darwis	1.743.386.400,00	19.884.200,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.366.625.667,00	0
5	Dinas Sosial	44.693.650,00	
6	Dinas Perhubungan	-	1.937.047,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	86.352.200,00
8	PPKD	10.333.998.383,00	9.642.270.290,00
9	Kecamatan Harau	0	1.920.380,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	289.016.000,00	39.750.000,00
	Jumlah	27.438.594.242,00	15.537.523.262,80

Perbandingan Pendapatan Hibah-LRA dengan Pendapatan Hibah- LO tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	OPD	Pendapatan Hibah-LO (Rp)	Pendapatan Hibah-LRA (Rp)	PENYESUAIAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.387.501.000,00	0,00	3.387.501.000,00
2	Dinas Kesehatan	2.273.373.142,00	0,00	2.273.373.142,00
3	RSUD dr.Achmad Darwis	1.743.386.400,00	0,00	1.743.386.400,00

NO	OPD	Pendapatan Hibah-LO (Rp)	Pendapatan Hibah-LRA (Rp)	PENYESUAIAN
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.366.625.667,00	0,00	9.366.625.667,00
5	Dinas Sosial	44.693.650,00	0,00	44.693.650,00
6	PPKD	10.333.998.383,00	10.333.998.383,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	289.016.000,00	0,00	289.016.000,00
		27.438.594.242,00	10.333.998.383,00	17.104.595.859,00

Pendapatan Hibah LO adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pihak lain yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pendapatan Hibah LO Tahun 2020 diterima oleh OPD:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Pendapatan Hibah Sebesar Rp3.387.501.000,00 merupakan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Hibah dari Komite Sekolah.
2. Dinas Kesehatan : Pendapatan Hibah sebesar Rp2.273.373.142,00 merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan RI.
3. RSUD dr.Achmad Darwis : Pendapatan Hibah sebesar Rp1.743.386.400,00 merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan, Universitas Indonesia, Bank Nagari dan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Pendapatan Hibah sebesar Rp9.366.625.667,00 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa Jembatan dan Irigasi.
5. Dinas Sosial : Pendapatan Hibah sebesar Rp44.693.650,00 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa kendaraan roda 2 (dua).
6. Kecamatan Harau : Pendapatan Hibah sebesar Rp1.920.380,00 merupakan Hibah Tong sampah dari Badan Lingkungan Hidup.
7. BPBD : Pendapatan Hibah sebesar Rp289.016.000,00 merupakan Hibah dari BPBD Provinsi Sumatera Barat berupa perahu, pompa semprot elektrik, tenda pengungsi dan wastafel.

5.4.2 Beban	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	1.117.778.198.948,03	1.242.644.042.474,43

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Jumlah Beban Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020 sebesar Rp1.117.778.198.948,03 dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp1.242.644.042.474,43 mengalami penurunan sebesar

Rp124.865.843.526,40 atau sebanyak 10,05 yang merupakan Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban tak Terduga.

Beban Operasi Tahun 2020 dan Tahun 2019 dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

Tabel V.4.58 Rincian Beban Operasi

NO	URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan	Persen tase
1	Beban Pegawai	598.559.781.161,71	634.391.378.003,00	(35.831.596.841,29)	(5,65)
2	Beban Barang Jasa	225.059.281.986,05	269.436.105.865,10	(44.376.823.879,05)	(16,47)
3	Beban hibah	56.451.617.524,00	36.963.869.527,00	19.487.747.997,00	52,72
4	Beban Bantuan Sosial	27.398.419.405,00	15.480.975.829,00	11.917.443.576,00	76,98
5	Beban Penyusutan dan amortisasi	125.359.640.102,87	118.342.195.533,41	7.017.444.569,46	5,93
6	Beban penyisihan Piutang	1.054.706.480,29	727.379.333,59	327.327.146,70	45,00
7	Beban Lain – lain	8.176.516.445,11	9.105.228.374,33	(928.711.929,22)	(10,20)
8	Beban Tarnsfer	75.718.235.843,00	158.196.910.009,00	(82.478.674.166,00)	(52,14)
Jumlah		1.117.778.198.948,03	1.242.644.042.474,43	(124.865.843.526,40)	(10,05)

Berdasarkan tabel diatas dapat dirinci Beban Operasi sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
A. Beban Pegawai – LO	598.559.781.161,71	634.391.378.003,00

Beban Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebesar Rp598.559.781.161,71. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp634.391.378.003,00. terjadi penurunan sebesar Rp35.832.596.841,29 (5,65%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.59 Rincian Beban Pegawai-LO

No	URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan	Persentase
1	Beban gaji dan tunjangan – LO	533.920.818.804,00	572.413.517.361,00	(38.492.698.557,00)	(6,72)
2	Beban tambahan penghasilan PNS – LO	52.474.588.603,00	50.433.238.243,00	2.041.350.360,00	4,05
3	Beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/ WKDH – LO	3.129.634.000,00	4.976.900.000,00	(1.847.266.000,00)	(37,12)
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak daerah	1.106.196.560,71	806.737.710,00	299.458.850,71	37,12
5	Beban insentif pemungutan redistribusi daerah – LO	130.556.394,00	109.631.438,00	20.924.956,00	19,09
6	Beban uang lembur- LO	1.288.951.800,00	5.651.353.251,00	(4.362.401.451,00)	(77,19)
7	Insentif Tenaga Kesehatan-LO	462.975.000,00	0,00	462.975.000,00	0,00
8	Uang Lelah/Operasional-LO	6.046.060.000,00	0,00	6.046.060.000,00	0,00
Jumlah		598.559.781.161,71	634.391.378.003,00	(35.831.596.841,29)	(5,65)

Dari Beban Pegawai - LO diatas apabila diperbandingkan dengan Belanja Pegawai – LRA dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel V.4.60 Rincian Perbandingan Belanja Pegawai – LRA dengan Beban Pegawai-LO

No	Uraian	Jumlah Belanja Pegawai-LRA Rp	Jumlah Beban Pegawai-LO Rp	Selisih Rp
1	Beban gaji dan tunjangan – LO	533.565.607.029,00	533.920.818.804,00	(355.211.775,00)
2	Beban tambahan penghasilan PNS – LO	52.474.588.603,00	52.474.588.603,00	0,00
3	Beban peberimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/ WKDH – LO	3.129.634.000,00	3.129.634.000,00	0,00
4	Beban insentif pemungutan Pajak daerah – LO	1.101.673.253,00	1.106.196.560,71	(4.523.307,71)
5	Beban insentif pemungutan retribusi daerah – LO	130.556.394,00	130.556.394,00	0,00
6	Beban uang lembur- LO	1.288.951.800,00	1.288.951.800,00	0,00
7	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
8	Insentif Tenaga Kesehatan	0,00	462.975.000,00	(462.975.000,00)
9	Uang Lelah / Operasional	0,00	6.046.060.000,00	(6.046.060.000,00)
	Jumlah	591.691.011.079,00	598.559.781.161,71	(6.868.770.082,71)

Terdapat beberapa OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Pegawai dengan jumlah sebesar Rp6.868.770.082,71 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama OPD	Rp	Penyesuaian	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	Rp	(355.211.775,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp355.211.775,00 berupa Beban Pegawai Non PNS BLUD Puskesmas.
2	Badan Keuangan	Rp	(4.523.307,71)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp4.523.307,71 berupa utang pembayaran insentif PBB.
3	RSUD dr. Achmad Darwis Suliki	Rp	(462.975.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp462.975.000,00 berupa insentif petugas Kesehatan untuk penanganan Covid-19.
4	Seluruh OPD penerima Dana BTT Covid-19	Rp	(6.046.060.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp6.046.060.000,00 berupa uang Lelah/operasional petugas untuk penanganan Covid-19.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
B. Beban Barang Jasa-LO	225.059.281.986,05	269.436.105.865,10

Beban Barang Jasa-LO Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebesar Rp225.068.241.586,00 dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp269.436.105.865,10 terjadi penurunan sebesar Rp44.367.864.279,05 (16,47%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.61 Rincian Beban Barang Jasa

No	URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan	Persen tase
1	Beban Persediaan	39.284.909.529,78	34.560.367.684,10	4.724.541.845,68	13,67
2	Beban Jasa	146.236.896.309,27	167.665.400.349,00	(21.428.504.039,73)	(12,78)
3	Beban Pemeliharaan	5.821.362.138,00	4.161.570.926,00	1.659.791.212,00	39,88
4	Beban Perjalanan Dinas	33.716.114.009,00	63.048.766.906,00	(29.332.652.897,00)	(46,52)
Jumlah		225.059.281.986,05	269.436.105.865,10	(44.376.823.879,05)	(16,47)

Beban Persediaan 2020 dan 2019 tersebut dapat dirinci per OPD sebagai berikut:

NO	SKPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.301.527.231,00	8.464.075.436,00
2	Dinas Kesehatan	8.097.688.857,93	6.193.590.062,38
3	RSUD dr.Achmad Darwis	6.491.110.654,85	8.038.331.424,72
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	159.020.300,00	199.403.650,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	35.185.000,00	110.789.160,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	149.122.900,00	122.594.060,00
7	Dinas Sosial	166.059.218,00	274.106.364,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	172.851.500,00	254.832.700,00
9	Dinas Pangan	365.026.175,00	205.183.810,00
10	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	230.545.541,00	388.049.384,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	575.229.375,00	559.599.012,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	108.278.290,00	336.173.038,00
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A	180.273.750,00	202.612.637,00
14	Dinas Perhubungan	336.548.400,00	437.494.600,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	110.044.870,00	196.012.277,00
16	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	162.462.680,00	406.164.363,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	40.405.500,00	141.554.029,00

NO	SKPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	141.060.085,00	814.999.943,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28.602.091,00	99.635.000,00
20	Dinas Perikanan	175.565.340,00	694.971.539,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	302.186.900,00	676.008.878,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	230.542.410,00	231.770.015,00
23	Inspektorat	81.681.950,00	139.443.779,00
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	92.726.525,00	172.776.297,00
25	PPKD	6.825.087.352,00	-
26	Badan Keuangan	429.300.749,00	565.133.598,00
27	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	133.797.385,00	170.376.622,00
28	Sekretariat Daerah	2.200.660.446,00	3.024.649.369,00
29	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0,00	-
30	Sekretariat DPRD	469.504.200,00	606.326.106,00
31	DPRD	0,00	-
32	Kecamatan Gunung Omeh	24.495.000,00	25.932.400,00
33	Kecamatan Bukit Barisan	24.228.000,00	65.126.900,00
34	Kecamatan Suliki	15.693.000,00	33.900.000,00
35	Kecamatan Guguk	22.549.000,00	57.256.000,00
36	Kecamatan Mungka	28.822.468,00	29.546.500,00
37	Kecamatan Akabiluru	20.684.000,00	28.901.000,00
38	Kecamatan Payakumbuh	13.028.950,00	20.357.400,00
39	Kecamatan Luak	17.606.500,00	29.778.500,00
40	Kecamatan Lareh Sago Halaban	26.586.000,00	37.774.000,00
41	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	19.970.500,00	46.306.500,00
42	Kecamatan Harau	26.377.810,00	38.791.600,00
43	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	39.739.700,00	76.554.200,00
44	Kecamatan Kapur IX	34.386.000,00	51.521.500,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.263.850,00	88.242.780,00
46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.383.076,00	203.721.251,00
	JUMLAH	39.284.909.529,78	34.560.367.684,10

Terdapat 15 (lima belas) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Persediaan dengan jumlah sebesar Rp13.556.726.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama OPD	Rp	Penyesuaian	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	Rp	(2.274.259.392,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp2.274.259.392,00 berupa persediaan dari PMT, Hibah Covid, barang cetak dan koreksi tahun lalu sebesar Rp355.000,00.

2	RSUD dr.Achmad Darwis	Rp	(1.498.265.400,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.498.265.400,00 berupa persediaan dari hibah Covid dan hibah dari Kemenkes.
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp.	(760.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp760.000,00 berupa persediaan barang cetak kwitansi.
4	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	Rp.	42.890.998,00	Terdapat sebesar Rp42.890.998,00 berupa Persediaan tong sampah dan barang cetak.
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp	(39.625.500,00)	Terdapat penyesuaian kurang sebesar Rp39.625.500,00 berupa persediaan barang cetakan berupa blanko akta capil yang bersumber dari belanja cetak.
6	Dinas Perhubungan	Rp	(16.462.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp16.462.000,00 berupa persediaan dari belanja cetak.
7.	Dinas Komunikasi dan Infomatika	Rp	525.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp525.000,00 berupa Kapitalisasi Barang Jasa.
8	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp	3.105.502.550,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp3.105.502.550,00 berupa Kapitalisasi barang jasa dan selisih bebang barang yang diserahkan ke masyarakat.
9.	Dinas Perikanan	Rp	217.671.246,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp217.671.246,00 berupa Kapitalisasi barang jasa dan selisih beban barang yang diserahkan ke masyarakat.
10	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Rp	29.998.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp29.998.000,00 berupa Persediaan Barang jasa dari bahan baku bangunan.
11	PPKD	Rp	(6.825.087.352,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp6.825.087.352,00 berupa beban pemeliharaan dari dana BTT untuk

penanganan Covid-19.

12	Sekretariat Daerah	Rp	97.112.900,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp97.112.900,00 berupa kapitalisasi barang jasa yang berasal dari belanja persediaan.
13	Sekretariat DPRD	Rp	34.950.000,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp34.950.000,00 berupa Kapitalisasi barang jasa treadmill, wastafel dan dispenser
14	BPBD	Rp.	(139.555.000,00)	Terdapat penyesuaian kurang sebesar Rp139.555.000,00 berupa persediaan dari Belanja Tak Terduga berupa Tedmon
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	(6.291.362.500,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp.6.291.362.500,00 berupa pekerjaan pembangunan MCK yang belum ada Berita Acara Serah Terima.
Jumlah			(13.556.726.450,00)	

Rincian Beban Persediaan per OPD Tahun 2020 tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 18** Laporan Keuangan Daerah ini.

Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019 dapat dirinci per OPD sebagai berikut:

NO	OPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.588.173.590,00	29.976.879.098,00
2	Dinas Kesehatan	33.783.707.148,37	29.660.408.369,00
3	RSUD dr.Achmad Darwis	12.668.853.606,90	12.728.367.985,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.467.745.574,00	3.785.457.071,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.415.234.559,00	2.610.491.298,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	5.221.377.672,00	4.517.621.685,00
7	Dinas Sosial	1.232.141.757,00	1.915.625.017,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	652.779.860,00	1.631.634.224,00
9	Dinas Pangan	483.788.844,00	844.518.140,00
10	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	2.012.791.001,00	2.761.595.805,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	920.627.905,00	1.174.779.286,00

NO	OPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	644.203.394,00	1.279.933.889,00
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A	4.281.059.973,00	5.123.536.825,00
14	Dinas Perhubungan	9.195.969.087,00	9.147.541.449,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.811.125.539,00	2.278.562.862,00
16	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	1.265.765.739,00	1.897.158.347,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	415.462.318,00	652.548.425,00
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2.950.519.290,00	8.242.284.706,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	469.700.455,00	836.498.184,00
20	Dinas Perikanan	849.639.432,00	1.286.910.437,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	2.871.960.324,00	4.600.594.017,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	761.003.203,00	806.838.214,00
23	Inspektorat	730.197.543,00	1.706.893.513,00
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.025.161.285,00	2.186.453.976,00
25	PPKD	1.812.930.714,00	-
26	Badan Keuangan	5.062.524.345,00	6.510.052.572,00
27	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.489.878.483,00	4.782.674.095,00
28	Sekretariat Daerah	9.480.941.273,00	13.343.377.748,00
29	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0,00	-
30	Sekretariat DPRD	4.020.223.063,00	4.632.114.006,00
31	DPRD	0,00	-
32	Kecamatan Gunung Omeh	136.383.400,00	195.832.350,00
33	Kecamatan Bukit Barisan	175.462.352,00	257.363.900,00
34	Kecamatan Suliki	190.852.449,00	318.794.135,00
35	Kecamatan Guguak	179.837.724,00	305.565.401,00
36	Kecamatan Mungka	231.871.394,00	251.679.790,00
37	Kecamatan Akabiluru	192.238.462,00	212.865.800,00
38	Kecamatan Payakumbuh	205.151.335,00	323.954.781,00
39	Kecamatan Luak	207.656.471,00	265.108.113,00
40	Kecamatan Lareh Sago Halaban	260.501.472,00	389.118.267,00
41	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	195.589.098,00	352.281.538,00
42	Kecamatan Harau	214.534.166,00	297.927.830,00
43	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	183.970.455,00	301.291.909,00
44	Kecamatan Kapur IX	299.781.038,00	483.711.271,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.049.711.204,00	1.055.159.340,00
46	Badan Penanggulangan Bencana	927.868.312,00	1.733.394.681,00

NO	OPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
	Daerah		
	JUMLAH	146.236.896.309,27	167.665.400.349,00

Perbandingan Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa LO tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	OPD	BELANJA JASA (Rp)	BEBAN JASA (Rp)	PENYESUAIAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.588.173.590,00	27.588.173.590,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	34.555.203.507,37	33.783.707.148,37	(771.496.359,00)
3	RSUD dr.Achmad Darwis	14.042.269.459,00	12.668.853.606,90	(1.373.415.852,10)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.467.533.260,00	2.467.745.574,00	212.314,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.416.694.559,00	2.415.234.559,00	(1.460.000,00)
6	Dinas Pemadam Kebakaran	5.222.656.992,00	5.221.377.672,00	(1.279.320,00)
7	Dinas Sosial	1.232.141.757,00	1.232.141.757,00	0,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	652.779.860,00	652.779.860,00	0,00
9	Dinas Pangan	483.788.844,00	483.788.844,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	1.996.019.001,00	2.012.791.001,00	16.772.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	958.696.162,00	920.627.905,00	(38.068.257,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	644.203.394,00	644.203.394,00	0,00
13	Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A	4.281.059.973,00	4.281.059.973,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	9.216.218.587,00	9.195.969.087,00	(20.249.500,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.810.574.119,00	3.811.125.539,00	551.420,00
16	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	1.265.765.739,00	1.265.765.739,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	415.535.078,00	415.462.318,00	(72.760,00)
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2.953.473.931,00	2.950.519.290,00	(2.954.641,00)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	469.700.455,00	469.700.455,00	0,00
20	Dinas Perikanan	851.004.647,00	849.639.432,00	(1.365.215,00)
21	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	2.871.960.324,00	2.871.960.324,00	0,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	760.979.738,00	761.003.203,00	23.465,00
23	Inspektorat	730.197.543,00	730.197.543,00	0,00
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.026.338.285,00	1.025.161.285,00	(1.177.000,00)

NO	OPD	BELANJA JASA (Rp)	BEBAN JASA (Rp)	PENYESUAIAN
25	PPKD		1.812.930.714,00	1.812.930.714,00
26	Badan Keuangan	5.064.102.554,00	5.062.524.345,00	(1.578.209,00)
27	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.489.878.483,00	1.489.878.483,00	0,00
28	Sekretariat Daerah	9.481.816.793,00	9.480.941.273,00	(875.520,00)
29	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
30	Sekretariat DPRD	4.018.868.460,00	4.020.223.063,00	1.354.603,00
31	DPRD	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Gunung Omeh	136.383.400,00	136.383.400,00	0,00
33	Kecamatan Bukit Barisan	175.330.662,00	175.462.352,00	131.690,00
34	Kecamatan Suliki	190.852.449,00	190.852.449,00	0,00
35	Kecamatan Guguak	179.837.724,00	179.837.724,00	0,00
36	Kecamatan Mungka	231.871.394,00	231.871.394,00	0,00
37	Kecamatan Akabiluru	192.860.178,00	192.238.462,00	(621.716,00)
38	Kecamatan Payakumbuh	205.151.335,00	205.151.335,00	0,00
39	Kecamatan Luak	208.562.411,00	207.656.471,00	(905.940,00)
40	Kecamatan Lareh Sago Halaban	260.501.472,00	260.501.472,00	0,00
41	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	196.289.171,00	195.589.098,00	(700.073,00)
42	Kecamatan Harau	215.694.781,00	214.534.166,00	(1.160.615,00)
43	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	183.935.035,00	183.970.455,00	35.420,00
44	Kecamatan Kapur IX	300.715.185,00	299.781.038,00	(934.147,00)
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.050.555.234,00	2.049.711.204,00	(844.030,00)
46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	927.739.973,00	927.868.312,00	128.339,00
	JUMLAH	146.623.915.498,37	146.236.896.309,27	(387.019.189,10)

Terdapat 27 (Dua puluh tujuh) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Jasa yaitu:

No	Nama OPD	Rp	Penyesuaian	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	Rp	(771.496.359,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp771.496.359,00 yang merupakan selisih utang jasa layanan tahun lalu dengan tahun ini Rp741.785.109 dan beban cetak brosur Rp29.711.250,00.
2.	RSUD dr.Achmad darwis	Rp	(1.373.415.852,10)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.373.415.852,10 yang merupakan penyesuaian pada jasa layanan

					Rp1.370.695.852,10 dan pada BBM Pelumas Rp2.720.000,00.
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp	212.314,00		Terdapat penyesuaian sebesar Rp212.314,00 yang merupakan selisih antara utang listrik tahun lalu dengan tahun ini.
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	(1.460.000,00)		Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.460.000,00 yang merupakan kapitalisasi belanja barang & jasa Rp700.000,00 berupa dan Rp760.000,00 berupa pengurangan pada beban cetak.
5.	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp	(1.279.320,00)		Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.279.320,00 yang merupakan selisih antara utang listrik tahun lalu dengan tahun ini.
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Rp	16.772.000,00		Terdapat penyesuaian sebesar Rp16.772.000,00 yang terdiri dari Rp5.340.000,00 berupa utang Tempat Pembuangan Akhir dan Rp11.432.000,00 berupa penambahan pada beban cetak.
7.	Disdukcapil	Rp	(38.068.257,00)		Terdapat penyesuaian sebesar Rp38.068.257,00 yang terdiri dari Rp1.952.821,00 berupa utang listrik, (Rp162.080,00) berupa utang air, (Rp233.498,00) berupa utang telepon dan (Rp39625.500,00) berupa pengurangan pada beban cetak.
8.	Dinas Perhubungan	Rp	(20.249.500,00)		Terdapat penyesuaian sebesar Rp20.249.500,00 yang terdiri dari Rp3.787.500,00 berupa kapitalisasi dari belanja barang dan jasa, dan Rp16.462.000,00 berupa pengurangan pada beban cetak
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	551.420,00		Terdapat penyesuaian sebesar Rp551.420,00 yang merupakan selisih antara utang air tahun lalu dengan tahun ini.
10.	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan	Rp	(72.760,00)		Terdapat penyesuaian sebesar Rp72.760,00 yang merupakan selisih

	Terpadu Satu Pintu			antara utang air tahun lalu dengan tahun ini.
11.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Rp	(2.954.641,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp2.954.641,00 yang terdiri dari Rp2.130.351 berupa utang listrik dan Rp824.290,00 berupa utang air.
12.	Dinas Perikanan	Rp	(1.365.215,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.365.215,00 yang terdiri dari (Rp1.532.030,00) berupa utang listrik dan Rp166.815 berupa utang air.
13.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp	23.465,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp23.465,00 yang merupakan selisih antara utang air tahun lalu dengan tahun ini.
14.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Rp	(1.177.000,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.177.000,00 yang merupakan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa
15.	PPKD	Rp	1.812.930.714,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.812.930.714,00 yang merupakan beban jasa dalam penanganan Covid-19.
16.	Badan Keuangan	Rp	(1.578.209,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.278.209,00 yang terdiri dari Rp1.828.624,00 berupa utang listrik, Rp415.795,00 berupa utang air, Rp175.346,00 berupa utang telepon dan Rp9.966,00 berupa utang internet
17.	Sekretariat Daerah	Rp	(875.520,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp875.520,00 yang berupa utang air Rp324.480,00 dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa (Rp1.200.000,00).
18.	Sekretariat DPRD	Rp	1.354.603,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.354.603 yang berupa utang listrik Rp980.117,00, utang air Rp563.145,00, utang telepon Rp130.159,00 dan utang internet Rp58.500,00.

19.	Kecamatan Bukik Barisan	Rp	131.690,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp131.690,00 yang merupakan selisih antara utang listrik tahun lalu dengan tahun ini.
20.	Kecamatan Akabiluru	Rp	(621.716,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp621.716,00 yang merupakan selisih antara utang listrik tahun lalu dengan tahun ini.
21.	Kecamatan Luak	Rp	(905.940,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp905.940,00 yang merupakan utang listrik Rp829.140,00 dan utang air Rp76.800,00.
22.	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Rp	(700.073,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp700.073,00 yang merupakan utang listrik Rp22.596,00 dan utang telepon Rp677.477,00.
23.	Kecamatan Harau	Rp	(1.160.615,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp1.160.615,00 yang merupakan utang listrik Rp241.905,00, utang air Rp431.050,00, utang telepon Rp633.570,00 dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa Rp1.200.000,00.
24.	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Rp	35.420,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp35.420,00 yang merupakan selisih antara utang air tahun lalu dengan tahun ini.
25.	Kecamatan Kapur IX	Rp	(934.147,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp934.147,00 yang merupakan utang listrik Rp544.792,00 dan utang air Rp389.355,00.
26.	Badan kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	(844.030,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp844.030,00 berupa utang listrik Rp72.320,00, utang air (Rp171.640,00) dan utang telepon (Rp744.710,00)
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	128.339,00	Terdapat penyesuaian sebesar Rp128.339,00 yang merupakan selisih antara utang listrik tahun lalu dengan tahun ini.
Jumlah			(387.019.189,10)	

Rincian Beban Jasa per OPD Tahun 2020 tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 19** Laporan Keuangan Daerah ini.

Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 dapat dirinci per OPD sebagai berikut:

NO	SKPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.057.273.345,00	1.899.497.164,00
2.	Dinas Kesehatan	335.756.456,00	460.338.712,00
3.	RSUD dr.Achmad Darwis	420.072.271,00	328.879.682,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	207.286.569,00	308.583.803,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.500.000,00	12.980.000,00
6.	Dinas Pemadam Kebakaran	65.194.000,00	45.852.000,00
7.	Dinas Sosial	12.000.000,00	8.000.000,00
8.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.365.000,00	20.000.000,00
9.	Dinas Pangan	34.358.850,00	10.000.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	7.708.000,00	67.595.048,00
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	22.175.000,00	21.175.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	1.623.000,00
13.	Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A	32.486.600,00	22.759.500,00
14.	Dinas Perhubungan	66.809.500,00	16.709.000,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.941.545,00	49.114.250,00
16.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	8.550.000,00	15.000.000,00
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	3.585.000,00	6.000.000,00
18.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	130.295.000,00	89.900.000,00
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25.417.370,00	5.200.000,00
20.	Dinas Perikanan	1.400.000,00	2.500.000,00
21.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	17.810.000,00	17.925.000,00
22.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.068.000,00	3.500.000,00
23.	Inspektorat	3.542.500,00	15.475.000,00
24.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.600.000,00	-
25.	PPKD	12.660.000,00	
26.	Badan Keuangan	78.045.950,00	100.615.000,00
27.	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.929.182,00	7.219.800,00
28.	Sekretariat Daerah	135.577.000,00	274.238.100,00
29.	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		-
30.	Sekretariat DPRD	21.205.000,00	265.460.867,00
31.	DPRD		-
32.	Kecamatan Gunung Omeh	3.860.000,00	3.860.000,00
33.	Kecamatan Bukit Barisan	950.000,00	2.540.000,00
34.	Kecamatan Suliki	0,00	-
35.	Kecamatan Guguak	2.000.000,00	10.500.000,00

NO	SKPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
36.	Kecamatan Mungka	4.000.000,00	4.400.000,00
37.	Kecamatan Akabiluru	4.660.000,00	5.000.000,00
38.	Kecamatan Payakumbuh	1.500.000,00	1.425.000,00
39.	Kecamatan Luak	1.000.000,00	800.000,00
40.	Kecamatan Lareh Sago Halaban	15.000.000,00	4.450.000,00
41.	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	1.200.000,00	4.000.000,00
42.	Kecamatan Harau	5.350.000,00	7.400.000,00
43.	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	0,00	3.500.000,00
44.	Kecamatan Kapur IX	5.150.000,00	15.000.000,00
45.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.820.000,00	6.590.000,00
46.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.260.000,00	15.965.000,00
	JUMLAH	5.821.362.138,00	4.161.570.926,00

Perbandingan Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	OPD	BELANJA PEMELIHARAAN (Rp)	BEBAN PEMELIHARAAN (Rp)	PENYESUAIAN
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.142.835.745,00	4.057.273.345,00	(85.562.400,00)
2.	Dinas Kesehatan	335.756.456,00	335.756.456,00	0,00
3.	RSUD dr.Achmad Darwis	420.072.271,00	420.072.271,00	0,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	650.938.569,00	207.286.569,00	(443.652.000,00)
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
6.	Dinas Pemadam Kebakaran	65.194.000,00	65.194.000,00	0,00
7.	Dinas Sosial	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
8.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.365.000,00	8.365.000,00	0,00
9.	Dinas Pangan	145.046.725,00	34.358.850,00	(110.687.875,00)
10.	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	7.708.000,00	7.708.000,00	0,00
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	22.175.000,00	22.175.000,00	0,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00
13.	Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A	32.486.600,00	32.486.600,00	0,00
14.	Dinas Perhubungan	242.317.000,00	66.809.500,00	(175.507.500,00)
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.526.545,00	26.941.545,00	(5.585.000,00)
16.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	3.585.000,00	3.585.000,00	0,00

NO	OPD	BELANJA PEMELIHARAAN (Rp)	BEBAN PEMELIHARAAN (Rp)	PENYESUAIAN
18.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	131.495.000,00	130.295.000,00	(1.200.000,00)
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.983.370,00	25.417.370,00	(199.566.000,00)
20.	Dinas Perikanan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
21.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	111.264.375,00	17.810.000,00	(93.454.375,00)
22.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.068.000,00	4.068.000,00	0,00
23.	Inspektorat	3.542.500,00	3.542.500,00	0,00
24.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
25.	PPKD	0,00	12.660.000,00	12.660.000,00
26.	Badan Keuangan	177.286.400,00	78.045.950,00	(99.240.450,00)
27.	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.929.182,00	9.929.182,00	0,00
28.	Sekretariat Daerah	135.577.000,00	135.577.000,00	0,00
29.	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
30.	Sekretariat DPRD	21.205.000,00	21.205.000,00	0,00
31.	DPRD	0,00	0,00	0,00
32.	Kecamatan Gunung Omeh	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00
33.	Kecamatan Bukit Barisan	950.000,00	950.000,00	0,00
34.	Kecamatan Suliki	0,00	0,00	0,00
35.	Kecamatan Guguk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
36.	Kecamatan Mungka	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
37.	Kecamatan Akabiluru	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00
38.	Kecamatan Payakumbuh	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
39.	Kecamatan Luak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
40.	Kecamatan Lareh Sago Halaban	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
41.	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
42.	Kecamatan Harau	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00
43.	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	0,00	0,00	0,00
44.	Kecamatan Kapur IX	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00
45.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.820.000,00	6.820.000,00	0,00
46.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.260.000,00	17.260.000,00	0,00
	JUMLAH	7.023.157.738,00	5.821.362.138,00	(1.201.795.600,00)

Terdapat 11 (sebelas) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Pemeliharaan yaitu:

No	Nama OPD	Rp	Penyesuaian	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	(85.562.400,00)	Terdapat penyesuaian sebesar Rp(85.562.400) berupa Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan dari Dana BOS.
2.	RSUD Dr. Achmad Darwis Suliki	Rp	(443.652.000,00)	Terdapat penyesuaian beban pemeliharaan sebesar Rp (443,652,000) berupa kapitalisasi barang dan jasa pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp282.444.900,00 dan pemeliharaan tempat parkir sebesar Rp161.207.100,00
3.	Dinas Pangan	Rp	(110.687.875,00)	Terdapat penyesuaian beban pemeliharaan sebesar Rp110.687.875,00 berupa Kapitalisasi belanja kanopi dan rehab dan bangunan.
4.	Dinas Perhubungan	Rp	(175.507.500,00)	Terdapat penyesuaian beban pemeliharaan sebesar Rp(175.507.500,00) berupa Kapitalisasi barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin berupa plang nama Rp27.750.000,00, peralatan dan perlengkapan kantor Rp1.200.000,00, rambu-rambu lalu lintas Rp48.057.500,00 dan gedung dan bangunan Rp98.500.000,00.
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	(5.585.000,00)	Terdapat penyesuaian beban pemeliharaan sebesar Rp5.585.000,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa pemeliharaan gedung dan bangunan.
6.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Rp	(1.200.000,00)	Terdapat penyesuaian beban pemeliharaan sebesar Rp1.200.000,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin.
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	(199.566.000,00)	Terdapat penyesuaian beban pemeliharaan sebesar Rp199.566.000,00 berupa kapitalisasi barang dan jasa pemeliharaan gedung dan bangunan berupa atap dan loteng.
8.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Rp	(93.454.375,00)	Terdapat penyesuaian beban pemeliharaan sebesar Rp93.454.375,00 berupa kapitalisasi

				barang dan jasa pemeliharaan gedung dan bangunan berupa rehap alsintan.
9.	PPKD	Rp	12.660.000,00	Terdapat penyesuaian beban pemeliharaan sebesar Rp12.660.000 yang bersumber dari Belanja BTT Covid Dinas BPBD.
10.	Badan keuangan	Rp	(99.240.450,00)	Terdapat penyesuaian beban pemeliharaan Rp(99.240.450,00) berupa kapitalisasi barang dan jasa peralatan dan mesin sebesar Rp865.000,00 dan pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp98.375.450,00.

Rincian Beban Pemeliharaan per OPD Tahun 2020 tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 20** Laporan Keuangan Daerah ini.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

		Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Perjalan Dinas Dalam Daerah	11.622.134.727,00	16.391.571.402,00
2	Beban Perjalan Dinas Luar Daerah	22.093.979.282,00	46.557.854.300,00
3	Beban Perjalan Dinas Luar Negeri	0,00	99.341.204,00
	Jumlah	33.716.114.009,00	63.048.766.906,00

Rincian Beban Perjalanan Dinas per OPD Tahun 2020 tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 21** Laporan Keuangan Daerah ini.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
C. Beban Hibah	56.451.617.524,00	36.963.869.527,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah dalam Tahun 2020 dan 2019. Beban Hibah sebesar Rp56.451.617.524,00 dan Rp36.963.869.527,00 tersebut, dalam bentuk uang dan barang. Hibah uang terletak di PPKD sedangkan Hibah barang ada pada OPD, dengan rincian beban Hibah per OPD sebagai berikut:

	Dinas Pendidikan dan		
1	Kebudayaan	384.231.726,00	3.118.334.025,00
2	Dinas Pekerjaan Umum & PR	726.053.000,00	2.213.392.000,00
3	Badan Satpol PP	0,00	40.000.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Naker	0,00	628.550.700,00
5	Dinas Pangan	0,00	803.636.400,00
	Dinas Perdagangan Koperasi		
6	UKM	3.646.794.270,00	7.238.754.683,00

7	Badan LH & PREAKIM	97.468.998,00	816.876.832,00
8	PPKD	47.055.184.406,00	10.369.060.000,00
9	Dinas Perikanan	391.419.546,00	2.364.133.134,00
10	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	4.150.465.578,00	8.969.439.233,00
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	401.692.520,00
Jumlah		56.451.617.524,00	36.963.869.527,00

Rincian Beban Hibah per OPD Tahun 2020 tersebut sebagaimana terlampir pada **Lampiran 22** Laporan Keuangan Daerah ini.

Perbandingan Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	OPD	BEBAN HIBAH	BELANJA HIBAH	SELISIH	PENERIMA HIBAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	384.231.726,00	366.240.500,00	17.991.226,00	Kelompok Masyarakat
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	726.053.000,00	726.053.000,00	0,00	Kelompok Masyarakat
3	DLH, Perumahan dan Permukiman	97.468.998,00	66.010.000,00	31.458.998,00	Kelompok Masyarakat
4	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	3.646.794.270,00	567.517.000,00	3.079.277.270,00	Kelompok Masyarakat
5	Dinas Perikanan	391.419.546,00	175.336.300,00	216.083.246,00	Kelompok Masyarakat
6	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.150.465.578,00	4.150.465.578,00	0,00	Kelompok Masyarakat
7	PPKD	8.055.100.000,00	8.055.100.000,00	0,00	Kelompok Masyarakat
		39.000.084.406,00	39.000.084.406,00	0,00	Hibah Yang kepada Organisasi Kemasyarakatan
JUMLAH		56.451.617.524,00	53.106.806.784,00	3.344.810.740,00	

Terdapat 3 (tiga) OPD yang mengalami penyesuaian pada Beban Hibah yaitu:

No	Nama OPD	Rp	Penyesuaian	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	17.991.226,00	Terdapat penyesuaian beban hibah sebesar Rp17.991.226,00 berupa Beban Hibah Dana BOS Untuk Satuan Pendidikan Dasar.
2.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	31.458.998,00	Terdapat penyesuaian beban hibah sebesar Rp31.458.998,00 berupa Beban Hibah Tong Sampah Tahun Lalu.
3.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Rp	3.079.277.270,00	Terdapat penyesuaian beban hibah sebesar Rp3.079.277.270,00 berupa selisih Persediaan hibah tahun

lalu dengan tahun ini dan kapitalisasi belanja barang dan jasa senilai Rp22.751.280,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
D. Beban Bantuan Sosial	27.398.419.405,00	15.480.975.829,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial dalam Tahun 2020 dan 2019. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp27.398.419.405,00 dan Rp15.480.975.829,00 tersebut dalam bentuk uang dan barang. Beban Bantuan Sosial berbentuk uang terletak di PPKD sedangkan Bantuan Sosial barang ada pada OPD. Beban bantuan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.800.000,00	Bansos Barang
2	Dinas Sosial	2.146.517.355,00	2.995.387.579,00	Bansos Barang
3	Dinas LH-PRP	3.934.677.050,00	8.602.750.750,00	Bansos Barang
4	PPKD	3.691.625.000,00	-	Bansos Uang
	Penanganan Covid-19	17.625.600.000,00		
5	Badan Keuangan	0,00	3.881.037.500,00	Bansos Barang
	Jumlah	27.398.419.405,00	15.480.975.829,00	

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
E. Beban Penyusutan dan Amortisasi	125.539.640.102,87	118.342.195.533,41

Beban Penyusutan dan Amortisasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebesar Rp125.620.188.769,87 dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp118.342.195.533,41 terjadi kenaikan sebesar Rp7.017.444.569,46 atau 5,93% dengan rincian terdiri dari:

-	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.231.738.992,56	34.677.209.597,09
-	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.749.780.978,13	9.491.451.291,14
-	Beban Penyusutan JIJ	62.231.479.107,06	73.813.324.738,24
-	Beban Penyusutan ATL	558.103.297,12	360.209.906,94
-	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	3.588.537.728,00	0,00
	Jumlah	125.359.640.102,87	118.342.195.533,41

Beban Penyusutan Tahun 2020 dan 2019 dapat dirinci per OPD sebagai berikut:

NO	SKPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.585.458.154,98	13.494.975.082,05

NO	SKPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
2.	Dinas Kesehatan	10.551.114.358,44	8.036.069.996,08
3.	RSUD dr.Achmad Darwis	7.714.470.497,50	8.106.623.310,62
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	60.789.886.520,22	69.089.145.717,11
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	18.848.449,44	149.306.128,64
6.	Dinas Pemadam Kebakaran	1.428.192.191,05	648.848.497,00
7.	Dinas Sosial	(38.588.307,44)	210.451.484,57
8.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	817.092.396,07	860.848.089,68
9.	Dinas Pangan	180.758.839,29	209.590.633,20
10.	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	1.708.044.138,64	3.982.576.685,61
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	314.560.048,06	361.231.766,92
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	102.516.013,42	142.888.025,70
13.	Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A	761.806.252,10	(2.186.124.611,49)
14.	Dinas Perhubungan	2.178.624.245,08	2.220.610.234,28
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	746.826.493,67	502.967.399,21
16.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	1.576.023.937,03	811.764.753,89
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	148.450.237,99	212.132.864,20
18.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	870.392.736,42	1.322.368.110,00
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	745.085.709,74	63.725.193,83
20.	Dinas Perikanan	776.626.696,22	833.383.934,27
21.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	820.459.311,18	985.099.571,99
22.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	255.942.821,67	401.086.183,49
23.	Inspektorat	349.621.760,00	438.012.542,00
24.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	233.839.403,74	252.462.061,02
25.	PPKD	0,00	0,00
26.	Badan Keuangan	802.645.914,11	929.318.439,71
27.	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	111.204.352,77	144.683.150,23
28.	Sekretariat Daerah	2.997.981.512,66	3.246.309.816,05
29.	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00
30.	Sekretariat DPRD	215.593.098,04	1.356.851.784,82
31.	DPRD	0,00	0,00
32.	Kecamatan Gunung Omeh	40.263.979,78	47.663.608,35
33.	Kecamatan Bukit Barisan	47.214.714,42	66.815.200,95
34.	Kecamatan Suliki	54.598.740,27	81.465.966,88
35.	Kecamatan Guguak	108.658.032,56	98.502.111,13
36.	Kecamatan Mungka	68.675.830,93	88.903.328,65
37.	Kecamatan Akabiluru	89.031.127,85	159.747.225,35

NO	SKPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
38.	Kecamatan Payakumbuh	104.603.122,43	69.301.308,14
39.	Kecamatan Luak	121.506.564,93	97.943.539,90
40.	Kecamatan Lareh Sago Halaban	89.358.557,06	40.043.234,77
41.	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	102.143.956,88	62.973.516,66
42.	Kecamatan Harau	66.619.599,23	72.891.231,52
43.	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	63.946.927,10	72.756.195,29
44.	Kecamatan Kapur IX	31.119.596,99	53.867.796,39
45.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77.703.479,18	104.031.594,18
46.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	530.718.091,17	398.082.830,57
	JUMLAH	125.359.640.102,87	118.342.195.533,41

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
F. Beban Penyisihan Piutang	1.054.706.480,29	727.379.333,59

Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.054.706.480,29 dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp727.379.333,59 terjadi penurunan sebesar Rp327.327.146,70 atau 45,00% dengan rincian terdiri dari:

1	Penyisihan Piutang Pajak	1.043.030.143,75	693.074.707,39
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(4.955.702,53)	(5.367.975,00)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	16.127.592,53
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(23.856.848,13)	4.800.416,42
5	Penyisihan Piutang Pajak Pusat	(7.730.135,64)	0,00
6	Penyisihan Piutang BHP Provinsi	48.219.022,84	0,00
7	Penyisihan Piutang Pemda Lainnya	0,00	18.744.592,25
	Jumlah	1.054.706.480,29	727.379.333,59

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan 2019 dapat dirinci per OPD sebagai berikut:

NO	SKPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	1.773.742,50	(1.092.850,00)
2.	RSUD dr.Achmad Darwis	(25.630.590,63)	5.893.266,42
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan PR		(4.818.000,00)
4.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat & Pemukiman	9.636.000,00	
5.	Dinas Perhubungan		
6.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	1.883.690,00	

NO	SKPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
7.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	(875.300,00)	50.025,00
8.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	(590.000,00)	(600.000,00)
9.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	82.500,00	
10.	Badan Keuangan	1.043.030.143,75	693.074.707,39
11.	PPKD	40.488.887,20	18.744.592,25
12.	Sekretariat Daerah	(15.092.592,53)	16.127.592,53
	JUMLAH	1.054.706.480,29	727.379.333,59

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
G. Beban Lain-Lain	8.176.516.445,11	9.105.228.374,33

Beban Lain – lain terdiri dari beban penurunan nilai Investasi, Belanja Modal yang tidak Dikapitalisir serta Aset Ekstracomtable.

Tahun Anggaran 2020 Beban lain-lain tercatat sebesar Rp8.176.516.445,11 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

NO	SKPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.687.988.031,00	2.454.740.116,00
2.	Dinas Kesehatan	440.157.954,96	479.683.031,00
3.	RSUD dr.Achmad Darwis	25.076.000,00	27.604.552,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.342.748.500,00	2.010.850.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	7.818.800,00	0,00
6.	Dinas Pemadam Kebakaran	50.880.000,00	158.415.000,00
7.	Dinas Sosial	454.000,00	1.000.000,00
8.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.850.000,00	1.485.000,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	0,00	8.600.455,00
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	454.000,00	0,00
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	5.450.000,00
12.	Dinas Pengendalian Pendudukan KB &P3A	0,00	440.000,00
13.	Dinas Perhubungan	195.600.000,00	551.169.400,00
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.846.000,00	9.069.860,00
15.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	131.449.451,00	161.961.800,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	19.314.000,00
17.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	19.680.000,00	67.557.979,00

NO	SKPD	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	450.000,00	777.200,00
19.	Dinas Perikanan	13.050.500,00	28.501.800,00
20.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	0,00	16.169.673,00
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	454.250,00	5.604.200,00
22.	Inspektorat	0,00	6.450.000,00
23.	Badan Keuangan	1.816.600,00	7.534.400,00
24.	PPKD	17.655.958,15	2.973.723.208,33
25.	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.450.000,00	0,00
26.	Sekretariat Daerah	46.977.400,00	65.946.700,00
27.	Sekretariat DPRD	4.554.000,00	0,00
28.	Kecamatan Gunung Omeh	3.454.000,00	0,00
29.	Kecamatan Bukik Barisan	3.514.000,00	0,00
30.	Kecamatan Suliki	2.454.000,00	0,00
31.	Kecamatan Guguak	850.000,00	0,00
32.	Kecamatan Mungka	3.754.000,00	2.000.000,00
33.	Kecamatan Akabiluru	3.754.000,00	5.000.000,00
34.	Kecamatan Payakumbuh	36.654.000,00	0,00
35.	Kecamatan Luak	3.434.000,00	2.450.000,00
36.	Kecamatan Lareh Sago Halaban	954.000,00	0,00
37.	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	2.604.000,00	1.000.000,00
38.	Kecamatan Harau	1.904.000,00	18.800.000,00
39.	Kecamatan Pangkalan	3.019.000,00	1.500.000,00
40.	Kecamatan Kapur IX	11.254.000,00	0,00
41.	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	13.704.000,00	0,00
42.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.798.000,00	12.430.000,00
	JUMLAH	8.176.516.445,11	9.105.228.374,33

Rincian Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2019 per rekening sebagai berikut :

NO	NAMA REKENING	BEBAN LAIN-LAIN 2020
1	Beban Penurunan Nilai Investasi Non Permanen	130.603.701,00
2	Beban Penurunan Nilai Investasi Permanen	17.655.958,15
3	Beban BM Tidak Dikapitalisir	2.804.568.476,11
4	Beban Aset Ekstracomp	2.573.850.937,85
5	Beban Hibah Tidak Dikapitalisir	2.649.837.372,00
	JUMLAH	8.176.516.445,11

5.4.2 Beban Transfer	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	75.718.235.843,00	158.196.910.009,00

Beban Transfer Tahun 2020 adalah sebesar Rp75.718.235.843,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp158.196.910.009,00 terjadi penurunan sebesar Rp82.478.674.166,00 atau 52,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.4.62 Rincian Beban Transfer

No	URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)	kenaikan/ penurunan	Persen tase
1	Beban transfer bagi hasil pajak daerah pada Pemerintah Desa	2.715.537.370,00	2.126.651.808,00	588.885.562,00	27,69
2	Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya	0,00	434.228.118,00	(434.228.118,00)	(100,00)
3	Beban Transfer bantuan keuangan ke Desa	72.227.885.386,00	154.771.387.194,00	(82.543.501.808,00)	(53,33)
4	Beban Transfer Bantuan keuangan lainnya	774.813.087,00	864.642.889,00	(89.829.802,00)	(10,39)
Jumlah		75.718.235.843,00	158.196.910.009,00	(82.478.674.166,00)	(52,14)

5.4.3 Surplus/Defisit Operasional	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	30.647.754.727,58	109.701.661.557,62

Surplus/Defisit Operasional adalah jumlah pendapatan-LO setelah dikurangi dengan beban operasional. Surplus/Defisit Operasional Tahun 2020 adalah sebesar Rp30.387.206.060,58 dibandingkan dengan Surplus/Defisit Operasional Tahun 2019 sebesar Rp109.701.661.557,62, terdapat penurunan surplus/defisit sebesar Rp79.053.906.830,04 atau 72,06%.

5.4.4 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	30.647.754.727,58	109.701.661.557,62

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa adalah sebesar Rp30.387.206.060,58. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp109.701.661.557,62 terjadi penurunan sebesar Rp79.053.906.830,04 atau 72,06%.

5.4.5 Pos Luar Biasa	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	2.267.022,00	659.859.470,00

Pos Luar Biasa sebesar Rp2.267.022,00 berupa pembayaran utang PFK BUD berupa jasa giro sekolah swasta yang masuk ke Kas Daerah sehingga diperlakukan sebagai utang di tahun 2019.

5.4.6 Surplus/Defisit LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	30.645.487.705,58	109.041.802.087,62

Surplus/Defisit LO adalah Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa dikurangi dengan beban luar biasa. Beban luar biasa sebesar Rp2.267.022,00 sehingga Surplus/Defisit LO Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebesar Rp30.384.939.038,58 Jika dibandingkan dengan 2019 sebesar Rp109.041.802.087,62 terjadi penurunan sebesar Rp78.396.314.382,04 atau 71,90%.

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas disusun bukan berdasarkan basis SP2D melainkan berdasarkan basis belanja rill.

Laporan arus kas adalah bagian dari Laporan Finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas Operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal Kas Daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo Akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada OPD. Sisa Kas di Bendahara OPD baik Bendahara Pengeluaran maupun Penerimaan adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetor ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara OPD merupakan bagian dari Kas Daerah.

Laporan arus kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode Akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2020 dan 2019 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	144.681.115.442,24	227.228.628.623,25
2	Aktivitas Investasi	(154.677.308.237,00)	(268.218.468.752,00)
3	Aktivitas Pendanaan	0	0
4	Aktivitas Transitoris	1.547.849,00	22.759.104,00
	Kenaikan/Penurunan Kas	(9.994.644.945,76)	(40.967.081.024,75)

Penjelasan mengenai aktivitas selama Tahun 2020 dapat diuraikan berikut ini:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	1.209.086.615.582,61	1.336.434.457.303,25

Jumlah tersebut merupakan arus kas masuk dari aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut.

1	Penerimaan Pajak Daerah	23.556.949.207,00	24.181.111.740,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	3.691.643.431,00	4.534.569.182,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	2.841.949.598,00	2.675.284.188,00

Dipisahkan			
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.954.160.059,61	53.726.135.222,25
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	13.360.698.775,00	10.773.957.374,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.800.038.422,00	1.897.802.801,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	696.866.984.000,00	768.836.012.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	82.069.351.610,00	82.797.025.030,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	154.869.866.102,00	151.719.334.611,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	127.623.525.500,00	174.095.960.290,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.117.450.495,00	51.554.994.575,00
12	Penerimaan Hibah	10.333.998.383,00	9.642.270.290,00
Jumlah		1.209.086.615.582,61	1.336.434.457.303,25

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Keluar	1.064.405.500.140,37	1.109.205.828.680,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar atas aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1	Pembayaran Pegawai	591.691.011.079,00	630.882.952.899,00
2	Pembayaran Barang	220.429.184.424,37	270.235.514.066,00
3	Pembayaran Hibah	53.106.806.784,00	33.749.616.407,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	9.772.819.405,00	15.480.975.829,00
5	Pembayaran Tidak Terduga	36.111.744.605,00	659.859.470,00
6	Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	2.715.537.370,00	2.560.879.926,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kpd Pemerintahan Desa	149.803.583.386,00	154.771.387.194,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	774.813.087,00	864.642.889,00
Jumlah		1.064.405.500.140,37	1.109.205.828.680,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	144.681.115.442,24	227.228.628.623,25

Jumlah tersebut merupakan selisih positif antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2020 dan 2019. Arus kas bersih sejumlah tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

5.5.2 Arus kas dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	384.781.408,00	51.053.000,00

Arus masuk kas merupakan penerimaan kas yang diperoleh dari aktivitas investasi berupa penjualan aset daerah. Pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 realisasi Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi dengan rincian sebagai berikut:

1	Pencairan Dana Cadangan		
2	Penjualan atas Tanah		
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
4	Penjualan atas Gedung & Bangunan	384.781.408,00	51.053.000,00
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan		
6	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		
7	Penjualan atas Aset Lainnya		
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
	Jumlah	384.781.408,00	51.053.000,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Keluar	155.062.089.645,00	268.269.521.752,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar atas aktivitas investasi selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	913.869.539,00	261.246.598,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	37.329.485.325,00	34.310.434.344,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	38.200.979.558,00	32.110.044.597,00
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.514.075.572,00	171.401.890.737,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	14.753.679.651,00	14.826.905.476,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.350.000.000,00	15.359.000.000,00
	Jumlah	155.062.089.645,00	268.269.521.752,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(154.677.308.237,00)	(268.218.468.752,00)

Jumlah tersebut merupakan selisih negatif antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi Tahun 2020 dan 2019. Arus kas bersih tersebut bertujuan meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00

Arus kas masuk kas merupakan penerimaan kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berupa Pinjaman Dalam Negeri. Pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 tidak ada realisasi Arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Keluar	0,00	0,00

Arus kas keluar merupakan pengeluaran kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 tidak ada realisasi Arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Pada Tahun Anggaran 2020 dan 2019 tidak ada realisasi Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Kas Masuk	73.511.372.412,00	90.491.333.924,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas masuk dari aktivitas transitoris selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Rincian penerimaan PFK Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2** Laporan Keuangan ini

- Penerimaan Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK)	73.511.372.412,00	90.491.333.924,00
Jumlah	73.511.372.412,00	90.491.333.924,00
	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Keluar	73.509.824.563,00	90.468.574.820,00

Jumlah tersebut merupakan arus kas keluar dari aktivitas transitoris selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019, yang terinci atas:

- Pengeluaran Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK)	73.509.824.563,00	90.468.574.820,00
Jumlah	73.509.824.563,00	90.468.574.820,00
	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.547.849,00	22.759.104,00

Jumlah tersebut merupakan selisih positif antara arus kas masuk dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris.

Dari perhitungan arus kas bersih masing-masing aktivitas Tahun Anggaran 2020, terjadi penurunan kas bersih Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp(9.994.644.945,76), sehingga Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp28.880.279.995,66 (Rp28.866.848.391,66 + Rp13.260.000,00 + Rp171.604,00).

Saldo Akhir Kas Tahun 2020 sejumlah tersebut terdiri dari:

- Kas BUD berada di rekening bank	Rp	15.145.768.088,53
- Kas di BLUD RSUD	Rp	4.065.373.463,50
- Kas di BLUD Puskesmas	Rp	5.033.046.604,63
- Kas Dana BOS	Rp	4.522.566.649,00
- Kas di Bendahara pengeluaran :	Rp	
a. UYHD	Rp	76.331.553,00
e. Dana PFK	Rp	23.762.033,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	13.260.000,00
- Kas Lainnya	Rp	171.604,00
SALDO AKHIR KAS	Rp	28.880.279.995,66

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan Penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca, yang menerangkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat diterangkan beberapa hal sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	1.719.296.779.066,78	1.611.031.731.763,59

Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp1.719.296.779.066,78 dan Rp1.611.031.731.763,59.

5.6.2 Surplus/(Defisit)-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	30.645.487.705,58	109.041.802.087,62

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban pada Laporan Operasional Tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut:

- Pendapatan-LO	1.148.425.953.675,61	1.352.345.704.032,05
- Beban	1.117.780.465.970,03	1.243.303.901.944,43
Surplus/(Defisit)-LO	30.645.487.705,58	109.041.802.087,62

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	(7.791.325.806,87)	(776.754.784,43)

1. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	2.832.104.007,00	(616.217.411,00)
2. Dampak Kumulatif Kesalahan mendasar	(10.623.429.813,87)	(160.537.373,43)
	(7.791.325.806,87)	(776.754.784,43)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	2.832.104.007,00	(616.217.411,00)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Koreksi Utang	444.817.010,00	(443.011.911,00)

Koreksi Utang Tahun 2020 sebesar Rp444.817.010,00 merupakan utang belanja modal pembangunan jembatan Maek pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Raktay sebesar Rp439.713.750,00 dan koreksi nilai utang PFK BUD (BTT) tahun lalu sebesar Rp5.103.260,00.

Koreksi Utang Tahun 2019 sebesar Rp443.011.911,00 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Koreksi Utang PFK BUD sebesar Rp1.666.670,00 merupakan Utang PFK yang timbul akibat masuknya Pendapatan Jasa Giro dari Samsat Lima Puluh Kota, sekolah swasta, dan SMA dimana Jasa Giro tersebut bukan milik Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah dikembalikan melalui Belanja Tidak Terduga Tahun 2019.
2. Koreksi Utang PFK BUD sebesar (Rp4.964.831,00) merupakan Utang PFK yang timbul akibat masuknya Pendapatan Jasa Giro dari sekolah dan beberapa OPD dimana Jasa Giro tersebut bukan milik Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Koreksi Utang Belanja sebesar (Rp439.713.750,00) merupakan koreksi tambah utang pekerjaan jembatan maek di Dinas PUPR yang belum dicatat.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Koreksi Piutang Tahun Lalu	215.650,00	(261.700.000,00)

Koreksi Piutang Tahun 2020 sebesar Rp215.650,00 merupakan koreksi piutang tahun 2019 pada Dinas Kesehatan.

Koreksi Piutang Tahun 2019 sebesar Rp261.700.000,00 merupakan piutang klaim non persalinan tahun 2018 pada Dinas Kesehatan yang telah dibayar lunas di tahun 2019 oleh BPJS. Koreksi ini dicatat di LPE karena pada tahun 2019 target piutang retribusi kesehatan sudah tidak ada karena pendapatan dari Dinas Kesehatan hanya diperoleh dari Lain-Lain PAD Yang Sah berupa Pendapatan BLUD Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan berbentuk BLUD holding. Pencatatan penerimaan piutang retribusi kesehatan tahun 2018 dicatat pada Bendahara penerimaan Badan Keuangan pada rekening pendapatan dari pengmbalian belanja langsung.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Mutasi / Koreksi Aset Ekstrakomtabel	2.792.000,00	88.494.500,00

Koreksi Aset Ekstrakomtabel tahun 2020 senilai Rp2.792.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan.

Mutasi/koreksi Aset *Ekstrakomptable* Tahun 2019 terdapat pada OPD sebagai berikut:

1	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	10.077.000,00
2	Sekretariat Daerah	78.417.500,00
Jumlah		88.494.500,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Koreksi Penghapusan Piutang	2.384.279.347,00	0,00
Koreksi Penghapusan Piutang sebesar Rp2.384.279.347,00 merupakan penghapusan atas piutang PBB yang telah kadaluarsa dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 332 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah kadaluarsa pada Badan Keuangan.		
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(10.623.429.813,87)	(160.537.373,43)
Mutasi tambah Aset Tetap	18.346.049.564,00	24.490.260.766,00

Mutasi tambah aset tetap Tahun 2020 terdapat pada OPD berikut ini:

1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	446.197.242,00
2	Dinas Kesehatan	1.719.109.800,00
3	Rsud Suliki	1.210.971.440,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	4.396.170.177,00
5	Satpol PP	255.890.097,00
6	Dinas Damkar	587.479.000,00
7	Dinas Sosial	1.454.000,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.450.000,00
9	Dinas Pangan	7.317.720,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	120.000.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	91.906.720,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari	178.852.720,00
13	Dinas P2kbp3a	852.720,00
14	Dinas Kominfo	309.665.220,00
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.087.507.000,00
16	Dinas PMPTSP	1.937.044,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	201.258.440,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.158.393.684,00
19	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	2.792.330,00
20	Inspektorat	852.720,00
21	Bapelitbang	103.606.720,00

22	Badan Keuangan	20.604.000,00
23	BKPSDM	2.302.720,00
24	Sekretariat Daerah	4.076.905.323,00
25	Sekretariat Dewan	1.306.720,00
26	Kecamatan Gunuang Omeh	8.716.000,00
27	Kecamatan Bukik Barisan	12.284.000,00
28	Kecamatan Suliki	7.678.000,00
29	Kecamatan Guguak	5.920.000,00
30	Kecamatan Mungka	9.924.000,00
31	Kecamatan Akabiluru	9.682.000,00
32	Kecamatan Payakumbuh	6.632.000,00
33	Kecamatan Luak	10.650.000,00
34	Kecamatan Lareh Sago Halaban	9.236.000,00
35	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	19.403.047,00
36	Kecamatan Harau	12.298.000,00
37	Kecamatan Pangkalan	8.743.000,00
38	Kecamatan Kapur IX	10.747.000,00
39	Badan Kesbangpol	1.454.000,00
40	BPBD	227.898.960,00
JUMLAH		18.346.049.564,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Mutasi kurang Aset Tetap	(20.072.825.639,00)	(24.271.419.196,56)

Mutasi kurang aset tetap Tahun 2020 pada OPD berikut ini:

1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(758.517.505,00)
2	Dinas Kesehatan	(258.556.880,00)
3	RSUD dr.Achmad Darwis	(13.970.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(6.471.105.177,00)
5	Satpol PP	(59.400.000,00)
6	Dinas Pemadam Kebakaran	(122.500.000,00)
7	Dinas Sosial	(210.650.000,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman	(502.677.250,00)
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(47.600.000,00)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari	(11.400.000,00)
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	(9.160.000,00)
12	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	(36.000.000,00)
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	(214.931.625,00)
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(261.033.684,00)
15	Dinas Perikanan	(113.539.834,00)
16	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	(184.356.000,00)
17	Inspektorat	(57.688.500,00)

18	Bapelitbang	(41.254.000,00)
19	Badan Keuangan	(53.800.000,00)
20	PPKD	(3.282.164.517,00)
21	BKPSDM	(28.200.000,00)
22	Sekretariat Daerah	(5.519.597.000,00)
23	Sekretariat Dewan	(1.658.006.667,00)
24	Kecamatan Gunuang Omeh	(1.362.000,00)
25	Kecamatan Bukik Barisan	(2.270.000,00)
26	Kecamatan Suliki	(2.724.000,00)
27	Kecamatan Guguk	(2.270.000,00)
28	Kecamatan Mungka	(2.270.000,00)
29	Kecamatan Akabiluru	(3.178.000,00)
30	Kecamatan Payakumbuh	(16.678.000,00)
31	Kecamatan Luak	(1.816.000,00)
32	Kecamatan Lareh Sago Halaban	(3.632.000,00)
33	Kecamatan Situjuah	(2.270.000,00)
34	Kecamatan Harau	(4.994.000,00)
35	Kecamatan Pangkalan	(2.724.000,00)
36	Kecamatan Kapur IX	(3.178.000,00)
37	Badan Kesbangpol	(19.583.000,00)
38	BPBD	(87.768.000,00)
JUMLAH		(20.072.825.639,00)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Mutasi tambah Aset Lainnya	0,00	174.100.000,00

Mutasi tambah aset lainnya Tahun 2019 terdapat pada 3 (tiga) OPD dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan	Rp.	99.100.000,00	Reklasifikasi dari akun Peralatan Mesin berupa Software PKB.
2. RSUD Achmad Darwis	Rp.	60.000.000,00	Reklasifikasi masuk dari Akun Aset Tetap Lainnya berupa Software SIMRS
3. Dinas Kependudukan dan Capil	Rp.	15.000.000,00	Reklasifikasi masuk dari Aset Peralatan Mesin berupa Aplikasi Smart Dukcapil
Jumlah	Rp.	<u>174.100.000,00</u>	

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Mutasi Kurang Aset Lainnya	(452.357.500,00)	0,00

Mutasi kurang aset lainnya Tahun 2020 terdapat pada 2 (dua) OPD dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan	Rp. (436.457.500,00)	Reklasifikasi keluar ke Setda untuk diusulkan sebagai penghapusan
2. Kecamatan kapur IX	Rp. (15.900.000,00)	Reklasifikasi keluar ke Setda untuk diusulkan sebagai penghapusan
Jumlah	<u>Rp. (452.357.500,00)</u>	

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya	812.679.286,50	175.070.357,13

Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 sebesar Rp812.679.286,50 terdapat pada Dinas Pendidikan yang terdapat pada Aset Tetap Gedung Bangunan dan Peralatan Mesin.

Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2019 merupakan kesalahan dalam penghitungan akumulasi penyusutan tahun anggaran 2018.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Koreksi Persediaan dari Belanja Tak terduga	139.555.000,00	3.700.000,00

Koreksi persediaan dari Belanja Tak terduga sebesar Rp139.555.000,00 merupakan Belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri atas Perlengkapan kantor pakai habis, alat tulis kantor, peralatan listrik dan peralatan dokter pakai habis.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Penghapusan	(2.107.295.750,00)	(732.249.300,00)

Penghapusan Aset Tetap Tahun 2020 terdapat pada 11 (sebelas) OPD berikut ini:

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp (187.669.000,00)	Penghapusan berupa rumah dinas jaga sekolah, rumah dinas guru dan Musholla.
-----------------------------------	---------------------	---

2	Dinas Kesehatan	Rp	(84.000.000,00)	Penghapusan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat).
3	Satpol PP	Rp	(42.000.000,00)	Penghapusan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat).
4	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	(163.569.750,00)	Penghapusan berupa kendaraan bermotor berupa becak dan sepeda motor..
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp	(88.600.000,00)	Penghapusan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat).
6	Dinas P2kbp3a	Rp	(14.358.000,00)	Penghapusan berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua).
7	Dinas PMPTSP	Rp	(46.000.000,00)	Penghapusan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat).
8	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Rp	(1.116.868.000,00)	Penghapusan berupa Tanah dan Bangunan.
9	Badan Keuangan	Rp	(3.416.000,00)	Penghapusan berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua).
10	Sekretariat Daerah	Rp	(357.515.000,00)	Penghapusan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat).
11	Kecamatan Luak	Rp	(3.300.000,00)	Penghapusan berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua).
			(2.107.295.750,00)	

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Koreksi Saldo Dana BOS	(42.740.000,00)	0,00

Koreksi saldo Dana BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp42.740.000,00 merupakan koreksi atas lebih salur dana BOS tahun 2019 yang dicatat sebagai utang sebesar Rp998.160.000,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Koreksi Kas BLUD Puskesmas	(12.829.521,00)	0,00

Koreksi Kas BLUD Puskesmas sebesar Rp12.829.521,00 merupakan koreksi yang dilakukan karena adanya kelebihan pembayaran setoran pajak oleh BLUD Puskesmas.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Koreksi Nilai Investasi	1.678.545,63	0,00

Koreksi Nilai Investasi sebesar Rp1.678.545,63 merupakan koreksi karena kesalahan dalam penghitungan Nilai Penyertaan Modal.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(7.235.343.800,00)	0,00

Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.235.343.800,00 merupakan koreksi pencatatan Aset Tetap berupa Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yg masih tercatat pada Dinas PUPR sedangkan secara fisik sudah digunakan dan dimanfaatkan oleh PDAM.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.4 . Ekuitas Akhir	1.742.150.940.965,49	1.719.296.779.066,78

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir Tahun 2020 dan Tahun 2019.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

DASAR HUKUM

Secara administrasi, Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).

DOMISILI

Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota berkedudukan di Jalan Raya Negara Kilometer 10 Sarilamak Kecamatan Harau, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pemindahan Ibu Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Kota Sarilamak.

VISI

Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, mempunyai Visi:

“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap”Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

MISI

Berdasarkan Visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 6 Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;
- 2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
- 5) Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan;
- 6) Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan dan daerah basis perjuangan.

LETAK DAN LUAS WILAYAH

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pintu gerbang utama dijalar darat dengan Provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada posisi 0°25'28,71'' Lintang Utara – 0°22'14,52'' Lintang Selatan serta antara 100°15'44,10''– 100°50'47,80'' Bujur Timur,

Luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sekitar 3.354,30 Km² atau 7,94 persen dari luas daratan Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi kedalam Tiga Belas Kecamatan dengan luas masing-masing sebagai berikut:

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Payakumbuh	99,47
2.	Akabiluru	94,26
3.	Luak	61,68
4.	Lareh Sago Halaban	394,85
5.	Situjuah Limo Nagari	74,18
6.	Harau	416,80
7.	Guguak	106,20
8.	Mungka	83,76
9.	Suliki	136,94
10.	Bukik Barisan	294,20
11.	Gunuang Omeh	156,54
12.	Kapur IX	723,36
13.	Pangkalan Koto Baru	712,06
	Jumlah	3354,30

Selain terbagi atas Tiga Belas Kecamatan, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota juga terbagi ke dalam 79 Nagari dan 414 Jorong.

TOPOGRAFI

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang, berbukit-bukit, dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dpl dan 2.261 meter dpl. Di daerah ini terdapat tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 meter), Gunung Bungsu (1.253 meter) dan Gunung Sanggul (1.495 meter) serta tujuh belas buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan/irigasi.

PEMERINTAHAN

Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh Kepala Daerah hasil pemilihan langsung (Pilkada) Tahun 2020, yakni:

- Bupati : Safaruddin Dt Bandaro Rajo
- Wakil Bupati : Rizki Kurniawan N

Jabatan Kepala Daerah tersebut merupakan hasil pemilihan langsung (Pilkada) Tahun 2020, dimana Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dilantik oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Februari 2021 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 tanggal 24 Februari Tahun 2021.

Struktur organisasi pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

6.1 Penerapan IPSAP Nomor 02

Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh RKBUD. Pada Tahun 2019 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh OPD. Pendapatan tersebut terjadi pada:

a. BLUD Puskesmas

Sisa dana BLUD Puskesmas per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.033.046.604,63 dicatat pada akun Kas di BLUD Puskesmas.

b. BLUD RSUD dr.Achmad Darwis

Sisa dana BLUD RSUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.065.373.463,50 dicatat pada akun Kas di BLUD RSUD.

c. Bantuan Operasional Sekolah

Saldo Dana BOS per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.522.566.649,00 dicatat pada akun Kas di Kas Dana BOS

6.2 Pengungkapan Lainnya

Seiring terjadinya Pandemi COVID 19 di Indonesia maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19 dan Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan tersebut juga dapat dalam bentuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Insentif yang dimaksud, paling sedikit meliputi:

- a. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- b. Keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi daerah dan/atau sanksinya;
- c. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau
- d. Perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan penyesuaian alokasi anggaran diprioritaskan untuk:

- a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan
- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.

Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan, meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah melalui rasionalisasi dan/atau perubahan alokasi belanja daerah, dan juga meliputi penggunaan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dana transfer umum untuk penanganan pandemi COVID-19, yang bersumber dari transfer dan penggunaannya mempedoman ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.

Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, dicantumkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau penyesuaian alokasi anggaran yang dilaksanakan setelah perubahan APBD, ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran berkenaan.

Penjelasan Kebijakan Pengelolaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanggulangan dan Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan COVID-19, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengambil tindakan antara lain:

6. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Dalam Keadaan darurat Penanganan Virus Corona di Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 18 Maret 2020.
7. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Virus Corona di Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 26 Maret 2020.
8. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase-19 (COVID-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020.
9. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 177 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disesase-19 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 3 Juni 2020
10. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 211 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Masa Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 30 Juni 2020.

d. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan, Perekonomian, Dan Kebijakan Keuangan

Mewabahnya Covid-19 sangat mempengaruhi tatanan hidup di kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada mereka yang terinfeksi saja, tetapi pada semua masyarakat di sekitarnya. Baik dari sisi ekonomi, kehidupan sosial, kesehatan raga, dan interaksi dengan masyarakat luas. Tidak terkecuali di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat secara fisik saja, namun juga secara mental. Kesehatan mental menjadi salah satu dampak yang mengancam masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Gangguan kesehatan mental yang terjadi selama pandemi disebabkan karena masyarakat dikelilingi oleh kematian, kemiskinan, kecemasan, isolasi, dan kegelisahan akibat pandemi Covid-19. Begitu banyak berita buruk yang diterima, membuat masyarakat cemas akan hidup diri mereka sendiri, keluarga, teman terdekat, dan bahkan lingkungan sekitarnya

Dampak positifnya telah menjadikan kedisiplinan masyarakat terhadap gerakan hidup sehat seperti rajin cuci tangan. Dampak negatifnya, rasa takut dan kegelisahan yang terjadi ditengah masyarakat mengakibatkan turunnya imun tubuh yang menyebabkan masyarakat semakin gampang diserang oleh virus covid-19 dan penyakit lainnya.

Langkah antisipasi pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 mengakibatkan mobilisasi masyarakat dibatasi sehingga pergerakan perekonomian jadi terganggu, pasar-pasar jadi sepi, dunia usaha banyak yang mengalami kerugian. Perekonomian jadi lesu, perputaran uang melambat sehingga dapat menimbulkan permasalahan baru.

- e. Langkah yang dilakukan dan realokasi anggaran yang dilakukan dalam rangka untuk kesehatan, jaringan pengamanan social dan penguatan ekonomi

Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan tindakan-tindakan untuk penanganan covid-19 di kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu:

- Menetapkan status tanggap darurat bencana non alam sebagai langkah awal untuk mengambil tindakan dalam penanganan covid-19
- Membentuk gugus tugas dan satuan tugas penanganan covid-19 yang melibat semua unsur terkait
- Memperkuat fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di RSUD dengan pengadaan peralatan dan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Lima Puluh Kota
- Memberikan Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat terdampak Covid-19 sebagai perwujudan dari program jaringan pengaman social
- Melakukan tracking terhadap masyarakat, khususnya yang melakukan kontak dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan masyarakat yang memiliki gejala terpapar Covid-19, Melakukan sterilisasi terhadap arus keluar masuk masyarakat ke Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mendirikan posko perbatasan
- Membentuk satgas penangan Covid-19 tingkat kecamatan
- Melakukan sosialisasi dan penindakan kebiasaan hidup baru untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota
- Untuk mengatasi Keterbatasan anggaran dalam penanganan Covid-19, telah dilakukan reconfusing anggaran

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2020 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2020 dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan Tahun 2020 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2020, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota yang lebih baik.

Sarilamak, Mei 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN Dt BANDARO RAJO